Laporan Pendahuluan

Jasa Pembuatan

Dokumen

IPRO

(INVESTMENT PROJECT READY TO OFFER KOPI)

Kabupaten Mimika



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya "Jasa Pembuatan Dokumen IPRO Kopi Kabupaten Mimika" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. IPRO (*Investment Project Ready to Offer)* merupakan dokumen penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan promosi penanaman modal untuk mencapai nilai realisasi investasi yang tinggi dan berkualitas di Kabupaten Mimika. IPRO (*Investment Project Ready to Offer)* menjadi salah satu bahan penawaran potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi. Sebagai bahan promosi untuk meyakinkan dan meningkatkan minat calon investor untuk berinventasi, penyusunan dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer)* harus dilakukan secara holistik dan komprehensif meliputi aspek hukum dan kelembagaan, aspek teknis, aspek pasar, aspek keuangan, aspek sosial dan ekonomi, aspek mitigasi risiko, serta kesimpulan dan rekomendasi.

Kabupaten Mimika memiliki berbangi potensi investasi yang dapat dioptimalkan menjadi peluang investasi serta mendorong minat calon investor untuk berinvestasi. Berbagai potensi investasi Kabupaten Mimika terdiri dari sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor pertambangan. Salah satu potensi perkebunan adalah komoditi kopi. Kabupaten Mimika memiliki kondisi geografis dan topografis yang lengkap serta beragam, mulai dari pegunungan sampai pantai serta kepulauan. Hal ini menjadikan Kabupaten Mimika memiliki topografi lahan yang cocok dalam pengembangan komoditi kopi, baik jenis kopi arabika maupun kopi robusta. Selain itu, permintaan komoditi kopi Kabupaten Mimika terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tumbuhnya berbagai rumah produksi kopi serta *coffe shop* di Kabupaten Mimika.

Dalam rangka pengoptimalan potensi dan peluang investasi Komoditi Kopi di Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk memaksimalkan potensi tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan peran penting invesasi sebagai *engine of economic growth,* sehingga pengoptimalan potensi tersbut dapat memberikan peluang pada penciptaan lapangan kerja baru serta pada jangka panjang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan angka kemiskinan. Semoga dokumen ini dapat menjadi bahan untuk melakukan promosi penanaman modal serta meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mimika.

Timika, …. Oktober 2025

Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-2
1.2. Maksud dan Tujuan I-4
1.3. Sasaran I-5
1.4. Ruang Lingkup I-5
1.5. Output I-5
1.6. Kerangka Berpikir I-6
1.7. Metode Penelitian I-6
1.8. Sistematika I-7

BAB II ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN
2.1. Latar Belakang II-2
2.1.1. Roadmap Kopi 2020-2045 ..... II-2
2.1.2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ..... II-10
2.1.3. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2021-2042 ..... II-13
2.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 II-20
2.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 ..... II-24
2.1.6. Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 ..... II-27
2.2. Tinjauan Peraturan Komoditas Kopi II-30
2.2.1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi II-30
2.2.2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan II-34
2.2.3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor II-35
2.2.4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kopi Instan Secara Wajib II-35
2.3. Tinjauan Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal II-36
2.3.1. Draf Rencana Umum Penanaman Modal Nasional Tahun 2025-2045 ..... II-36
2.3.2. Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 ..... II-39
2.3.3. *Backgroud Study* RUPM Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 ..... II-41
2.3.4. Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika Tahun 2024 ..... II-43
2.4. Tinjauan Peraturan Penanaman Modal II-49
2.4.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal II-49
2.4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah II-51
2.4.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang II-52

2.4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah II-52
2.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu..... II-53
2.4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah II-54
2.4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko II-55
2.4.8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal..... II-56
2.4.9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal..... II-56
2.4.10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal..... II-57
2.5. Pemetaan Stakeholders II-58
2.5.1. Identifikasi Daftar Stakeholder Awal II-58
2.5.2. Penilaian Tingkat Kekuasaan dan Minat II-60
2.5.3. Plot Stakeholder II-62

BAB III ASPEK TEKNIS
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Mimika..... III-2
3.1.1. Kondisi Geografis III-2
3.1.2. Kondisi Iklim III-8
3.1.3. Kondisi Demografi III-15
3.1.4. Kondisi Ketenagakerjaan..... III-20
3.1.5. Kondisi Kemiskinan III-27
3.1.6. Kondisi Pendidikan III-31
3.1.7. Kondisi Kesehatan..... III-40
3.1.8. Kondisi Infrastruktur..... III-42
3.1.9. Akses Sumber Daya Air Bersih dan Listrik..... III-46
3.1.10. Profil Industri dan UMKM III-50
3.2. Analisis PDRB..... III-52
3.2.1. PDRB Kabupaten Mimika III-52
3.2.2. Analisis Neraca Perdagangan..... III-58
3.2.3. Analisis Location Quotient (LQ)..... III-59
3.2.4. Analisis Shift Share (SS)..... III-61
3.2.5. Analisis Tipologi Klaster..... III-64
3.2.6. Analisis Tipologi Klassen III-65
3.2.7. Analisis Penentuan Sektor, Subsektor Unggulan Berdasarkan Analisis Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), Tipologi Sektor, dan Tipologi Klassen..... III-67
3.3. Gambaran Kondisi Komoditas Kopi..... III-69
3.3.1. Kopi Arabika Provinsi Papua Tengah..... III-69
3.3.2. Kopi Robusta Provinsi Papua Tengah..... III-70
3.3.3. Kopi Arabika Kabupaten Mimika III-71
3.3.4. Kopi Robusta Kabupaten Mimika III-71
3.3.5. Sebaran Rumah Pengolahan Kabupaten Mimika..... III-72

3.4. Bencmarking Pabrik Pengolahan Kopi III-72
3.5. Alternatif Lokasi Pengembangan "Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated" III-73
3.6. Rencana Desain Pengembangan "Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated" III-75
3.7. Analisis KBLI III-83

BAB IV ASPEK PASAR
4.1. Analisis Permintaan IV-2
4.2. Analisis Penawaran IV-6
4.3. Identifikasi Investor Potensial IV-7

BAB V ASPEK KEUANGAN
5.1. Profil Proyek Peluang Investasi V-2
5.2. Analisis Kelayakan Finansial V-2

BAB VI SOSIAL DAN EKONOMI
6.1. Aspek Sosial VI-2
6.2. Aspek Ekonomi VI-3
6.3. Aspek Lingkungan VI-6
6.4. Dukungan terhadap SDG's VI-9

BAB VII ANALISIS RISIKO
7.1. Analisis Risiko IPRO Kopi VII-4
7.1.1. Risiko Hulu VII-4
7.1.2. Risiko Operasional Pabrik VII-5
7.1.3. Risiko Pasar dan Logistik VII-5
7.1.4. Risiko Regulasi dan Sosial VII-6
7.1.5. Risiko Lingkungan VII-6
7.1.6. Risiko Keuangan VII-7
7.2. Kesimpulan Umum VII-7

BAB VIII KESIMPULAN & REKOMENDASI
8.1. Kesimpulan VIII-2
8.2. Rekomendasi VIII-3

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Kebutuhan Investasi Tahun 2025-2029	II-22
Tabel 2.2.	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Mimika	II-43
Tabel 2.3.	Hasil Perhitungan Analisis Shift Share Kabupaten Mimika	II-44
Tabel 2.4.	Hasil Perhitungan Tipologi Sektor Kabupaten Mimika	II-44
Tabel 2.5.	Sektor, Sub Sektor, Komoditas, Lokasi, dan Peluang Investasi Kabupaten Mimika	II-46
Tabel 2.6.	Identifikasi Daftar Stakeholder Awal IPRO Kopi Mimika	II-58
Tabel 2.7.	Indikator Penentuan Tingkat Kekuasaan (*Power*)	II-59
Tabel 2.8.	Identifikasi Tingkat Kekuasaan (*Power*) Stakeholder	II-59
Tabel 2.9.	Indikator Penentuan Tingkat Minat (*Interest*)	II-60
Tabel 2.10.	Identifikasi Tingkat Minat (*Interest*) Stakeholder	II-61
Tabel 3.1.	Sebaran Distrik, ibu kota, Luas wilayah, dan persentase	III-2
Tabel 3.2.	Jumlah Kampung Kabupaten Mimika di setiap Distrik	III-4
Tabel 3.3.	Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan	III-4
Tabel 3.4.	Kondisi Geologi Kabupaten mimika	III-6
Tabel 3.5.	Jenis Tanah Kabupaten Mimika	III-7
Tabel 3.6.	Data Jumlah Penduduk pe Kecamatan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	III-15
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk menurut kategori usia Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024	III-17
Tabel 3.8.	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024	III-18
Tabel 3.9.	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024	III-18
Tabel 3.10.	Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pendidikan	III-31
Tabel 3.11.	Kondisi Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	III-44
Tabel 3.12.	Jenis Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	III-44
Tabel 3.13.	Daya Terpasang, Poduki dan Distribusi PT.PLN (Persero) pada Cabang/ranting PLN menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika Tahun 2024	III-49
Tabel 3.14.	Realisasi Investasi per Kabupaten Provinsi Papua Tengah tahun 2023	III-51
Tabel 3.15.	Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024	III-52
Tabel 3.16.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%), Tahun 2024	III-52
Tabel 3.17.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 (juta)	III-54
Tabel 3.18.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 (Juta)	III-55
Tabel 3.19.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mimika Tahun 2020 -2024	III-57
Tabel 3.20.	Neraca Perdagangan Provinsi Papua Tengah (Juta US$)	III-58
Tabel 3.21.	Location Quotients (LQ) Kabupaten Mimika	III-60
Tabel 3.22.	Analisis Shift Share Kabupaten Mimika 2020-2023	III-62
Tabel 3.23.	Analisis Shift Share Kabupaten Mimika Tahun 2023-2024	III-63
Tabel 3.24.	Matriks Tipologi Klaster	III-64
Tabel 3.25.	Tipologi Sektor Kabupaten Mimika	III-65
Tabel 3.26.	Klasifikasi Sektor Menurut Tipologi Klassen	III-66

Tabel 3.27. Tipologi Klassen Kabupaten Mimika III-66
Tabel 3.28. Location Quotient, Shift Share, Tipologi Sektor dan Tipologi Klassen Kabupaten Mimika III-68
Tabel 3.29. Produksi Kopi Arabika Kabupaten Mimika 2020-2025 ..... III-71
Tabel 3.30. Produksi Kopi Robusta Kabupaten Mimika 2020-2025 ..... III-72
Tabel 3.31. *Bencmarking* Industri Pengolahan Kopi III-73
Tabel 3.32. Rencana Pola Ruang Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated III-77
Tabel 3.33. Analisis KBLI Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated III-83
Tabel 4.1. Negara Tujuan Ekspor Kopi Indonesia IV-4
Tabel 4.2. Produksi Kopi Kabupaten Mimika Per Distrik IV-8
Tabel 4.3. Identifikasi Calon Investor Potensial IV-9
Tabel 5.1. Asumsi Dasar Perhitungan V-2
Tabel 5.2. Estimasi Investasi Awal (CAPEX) V-2
Tabel 5.3. Estimasi Biaya Operasional (OPEX) V-3
Tabel 5.4. Estimasi Pendapatan V-3
Tabel 5.5. Laporan Laba Rugi V-4
Tabel 5.6. Laporan Arus Kas Bersih (*Cashflow)* V-4
Tabel 5.7. NPV, IRR, dan *Payback Period* V-4
Tabel 6.1. Identifikasi Aspek Sosial VI-3
Tabel 7.1. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko (*Likelihood Scale*) VII-3
Tabel 7.2. Skala Dampak Risiko terhadap Proyek (*Impact Severity Scale*) VII-3
Tabel 7.3. Matriks Penilaian Risiko (*Risk Assessment Matrix*) VII-4
Tabel 7.4. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Hulu VII-5
Tabel 7.5. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Operasional Pabrik VII-5
Tabel 7.6. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Pasar dan Logistik VII-6
Tabel 7.7. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Regulasi dan Sosial VII-6
Tabel 7.8. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Lingkungan VII-7
Tabel 7.9. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Keuangan VII-7
Tabel 7.10. Ringkasan Risiko Kritis (Level Risiko Sangat Tinggi) VII-8

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tujuan Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika I-4
Gambar 1.2. Sasaran Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika I-5
Gambar 1.3. Kerangka Berpikir Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika I-6
Gambar 1.4. Metode Penelitian Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika I-7
Gambar 2.1. Tahapan Pembangunan Industri Nasional..... II-11
Gambar 2.2. Tahapan Pembangunan Industri Nasional..... II-12
Gambar 2.3. Perwilayahan Industri pada WPI Papua II-13
Gambar 2.4. Gambaran Umum Wilayah Adat Papua II-15
Gambar 2.5. Isu dan Tantangan Wilayah Adat Mee Pago II-16
Gambar 2.6. Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua II-18
Gambar 2.7. Peta Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago..... II-19
Gambar 2.8. Visi Misi Presiden 2025-2029 ..... II-20
Gambar 2.9. 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat 2025-2029..... II-21
Gambar 2.10. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025-2029 ..... II-22
Gambar 2.11. Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Papua Tengah 2025-2029..... II-23
Gambar 2.12. Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah 2025-2029 ..... II-24
Gambar 2.13. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029..... II-25
Gambar 2.14. Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029 ..... II-27
Gambar 2.15. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2011-2031 ..... II-29
Gambar 2.16. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2011-2031 ..... II-30
Gambar 2.17. Proses Kopi Secara Kering II-32
Gambar 2.18. Proses Kopi Secara Basah..... II-33
Gambar 2.19. Proses Kopi Secara Semi Basah..... II-34
Gambar 2.20. *Grand Design* RUPM 2025-2045..... II-37
Gambar 2.21. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Unit Kinerja Pengampu..... II-40
Gambar 2.22. Arah Kebijkan dalam Mencapai Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029..... II-41
Gambar 2.23. Arah Kebijakan Draf RUPM Kabuapaten Mimika 2025-2045..... II-41
Gambar 2.24. Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika 2029..... II-46
Gambar 2.25. Plot Stakeholder II-63
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Mimika III-2
Gambar 3.2. Peta Sebaran Distrik Kabupaten Mimika III-3
Gambar 3.3. Peta Topografi Kabupaten Mimika III-5
Gambar 3.4. Kategori Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika..... III-6
Gambar 3.5. Peta Jenis Geologi Kabupaten Mimika III-7
Gambar 3.6. Tanah Kabupaten Mimika..... III-8
Gambar 3.7. Grafik Suhu (°C) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024..... III-9
Gambar 3.8. Grafik Kelembapan Udara (%) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024..... III-10
Gambar 3.9. Grafik Kecepatan Angin (Knot) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024..... III-11
Gambar 3.10. Grafik Tekanan Udara (mb) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024..... III-12

Gambar 3.11. Grafik Curah Hujan (mm/thn) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024 ... III-13
Gambar 3.12. Jumlah Hari Hujan (hari) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024 ..... III-14
Gambar 3.13. Grafik Penyinaran Matahari (Jam) Kabupaten Mimika Tahun 2024 ..... III-15
Gambar 3.14. Grafik Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-16
Gambar 3.15. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2024 ..... III-19
Gambar 3.16. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan dan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-20
Gambar 3.17. Grafik Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-21
Gambar 3.18. Grafik Jumlah Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-22
Gambar 3.19. Grafik Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-23
Gambar 3.20. Grafik Jumlah Pengangguran Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-24
Gambar 3.21. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-24
Gambar 3.22. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-25
Gambar 3.23. Indeks Pembangun Manusia per Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 ..... III-26
Gambar 3.24. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... III-27
Gambar 3.25. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024 ..... III-28
Gambar 3.26. Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024 ..... III-29
Gambar 3.27. Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten Mimika 2020-2024 ..... III-30
Gambar 3.28. Grafik Indeks Keparahan dan Kedalaman Kabupaten Mimika 2020-2024 .. III-31
Gambar 3.29. Grafik Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kabupaten Mimika 2020-2024 ..... III-34
Gambar 3.30. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kabupaten Mimika 2020-2024 ..... III-35
Gambar 3.31. Grafik Jumlah Sekolah Dasar Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-36
Gambar 3.32. Grafik Jumlah Murid Sekolah Dasar Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-36
Gambar 3.33. Grafik Jumlah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-37
Gambar 3.34. Grafik Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-38
Gambar 3.35. Grafik Jumlah Sekolah Menengah Atas Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-39
Gambar 3.36. Grafik Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-39
Gambar 3.37. Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-40
Gambar 3.38. Grafik Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-41
Gambar 3.39. Grafik Jumlah Dokter dan Perawat Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 ..... III-42
Gambar 3.40. Panjang Jalan Kabupaten Mimika III-43
Gambar 3.41. Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika III-45
Gambar 3.42. Pelabuhan di Kabupaten Mimika III-46
Gambar 3.43. Grafik total penggunaan bahan baku air bersih Provinsi Papua Tahun 2023 ..... III-48

Gambar 3.44. Grafik Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN Persero di Kabupaten Mimika, 2024 ..... III-49
Gambar 3.45. Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier, 2020-2024 (%) III-53
Gambar 3.46. Pertumbuhan Ekonomi Kabpaten Mimika 2020-2024 ..... III-57
Gambar 3.47. Neraca Perdagangan Papua Tengah Nov 2023- Nov 2024 ..... III-59
Gambar 3.48. Kopi Arabika Provinsi Papua Tengah III-70
Gambar 3.49. Kopi Robusta Provinsi Papua Tengah III-71
Gambar 3.50. Rumah Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika III-72
Gambar 3.51. Lokasi Alternatif Pertama Pengembangan Pabrik Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika III-74
Gambar 3.52. Lokasi Alternatif Kedua Pengembangan Pabrik Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika III-74
Gambar 3.53. Konektivitas Lokasi Alternatif Peratama dan Kedua Pengembangan Pabrik Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika III-75
Gambar 3.54. Desain Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated III-76
Gambar 3.55. Desain Coffe dan Retail III-78
Gambar 3.56. Desain Area Penerimaan dan Penyimpanan Biji III-79
Gambar 3.57. Desain Area Pengolahan Biji Basah III-80
Gambar 3.58. Desain Area Pengolahan Biji Kering III-81
Gambar 3.59. Desain Area Penggilingan dan Pengemasan Kopi III-82
Gambar 3.60. Desain Area Penjemuran Kopi III-83
Gambar 4.1. Permintaan Kopi Dunia (Juta Ton) IV-2
Gambar 4.2. Persentase Komsumsi Kopi Dunia IV-3
Gambar 4.3. Ekspor Kopi Indonesia IV-3
Gambar 4.4. Permintaan Kopi Indonesia IV-5
Gambar 4.5. Proyeksi Permintaan Kopi Indonesia IV-5
Gambar 4.6. Produksi Kopi Indonesia IV-6
Gambar 4.7. Produksi Kopi Per Provinsi IV-7
Gambar 4.8. Produksi Kopi Kabupaten Mimika IV-7



BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Investasi memiliki peran penting dalam medorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Investasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi, perluasan lapangan kerja, dan penguatan sdaya saing daerah. Hal ini terjadi karena masuknya arus modal ke berbagai sektor ekonomi berdampak pada peningkatan kegiatan produksi serta distribusi yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, investasi juga mendorong pembangunan, pemerataan, dan perbaikan infrastruktur dasar. Hal ini karena infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air adalah pondasi utama dalam menarik minat calon investor untuk berinvestasi. Investasi juga berfungsi sebagai upaya transfer dan alih teknologi teknologi serta pengetahuan. Hal tersebut diharapkan dapat produktivitas ekonomi daerah dan daya saing di pasar global. Dalam rangka peningkatan minat calon investor, salah satu proses bisnis pengelolaan penanaman modal yang penting adalah strategi promosi investasi yang promotif, inovatif, dan komprehensif. Untuk melaksanakan strategi promosi tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dokumen promosi investasi yang memberikan informasi secara holistik dan komprehensif melalui penyusunan dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO).

Dalam rangka mendorong peningkatan nilai realisasi penanaman modal yang tinggi dan berkualitas diperlukan strategi promosi yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Kegiatan promosi penanaman modal harus berfokus pada penawaran potensi dan peluang investasi yang spesifik serta beroreintasi pada kebutuhan calon investor. Hal ini menjadi upaya untuk melakukan promosi penanaman modal secara *targeted* dan *segmented.* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di daerah memiliki kewenangan dalam melakukan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Merujuk Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, bahwa promosi penanaman modal diarahkan untuk meningkatan jangkauan promosi penanaman modal. Upaya peningkatan jangkauan promosi tersebut perlu dilakukan dengan penyelanggaraan penanaman modal yang tidak sekadar *business as usual (BAU).* Namun, kegiatan promosi penanaman modal perlu dilakukan secara strategis dan inovatif.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan promosi penanaman modal yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Promosi penanaman modal diarahkan dalam mendukung capaian arah kebijakan **"Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata"**. Arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam strategi **"Meningkatnya Promosi Penanaman Modal"**. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui: 1) Penguatan branding citra positif penanaman modal di Indonesia. b.Pendeteksian investor dan negara potensial di sektor prioritas; 2) Penanaman modal (*market intelligence*) yang dilakukan di antaranya untuk merumuskan strategi promosi; 3) Diseminasi serta penyebaran informasi peluang dan proyek investasi prioritas di kegiatan/forum investasi tingkat nasional dan internasional; 4) Pemasaran investasi yang sesuai dengan sektor prioritas, termasuk peningkatan promosi investasi untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi di kawasan pusat pertumbuhan; 5) Perluasan promosi penanaman modal dengan mengoptimalkan peran aktif Kedubes/Atase/Pusat Promosi Investasi di negara potensial, jaringan diaspora Indonesia, instansi/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk melakukan promosi penanaman modal; serta 6) Pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah. Strategi promosi penanaman modal tersebut dapat menjadi rujukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelanggarakan kegiatan promosi penanaman modal.

Merujuk dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041, bahwa visi percepatan pembangunan Papua adalah **"Terwujudan Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera".** Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tiga misi yaitu**.** ***Pertama,*** Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat. ***Kedua,*** Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan ma.mpu bekerja sama, menuju Papua Cerdas. ***Ketiga,*** Meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif. Sasaran RIPPP terdiri dari: 1) Papua Sehat: tercapainya kehidupan yErng sehat bagi seluruh penduduk; 2) Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk; serta 3) Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Dokumen RIPPP tahun 2022-2041 menggunakan pendekatan pembangunan Papua berdasarkan pembagian wilayah adat, Kabupaten Mimika termasuk ke dalam wilayah adat Mee Pago. Wilayah adat ini diarahkan pada pembangunan kawasan ekonomi berfokus pada **sektor perkebunan**, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, serta frimisasi hasil pertambangan.

Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika tahun 2024 telah memberikan gambaran terkait potensi dan peluang investasi. Potensi investasi Kabupaten Mimika terdiri dari lima sektor yaitu: 1) Sektor perikanan terdiri dari sub sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Sektor pertanian terdiri dari sub sektor perkebunan dan peternakan; 3) Sektor pertambangan terdiri dari sub sektor batu bara dan mineral serta migas; 4) Sektor pariwisata pada sub sektor pariwisata alam; serta 5) Sektor kontruksi pada sub sektor pendukung kontruksi. Sub sektor perkebunan terdiri dari komoditi **kopi**, kelapa sawit, kakao, serta sagu. Komoditas kopi Kabupaten Mimika terdapat di **Distrik Tembagapura, Distrik Hoya, Distrik Jila, Distrik Alama, Distrik Agimuga, Distrik Jita, Distrik Iwaka, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama, Distrik Wania, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Baru, dan Distrik Mimika Barat.** Komoditi kopi Kabupaten Mimika terdiri dari jenis kopi arabika dan robusta. Kopi arabika sebagian besar terdapat di wilayah topografi dengan ketinggian > 2.000 Mdpl atau di wilayah Pegunungan Kabupaten Mimika. Kopi robusta terdapat di wilayah dataran rendah dan < 2.000 Mdpl. Potensi komoditas kopi Kabupaten Mimika ini memiliki peluang investasi untuk produk olahan biji kopi robusta dan arabika serta pengembangan produk turunan kulit dan daging buah kopi.

Kopi dari Kabupaten Mimika, memiliki beberapa keunggulan distingsi yang membuatnya unik di antara kopi-kopi Indonesia. Kopi yang ditanam di wilayah ini tumbuh di ketinggian ideal pegunungan Mimika dengan kondisi iklim yang khas, menghasilkan biji kopi dengan karakteristik rasa yang spesial. Para petani kopi di Kabupaten Mimika menerapkan metode budidaya organik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, menghasilkan kopi dengan kualitas premium dan bebas dari penggunaan bahan kimia sintetis. Metode pengolahan yang masih tradisional, mulai dari pemetikan hingga penjemuran, turut berkontribusi pada terjaganya kualitas dan keunikan cita rasa kopi Mimika. Nilai tambah yang menjadi pembeda signifikan dari kopi Mimika adalah aspek sosial-ekonominya yang unik. Kopi ini dikelola langsung oleh masyarakat adat setempat melalui koperasi-koperasi yang terorganisir dengan baik, menciptakan rantai nilai yang lebih pendek dan memastikan kesejahteraan petani lokal. Model pengelolaan berbasis kearifan lokal ini menjadi contoh bagaimana produk pertanian dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat asli. Selain itu, kopi Mimika juga memiliki sertifikasi organik dan fair trade yang meningkatkan nilai jualnya di pasar internasional. Keunikan rasa yang dihasilkan dari tanah Papua, dikombinasikan dengan cerita budaya di balik setiap biji kopinya, memberikan nilai tambah yang sulit ditandingi daerah lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa komsumsi kopi rumah tangga selalu berada di atas 1.000 kg per tahun. Pada tahun 2022, komsumsi kopi bubuk di Indonesia mencapai 1.081 kg/kapita/tahun. Jumlah ini menurun menjadi 1.071 kg/kapita/tahun pada

tahun 2023 dan 1.062 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Hal ini menjadi potensi pasar dalam pengembangan komoditi kopi Kabupaten Mimika untuk memenuhi kebutuhan kopi domestik dan nasional. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2025-2029 memiliki visi "***Mimika Sejahtera, Cerdas, Sehat, Aman, dan Damai menuju Mimika Gerbang Emas".*** Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi sebagai berikut: 1) Membangun regulasi dan sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi; 2) Menciptakan Mimika yang aman, tertib dan damai; 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar, ekonomi dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir; 4) Mewujudkan pemerintahan yang dinamis, bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif; serta 5) Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Mimika. Untuk mewujudkan sentra pertumbuhan ekonomi baru Kabupaten Mimika, investasi memiliki peran penting karena berperan sebagai *engine of economic growth* atau mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investasi di Kabupaten Mimika, DPMPTSP Kabupaten Mimika melalui Bidang Promosi Penanaman Modal menginisiasi penyusunan dokumen IPRO Kopi Kabupaten Mimika. Dokumen ini diharapkan menjadi bahan promosi yang strategis dalam rangka pengoptimalan potensi dan peluang investasi komoditas kopi di Kabupaten Mimika. Dokumen IPRO ini akan memberikan ulasan secara holistik dan integratif dari berbagai aspek mulai dari aspek hukum dan kelembagaan, aspek teknis, aspek pasar, aspek keuangan, aspek sosial dan ekonomi, serta aspek mitigasi risiko. Ulasan dan uraian berbagai aspek tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan data calon investor agar memiliki minat dan ketertarikan untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika. Penyusunan dokumen IPRO Kopi ini juga menjadi inisiatif serta inovasi DPMPTSP dalam mencapai visi Kabupaten Mimika untuk menuju gerbang emas pada tahun 2029.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah Penyusunan Dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) Kopi di Kabupaten Mimika. Tujuan penyusunan IPRO adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tujuan Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika

1.3. Sasaran

Sasaran dari Penyusunan Dokumen IPRO Kabupaten Mimika yaitu adalah sebagai berikut:

IDENTIFIKASI POTENSI

Teridentifikasinya potensi Komoditi Kopi di Kabupaten Mimika

IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL

Teridentifikasinya lahan potensial untuk pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika



DESAIN PABRIK PENGOLAHAN KOPI

Tersedianya desain pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika

Gambar 1.2
Sasaran Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Penyusunan Dokumen IPRO Kabupaten Mimika yaitu :

1) Menyediakan data dan informasi terkait berbagai alternatif lokasi proyek kopi di Kabupaten Mimika;
2) Menguraikan gambaran umum terdiri dari profil wilayah Kabupaten Mimika:
3) Menguraikan strategi investasi terdiri dari gambaran umum kondisi investasi, perkiraan biaya investasi, kebijakan atau dukungan pemerintah, dan rekomendasi langkah strategis;
4) Menguraikan kebijakan-kebijakan terkait sektor kopi dan investasi sektor kopi di tingkat pusat maupun daerah;
5) Mengidentifikasi investor potensial;
6) Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan dalam pengembangan investasi sektor kopi di Kabupaten Mimika;
7) Menyusun analisis proyek kopi yang siap ditawarkan melalui beberapa tahapan analisis.
8) Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan proyek yang bersifat strategis untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko;
9) Mengidentifikasi potensi atau manfaat kopi terhadap pengembangan potensi daerah;
10) Merumuskan usulan tindak lanjut, rekomendasi program dan kebijakan serta implikasinya bagi rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan iklim investasi di Kabupaten Mimika.

1.5. Output

Keluaran yang harus dipenuhi dalam Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika, meliputi:

1) Dokumen laporan akhir “IPRO Kopi Kabupaten Mimika”;
2) Dokumen ringkasan eksekutif “IPRO Kopi Kabupaten Mimika” dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

3) Dokumen infografis "IPRO Kopi Kabupaten Mimika" dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
4) Video promosi investasi "IPRO Kopi Kabupaten Mimika".

1.6. Kerangka Berpikir

Kajian penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika memiliki kerangka berpikir sebagai berikut:



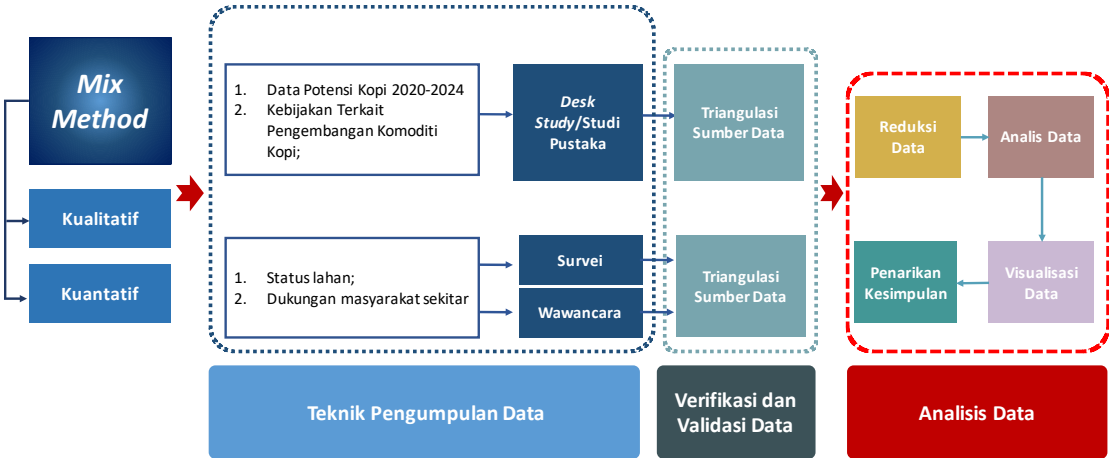
Gambar 1.3
Kerangka Berpikir Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika

Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika memiliki kerangka berpikir berdasarkan arah berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencaan tersebut meliputi Rencana Umum Penanaman Modal Nasional 2022-2045; RPJMN tahun 2025-2029; dan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Di tingkat daerah, dokumen dasar yang menjadi rujukan adalah RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Mimika. Selain itu, penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika ini juga memerhatikan dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika tahun 2024 dan Kajian *Background Study* RUPMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029. Berbagai dokumen tersebut menjadi dasar untuk menentukan potensi dan peluang investasi komoditi kopi di Kabupaten Mimika. Potensi dan peluang tersebut kemudian menjadi bahan untuk dilakukan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendorong promosi penanaman modal yang *targeted* dan *segmented* diperlukan bahan promosi secara komprehensif untuk menarik minat calon investor. Dokumen tersebut dipenuhi melalui penyusunan *Invesmnet Project Ready to Offer* (IPRO) Kopi Kabupaten Mimika. Penyusunan dokumen IPRO Kopi akan memuat bahasan secara holistik dan terintegratif meliputi aspek hukum dan kelembagaan, aspek teknis, aspek pasar, aspek keuangan, aspek sosial dan ekonomi, serta aspek mitigasi risiko.

1.7. Metode Penelitian

Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika menggunakan metode penelitian *mix method.* Metode penelitian *mixed methods* merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini digunakan ketika data kuantitatif saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam, dan data kualitatif diperlukan untuk memberikan konteks, penjelasan, atau pemaknaan terhadap hasil yang diperoleh. Secara epistemologis, *mixed methods* berakar pada paradigma pragmatis yang menekankan pada

pemilihan metode penelitian berdasarkan kesesuaiannya untuk menjawab masalah penelitian. Integrasi antara data kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tahap interpretasi, saat hasil dari kedua pendekatan dibandingkan, dikontraskan, dan dikombinasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih utuh dan valid.



Gambar 1.4
Metode Penelitian Penyusunan IPRO Kopi Kabupaten Mimika

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi ke dalam pengumpulan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan *desk study* atau studi pustaka. Teknik pengumpulan data primer menggunakan survei dan wawancara. Data sekunder terdiri dari dokumen peraturan terkait, dokumen kebijakan terkait, data potensi komoditi kopi di Kabupaten Mimika. Data primer terdiri dari status lahan, dukungan masyarakat sekitar, dan data riil pengolahan kopi di Kabupaten Mimika.

2) Verifikasi dan Validasi Data

Verifikasi dan validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik dalam *mixed methods* yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan cara memanfaatkan berbagai sumber, metode, teori, atau peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data.. Dalam penelitian, prinsip yang sama diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Triangulasi sumber merupakan upaya membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi metode merupakan upaya untuk memverifikasi penggunaan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk saling melengkapi dan mengonfirmasi temuan.

3) Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini terdiri dari empat tahap. Pertama, reduksi data yaitu langkah untuk memfilter data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Kedua, analisis data yaitu upaya untuk melakukan analisis dan penafasiran data hasil reduksi. Ketiga, visualisasi data yaitu upaya untuk menampilkan analisis data menjadi lebih mudah dipahami baik dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Keempat, penarikan kesimpulan yaitu untuk memberikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian.



1.8. Sistematika

Laporan IPRO Kopi Kabupaten Mimika terdiri dari delapan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I	Pedahuluhan
Bab II	Aspek Hukum dan Kelembagaan
Bab III	Aspek Teknis
Bab IV	Aspek Pasar
Bab V	Aspek Keuangan
Bab VI	Aspek Sosial dan Ekonomi
Bab VII	Aspek Mitigasi Risiko
Bab VIII	Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB



Aspek Hukum & Kelembagaan

2.1. Tinjauan Kebijakan Komoditas Kopi

2.1.1. Roadmap Kopi 2020-2045

Roadmap Kopi Nasional tahun 2020-2045 merupakan dokumen yang memberikan pemahaman dan acuan serta menyajikan kepada perencana, penentu kebijakan, pemerhati, dan penguasa kopi terkait kebijakan, strategi, program, serta sasaran yang ingin dicapai pada periode 2020-2045. Roadmap ini membagi sasaran pengembangan kopi nasional menjadi tiga tahap yaitu sasaran jangka panjang, sasaran jangka menengah, dan sasaran jangka pendek. Berdasarkan dokumen roadmap kopi bahwa terdapat beberapa permasalahan pengembangan kopi di Indonesia, bahwa kapasitas produksi kopi Indonesia berada di bawah kapasitas produksi dari negara Vietnam. Rendahnya produksi kopi nasional ini disebabkan oleh beberapa aspek terkait dengan keadaan pertanaman kopi, penerapan teknologi budidaya dan penanganan pascapanen. Selain itu, mutu hasil kopi Indonesia masih tergolong dalam kelas rendah, karena pengusahaan kopi secara nasional didominasi oleh perkebunan rakyat. Permasalahan rendahnya mutu kopi diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pengetahuan tentang pengolahan hasil, desakan kebutuhan ekonomi, terbatasnya akses pasar dan sebagainya.

2.1.1.1. Sasaran

A. Sasaran Jangka Panjang Sampai Tahun 2045

Dalam jangka panjang, sasaran pengembangan kopi secara nasional diterjemahkan secara spesifik, yaitu sebagai berikut:

1) Indonesia dapat menjadi negara produsen utama kopi di dunia, setelah Brazil. Capaian produksi kopi saat ini telah mencapai 0,77 juta ton per tahun dan produksi kopi tahun 2045 diproyeksikan menjadi 1,44 juta ton per tahun dengan luas areal minimal sebesar 1,43 juta hektar;
2) Produktivitas tanaman dapat ditingkatkan menjadi 1,42 ton per ha;
3) Meningkatnya kuantitas ekspor (dari 368.029 ton menjadi 682.306 ton). Ekspor kopi arabika dan fine robusta berdasarkan Indikasi Geografis dapat meningkat menjadi 20%;
4) Memperluas pangsa pasar kopi Indonesia di Uni Eropa dari 5,11% menjadi 5,31%, dengan terbentuknya *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) EU-Indonesia;
5) Meningkatnya kualitas kopi berdasarkan mutu fisik sesuai standar nasional Indonesia dari 60% produk kopi dengan kelas mutu 4, 5, 6 menjadi lebih dari 70% produk kopi dengan kelas mutu 1, 2, 3, 4;
6) Meningkatnya SNI wajib terkait kopi yang sebelumnya SNI wajib hanya kopi instan, bertambah dengan SNI wajib kopi 3 in 1;
7) Bertambahnya kuantitas ekspor untuk produk kopi olahan dengan persentase sekitar 15%;
8) Meningkatnya konsumsi kopi dan produk olahan hasil industri skala UMKM sekitar 5%;
9) Meningkatnya volume kopi bersertifikasi dari 35% menjadi 40%;
10) Bertambahnya jumlah kopi bersertifikat Indikasi Geografis (IG) dari 40 menjadi 45;
11) Penggunaan bahan tanam unggul pada areal pertanaman kopi dapat tercapai sekitar 80% dari total areal tanaman;
12) Pendapatan petani dari usaha tani kopi beserta diversifikasi usaha lainnya (tumpangsari dan integrase kopi-ternak) dapat ditingkatkan dari US$ 2,600/tahun menjadi US$ 5.000-6.000 per hektar per tahun;
13) Harga kopi di tingkat petani dapat meningkat dari 80% menjadi 90% dari harga FOB dan loko pabrik dalam negeri;
14) Meningkatnya jumlah kelompok tani mandiri dari 325 menjadi 625 kelompok tani;
15) Pemberian fasilitasi kredit kepada petani untuk mendukung pengembangan kopi;

16) Membangun citra negara atau *country image* Indonesia sebagai surga pecinta kopi.

B. Sasaran Khusus Jangka Panjang Sampai Tahun 2025-2034

Sasaran pengembangan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2034, adalah sebagai berikut:

1) Tercapainya produksi kopi nasional yang diproyeksikan sebesar 1,04 juta ton per tahun dengan luas areal minimal 1,42 juta hektar;
2) Tercapainya produktivitas kopi nasional sekitar 1.035 kg per ha per tahun;
3) Proporsi produksi kopi nasional yang semula sekitar 31% kopi arabika dan 69% kopi robusta, dapat ditingkatkan menjadi 33% kopi arabika dan 67% kopi robusta.
4) Meningkatnya kuantitas ekspor (dari 416.391 ton menjadi 494.959 ton). Ekspor kopi *spesialty* berdasarkan Indikasi Geografis dapat meningkat sekitar 10%;
5) Memperluas pangsa pasar kopi Indonesia di Uni Eropa dari 4,91% menjadi 5,11%, dengan terbentuknya *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) EU-Indonesia;
6) Meningkatnya kualitas kopi berdasarkan mutu fisik sesuai standar SNI dari 60% produk kopi dengan kelas mutu 4, 5, 6 menjadi 55% produk kopi dengan kelas mutu 1,2,3,4;
7) Bertambahnya kuantitas ekspor untuk produk kopi olahan dengan persentase sekitar 10%;
8) Meningkatnya volume kopi bersertifikasi dari 30% menjadi 35%;
9) Bertambahnya jumlah kopi bersertifikat Indikasi Geografis (IG) dari 30 menjadi 40;
10) Tersusunnya peta potensi kopi Indonesia untuk pengembangan kopi spesialti dengan tujuan meningkatkan keberagaman kopi spesialti Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah berdasarkan Indikasi Geografisnya;
11) Bertambahnya penggunaan bahan tanam unggul pada areal perkebunan kopi dalam skala nasional sebesar 50%;
12) Meningkatnya pendapatan petani dari usaha tani kopi dari US$ 2,100 /KK/ha/tahun (asumsi rata-rata harga kopi sebesar US$ 3 per kg dan biaya produksi sebesar 30% dari pendapatan kotor) menjadi US$ 2.600/tahun;
13) Harga kopi di tingkat petani dapat mencapai 80% dari harga FOB dan loko pabrik dalam negeri;
14) Terwujudnya implementasi *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan sistem sertifikasi mutu di tingkat petani dengan capaian sebesar 50%;
15) Meningkatnya kemampuan petani untuk berorientasi bisnis dalam menjalankan kegiatan usahataninya, sehingga mampu menyikapi terjadinya perubahan permintaan pasar yang sifatnya dinamis;
16) Terbangunnya kelembagaan pemasaran dan koperasi di tingkat petani sekitar 50% dalam rangka peningkatan posisi tawar petani terkait penetapan harga dan akses terhadap permodalan.

C. Sasaran Khusus Jangka Pendek Tahun 2020-2024

Sasaran khusus yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024), adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya luas areal pertanaman kopi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,37% per tahun;
2) Tercapainya produksi kopi nasional sebesar 836.569 ton/tahun dengan rata-rata produktivitas sebesar 868 kg/ha/tahun;
3) Proporsi produksi kopi nasional yang semula sekitar 29% kopi arabika dan 71% kopi robusta, dapat ditingkatkan menjadi 31% kopi arabika dan 69% kopi robusta;

4) Meningkatnya kuantitas ekspor (dari 368.029 ton menjadi 406.236 ton). Ekspor kopi spesialti berdasarkan Indikasi Geografis dapat meningkat sekitar 5%;
5) Memperluas pangsa pasar kopi Indonesia di Uni Eropa dari 4,71% menjadi 4,91%;
6) Meningkatnya kualitas kopi berdasarkan mutu fisik sesuai standar SNI dari 70% produk kopi dengan kelas mutu 4, 5, 6 menjadi 45% produk kopi dengan kelas mutu 1,2,3,4;
7) Meningkatnya penggunaan bahan tanam unggul di areal perkebunan kopi dalam skala nasional menjadi 20%;
8) Harga kopi di tingkat petani dapat mencapai 75% dari harga FOB dan loko pabrik dalam negeri;
9) Terwujudnya implementasi *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan sistem sertifikasi mutu di tingkat petani dengan capaian sebesar 10%;
10) Terbangunnya kelembagaan pemasaran dan koperasi di tingkat petani menjadi 10%.

2.1.1.2. Strategi

A. Jangka Menengah dan Panjang

Sasaran jangka menengah dan jangka panjang pengembangan komoditas kopi diarahkan sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas kopi melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, pengembangan IPTEK dan pengelolaan pertanaman kopi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
   Pengembangan kopi dilaksanakan melalui: (1) peremajaan, rehabilitasi, ekstensifikasi dan perluasan khususnya perluasan terhadap kopi arabika; (2) menerapkan Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP) serta sarana prasarana penunjang ; (3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); 4) pengembangan kelembagaan petani dan kemitraan; dan (5) peningkatan investasi.
2) Penumbuhan dan pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri baik di bidang pangan maupun non pangan.
   Target produksi kopi dalam negeri pada tahun 2045 sebesar 1,74 juta ton, yang ditujukan terutama untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan dalam negeri, serta memenuhi kouta ekspor biji kopi ke luar negeri. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah: (1) pengembangan jumlah industri pengolahaan kopi dalam negeri; (2) menjalin kemitraan dengan perusahaan pengolah kopi dalam negeri; (3) menjalin kerjasama dengan eksportir kopi dan pabrik pengolah kopi di negara tujuan ekspor; (4) pengembangan kopi arabika specialty, fine robusta dan kopi bersertifikat indikasi geografis; (5) diversifikasi produk kopi nasional baik robusta maupun arabika; dan (6) meningkatkan konsumsi kopi dalam negeri.
3) Penguatan kelembagaan petani.
   Hal ini sangat penting terutama untuk mendorong petani dalam menjalin kemitraan dengan eksportir maupun pabrik pengolah kopi. Kelembagaan petani yang kuat merupakan embrio terbentuknya koperasi petani yang berbadan hukum, sehingga akan mempermudah dalam mendapatkan fasilitas pemerintah, serta akses permodalan. Langkah strategis untuk menguatkan kelembagaan petani dapat ditempuh melalui pelatihan, pendampingan, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani, serta penguatan kemitraan usaha.
4) Dukungan terhadap pelestarian lingkungan.
   Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas perkebunan kopi (sekitar 96%) dikelola oleh rakyat, sehingga isu-isu lingkungan menjadi sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, kaitannya dengan tindakan pengolahan dan

perluasan lahan yang *zero burning*. Pengembangan kopi harus memperhatikan kelestarian lingkungan karena akan dikaitkan dengan sertifikat kopi berkelanjutan. Penerapan GAP harus menjadi konsensus nasional, sehingga produk kopi nasional diterima industri pengolahan kopi dalam negeri maupun luar negeri.

5) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana untuk keberlanjutan pengelolaan agribisnis kopi.
   Penyediaan sarana dan prasana untuk seluruh sistem agribisnis kopi dalam mendukung pengembangan kopi baik pada kegiatan on-farm maupun kegiatan off-farm, yang berupa jalan, jembatan, pelabuhan, sarana komunikasi dan sebagainya.
6) Dukungan pembiayaan guna meningkatkan investasi usaha dalam rangka menjaga keberlanjutan pengembangan komoditas kopi.
   Tersedianya lembaga perbankan maupun sumber pembiayaan lainnyaguna mendukung pengembangan kopi, termasuk APBN, APBD dan permodalan dari lembaga nonbank, serta swasta. Tersedianya penyertaan dana masyarakat untuk pengembangan kopi dan resi gudang, serta akses terhadap sumber permodalan lainnya.

B. Jangka Pendek

Sasaran jangka pendek pengembangan komoditas kopi diarahkan sebagai berikut:

1) Pengembangan tanaman kopi dilaksanakan melalui perbaikan mutu tanaman dengan melakukan: (1) kegiatan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi (robusta dan arabika) dan perluasan tanaman kopi arabika; (2) penerapan GAP; (3) pengendalian OPT; (4) penyediaan benih unggul yang sesuai dengan lokasi pengembangan, (5) pengembangan kopi arabika specialty dan fine robusta; (6) implementasi hasil penelitian; dan (7) kopi bersertifikasi indikasi geografis.
2) Operasionalisasi kebijakan peningkatan mutu hasil dalam bentuk: (1) penerapan persyaratan mutu biji kopi untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor; (2) produk kopi wajib SNI (untuk kopi instan); (3) sertifikasi kopi berkelanjutan atau sertifikasi manajemen mutu (ISO) ; dan (4) kopi specialty untuk arabika dan fine robusta bersertifikat.
3) Peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia.
   Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM ditempuh melalui: (1) peningkatan kemampuan dan pengembangan kualitas petugas; (2) peningkatan kemampuan dan kemandirian petani kopi; (3) optimalisasi tenaga pendamping/ penyuluh; dan (4) optimalisasi lembaga pengembangan SDM.
4) Strategi pengembangan kelembagaan dan kemitraan di tingkat petani dapat dilakukan melalui (1) fasilitasi penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani; (2) menumbuhkan kemitraan usaha dengan indutsri pengolah kopi, eksportir kopi dan pedagang kopi; (3) pendampingan pada petani/kelompok tani untuk menghasilkan mutu kopi yang memenuhi persyaratan industri dan mutu ekspor; dan (4) memantapkan kelompok tani menjadi Gapoktan kopi yang kuat dan mandiri.
5) Strategi peningkatan ketersediaan investasi usaha yang dapat dilakukan meliputi : (1) fasilitasi dan bimbingan untuk memperoleh kemudahaan akses investasi di wilayah sentra penghasil kopi; (2) bimbingan pengelolaan dana yang diperoleh dari perbankan; (3) fasilitasi sumber dana di daerah termasuk dana yang berasal dari Pemerintah Daerah; (4) mendorong Pemerintah Daerah sebagai fasilitator untuk memperoleh investor baru dibidang kopi; (5) menggali sumber dana lainnya; dan (6) membangun jalinan kerjasama dan pendanaan dengan swasta yang mempunyai animo untuk pengembangan kopi.
6) Dalam meningkatkan produktivitas tanaman, serangkaian kegiatan yang akan ditempuh antara lain: (1) kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan

tanaman kopi robusta, arabika dan perluasan khusus untuk kopi arabika; (2) penggunaan benih unggul untuk peremajaan dan perluasan yang telah direkomendasikan Pemerintah; (3) pengendalian hama/ penyakit; (4) penerapan metode SL-PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), (5) optimalisasi irigasi dan pupuk organik in situ yang diproduksi oleh petani secara mandiri melalui fasilitasi pemerintah.

7) Salah satu upaya dalam mendukung peningkatan produksi kopi nasional khususnya kopi arabika, strategi pengembangan yang dapat dilakukan adalah kegiatan perluasan tanaman kopi. Perluasan areal untuk pengembangan kopi arabika, difokuskan pada wilayah potensial sentra kopi arabika yang secara teknis layak untuk dikembangkan terutama pada ketinggian 1.000 meter atau lebih. Pengembangan kopi arabika ini disesuaikan dengan keunggulan wilayah masing-masing yang telah mempunyai brand di dunia internasional.
8) Peningkatan produksi kopi nasional juga diupayakan melalui langkah strategis, yaitu kegiatan rehabilitasi dan peremajaan. Rehabilitasi tanaman dilakukan pada tanaman yang kurang produktif atau rusak dengan menggunakan klon unggul yang disertai pemeliharaan secara intensif dan efisien. Lokasi rehabilitasi ini dilaksanakan pada sentra penghasil kopi robusta maupun arabika. Peremajaan tanaman diutamakan pada tanaman tua yang tidak produktif dan tanaman yang sudah tidak dapat direhabilitasi, sehingga tanaman tersebut harus dibongkar dan ditanam kembali dengan tanaman kopi yang baru.
9) Dalam mendorong peningkatan pendapatan petani dan pengembangan kopi secara berkelanjutan, maka strategi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan diversifikasi usaha. Kegiatan diversifikasi usaha dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antara usaha pengembangan kopi dengan pemeliharaan ternak. Beberapa sentra produksi kopi seperti Kintamani Bali, telah melakukan pengembangan kopi yang disinergikan dengan pemeliharaan ternak kambing. Di samping itu, pengembangan kopi juga dapat diintegrasikan dengan pemeliharaan ternak luwak. Pengembangan kopi bersama dengan pemeliharaan ternak luwak tersebut, akan menghasilkan produk kopi luwak yang sudah dikenal luas di manca negara. Di lain pihak, pengembangan kopi bersertifikat Indikasi Geografis (IG) dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan mutu kopi terutama dalam menembus pangsa pasar tertentu.
10) Mengingat bahwa pengusahaan kopi didominasi oleh Perkebunan Rakyat (PR), maka pengelolaan usahatani kopi dapat dikatakan tidak seragam dan kurang memperhatikan praktek budidaya yang baik. Strategi untuk meningkatkan kapasitas petani dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam rangka pengembangan kopi sesuai dengan GAP, serta pemanfaatan peluang bisnis berbasis kopi; peningkatan keterampilan petani dalam pengendalian OPT melalui SL-PHT; pendampingan sertifikasi mutu kopi yang ramah lingkungan; serta pendampingan ke sumber teknologi untuk pengembangan on-farm dan off-farm.
11) Kelembagaan terkait perkopian nasional perlu dilakukan restrukturisasi dalam rangka mempererat jalinan kerjasama di antara pelaku usaha kopi. Penataan kelembagaan di tingkat petani dapat dilakukan dengan memberikan fasilitasi dalam mengakses ke lembaga perbankan dan keuangan untuk mendorong penerapan usahatani yang berorientasi bisnis. Dalam skala lebih luas, penataan kelembagaan dapat diperluas dengan mengembangkan *networking* dan sharing dengan lembaga internasional termasuk ke ICO. Di samping itu, pemerintah perlu mendorong pembentukan Dewan Kopi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pengembangan kopi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang kopi.

12) Dalam rangka perbaikan mutu hasil dan aspek pemasaran, strategi yang dapat ditempuh melalui serangkaian kegiatan antara lain: (1) pengembangan dan diseminasi teknologi pengolahan kopi; (2) fasilitasi penyediaan sarana pengolahan kopi; (3) peningkatan mutu hasil;(4) penerapan SNI wajib untuk melakukan penetrasi pasar dalam negeri dan luar negeri; (5) pemanfaatan limbah untuk pakan ternak; (6) peningkatan pemasaran mulai dari petani sampai pasar ekspor; (7) pengembangan pemasaran melalui sistem informasi teknologi/media elektronik, pengembangan pemasaran melalui sistem informasi pasar; (8) melakukan promosi sehingga terjalin hubungan bisnis dan teknologi dengan instansi dan industri kopi luar negeri; (9) pengembangansistem jaminan mutu melalui kerjasama dan harmonisasi untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan ekspor, penerapan SNI; (10) penerapan jaminan mutu; (11) pelayanan sertifikasi pembinaan dan pengawasan mutu, serta mendorong sertifikasi jaminan mutu pada pelaku usaha kopi.
13) Upaya mendukung perbaikan pada aspek pemasaran, strategi yang dapat dilakukan adalah pemantapan infrastruktur melalui kegiatan- kegiatan yang meliputi (1) peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan khususnya untuk ekspor kopi dari sentra produksi kopi ke luar negeri; (2) peningkatan sarana listrik dan komunikasi yang dapat diakses petani; dan (3) pengembangan sentra agrbisnis berbasis kopi.
14) Kebijakan ini dimaksudkan agar ekspor kopi Indonesia tidak lagi berupa bahan mentah (produk primer), tetapi dalam bentuk hasil olahan dengan mutu yang sesuai dengan permintaan konsumen. Strategi peningkatan nilai tambah kopi dapat ditempuh antara lain melalui: (1) pengembangan produk hilir, (2) peningkatan konsumsi kopi domestik, dan (3) mendukung terwujudnya kerjasama dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi.
15) Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyediakan berbagai kemungkinan sumber pembiayaan yang sesuai untuk pengembangan kopi, baik yang berasal dari lembaga perbankan maupun non perbankan (antara lain memanfaatkan penyertaan dana masyarakat melalui Kontrak Investasi Kolektif, resi gudang dan lain-lain).

2.1.1.3. Arah Kebijakan Pendekatan Kawasan

A. Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Arah kebijakan pengembangan kopi dalam jangka panjang hingga tahun 2045, meliputi:

1) Pengembangan pemanfaatan pengembangan pertanaman kelestarian lingkungan. komoditas potensi sumber IPTEK dan pengelolaan pertamanan kopi dengan memerhatikan kelestarian lingkungan;
2) Penumbuhan dan pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri, baik di bidang pangan maupun non pangan;
3) Penguatan kelembagaan petani;
4) Dukungan terhadap pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
5) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana untuk keberlanjutan pengelolaan agribisnis kopi;
6) Dukungan pembiayaan guna meningkatkan investasi usaha dalam rangka menjaga keberlanjutan pengembangan komoditas kopi.

B. Jangka Pendek

Arah kebijakan pengembangan kopi dalam jangka pendek (2020-2024) diprioritaskan untuk melakukan perbaikan tanaman dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman kopi. Kebijakan pengembangan kopi dalam jangka pendek, meliputi:

1) Pengembangan tanaman kopi.

2) Peningkatan mutu hasil.
3) Peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
4) Pengembangan kelembagaan petani dan kemitraan usaha.
5) Peningkatan ketersediaan investasi usaha.
6) Peningkatan produktivitas tanaman.
7) Perluasan tanaman kopi terutama kopi arabika.
8) Peremajaan dan rehabilitasi kopi robusta dan arabika.
9) Diversifikasi usaha.
10) Pendampingan petani.
11) Penataan kelembagaan.
12) Pengolahan dan pemasaran.
13) Pemantapan infrastruktur.
14) Peningkatan ekspordan nilai tambah kopi.
15) Dukungan penyediaan pembiayaan

2.1.1.4. Arah Kebijakan Proteksi

Kebijakan proteksi dimaksud sebagai benteng pelindung bagi para pengusaha lokal, pengusaha kecil dan menengah (UKM) bahkan untuk melindungi kepentingan negara dalam hal perdagangan internasional (WTO). Beberapa bentuk proteksi perdagangan antara lain :

1) Tarif atau bea masuk;
2) Pelarangan impor;
3) Sistem kuota dan;
4) Subsidi.

2.1.1.5. Arah Kebijakan Promosi

Ekspor kopi meningkat d isaat ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 14 persen. Namun memang harus lebih diorganisir dengan baik, meliputi marketing, branding, dan promosi. Pada tahun 2020 nilai ekspor kopi Indonesia mencapai 1,19 milyar dolar. Dari nilai itu, Amerika adalah negara pertama tujuan ekspor kopi Indonesia dengan total ekspor mencapai 181,15 juta dolar, disusul Jepang dengan 104,96 juta dolar, Jerman dengan 88,4 juta dolar, Italia dengan 84 juta dolar dan Malaysia dengan 70,8 juta dolar. Ekspor kopi Indonesia ke Amerika didominasi oleh kopi tidak digongseng dan tidak dihilangkan kafeinnya sebesar 99,97%. Perlunya pembenahan promosi kopi asal dalam negeri dengan lebih mengedepankan dan memperkenalkan Indonesia sebagai salah penghasil kopi kualitas tinggi di dunia serta penting memperbaiki branding kita di pasar internasional. Upaya untuk memperkenalkan keunggulan kopi Indonesia yang berasal dari berbagai sentra produksi dapat dilakukan dengan:

1) Penyelenggaraan kontes kopi spesialti Indonesia di tingkat nasional;
2) Ikut serta festival kopi di tingkat nasional maupun internasional;
3) Penyelenggaraan festival kopi di sentra-sentra kopi;
4) Pengembangan kawasan agrowisata berbasis komoditas kopi;
5) Pembuatan *merchandise* produk kopi sebagai sarana promosi;
6) Penciptaan branding kopi spesifik lokasi (*single origin product*) melalui skema Indikasi Geografis (IG).

2.1.1.6. Arah Kebijakan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Nilai Tambah

A. Penggunaan Bahan Tanam Unggul Anjuran
   1) Bahan tanam unggul anjuran berdasarkan SK Menteri Pertanian.
   2) Pengembangan bahan tanam unggul anjuran tersebut harus berasal dari kebun benih maupun kebun entres yang bersertifikat.

B. Pengelolaan Nutrisi Tanaman Terpadu
   1) Penggunaan pupuk organik dan an-organik dalam pengelolaan nutrisi tanaman kopi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lingkungan tempat tumbuh tanaman. Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan

prinsip tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara pemberian dan tepat sasaran. Penggunaan pupuk organik ditingkatkan untuk mendukung produksi tanaman dan keberlanjutan lingkungan.

2) Pemberian edukasi serta transfer teknologi dan pengetahuan kepada petani/kelompok tani untuk memanfaatkan dan mengolah limbah perkebunan menjadi pupuk organik. Selanjutnya, pupuk organik tersebut diaplikasikan ke pertanaman kopi secara berkelanjutan.
3) Peningkatan pengetahuan petani bahwa perolehan produksi kopi yang tinggi diperlukan input produksi yang optimal dan efektif.
4) Pengelolaan nutrisi tanaman di tingkat petani sebaiknya didukung dengan kemudahan akses dalam memperoleh pupuk bersubsidi dan ketersediaan akses finansial untuk mendapatkan pupuk non-subsidi.

C. Pengendalian OPT Secara Terpadu

1) Hama PBKo (*Hypothenemus hampei*)
   - Petik buah, lelesan dan rampasan disertai dengan konservasi musuh alami;
   - Pemanfaatan musuh alami dan APH;
   - Pemasangan perangkap.
2) Kutu-kutuan (*Pianococcus citri* dan *Coccus viridis*)
   - Monitoring secara intensif untuk mengetahui ambang kendali;
   - Pengaturan naungan, serta memangkas cabang tanaman kopi yang menyentuh tanah untuk mencegah keberadaan semut;
   - Konservasi musuh alami didukung oleh pengelolaan gulma;
   - Memanfaatkan tanaman sekitar sebagai pestisida nabati;
3) Penggerek batang (*Zeuzera coffeae*)
   - Pengamatan/monitoring yang intensif;
   - Konservasi musuh alami;
   - Aplikasi jamur entomopatogen;
   - Aplikasi pestisida nabati.
4) Penggerek cabang/ranting (*Xylosandrus sp.)*
   - Pengamatan/monitoring yang intensif;
   - Memangkas dan membakar cabang/ranting terserang;
   - Konservasi musuh alami/parasitoid;
   - Aplikasi pestisida nabati;
   - Aplikasi jamur entomopatogen.
5) Penyakit karat daun (*H. vastatrix*)
   - Penanaman kopi arabika pada ketinggian diatas 800 m dpi;
   - Pengaturan naungan dengan pemangkasan;
   - Pemupukan berimbang sesuai anjuran;
   - Aplikasi pestisida nabati;
   - Aplikasi fungisida saat serangan karat daun mencapai ambang ekonomi (> 20 % daun terserang).
6) Nematoda luka akar (*P. coffeae*)
   - Penggunaan benih sehat;
   - Rotasi tanaman;
   - Penanaman tanaman perangkap;
   - Solarisasi tanah;
   - Penggenangan tanah;
   - Penggunaan batang bawah dengan jenis kopi yang tahan nematoda;
   - Penggunaan APH;
   - Aplikasi bahan organik.
   -

2.1.1.7. Arah Kebijakan Peningkatan Mutu dan Perbaikan Sistem Pemasaran

1) Perlu dilakukan perbaikan pada proses pengolahan kopi sesuai Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedure*/SOP);
2) introduksi teknologi pengolahan yang memadai sehingga tercapai perbaikan mutu yang dititikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip praktek pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices*/GMP) di tingkat petani;
3) Pada perbaikan mutu khususnya kopi Arabika dilaksanakan dengan cara mengubah pengolahan buah kopi secara kering (*dry process*) yang biasa dilakukan petani secara individual, menjadi pengolahan buah secara basah (wet process) di tingkat kelompok tani;
4) Program kemitraan juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pengolahan hilir kopi.

2.1.2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

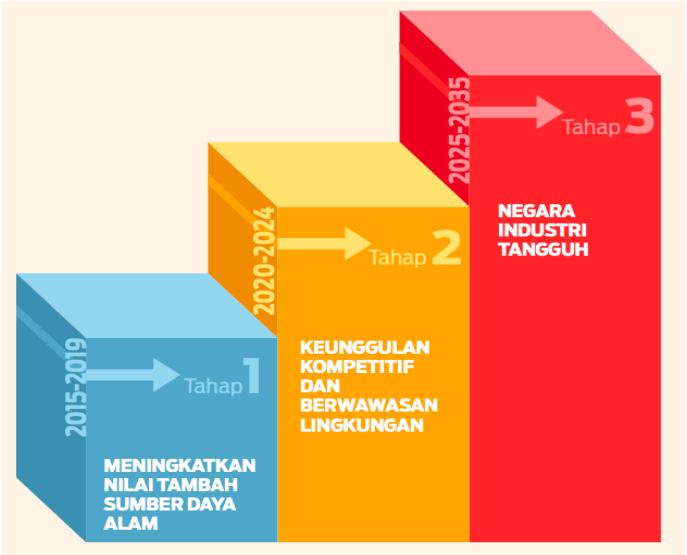
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 memiliki visi pembangunan industri nasional **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**. Industri Tangguh bercirikan: 1) Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; 2) Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 3) Industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; 3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Sasaran pembangunan industri nasional adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan dua digit pada tahun 2035 sehingga kontribusiindustri dalamProduk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30%; 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri; 3) Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia; 4) Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional; 5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan 7) Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

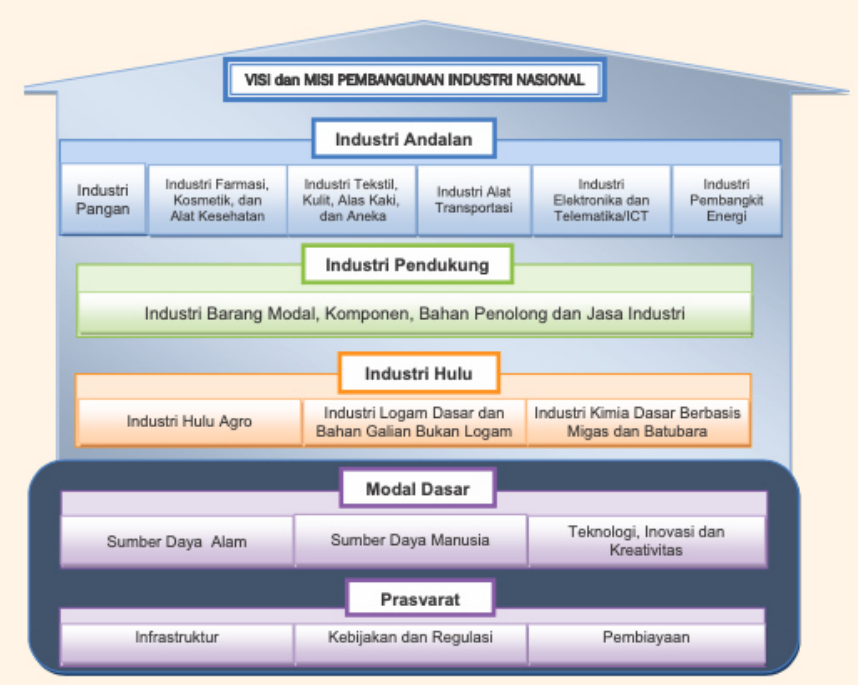
1) Tahap I (2015-2019)
   Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2) Tahap II (2020-2024)
   Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3) Tahap III (2025-2035)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.



Gambar 2.1.
Tahapan Pembangunan Industri Nasional
Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

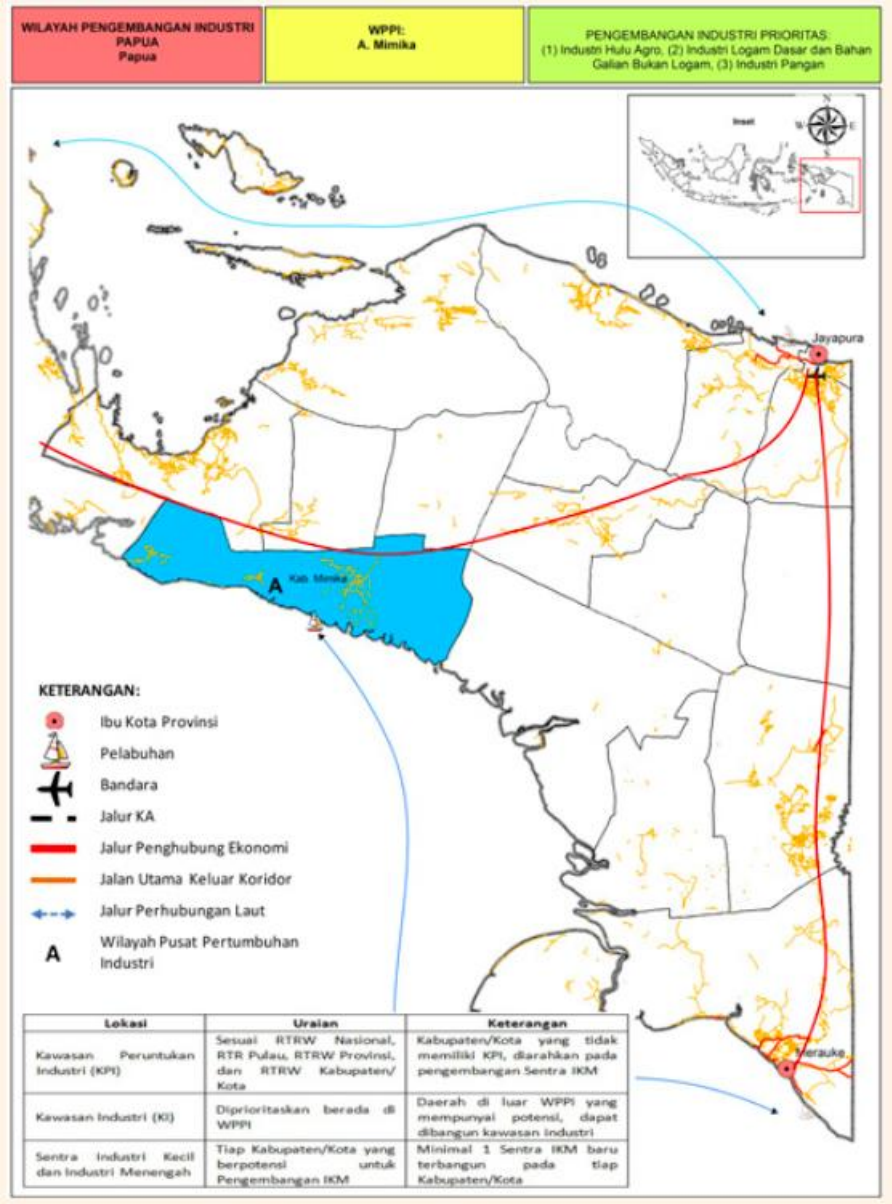
Bangun industri nasional menerjemahkan visi dan misi pembangunan industri ke dalam beberapa industri. Industri andalan terdiri dari industri pangan; industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; industri alat transportasi; industri elektronika dan telematika (ICT); serta industri pembangkit energi. Industri pendukung terdiri dari industri barang modal; komponen; bahan penolong dan jasa industri. Industri hulu terdiri dari industri hulu argo, indukstri bahan logam dasar dan bahan galian bukan logam; serta industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. Modal dasar pembangunan industri nasional terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Berikut ini merupakan bangunan industri nasional.



Gambar 2.2.
Tahapan Pembangunan Industri Nasional
Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

Kabupaten Mimika telah ditetapkan menjadi pengembangan pusat pertumbuhan indsutri (WPPI). WPPI Mimika diarahkan pada pengembangan industri prioritas seperti industri hulu argo, industri logam dasar dan bahan galingan bukan logam serta industri pangan. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
2) Ketersediaan infrastruktur transportasi;
3) Kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
4) Penguatan dan pendalaman rantai nilai;
5) Kualitas dan kuantitas SDM;
6) Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
7) Memiliki potensi sumber daya air industri;
8) Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
9) Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.



Gambar 2.3.
Perwilayahan Industri pada WPI Papua
Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

2.1.3. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2021-2042

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2021-2042 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. RIPPP ditetapkan untuk mengintegrasikan misi besar yang diamanatkan dalam Instrrrksi Presiden tersebut dengan menekankan pada fokus percepatan 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu peningkatan kapasitas dan daya saing Orang Asli Papua (OAP). RIPPP memuat arah besar percepatan pembangunan di Papua yang bersifat terobosan dengan menekankan pentingnya fokus perhatian terhadap upaya pengembangan masyarakat Papua, sehingga OAP dapat berdaya saing dan mampu mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi OAP di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat Papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan tanah adat/ulayat, kebudayaan,

dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan. Selain itu, dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua perlu memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iktim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

RIPPP dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian program dan kegiatan serta sinergi sumber pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Papua, RIPPP disusun dengan tiga pendekatan dasar, yaitu: (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agarna, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya OAP, dengan berpegang teguh pada prinsip- prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; serta (c) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good gouemancel dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan RIPPP adalah: 1) Menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua; 2) Menjadi pedoman bagi menteri/kepala lembaga untuk melaksanakan kebdakan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua; 3) Menjadi pedoman bagi Pemerintah hrsat dalam melakukan asistensi dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; 4) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan Program dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua; dan 5) Menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua oleh kementerian/lembaga.

Kabupaten Mimika termasuk ke dalam Wilayah Adat Mee Pago. Wilayah adat Mee Pago memiliki karakteristik geografis berupa pegunungan tinggi, pesisir, dan rawa. Potensi wilayah adat Mee Pago adalah **kopi**, padi, sagu, ubi jalar, ubi kayu, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata.

Wilayah Adat Saireri

- Karakteristik geografis: pesisir dan pulau
- Potensi wilayah: kelapa, sagu, padi, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, dan pariwisata

Wilayah Adat Tabi

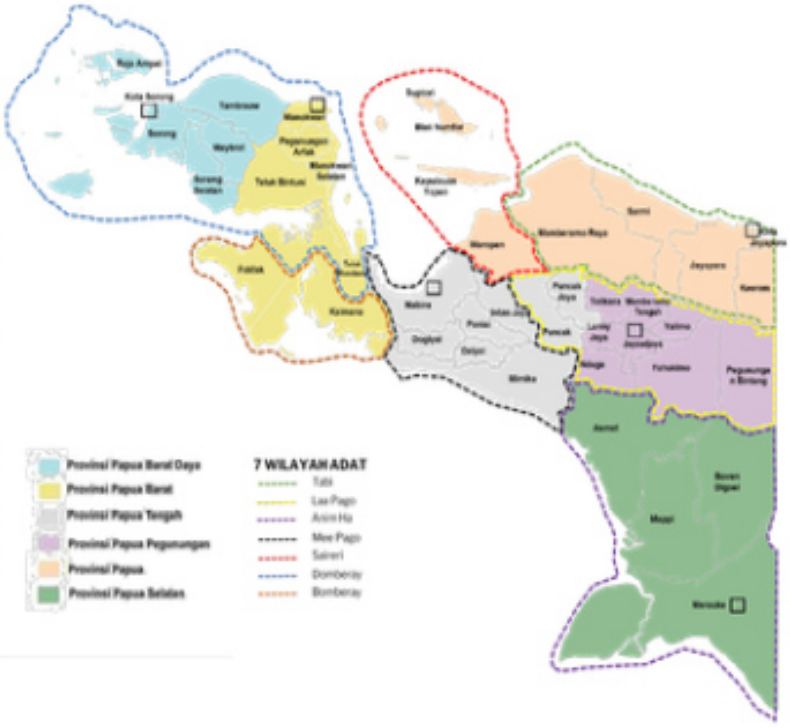
- Karakteristik geografis: pesisir dan dataran rendah
- Potensi wilayah: kakao, kelapa, kelapa sawit, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata

Wilayah Adat Laa Pago

- Karakteristik geografis: pegunungan tinggi
- Potensi wilayah: kopi, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, peternakan, dan pariwisata

Wilayah Adat Domberay

- Karakteristik geografis: dataran rendah, pegunungan, dan pesisir
- Potensi wilayah: kacang hijau, jagung, padi, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sagu, kopi, kelapa, kelapa sawit, kakao, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata



Wilayah Adat Bomberay

- Karakteristik geografis: dataran rendah, pegunungan, dan pesisir
- Potensi wilayah: pala, kenaf, perikanan, peternakan, dan pariwisata

Wilayah Adat Mee Pago

- Karakteristik geografis: pegunungan tinggi, pesisir, dan rawa
- Potensi wilayah: kopi, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata

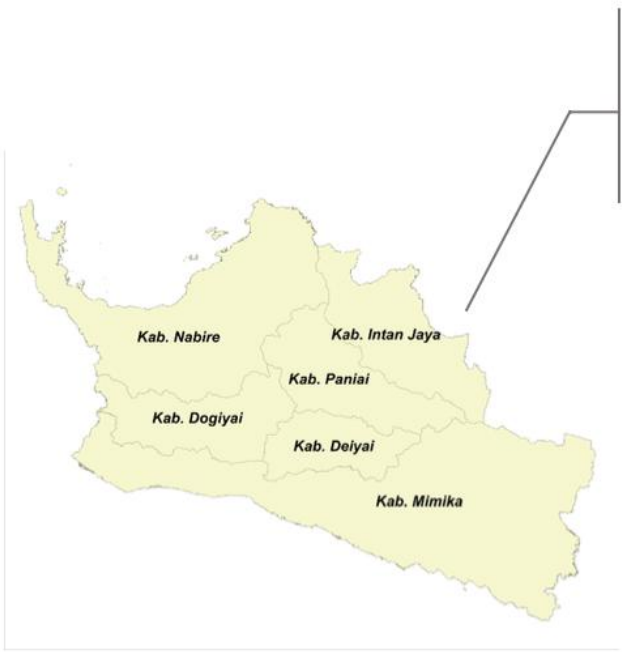
Wilayah Adat Anim Ha

- Karakteristik geografis: pantai, rawa, dan dataran rendah
- Potensi wilayah: kelapa, sagu, ubi kayu, ubi jalar, padi, perikanan, dan pariwisata

Gambar 2.4.
Gambaran Umum Wilayah Adat Papua
Sumber: RIPPP 2021-2042

Setelah pembentukan daerah otonom baru, secara administratif kabupaten-kabupaten di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah, ditambah dengan Kabupaten hrncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Mee Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan

(harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) menunjukkan hal serupa atau lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan pada Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.



Pembangunan Kesehatan

Kabupaten/kota	UHH (tahun)	Tingkat kemudahan akses ke rumah sakit (persen)	Tingkat kemudahan akses ke puskesmas (persen)
	2021	2020	2020
Provinsi Papua Tengah			
Nabire	68,15	37,50	45,58
Dogiyai	65,85	10,39	6,96
Paniai	66,62	17,67	20,57
Deiyai	65,36	65,15	40,63
Intan Jaya	65,69	6,25	7,85
Mimika	72,36	31,29	34,64

Pembangunan Pendidikan

Kabupaten/kota	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Tingkat kemudahan akses ke pendidikan (persen)
	2021	2021	2020
Provinsi Papua Tengah			
Nabire	12,18	10,01	41,99
Dogiyai	10,59	4,94	19,03
Paniai	10,50	4,77	22,86
Deiyai	9,82	3,25	46,18
Intan Jaya	7,66	3,09	13,07
Mimika	12,69	10,18	29,95

Keterangan

- Capaian kab/kota lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota berada diantara capaian provinsi dan nasional
- Capaian kab/kota lebih baik dari capaian provinsi dan nasional

Pembangunan Ekonomi

Kabupaten/kota	Tingkat Kemiskinan (persen)	PDRB per kapita (ribu rupiah)	Pengeluaran per kapita (Rp/Jiwa/th)
	2021	2021	2021
Provinsi Papua Tengah			
Nabire	23,83	70.472	8.856.000
Dogiyai	28,81	11.983	5.415.000
Paniai	36,59	19.899	6.377.000
Deiyai	40,59	14.860	4.673.000
Intan Jaya	41,66	9.521	5.328.000
Mimika	14,17	301.074	11.400.000

Gambar 2.5.
Isu dan Tantangan Wilayah Adat Mee Pago
Sumber: RIPPP 2021-2042

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2021-2042 memiliki visi ***"Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera***". Visi tersebut diterjamahkan ke dalam tiga misi. Pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, **menuju Papua Sehat**. Kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan ma.mpu bekerja sama, menuju **Papua Cerdas**. Ketiga, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju **Papua Produktif.** Sasaran RIPPP tahun 2021-2042 adalah sebagai berikut:

a. Papua Sehat: tercapainya kehidupan yErng sehat bagi seluruh penduduk.
b. Papua Cerdas: tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk.
c. Papua Produktif: tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

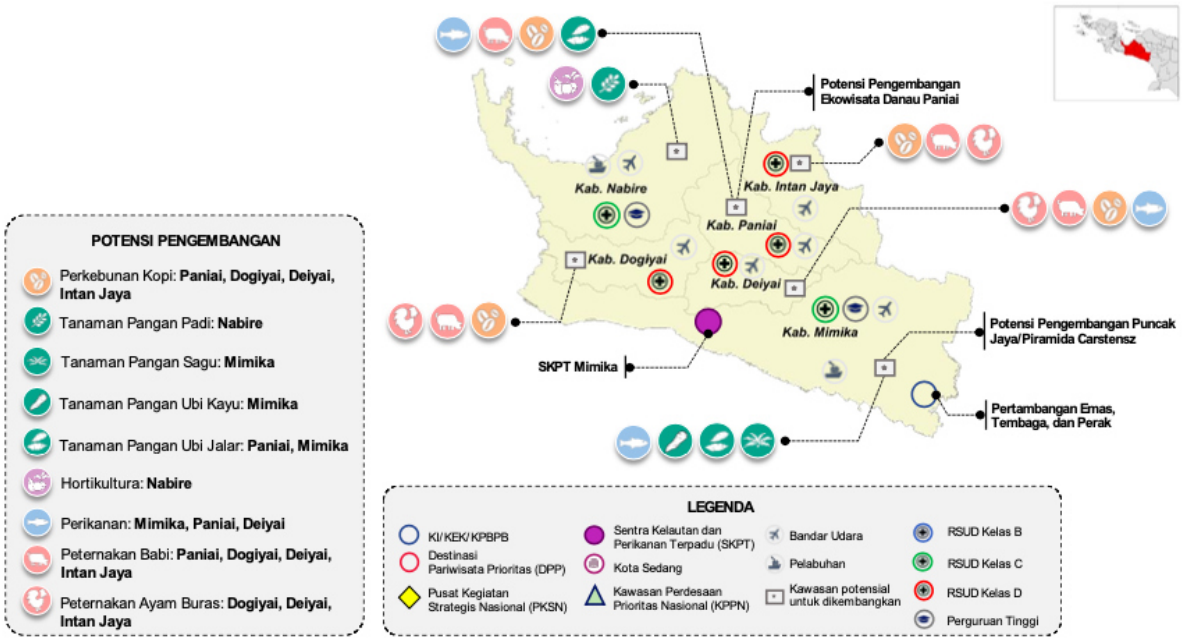
Percepatan pembangunan Papua ke depan akan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangun€rn manusia (IPM). Pada tahun 2O21 (sebelum pembentukan daerah otonom baru), capaian IPM di Papua sebesar 60,62-65,26 atau termasuk ke dalam kategori sedang, sedangkan pada tahun 2O24 ditargetkan mencapai 79,33-80,93 atau termasuk ke dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi ini masing-masing diwakilkan oleh beberapa indikator yang dapat merepresentasikan tingkat pembangunan pada masing-masing dimensi dan dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional. Selanjutnya, dalam rangka terwujudnya visi Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera akan dilakukan melalui misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

1) Misi-I, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH), prevalensi stunting, dan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
2) Misi-II, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3) Misi-III, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan realisasi investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri).

	INDIKATOR	BASELINE ** 2021	TARGET *** 2041
PAPUA SEHAT **sasaran :** Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk	1. Umur harapan hidup (UHH) (tahun)	65,93–66,14	68,66–68,67
	2. Prevalensi *stunting* (%)*	29,50–26,20	<10,00
	3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	0	Seluruh kab/kota
PAPUA CERDAS **sasaran :** Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk	1. Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)	11,11–13,13	14,59–16,61
	2. Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun)	6,76–7,69	9,36–10,37
PAPUA PRODUKTIF **sasaran :** Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk	1. Tingkat kemiskinan (%)	27,38–21,82	5,81–2,82
	2. Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,84–3,33	4,11–1,73
	3. Realisasi investasi (PMA – PMDN) (Rp triliun)	1,1–22,7	92,3–174,5

Gambar 2.6.
Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua
Sumber: RIPPP 2021-2042

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago yaitu: pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Mee Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan.



Gambar 2.7.
Peta Pengembangan Wilayah Adat Mee Pago
Sumber: RIPPP 2021-2042

Strategi pengembangan wilayah adat Mee Pago berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
2) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
3) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skfll deuelopment center);
4) Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
5) Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
6) Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belania kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
7) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
8) Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
9) Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:
    a) Mengembangkan sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
    b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta kelautan dan perikanan;
    c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
    d) Mengembangkan pusat industri hasil pertambangan mineral.

2.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memiliki visi ***"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045***". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra- putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setora negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita sebagai berikut:



Gambar 2.8.
Visi Misi Presiden 2025-2029
Sumber: RPJMN 2025-2029

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

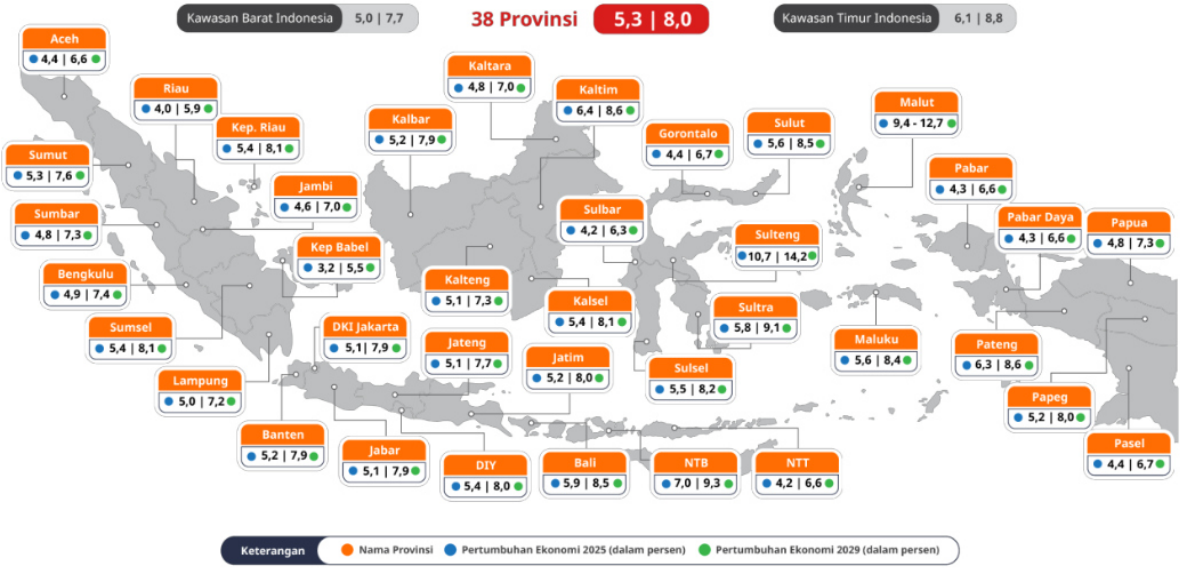


Program Prioritas	
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5	Pemberantasan Kemiskinan
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
17	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Program Hasil Terbaik Cepat	
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Gambar 2.9.
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat 2025-2029
Sumber: RPJMN 2025-2029

Sasaran pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 8,0 persen pada tahun 2029. Kawasan Indonesia Barat ditargetkan sebesar 7,7 persen dan Kawasan Indonesia Timur sebesar 8,8 persen. Wilayah Provinsi Papua Tengah ditargetkan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 8,6 persen pada tahun 2029.



Gambar 2.10.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025-2029
Sumber: RPJMN 2025-2029

Selama tahun 2025-2029, dibutuhkan total investasi sebesar Rp47.573,45 triliun atau rata-rata sebesar Rp9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, investasi Badan Usaha Milik Negara, dan investasi swasta/masyarakat. Investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian tahun 2025-2029.

Tabel 2.1
Kebutuhan Investasi Tahun 2025-2029

No	Uraian	Nilai (Trilliun Rp)	*Share* (Persen)
1	Investasi Pemerintah	3.435,04	7,22
2	Investasi BUMN	2.915,14	6,13
3	Investasi Swasta/Masyarakat	41.223,26	86,65
	Total Kebutuhan Investasi	**47.573,45**	**100**

Sumber: RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Prioritas (Asta Cita) Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju unggul, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Seluruh program prioritas tersebut perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memerhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025-2045 yang menekankan pada tiga transformasi dan dua landasan transformasi. Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan fimur Indonesia. Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.



PAPUA TENGAH

LEGENDA
- Kawasan Pertumbuhan
- Kawasan Komoditas Unggulan
- Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
- Kawasan Afirmasi
- Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana
- Ibu Kota Provinsi
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
- Jalan Nasional
- Rencana Jalan (Tol & Non Tol)
- Batas Administrasi

A. Kawasan Pertumbuhan

Kawasan Pariwisata
1. Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire

Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak
2. Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak - Kab. Mimika

Kawasan Perkotaan
3. Ibu Kota Daerah Otonom Baru – Kab. Nabire

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi
1. Kab. Paniai
2. Kab. Dogiyai
3. Kab. Puncak Jaya

Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT
4. Kab. Nabire
5. Kab. Mimika

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
1. Kab. Nabire: potensial pangan, potensial energi, potensial air
2. Kab. Mimika: potensial pangan, potensial energi, potensial air

D. Kawasan Afirmasi

Daerah Tertinggal*
1. Kab. Paniai
2. Kab. Dogiyai
3. Kab. Deiyai
4. Kab. Puncak
5. Kab. Puncak Jaya
6. Kab. Intan Jaya

**) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal*

Kawasan Perbatasan
Kecamatan Perbatasan Prioritas
7. Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita – Kab. Mimika

E. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Kawasan Konservasi
1. TN Teluk Cenderawasih – Kab. Nabire
2. TN Lorentz – Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya
3. TN Mamberamo Foja – Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
4. Kab. Deiyai

Gambar 2.11.
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Papua Tengah 2025-2029
Sumber: RPJMN 2025-2029

Berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029 bahwa kawasan pertumbuhan Kabupaten Mimika sebagai kawasan pertambangan emas-tembaga-perak. Kawasan komoditas unggulan Kabupaten Mimika diarahkan sebagai sentra produksi berbasis TCT (Tuna, Cakalang, Tongkol). Kawasan swasembada pangan, air, dan energi Kabupaten Mimika diarahkan menjadi potensial pangan, potensial energi, dan potensial air.

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	7,7 (Rata-rata 2025–2029)	119,5	0,7	26,50 – 27,00	0,380 – 0,383	0,42	59,28	82,56	2,65 – 3,12
2029	8,6 (2029)	179,4	0,8	15,50 – 16,50	0,374 – 0,380	0,45	78,99	83,20	2,00 – 2,40

Gambar 2.12.
Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah 2025-2029
Sumber: RPJMN 2025-2029

Dokumen RPJMN 2025-2029 manargetkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Tengah sebesar 8,6 persen pada tahun 2029. PDRB per kapita sebesar 179,4 juta pada tahun 2029. Kontribusi PDRB Provinsi sebesar 0,8 persen pada tahun 2029. Tingkat kemiskinan sebesar 15,50-16,50 persen. Rasio Gini sebesar 0,374-0,380. Indeks modal manusia sebesar 0,45. Penurunan emisi GRK sebesar 78,99 persen, IKLH Daerah sebesar 83,20 dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,00-2,40 persen.

2.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 memiliki visi *"Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju: "GERBANG EMAS" (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)".* Visi tersebut diterjamhkan ke dalam enam misi yaitu: 1) Meningkatkan Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensii yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan tekhnologi dan informasi; 2) Mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahtreraan Masyarakat di Kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar; 3) Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan public dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam Upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan Masyarakat; 4) Mewujukan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatakn angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok; 5) Mewujudkan Mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas Pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia; 6) Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan Pembangunan Mimika.



Gambar 2.13.
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029
Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

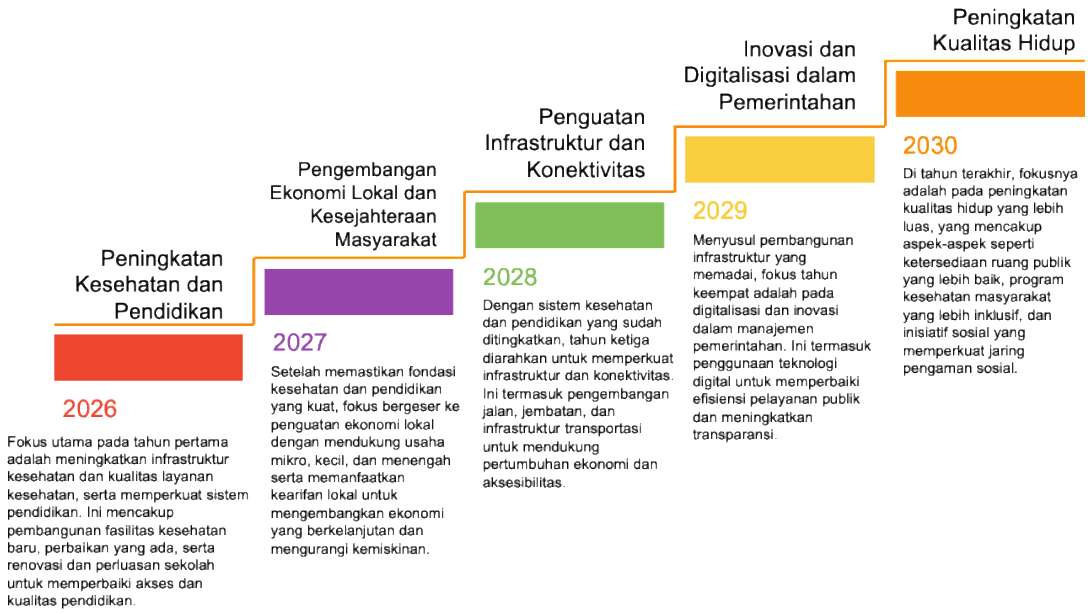
Visi dan misi tersebut diturunkan menjadi sepuluh tujuan yaitu 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; 2) Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional; 3) Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi yang transparan dan akuntabel; 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5) Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas; 6) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima; 7) Meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan angka harapan hidup; 8) Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur; 9) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif, dan berkelanjutan; 10) Mewujudkan pusat ekonomi baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

1) Menyediakan dana subsidi untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor strategis ekonomi lokal.
2) Memperkuat kolaborasi dengan PT Freeport Indonesia dan YPMAK untuk penyediaan beasiswa, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi
3) Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal untuk usaha rintisan dan UMKM yang inovatif, guna mendorong kreativitas dan produktivitas berbasis kreativitas lokal.
4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur, termasuk beasiswa studi lanjutan dan pelatihan spesialisasi.

5) Mengadopsi teknologi pemerintahan elektronik untuk transparansi dan efisiensi dalam layanan dan tata kelola aparatur sipil.
6) Penguatan penerapan SPBE dan integrasi layanan digital sebagai bagian dari Smart City Mimika.
7) Pembentukan badan pengawas independen untuk audit dan laporan kualitas layanan publik, memastikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan akuntabel.
8) Memperkuat lembaga pengawasan dan memberikan akses publik untuk mengawasi kinerja pemerintah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
9) Mengalokasikan dana anggaran daerah untuk proyek-proyek inovasi yang memperbaiki layanan publik dan ekonomi lokal.
10) Pendirian command center Smart City Mimika untuk mengelola data, informasi, dan layanan publik digital
11) Memberikan fasilitasi kredit lunak dan bantuan teknis untuk klaster ekonomi mikro, mendukung pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal.
12) Optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui dukungan pendanaan YPMAK dan CSR PT Freeport Indonesia.
13) Memberikan insentif pajak dan bantuan modal untuk koperasi dan usaha bersama yang menggunakan sumber daya lokal, memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
14) Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan telekomunikasi untuk memperluas cakupan dan menurunkan biaya akses, meningkatkan ketersediaan informasi publik.
15) Pengembangan dashboard data daerah yang dapat diakses publik secara transparan.
16) Pengembangan platform online untuk penerimaan dan pengelolaan keluhan serta saran dari masyarakat, memperbaiki pelayanan publik.
17) Memberikan insentif dan pendanaan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baru dan perbaikan yang ada, meningkatkan akses kesehatan yang inklusif.
18) Menyediakan dana dari anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk proyek infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, dan utilitas.
19) Memfasilitasi kerjasama dengan investor swasta untuk pendanaan dan operasi infrastruktur, mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
20) Meningkatkan anggaran pendidikan dan menyediakan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, memperluas partisipasi dalam pendidikan.
21) Menyediakan dana untuk renovasi dan perluasan sekolah, serta pelatihan guru, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
22) Menerapkan program hibah dan bantuan teknis untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, menurunkan angka kemiskinan melalui peluang usaha baru.
23) Memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk perusahaan yang berinvestasi di zona ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Tema pembangunan setiap tahun Kabupaten Mimika selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.14.
Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029
Sumber: RPJMD Kabupaten Mimika 2025-2029

2.1.6. Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Mimika tahun 2011-2031 memberikan gambaran terkait arah pembangunan dan pedoman pengembangan struktur ruang di Kabupaten Mimika selama 20 tahun ke depan. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Mimika terdiri atas: 1) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perkampungan untuk mendukung pengembangan wilayah, mengurangi kesenjangan intra-wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2) Pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya alam, yaitu: pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan satu sektor pendukung yaitu pariwisata; 3) Pengelolaan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan; 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten sebagai modal utama pembangunan yang berkelanjutan; dan 5) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perkampungan untuk mendukung pengembangan wilayah, mengurangi kesenjangan intra-wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik terdiri dari:

1) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara;
2) Mengembangkan sarana dan prasarana pembangkit energi;
3) Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi;
4) Mengembangkan sarana dan prasarana pos, telekomunikasi dan informasi;
5) Mengembangkan sarana dan prasarana air bersih;
6) Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman;
7) Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
8) Mengembangkan skema kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan dengan kabupaten disekitarnya.

Strategi pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya alam, yaitu: pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan, serta sektor pendukung yaitu pariwisata terdiri dari:

1) Mengembangkan sentra kawasan industri;
2) Mengembangkan sentra kawasan pertanian dan perkebunan;

3) Mengembangkan sentra kawasan perikanan di sepanjang pesisir selatan;
4) Mengelola kawasan hutan produksi;
5) Mengelola sentra kawasan pertambangan dan pengendalian limbah pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah;
6) Mengembangkan pusat-pusat obyek pariwisata daerah; dan
7) Mengembangkan skema kerjasama antar daerah untuk peningkatan kegiatan perekonomian.

Strategi pengelolaan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan terdiri dari:

1) Menjaga dan melindungi kelestarian Taman Nasional Lorentz;
2) mengelola dan menjaga kelestarian suaka margasatwa dan cagar alam;
3) Mengelola dan menjaga kelestarian kawasan lindung seperti hutan lindung, hutan rawa bakau di kawasan pesisir pantai dan kawasan daerah aliran sungai;
4) Mengembangkan pola-pola mitigasi bencana, khususnya bencana banjir, longsor, gempa bumi; dan
5) Menjaga keharmonisan pemanfaatan kawasan budidaya dengan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten sebagai modal utama pembangunan yang berkelanjutan terdiri dari:

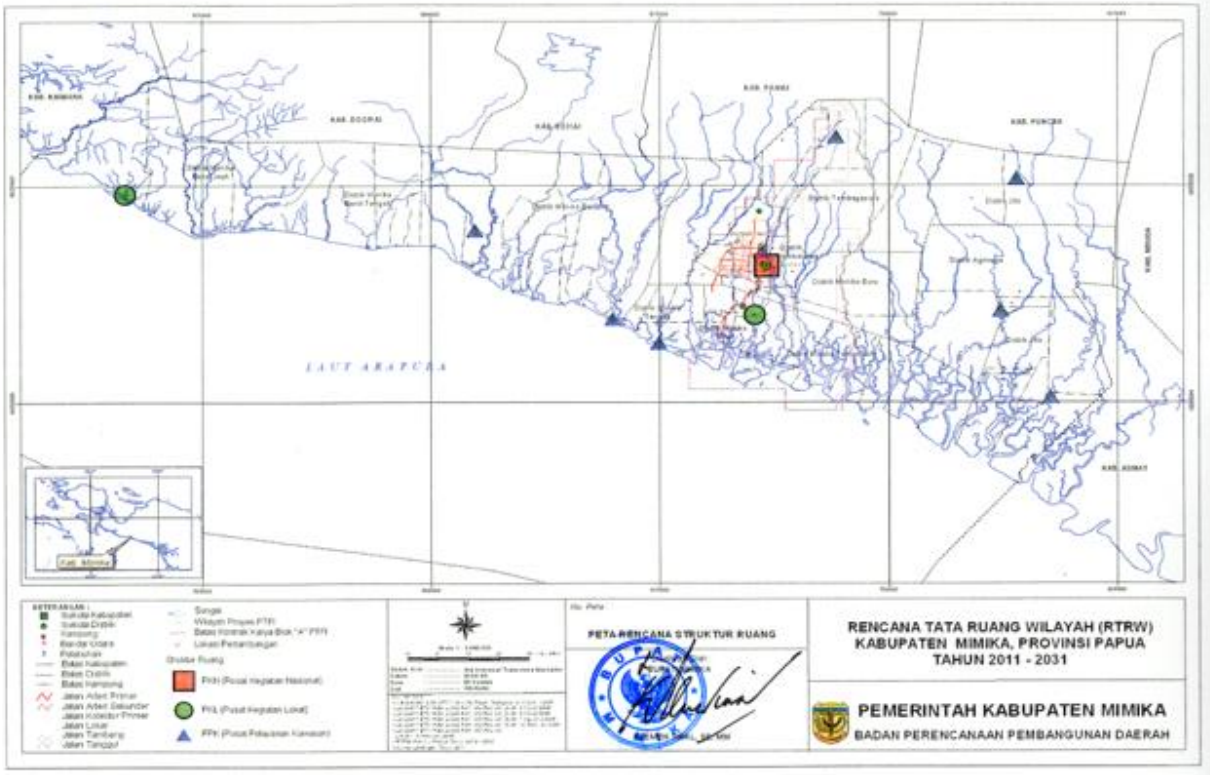
1) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
2) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan tenaga medis;
3) Mengembangkan balai-balai latihan kerja dengan berorientasi pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah;
4) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri dari:

1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
2) Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
3) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
4) Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

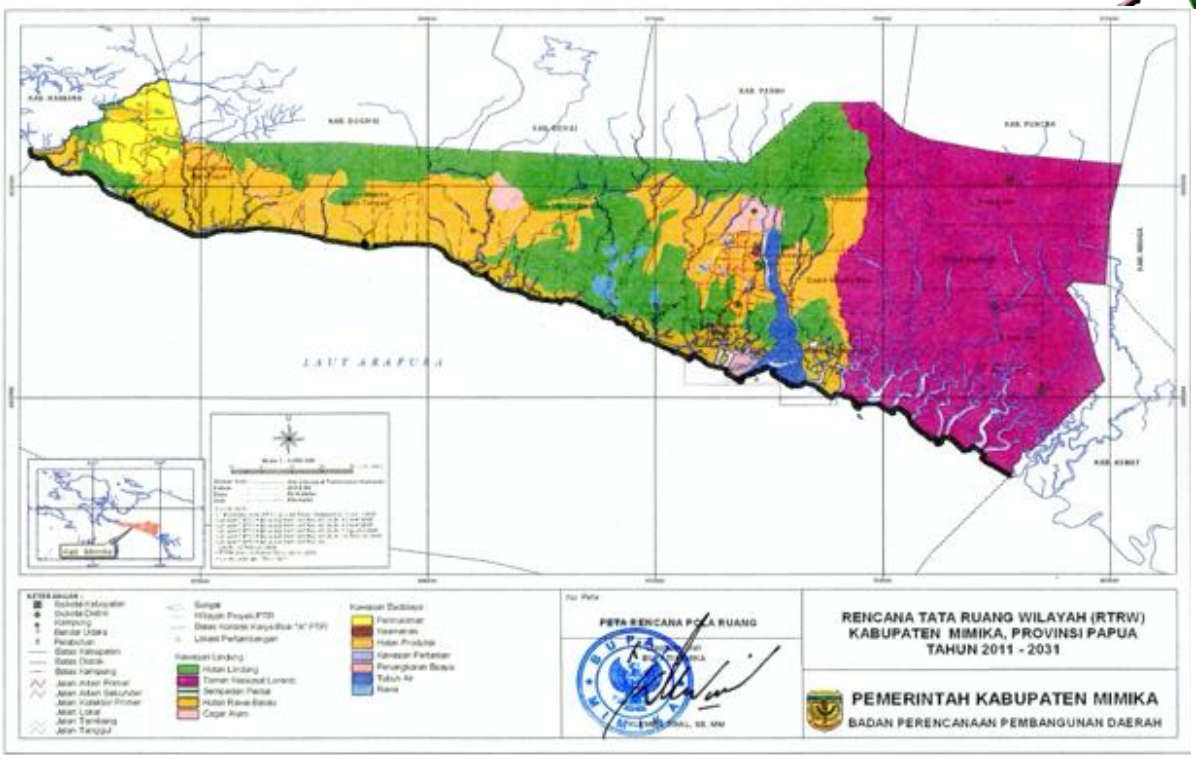
Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional terdiri dari:

1) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
2) Menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
3) Mendorong perkembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi melalui pemberian insentif dan pengenaan disinsentif pada kawasan tersebut;
4) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
5) Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
6) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.



Gambar 2.15.
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2011-2031
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2011-2031

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Mimika yaitu: 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Timika; 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Distrik Mimika Barat Jauh dan Ayuka di Distrik Mimika Timur Jauh; 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di Kapiraya di Distrik Mimika Barat Tengah, Kokonao di Distrik Mimika Barat, Atuka di Distrik Mimika Timur Tengah, Tembagapura di Distrik Tembagapura, Jila di Distrik Jila, Kiliarma di Distrik Agimuga, dan Sempan Timur di Distrik Jita. Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL) meliputi kampung-kampung yang tersebar di semua Distrik Kabupaten Mimika.



Gambar 2.16.
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mimika 2011-2031
Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2011-2031

Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas: 1) Kawasan hutan lindung; 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 3) Kawasan perlindungan setempat; 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 5) Kawasan rawan bencana alam; 6) Kawasan lindung geologi; dan 7) Kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya terdiri dari: 1) Kawasan peruntukan hutan produksi; 2) Kawasan peruntukan pertanian; 3) Kawasan peruntukan perikanan; 4) Kawasan peruntukan pertambangan; 5) Kawasan peruntukan industri; 6) Kawasan peruntukan pariwisata; 7) Kawasan peruntukan permukiman; 8) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan 9) Kawasan peruntukan lainnya. **Kawasan peruntukan industri sedang terdapat di Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Timur. Kawasan peruntukan industri kecil terdapat di Distrik Kuala Kencana dan Distrik Mimika Baru.**

2.2. Tinjauan Peraturan Komoditas Kopi

2.2.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan bersifat strategis yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam rangka memenuhi permintaan pasar perlu didukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani agar menghasilkan biji kopi dengan mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kopi merupakan salah satu komoditas penting di dalam perdagangan dunia yang melibatkan beberapa negara produsen dan banyak negara konsumen. Kopi, meskipun bukan merupakan tanaman asli Indonesia, tanaman ini mempunyai peranan penting dalam industri perkebunan di Indonesia. Perkembangan yang cukup pesat tersebut perlu di dukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani agar mereka mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu seperti yang dipersyaratkan oleh Standard Nasional Indonesia. Adanya

jaminan mutu yang pasti, ketersediaan dalam jumlah yang cukup dan pasokan yang tepat waktu serta keberlanjutan merupakan beberapa persyaratan yang dibutuhkan agar biji kopi rakyat dapat dipasarkan pada tingkat harga yang lebih menguntungkan.

Untuk memenuhi persyaratan di atas penanganan pascapanen kopi rakyat harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat cara dan tepat jumlah seperti halnya produk pertanian yang lain. Buah kopi hasil panen perlu segera diproses menjadi bentuk akhir yang lebih stabil agar aman untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu tahapan proses dan spesifikasi peralatan kopi yang menjadi kepastian mutu harus didefinisikan dengan jelas. Untuk itu diperlukan suatu acuan standar sebagai pegangan bagi petani/pengolah dalam menghasilkan produk yang dipersyaratkan pasar. Seiring dengan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap produk yang aman dan ramah lingkungan, maka acuan standar tersebut harus mengakomodasi prinsip penanganan pascapanen yang baik dan benar. Keberhasilan penanganan pascapanen sangat tergantung dari mutu bahan baku dari kegiatan proses produksi/budidaya, karena itu penanganan proses produksi di kebun juga harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices*/GAP). Penerapan GAP dan GHP menjadi jaminan bagi konsumen, bahwa produk yang dipasarkan diperoleh dari hasil serangkaian proses yang efisien, produktif dan ramah lingkungan. Dengan demikian petani akan mendapatkan nilai tambah berupa insentif peningkatan harga dan jaminan pasar yang memadai.

A. Panen

Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. Ukuran kemasakan buah ditandai dengan perubahan warna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau tua ketika masih muda, berwarna kuning ketika setengah masak dan berwarna merah saat masak penuh dan menjadi kehitam-hitaman setelah terlampau masak penuh (*over ripe*). Kemasakan buah kopi juga dapat dilihat dari kekerasan dan komponen senyawa gula di dalam daging buah. Buah kopi yang masak mempunyai daging buah lunak dan berlendir serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis. Sebaliknya daging buah muda sedikit keras, tidak berlendir dan rasanya tidak manis karena senyawa gula masih belum terbentuk maksimal. Sedangkan kandungan lendir pada buah yang terlalu masak cenderung berkurang karena sebagian senyawa gula dan pektin sudah terurai secara alami akibat proses respirasi. Tanaman kopi tidak berbunga serentak dalam setahun, karena itu ada beberapa cara pemanenan sebagai berikut:

1) pemetikan selektif dilakukan terhadap buah masak.
2) pemetikan setengah selektif dilakukan terhadap dompolan buah masak.
3) secara lelesan dilakukan terhadap buah kopi yang gugur karena terlambat pemetikan.
4) secara racutan/rampasan merupakan pemetikan terhadap semua buah kopi yang masih hijau, biasanya pada pemanenan akhir.

B. Sortasi Buah

Sortasi buah dilakukan untuk memisahkan buah yang *superior* (masak, bernas, seragam) dari buah *inferior* (cacat, hitam, pecah, berlubang dan terserang hama/penyakit). Sortasi buah kopi juga dapat menggunakan air untuk memisahkan buah yang diserang hama. Kotoran seperti daun, ranting, tanah dan kerikil harus dibuang, karena dapat merusak mesin pengupas. Buah kopi merah (*superior*) diolah dengan cara proses basah atau semi-basah, agar diperoleh biji kopi HS kering dengan tampilan yang bagus. Sedangkan buah campuran hijau, kuning dan merah diolah dengan cara proses kering. Hal yang harus dihindari yaitu menyimpan buah kopi di dalam karung plastik atau sak selama lebih dari 12 jam, karena akan menyebabkan pra-fermentasi sehingga aroma dan citarasa biji kopi menjadi kurang baik dan berbau tengik (*stink*).

C. Proses Kopi Secara Kering (*Dry Process*)

Proses kopi secara kering banyak dilakukan petani, mengingat kapasitas olah kecil, mudah dilakukan dan peralatan sederhana.



Gambar 2.17.
Proses Kopi Secara Kering
Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012

D. Proses Secara Basah (*Fully Washed)*

Pengupasan kulit buah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pengupas kulit buah (*pulper*). Pulper dapat dipilih dari bahan dasar yang terbuat dari tembaga/logam dan/atau kayu. Air dialirkan ke dalam silinder bersamaan dengan buah yang akan dikupas. Sebaiknya buah kopi dipisahkan atas dasar ukuran sebelum dikupas. Fermentasi umumnya dilakukan untuk penanganan kopi arabika, bertujuan untuk menguraikan lapisan lendir yang ada di permukaan kulit tanduk biji kopi. Selain itu, fermentasi mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan “mild” pada citarasa seduhan kopi arabika. sedangkan pada kopi robusta fermentasi dilakukan hanya untuk menguraikan lapisan lendir yang ada di permukaan kulit tanduk. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang menempel di permukaan kulit tanduk. Untuk kapasitas kecil, pencucian dikerjakan secara manual di dalam bak atau ember, sedangkan kapasitas besar perlu dibantu mesin pencuci biji kopi.



Gambar 2.18.
Proses Kopi Secara Basah
Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012

E. Proses Secara Semi Basah (*Semi Washed Process)*

Proses secara semi basah dilakukan untuk menghemat penggunaan air dan menghasilkan kopi dengan citarasa yang khas (berwarna gelap dengan fisik kopi agak melengkung). Kopi arabika yang diproses secara semi-basah biasanya memiliki tingkat keasaman lebih rendah dengan body lebih kuat dibanding dengan kopi yang diproses secara basah penuh. Proses secara semi-basah juga dapat diterapkan untuk kopi robusta. Secara umum kopi yang diproses secara semi-basah mutunya baik. Proses secara semi-basah lebih singkat dibandingkan dengan proses secara basah.



Gambar 2.19.
Proses Kopi Secara Semi Basah
Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012

2.2.2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

Dalam rangka pengembangan tanaman perkebunan diperlukan ketersediaan benih unggul yang diproduksi dari varietas yang telah dilepas. Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan hanya dapat dilakukan untuk jenis tanaman tertentu dan tidak dapat dilakukan untuk jenis tanaman lainnya karena belum tersedia varietas yang telah dilepas. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Produksi benih tanaman perkebunan berasal dari benih varietas unggul dan/atau benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan secara berkelanjutan dilakukan produksi benih melalui perbanyakan secara generatif dan vegetatif. Benih tanaman diklasifikan menjadi 1) Benih Penjenis; 2) Benih Dasar; 3) Benih Pokok; dan 4) Benih Sebar. Perbanyakan benih tanaman secara generatif dilakukan untuk varietas bersari bebas, lini murni dan hibrida. Perbanyakan benih tanaman secara vegetatif dilakukan dengan metode konvensional dan/atau kultur jaringan. Metode konvensional meliputi okulasi, cangkok, sambung, *sucker* dan setek. Perbanyakan benih secara generatif terdiri dari: 1) Proses produksi benih varietas bersari bebas tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dimulai dari pemilihan pohon induk, pembangunan kebun benih sumber, dan

produksi benih dari kebun benih sumber; 2) Proses produksi benih varietas hibrida tanaman tahunan dimulai dari penetapan tetua betina dan tetua jantan, dilanjutkan dengan produksi benih hibrida dengan menyilangkan tetua betina terpilih dengan tetua jantan terpilih; 3) Proses produksi benih tanaman semusim dilakukan secara berjenjang, mulai dari benih penjenis, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Perbanyakan benih secara vegetatif

2.2.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. Kebijakan dan pengaturan di bidang Ekspor meliputi: 1) Eksportir terdaftar; 2) Persetujuan ekspor; 3) Kewenangan; 4) Persyaratan eksportir; 5) Tata cara permohonan perizinan ekspor; 6) Penerbitan perizinan ekspor; 7) Penetapan barang dibatasi ekspor; 8) Verifikasi atau penelusuran teknis; 9) Penentuan tempat pengeluaran barang; 10) Kewajiban eksportir; 11) Larangan bagi eksportir; 12) Sanksi; dan 13) Pengawasan. Peraturan ini secara spesifik membahas komoditas kopi dalam konteks ekspor melalui pengaturan sebagai berikut:

A. Prosedur Perizinan dan Kemudahan Ekspor

- Ekspor kopi tidak lagi memerlukan persyaratan seperti verifikasi asal barang (VAB) yang ketat untuk komoditas tertentu. Proses perizinan ekspor kopi disederhanakan melalui sistem online terintegrasi melalui INSW – *Indonesia National Single Window*, sehingga waktu pemrosesan perizinan berkurang dan lebih efektif. Kondisi ini memungkinkan eksportir kopi, termasuk yang baru, untuk lebih cepat mengakses pasar global.
- Kopi sebagai komoditas prioritas ekspor bebas, tanpa kuota atau larangan, kecuali untuk jenis kopi mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga dunia.

B. Pembatasan dan Kewajiban

- Ekspor kopi dibatasi untuk mencegah over-ekspor biji mentah, dengan dorongan kuat untuk pengolahan domestik seperti roasting atau pengemasan. Pasal 10-15 mengharuskan eksportir mematuhi standar kualitas SNI untuk kopi, termasuk sertifikasi organik atau *fair trade* jika ditargetkan ke pasar premium.

2.2.4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kopi Instan Secara Wajib

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Kopi instan adalah produk kopi berbentuk serbuk atau *granula* atau *flake* yang diperoleh dari proses pemisahan biji kopi murni tanpa dicampur dengan bahan lain, disangrai, digiling, diekstrak dengan air pada kondisi tertentu dengan atau tanpa tanpa bahan tambahan pangan, dikeringkan dengan proses *spray drying* (dengan atau tanpa aglomerasi) atau *freeze drying* atau *fluidized bed drying* menjadi produk yang mudah larut dalam air. Proses sertifikasi SNI untuk kopi instan dirancang secara bertahap untuk memastikan kepatuhan terhadap SNI 2983:2024 tentang kopi instan, langkah sertifikasi adalah sebagai berikut:

A. Seleksi Awal

- Proses dimulai secara elektronik melalui portal SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).
- Pelaku usaha mengisi formulir isian dengan data lengkap, termasuk pemilihan SNI yang relevan (SNI 2983:2024) dan LSPro yang akan menangani penilaian.
- Unggah dokumen pendukung, seperti bukti kepemilikan merek dagang untuk kopi instan (kelas 30 menurut Klasifikasi Nice).

- Langkah ini bersifat administratif dan bertujuan menyaring kelayakan awal sebelum audit lapangan.

B. Audit Sistem Manajemen dan Produksi

- Dilakukan saat proses produksi sedang berjalan untuk memverifikasi konsistensi.
- Auditor memeriksa satu atau lebih jenis media pengisi (misalnya, bubuk, granul, atau larutan instan) sesuai produk yang diajukan.
- Fokus pada rantai pasok, higiene, dan kepatuhan terhadap prinsip *Good Manufacturing Practices* (GMP) serta *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP).

C. Pengambilan Sampel

- Petugas LSPro menyusun rencana pengambilan sampel yang disetujui ketua tim auditor.
- Sampel diambil secara acak dari lini produksi atau gudang, dengan minimal 3 unit per batch.
- Setiap sampel dilengkapi Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan label identifikasi untuk t*raceability*.

D. Pengujian Laboratorium

- Sampel diuji di laboratorium terakreditasi sesuai ketentuan SNI 2983:2024, yang mencakup parameter seperti kadar kafein, kelembaban, kontaminan (misalnya, aflatoksin), dan rasa/aroma.
- Pengujian meliputi uji fisikokimia, mikrobiologi, dan sensorik untuk memastikan produk aman dan berkualitas.

E. Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat

- LSPro menyusun laporan hasil audit dan uji, yang ditinjau oleh reviewer independen.
- Jika memenuhi syarat, sertifikat SNI diterbitkan dengan masa berlaku 2 tahun, disertai kewajiban surveillance tahunan.
- Jika tidak lolos, ada kesempatan revisi dalam 30 hari sebelum penolakan final.

2.3. Tinjauan Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal

2.3.1. Draf Rencana Umum Penanaman Modal Nasional Tahun 2025-2045

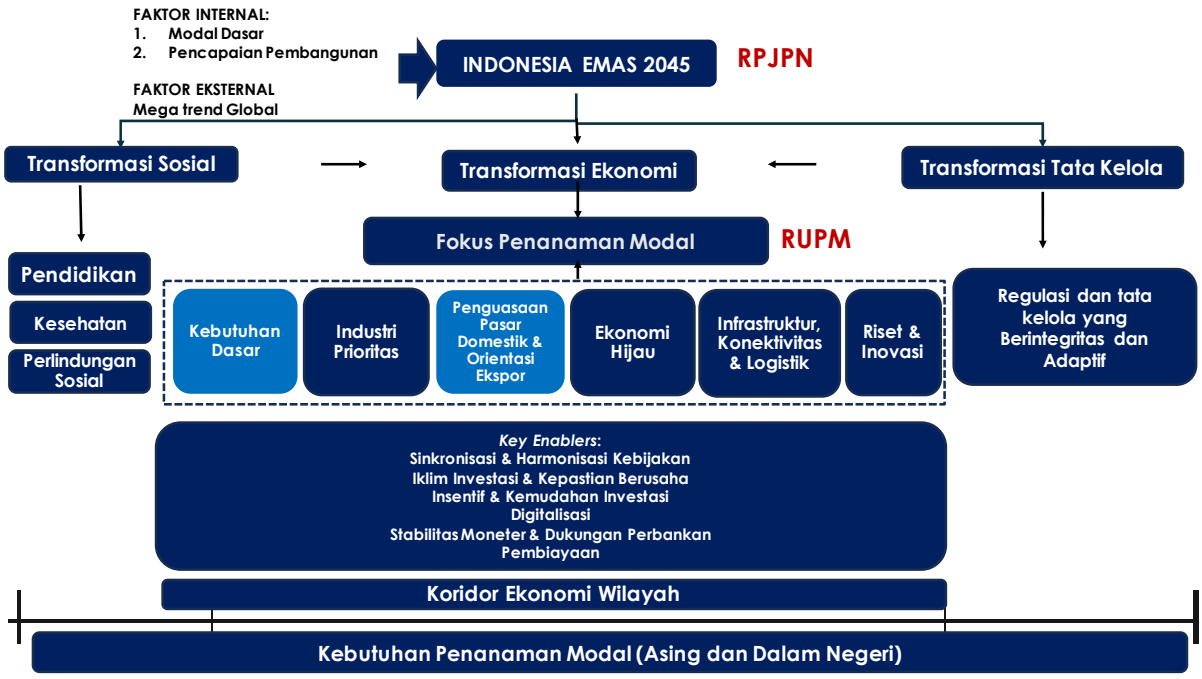
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045: (i) pendapatan per kapita setara negara maju sebesar US$30,300; (ii) tingkat kemiskinan berkisar 0,5-0,8 persen dan ketimpangan pendapatan (rasio gini) sekitar 0,290-0,320 serta kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) meningkat menjadi 28,5 persen (2045) dari 21,4 persen (2025); (iii) Global Power Index membaik menjadi 15 besar dari posisi 34 pada 2023; (iv) daya saing sumber daya manusia naik dari 0,56 ke 0,73 (indeks modal manusia) dan (v) penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 38,6 persen (2025) menjadi 93,65 persen (2045); (v). Indeks kualitas lingkungan hidup membaik, dari 76,49 (2025) menjadi 83 (2045).

Dalam rangka mencapai target lima sasaran utama tersebut, ditetapkan delapan misi (agenda) pembangunan 2045. Agenda tersebut fokus pada transformasi untuk memperbaiki berbagai kondisi di dalam negeri. Transformasi Indonesia fokus pada tiga: sosial, ekonomi, dan tata kelola. Landasan transformasi tersebut adalah supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, dimana bertujuan untuk (a) hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan (c) demokrasi substansial, (b) stabilibitas ekonomi makro, dan ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan. Serta landasan transformasi juga yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi, dimana bertujuan untuk (a) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, (b) keluarga berkualitas, kesetaraan gender,

dan masyarakat inklusif, (c) lingkungan hidup berkualitas, (d) bertahanan energi, air, dan kemandirian pangan, dan (e) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sementara itu kerangka implementasi transformasi terdiri dari tiga: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.

Penanaman modal menjadi salah satu determinan penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Penanaman modal produktif dan berkualitas mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur. Pertama, investasi berperan penting dalam peningkatan konsumsi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru. Konsumsi yang terjaga berkorelasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga. Sebagaimana dipahami bahwa konsumsi rumah menjadi kontributor ekonomi Indonesia paling tinggi, rata-rata di atas 50 persen. Kedua, investasi dapat memperbaiki kualitas neraca perdagangan dan peningkatan devisa negara melalui. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan investasi berorientasi ekspor dan substitusi impor. Pemerintah telah mengarahkan investasi ke sektor-sektor berorientasi ekspor dan substitusi impor melalui hilirisasi. Ketiga, investasi berkontribusi dalam menaikkan pendapatan negara (khususnya dari penerimaan pajak) sehingga memperbaiki ruang fiskal (fiscal space). Fokus pemerintah memacu industri manufaktur, sebagaimana ditetapkan pada RPJPN 2025-2045, sangat relevan mengingat lapangan usaha tersebut menjadi kontributor utama penerimaan perpajakan, sekitar 25-30 persen.

Tingginya kebutuhan dana pembangunan menjadi tantangan utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahap pertama dibutuhkan dana pembangunan sekitar Rp42 ribu triliun sedangkan pada tahap kedua sekitar Rp72 ribu triliun. Kebutuhan dana pembangunan tahap ketiga dan keempat masing-masing Rp125 ribu triliun dan Rp247 ribu triliun. Dari target yang disebutkan di atas, pemerintah berkontribusi sekitar 7 persen sedangkan BUMN sebesar 4,5 persen. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan akan memaksimalkan kontribusi swasta (sekitar 88 persen). Sementara itu, menarik penanaman modal swasta semakin menantang di tengah perubahan mega tren dunia yang sangat cepat serta tantangan ekonomi domestik yang masih tinggi.



Gambar 2.20.
Grand Design RUPM 2025-2045
Sumber: Draf RUPM 2025-2045

Visi penanaman modal adalah **"*Penanaman Modal yang Produktif dan Berkualitas Melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045*"**. Misi Penanaman Modal yaitu:

a. Mendukung iklim penanaman modal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian;
b. Mendukung penanaman modal untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan sektor yang memiliki efek pengganda paling besar terhadap perekonomian;
c. Mendukung perbaikan regulasi dan tata kelola penanaman modal; dan
d. Mendorong penanaman modal yang merata dan berkelanjutan.

Fokus penanaman modal pada pemenuhan kebutuhan dasar, industri prioritas, industri berorientasi ekspor, investasi hijau, infrastruktur konektivitas dan logistik, dan berorientasi riset dan inovasi, dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Kebutuhan Dasar
   Kebijakan penanaman modal untuk mengembangkan industri kebutuhan dasar sebagai berikut :
   1) pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung produksi dan akses terhadap produk pangan, seperti mekanisasi, diversifikasi produk, dan pusat-pusat penelitian pangan;
   2) ekstensifikasi lahan pertanian dan bahan baku industri pendukungnya berupa pupuk, benih, dan pestisida;
   3) mendorong skema layanan produsen pertanian meliputi pembiayaan, asuransi, sistem resi gudang (SRG), hingga distribusi dengan *offtaker*; dan
   4) mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam produk pendukung pertanian untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
b. Industri Prioritas
   Kebijakan penanaman modal untuk mengembangkan industri prioritas, sebagai berikut:
   1) hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis sumber daya alam tambang, *critical minerals*, serta sumber daya alam agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
   2) penguatan industri dasar prioritas untuk memperkokoh struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor, terutama industri kimia dasar dan logam;
   3) pengembangan industri berbasis teknologi-menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas;
   4) pengembangan industri barang konsumsi berkelanjutan prioritas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan domestik dan global dengan produk-produk ramah lingkungan;
   5) pengembangan industri berbasis inovasi dan riset, terutama untuk mendorong ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi;
   6) peningkatan penanaman modal dan ekspansi industri prioritas yang padat karya terampil, berorientasi ekspor, berbasis teknologi menengah dan tinggi, serta diutamakan di luar Jawa; dan
   7) pemanfaatan industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni, dan kearifan masyarakat, serta kreativitas talenta Indonesia ke tingkat global.
c. Industri Berorientasi Ekspor
   Kebijakan penanaman modal pada industri berorientasi ekspor sebagai berikut:
   1) peningkatan infrastruktur pendukung untuk industri berorientasi ekspor;

2) penguatan kapasitas industri domestik yang berorientasi ekspor dengan fokus pada peningkatan partisipasi dalam GVC; dan
3) memfasilitasi terbentuknya kemitraan dan aliansi strategis antara industri lokal dan industri multinasional untuk memperkuat daya saing.

d. Investasi Hijau

Kebijakan penanaman modal di bidang Investasi hijau adalah sebagai berikut:

1) pengembangan energi baru terbarukan;
2) pengembangan dan percepatan investasi untuk jaringan listrik interkoneksi nasional, *smart grid*, dan *island grid;*
3) pengembangan transportasi ramah lingkungan;
4) penguatan investasi pada infrastruktur pengolahan limbah berbasis ekonomi sirkular; dan
5) pengelolaan sumber daya alam dan perdagangan karbon.

e. Infrastruktur Konektivitas dan Logistik

Kebijakan penanaman modal infrastruktur konektivitas dan logistik adalah sebagai berikut:

1) pengoptimalan kuantitas dan kualitas infrastruktur terbangun untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur yang sudah ada;
2) pengembangan pusat-pusat ekonomi baru dan pengoptimalan pusat ekonomi yang sudah ada melalui dukungan infrastruktur konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kebijakan pembangunan wilayah;
3) pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah perkotaan metropolitan, kota besar, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengadopsi konsep *smart city* berbasis karakter wilayah melalui penyediaan transportasi perkotaan terpadu berbasis digital dan berwawasan lingkungan;
4) pengembangan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri untuk memperkuat akses ke pasar regional dan global serta mengurangi biaya logistik;
5) pengoptimalan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan non-skema kerja sama pemerintah dan swasta untuk meningkatkan porsi penanaman modal swasta dalam pengembangan infrastruktur; dan
6) pengaturan terkait kepastian pembangunan infrastruktur daerah tertinggal bagi perusahaan penanaman modal yang berlokasi di daerah tertinggal.

f. Riset dan Inovasi

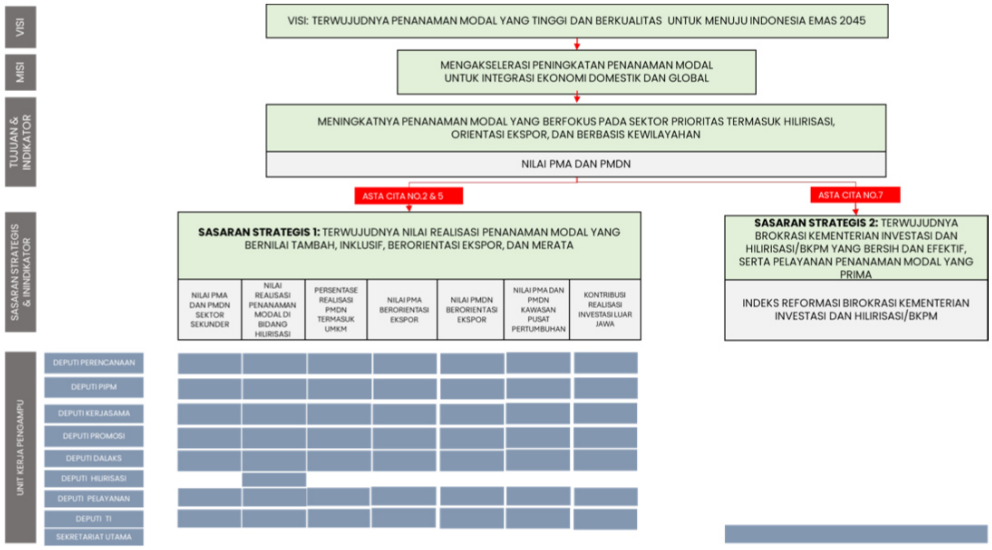
Kebijakan penanaman modal berorientasi riset dan inovasi adalah sebagai berikut:

1) optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk perbaikan teknologi produksi dan diversifikasi produk industri;
2) peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM); dan
3) pengembangan kawasan khusus dan ekosistem pengembangan riset dan inovasi.

2.3.2. Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029

Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan gambaran konsistensi kinerja selama lima tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Perumusan visi dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 adalah ***"Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045"***. Berdasarkan visi Kementerian

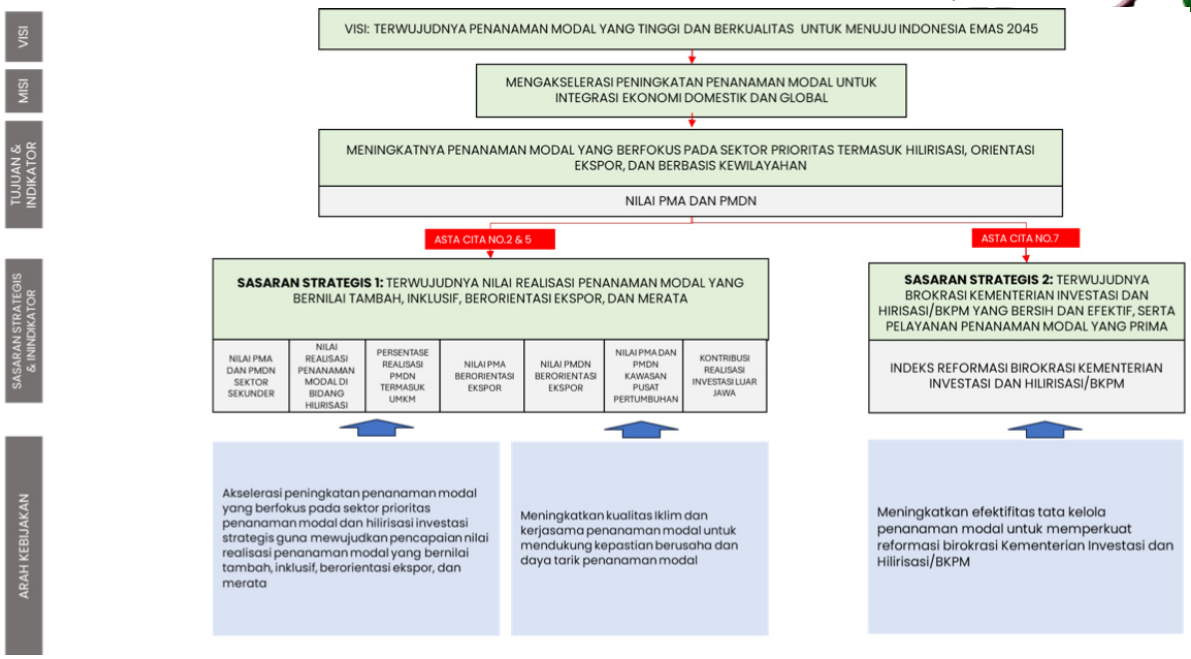
Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dan dukungan terhadap misi RPJMN 2025-2029, serta tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka rumusan misi untuk mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 yaitu ***"Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global"***. Mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 adalah: Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan. Keberhasilan tujuan diukur melalui indikator nilai PMA dan PMDN.



Gambar 2.21.
Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Unit Kinerja Pengampu
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 sebagai berikut:

1) Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;
2) Meningkatkan kualitas Iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal;
3) Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.



Gambar 2.22.
Arah Kebijkan dalam Mencapai Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029
Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029

2.3.3. *Backgroud Study* RUPM Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045

Berdasarkan *Backgroud Studies* Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Mimika tahun 2025-205, pengembangan penanaman modal di Kabupaten Mimika diarahkan pada **penanaman modal yang lebih tinggi, inklusif, berkualitas, dan merata.** Penanaman modal yang lebih tinggi dimaknai bahwa nilai realisasi penanaman modal Kabupaten Mimika didorong lebih tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Penanaman modal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. Inklusif dimaknai bahwa penanaman modal dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, mendukung hilirisasi, serta industri yang berorientasi ekspor, termasuk peningkatan investasi PMDN dan UMKM. Berkualitas dimaknai bahwa penanaman modal dilakukan secara berwawasan lingkungan, mendukung *green economy*, dan *blue economy*. Merata dimaknai bahwa penanaman modal didorong secara seimbang di berbagai wilayah Kabupaten Mimika.



Gambar 2.23.
Arah Kebijakan Draf RUPM Kabuapaten Mimika 2025-2045
Sumber: *Backgorud* Studi RUPM Kabupaten Mimika 2025-2045

Terdapat enam arah kebijakan untuk mewujudkan penanaman modal yang lebih tinggi, inklusif, berkualitas, dan merata di Kabupaten Mimika tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. **Arah Kebijakan I: Akselerasi Peningkatan Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas Penanaman Modal**
   Kebijakan ini mendorong investasi di sektor prioritas dengan potensi nilai tambah tinggi melalui optimalisasi potensi daerah, fokus pada pertumbuhan investasi kualitatif dan kuantitatif. Sektor unggulan Kabupaten Mimika meliputi: (i) Pariwisata; (ii) Perkebunan dan Tanaman Pangan (sagu, kopi, kelapa, jagung); (iii) Peternakan (sapi, kambing, ayam pedaging); (iv) Perikanan (ikan, udang, kepiting); (v) Pertambangan; dan (vi) Energi Baru Terbarukan. Peluang usaha prospektif antara lain peternakan terintegrasi, industri pengolahan produk berbahan dasar sagu, kopi, kelapa, jagung, usaha penangkapan dan budidaya ikan, udang, kepiting, serta pariwisata seperti biro perjalanan wisata eksklusif, pengelolaan kesenian dan tradisi lokal, wisata mangrove, serta usaha souvenir dan agrowisata. Di sektor pertambangan terdapat pengolahan tailing bekas PT Freeport, dan di energi baru terbarukan terdapat pembangkit listrik tenaga air serta industri pengolahan limbah. Selain itu, penanaman modal difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, industri prioritas dan ekspor, ekonomi hijau, infrastruktur, konektivitas, logistik, serta riset dan inovasi.
2. **Arah Kebijakan II: Meningkatkan Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Kepastian dan Kemudahan Berusaha Serta Daya Tarik Penanaman Modal**
   Perbaikan dan peningkatan iklim investasi di Kabupaten Mimika bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi, memberikan pelayanan dan kepastian yang lebih baik pada saat perizinan penanaman modal.
3. **Arah Kebijakan III: Peningkatan Kualitas Promosi, Kerjasama dan Pengendalian Penanaman Modal**
   Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi terkait penguatan promosi daerah sebagai tujuan investasi yang diminati (*image building*), terutama berinvestasi di sektor prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melakukan riset terhadap kebutuhan pasar, promosi investasi melalui media cetak dan elektronik, melakukan promosi sektor usaha yang potensial dan lain-lain. Kerjasama dan pengendalian penanaman modal juga perlu dilakukan agar akselerasi perwujudan penanaman modal yang tinggi dan berkualitas dapat terwujud.
4. **Arah Kebijakan IV: Pemberdayaan UMKM dan Koperasi**
   Upaya peningkatan penanaman modal perlu untuk mempertimbangkan daya saing industri kecil dan menengah. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Mimika perlu untuk melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Kabupaten Mimika memang masih terhambat oleh permasalahan pengembangan UMKM. Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya kemitraan Pelaku Usaha besar dengan UMKM.
5. **Arah Kebijakan V: Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan**
   Upaya peningkatan penanaman modal harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Salah satu konsep yang dikenalkan adalah green investment. Pengembangan arah penanaman modal diharapkan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, serta memberikan efek yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat lokal.
6. **Arah Kebijakan VI: Pemerataan Penanaman Modal**
   Arah kebijakan ini mendorong pemerataan distribusi investasi di seluruh wilayah dan sektor ekonomi di Kabupaten Mimika. Pemerataan ini diharapkan dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan aktivitas

ekonomi masyarakat. Diperlukan peningkatan dan pemerataan infrastruktur penunjang penanaman modal untuk mewujudkan hal ini, terutama di wilayah terpencil.

2.3.4. Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika Tahun 2024

Identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Mimika dilakukan menggunakan alat analisis diantaranya *Location Quotient* (LQ); *Shift-Share Analysis* (SSA); Tipologi Sektor; dan Tipologi Klassen. Berdasarkan analisis LQ, terdapat dua lapangan usaha yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Mimika, yaitu Pertambangan dan Penggalian serta Informasi dan Komunikasi. Hal ini menunjukkan terbatasnya pilihan sektor ekonomi, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan pembangunan pada sektor yang ada.

Tabel 2.2
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha		Rerata LQ	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,39	Non Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	1,18	Basis
C	Industri Pengolahan	0,53	Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	Non Basis
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,85	Non Basis
F	Konstruksi	0,46	Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,58	Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,72	Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,03	Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,80	Non Basis
L	Real Estat	0,65	Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,96	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,38	Non Basis
P	Jasa Pendidikan	0,35	Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	Non Basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,63	Non Basis

Sumber: Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika 2024

Analisis *Shift Share* (SS) menggambarkan kinerja sektor perekonomian di suatu provinsi terhadap perekonomian nasional dengan melihat aspek daya saing dan pertumbuhan suatu sektor. Analisis ini juga dapat melihat perkembangan dalam membandingkan besar aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antar wilayah. Dari hasil analisis *shift share*, dapat diketahui bahwa hampir seluruh lapangan usaha di Kabupaten Mimika bernilai positif sehingga menunjukkan bahwa secara agregat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika mengalami percepatan. Akan tetapi, terdapat satu lapangan usaha yang laju pertumbuhannya melambat, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel 2.3
Hasil Perhitungan Analisis Shift Share Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha		*Shift Share* (2020-2023)	
		Dij	SS
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,95	Sektor Kompetitif
B	Pertambangan dan Penggalian	12943,43	Sektor Kompetitif
C	Industri Pengolahan	0,07	Sektor Kompetitif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,45	Sektor Kompetitif
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	Sektor Kompetitif
F	Konstruksi	26,38	Sektor Kompetitif
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	50,15	Sektor Kompetitif
H	Transportasi dan Pergudangan	13,24	Sektor Kompetitif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,76	Bukan Sektor Kompetitif
J	Informasi dan Komunikasi	46,20	Sektor Kompetitif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,94	Sektor Kompetitif
L	Real Estat	10,54	Sektor Kompetitif
M,N	Jasa Perusahaan	2,02	Sektor Kompetitif
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	Sektor Kompetitif
P	Jasa Pendidikan	3,20	Sektor Kompetitif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	Sektor Kompetitif
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,66	Sektor Kompetitif

Sumber: Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika 2024

Analisis Tipologi Sektor dapat mengidentifikasi posisi sektor ekonomi unggulan wilayah dengan memperhatikan sektor pertumbuhan sektoral (*Shift-share Analysis/SSA*), dan pemusatan aktivitas ekonomi (*Location Quotient/LQ*). Berdasarkan hasil analisis LQ sebelumnya, terdapat dua sektor yang merupakan basis ekonomi sedangkan berdasarkan analisis *shift share*, terdapat 16 sektor yang memiliki laju pertumbuhan sektoral positif. Berdasarkan analisis LQ dan SS tersebut, tipologi sektor mengelompokkan sektor Pertambangan dan Penggalian serta Informasi dan Komunikasi termasuk dalam sektor yang mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat di Kabupaten Mimika. Sektor lainnya yaitu 13 lapangan usaha, mampu berkembang namun kecepatan pertumbuhannya terhambat.

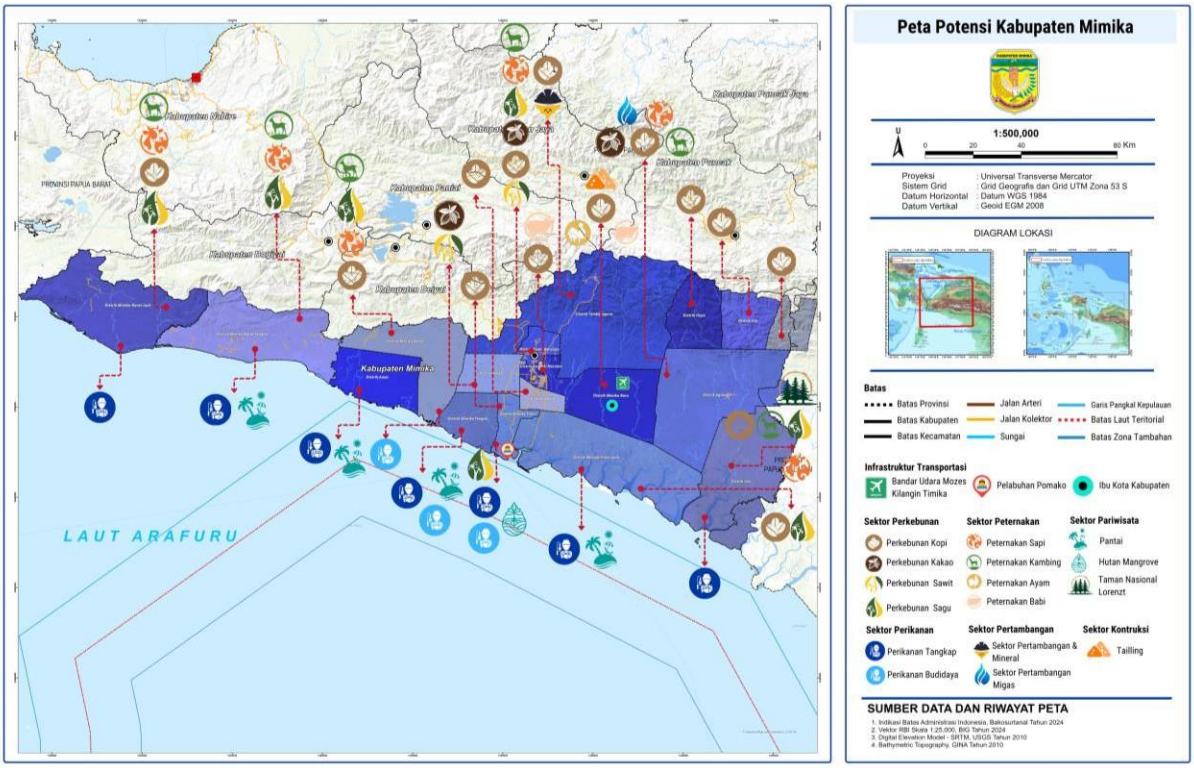
Tabel 2.4
Hasil Perhitungan Tipologi Sektor Kabupaten Mimika

	Lapangan Usaha	LQ	SS	Tipologi Sektor
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,39	7,95	Sektor Maju Tapi Tertekan
B	Pertambangan dan Penggalian	1,18	12943,43	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat
C	Industri Pengolahan	0,53	0,07	Sektor Maju Tapi Tertekan
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	0,45	Sektor Maju Tapi Tertekan
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,85	0,04	Sektor Maju Tapi Tertekan
F	Konstruksi	0,46	26,38	Sektor Maju Tapi Tertekan
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	0,58	50,15	Sektor Maju Tapi

	Lapangan Usaha	LQ	SS	Tipologi Sektor
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			Tertekan
H	Transportasi dan Pergudangan	0,72	13,24	Sektor Maju Tapi Tertekan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	-5,76	Sektor Relatif Tertinggal
J	Informasi dan Komunikasi	1,03	46,20	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Cepat
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,80	13,94	Sektor Maju Tapi Tertekan
L	Real Estat	0,65	10,54	Sektor Maju Tapi Tertekan
M,N	Jasa Perusahaan	0,96	2,02	Sektor Maju Tapi Tertekan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,38	1,94	Sektor Maju Tapi Tertekan
P	Jasa Pendidikan	0,35	3,20	Sektor Maju Tapi Tertekan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	5,03	Sektor Maju Tapi Tertekan
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,63	2,66	Sektor Maju Tapi Tertekan

Sumber: Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika 2024

Peta potensi investasi Kabupaten Mimika memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sektor, sub sektor, komoditas strategis, dan lokasi-lokasi yang memiliki peluang investasi untuk dikembangkan di masa depan. Peta potensi investasi ini memiliki keterkaitan dengan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan penanaman modal usaha, kebijakan tersebut harus mencerminkan potensi yang telah diidentifikasi dalam peta ini. Misalnya, insentif khusus untuk sektor perikanan dan pertanian dapat mendorong pengembangan budidaya dan pengolahan hasil laut serta produk pertanian. Adanya fasilitas dan kemudahan yang sesuai dengan peta potensi investasi, Kabupaten Mimika dapat menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keterpaduan antara pemetaan potensi investasi dan kebijakan daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Mimika. Berikut ini merupakan peta potensi investasi Kabupaten Mimika.



Gambar 2.24.
Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika 2029
Sumber: Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika 2024

Berdasarkan peta potensi peluang investasi pada Gmabar 2.1, sektor perikanan terdiri dari sub sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor perkebunan dan peternakan. Sektor pertambangan terdiri dari sub sektor batu bara dan mineral serta minyak bumi dan gas. Sektor konstruksi terdiri dari sub sektor pendukung konstruksi. Berikut adalah tabel sebaran komoditas, lokasi, dan peluang investasi berdasarkan sektor dan subsektor di Kabupaten Mimika.

Tabel 2.5
Sektor, Sub Sektor, Komoditas, Lokasi, dan Peluang Investasi Kabupaten Mimika

Sektor	Sub Sektor	Komoditas	Lokasi	Peluang Investasi
Perikanan	Perikanan Tangkap	Tuna	Mimika Barat jauh, Mimika barat tengah, Mimika Tengah, Mimika Timur, Amar, Mimika Timur Jauh, Jita	Industri Pengolahan Ikan, *Cold Storage*
		Tongkol	Mimika Barat jauh, Mimika barat tengah, Mimika Tengah, Mimika Timur, Amar, Mimika Timur Jauh, Jita	Industri Pengolahan Ikan, *Cold Storage*

Sektor	Sub Sektor	Komoditas	Lokasi	Peluang Investasi
		Cakalang	Mimika Barat jauh, Mimika barat tengah, Mimika Tengah, Mimika Timur, Amar, Mimika Timur Jauh, Jita	Industri Pengolahan Ikan, *Cold Storage*
		Bawal Hitam	Mimika Barat jauh, Mimika barat tengah, Mimika Tengah, Mimika Timur, Amar, Mimika Timur Jauh, Jita	Industri Pengolahan Ikan, *Cold Storage*
	Perikanan Budidaya	Kepiting	Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Barat	Industri Pengolahan Ikan, *Cold Storage*
		Udang	Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Barat	Industri Pengolahan Ikan, *Cold Storage*
Pertanian	Perkebunan	Kopi	Tembagapura, Hoya, Jila, Alama, Agimuga, Jita, Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Wania,Mimika Timur, Mimika Baru, dan Mimika Barat	1. Produk Olahan Biji Kopi Robusta dan Arabika ; 2. Produk turunan kulit dan daging buah kopi
		Kelapa Sawit	Distrik Iwaka dan Kuala Kencana	CPO, Biodisel, Olekimia
		Kakao	Iwaka, Agimuga, Kuala Kencana	Coklat Bubuk, Coklat Batangan
		Sagu	Distrik Jita, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat dan Distrik Mimika Timur Jauh.	Produk turunan olahan sagu (tepung sagu, dsb)
		Sapi	Distrik Kuala Kencana, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat, Agimuga, dan Jita.	Produk turunan olahan sapi

Sektor	Sub Sektor	Komoditas	Lokasi	Peluang Investasi
	Peternakan	Babi	Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama	Produk Olahan, Daging Premium, Rumah Potong Hewan (RPH)
		Kambing	Kuala Kencana, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat, Agimuga, dan Jita.	Produk turunan olahan kambing
		Ayam	Mimika Baru	Olahan daging, Produk turunan daging ayam, Industri Pengolahan Bulu Ayam, Produk turunan olahan limbah ayam
Pertambangan	Batu Bara & Mineral	Emas	Tembagapura	Saat ini emas menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Mimika namun telah di kuasai oleh PT.FreePort sehingga tidak memungkinkan untuk di kembangkan pihak lain.
		Tembaga	Tembagapura	Saat ini tembaga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Mimika namun telah di kuasai oleh PT.FreePort sehingga tidak memungkinkan untuk di kembangkan pihak lain.

Sektor	Sub Sektor	Komoditas	Lokasi	Peluang Investasi
	Migas	LNG	Agimuga	Turunan Industri produk Olahan Migas
Pariwisata	Pariwisata Alam (Taman bertema)	Pantai Kampus Biru	Mimika Timur Jauh	Wisata Bahari
		Pantai Ipaya	amar	Homestay, Glamping (*glamorous camping*))
		Taman Nasional Lorenzt	Agimua,Jita	Wisata Premium
		Kali Kyura	Kuala Kencana	Taman Wisata Air
		Danau Idenberg	Tembagapura	Wisata Premium
		Kali Iwaka Kuala Kencana	Kuala Kencana	Wisata Premium
		Ekowisata Hutan Mangrove	Mimika Timur	Atraksi Wisata Budaya
		Puncak Cartenzs	Tembagapura	Wisata Premium
		Pulau Puriri	Amar	Resort, Atraksi Wisata Budaya
		Pantai Kekwa	Mimika Tengah	Wisata Bahari dan Sejarah
Kontruksi	Pendukung Kontruksi	Tailling	Mimika Baru	Bahan baku kaca, Bahan baku batako

Sumber: Peta Potensi Investasi Kabupaten Mimika 2024

2.4. Tinjauan Peraturan Penanaman Modal

2.4.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan landasan hukum fundamental dalam pengaturan investasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mimika. Bahwa, upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi. Dalam rangka pembangunan demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal menjadi salah satu dasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu, perlu penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global serta nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri

maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanan modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: 1) Kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal; 2) Keterbukaan, asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal; 3) Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya; 5) Kebersamaan, asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; 6) Efisiensi berkeadilan, asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing; 7) Berkelanjutan, asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang; 8) Berwawasan lingkungan, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; 9) Kemandirian, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; serta 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan penanaman modal adalah untuk: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2) Menciptakan lapangan kerja; 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kerangka dasar untuk mendorong penanaman modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam konteks Kabupaten Mimika, Undang-Undang Penanaman Modal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip penanaman modal yang harus dianut, termasuk kepastian hukum, keterbukaan,

akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari peraturan ini juga dapat dipahami tujuan penyelenggaraan penanaman modal meliputi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan pengaturan terkait fasilitas penanaman modal. Fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan peluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Fasilitas penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut: 1) Menyerap banyak tenaga kerja; 2) Termasuk skala prioritas tinggi; 3) Termasuk pembangunan infrastruktur; 4) Melakukan alih teknologi; 5) Melakukan industri pionir; 6) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; 7) Menjaga kelestarian lingkungan hidup; 8) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 9) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau 10) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Bentuk fasilitas tersebut berupa: 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan berusaha, peraturan ini memberikan kerangka dasar antara lain meliputi fasilitas fiskal seperti jenis, kriteria pemberian, serta kemudahan pelayanan dan perizinan seperti fasilitas hak atas tanah, fasilitas keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor, hak, kewajiban, serta sanksi penanam modal. Peraturan ini merupakan *framework* legal untuk memberikan fasilitasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di lingkup pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Peraturan ini menjadi rujukan dasar dalam upaya penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Mimika.

2.4.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras. Peraturan ini mengatur terkait pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; pengelolaan belanja daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah,

sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

2.4.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan dengan menimbang bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Selain itu, untuk rnendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, peiindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: 1) Pemerataan hak; 2) Kepastian hukum; 3) Kemudahan berusaha; 4) Kebersamaan; dan 5) Kemandirian. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk untuk tujuan: 1) Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 2) Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan pelindungan bagi Koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan 4) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan strategis cipta kerja diantaranya: 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) Ketenagakerjaan; 3) Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) Kemudahan berusaha; 5) Dukungan riset dan inovasi; 6) Pengadaan tanah; 7) Kawasan ekonomi; 8) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) Pengenaan sanksi. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memberikan paradigma baru dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengatur penyederhanaan perizinan, percepatan proyek strategis nasional, dan peningkatan ekosistem investasi yang lebih kompetitif. Hal ini memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengoptimalkan potensi daerah melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, dan percepatan proses perizinan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk lebih fleksibel dalam memberikan insentif kepada investor yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

2.4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah merupakan acuan hukum dasar dalam penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Mimika. Peraturan ini menjadi

panduan sekaligus pedoman penyusunan kebijakan terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha di daerah. Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan menimbang untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, bahwa pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian kemudahan berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha dilakukan dengan berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut: 1) Kepastian hukum, asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; 2) Kesetaraan, perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu; 3) Transparansi, keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/ atau investor; 4) Akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; serta 5) Efektif dan efisien, pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha diberikan kepada kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria: 1) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; 2) Menyerap tenaga kerja; 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; 6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 7) Pembangunan infrastruktur; 8) Melakukan alih teknologi; 9) Melakukan industri pionir; 10) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 11) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; 12) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; 13) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau 14) Berorientasi ekspor. Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagai berikut: 1) Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; 2) Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; 3) Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; 4) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; 5) Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; 6) Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; 7) Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau 8) Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu merupakan salah satu rujukan hukum penting dalam rangka penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Mimika. Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan menimbang upaya untuk lebih mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal langsung, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor usaha, maupun kepastian hukum guna perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu. Bidang dan/atau daerah tertentu termasuk ke dalam kategori prioritas tinggi dalam skala

nasional, serta upaya pemerataan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.

Penanaman modal yang dapat diberikan fasilitas PPh harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

1) Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, penanaman modal memiliki nilai investasi tertentu atau menghasilkan produk yang minimal 30% untuk tujuan ekspor;
2) Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, penanaman modal menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dalam jumlah tertentu;
3) Memiliki kandungan lokal (TKDN) yang tinggi, penanaman modal memiliki penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam proses produksinya.

Bidang-bidang usaha ini umumnya mencakup sektor-sektor yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, seperti industri pengolahan tertentu, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan jasa. Fasilitas ini dapat berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali untuk beberapa jenis usaha yang dikecualikan di provinsi tertentu. Untuk bidang usaha tertentu di daerah tertentu diberlakukan di wilayah yang perlu didorong pemerataan dan percepatan pembangunannya, termasuk di luar Pulau Jawa atau di kawasan timur Indonesia. Penetapan daerahnya didasarkan pada potensi ekonomi dan prioritas nasional. Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan berupa *Tax Allowance* yang meliputi:

1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, yang dibebankan selama 6 tahun (5% per tahun);
2) Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3) Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10% (atau tarif yang lebih rendah sesuai P3B/*Tax Treaty*);
4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, namun tidak lebih dari 10 tahun.

2.4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah landasan hukum penting dalam penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Mimika. Penyelenggaraan perizinan berusaha di dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha tersebut terdiri dari:

1) Perizinan berusaha berbasis risiko, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
   a) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   b) Persetujuan lingkungan; dan
   c) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
3) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi, terdiri dari sektor:
   a) Kelautan dan perikanan;
   b) Pertanian;
   c) Lingkungan hidup dan kehutanan;
   d) Energi dan sumber daya mineral;
   e) Ketenaganukliran;
   f) Perindustrian;
   g) Perdagangan;

h) Pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
i) Transportasi;
j) Kesehatan, obat dan makanan;
k) Pendidikan dan kebudayaan;
l) Pariwisata;
m) Keagamaan;
n) Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
o) Pertahanan dan keamanan; dan
p) Ketenagakerjaan.

Pemerintahan Daerah diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, pelayanan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha di daerah, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah, pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Peraturan Pemerintah ini mengatur implementasi perizinan berusaha di tingkat daerah, termasuk mekanisme pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan integrasi dengan sistem OSS sehingga prosesnya transparan, akuntabel, dan cepat.

2.4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi landasan hukum terbaru yang harus dirujuk dalam penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Mimika. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan menimbang bahwa perizinan berusaha berbasis risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. Risiko merupakan potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dilakukan melalui:

a) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan
b) Pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini bemsaha mengakomodir beberapa sektor perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatif, sektor informasi geospasial, sektor ketenagakerjaan, sektor perkoperasian, sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan sektor lingkungan hidup. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berupaya memberikan kepastian

hukum kepada Pelaku Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, dalam proses penJrusunan Peraturan Pemerintah ini melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*business process re-engineeing*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis perizinan berusaha di dalam perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

2.4.8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres ini mengatur bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan, atau tertutup untuk penanaman modal. Bagi Kabupaten Mimika, Perpres ini memberikan kepastian hukum mengenai sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk menarik investasi. Adapun kategori bidang usaha yang mendapat prioritas khusus memiliki kriteria padat karya, membawa teknologi baru, hilirisasi dengan pengolahan sumber daya alam dalam negeri, berorientasi pada peningkatan ekspor, mendukung ekonomi berkelanjutan, serta mendorong transformasi digital.

2.4.9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal menjadi rujukan hukum dalam penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Mimika. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga oss untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Penerbitan perizinan berusaha meliputi:

1) Data pelaku usaha dan data usaha;
2) Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko;
3) Penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
4) Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk UMK;
5) Perubahan data usaha;
6) Pengembangan usaha; dan
7) Penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.

Layanan fasilitas penanaman modal terdiri dari layanan fiskal dan non fiskal. Layanan fiskal meliputi:

1) Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;
2) Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
3) Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
4) Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK;
5) Fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di indonesia;
6) Pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
7) Pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Layanan fasilitas non fiskal meliputi:

1) Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
2) Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

2.4.10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum penting dalam pengaturan penanaman modal di Kabupaten Mimika. Penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah. Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas: 1) Asas kepastian hukum; 2) Keterbukaan; 3) Akuntabilitas; 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanan modal; 5) Kebersamaan; 6) Efisiensi berkeadilan; 7) Berkelanjutan; 8) Berwawasan lingkungan; 9) Kemandirian; dan 10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daeran. Penanaman modal bertujuan untuk 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 2) Menciptakan lapangan kerja; 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah; 5) Meningkatan kapasitas, kemampuan, menerapkan teknologi daerah; 6) Mendorong pengembangan ekonomi yang berkeadilan; 7) Mengelola potensi ekonomi daerah menjadi kekuatanekonomi rill; dan 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara penyelenggaraan pengawasan dan penyampaian informasi potensi daerah. Peran serta masyarakat bertujuan untuk:

1) Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
2) Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
3) Mencegah dampak negatif sebagai akibat modal; dan
4) Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

Analisis komprehensif terhadap hierarki peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki landasan hukum yang solid dan peluang besar untuk mengembangkan sistem pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang efektif. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan daerah untuk mensinergikan berbagai level regulasi dalam satu kerangka kebijakan yang koheren, implementatif, dan

berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus dan potensi unik Kabupaten Mimika.

2.5. Pemetaan Stakeholders

Pemetaan stakeholder menggunakan pendekatan *power interest grid.* Pendekatan ini menekankan pada *power* dan *interest* dalam melakukan pemetaan terhadap stakeholder. Tujuan utama *power interest grid* adalah untuk mengoptimalkan strategi manajemen stakeholder, sehingga proyek berjalan lancar dengan dukungan maksimal dan risiko minimal. Manfaat *power interest grid* adalah: 1) Prioritisasi Sumber Daya: Proyek sering kali memiliki keterbatasan waktu dan anggaran, jadi grid ini membantu fokus pada stakeholder yang paling berpengaruh; 2) Pengelolaan Risiko: untuk memahami siapa yang bisa mendukung atau menghalangi sebuah proyek; 3) Peningkatan keterlibatan: upaya untuk mengindentifikasi upaya dan strategi meningkatan partisipasi dan keterlibatan stakeholder; 4) Fleksibilitas dan Adaptasi: upaya untuk meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi stakeholder terkait. Langkah-langkah penerapan *power interest grid* adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi daftar stakeholder awal; 2) Menilai tingkat kekuasaan dan minat; 3) Plot stakeholders di grid; 4) Penentuan strategi setiap kuadran; dan 5) Pemetaan stakeholder IRPO Kopi Mimika.

2.5.1. Identifikasi Daftar Stakeholder Awal

Identifikasi daftar stakeholder awal untuk mengindentifikasi pemangku kepentingan awal yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan IPRO Kopi Mimika. Berikut ini adalah identifikasi daftar stakeholder awal IPRO Kopi Mimika.

Tabel 2.6
Identifikasi Daftar Stakeholder Awal IPRO Kopi Mimika

Stakeholder	Nama	Kepentingan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	DPMPTSP	1) Fasilitasi penyelanggaraan penanaman modal; 2) Promosi peluang investasi; 3) Fasilitasi dan koordinasi lintas OPD dalam pelayanan terpadu; 4) Fasilitasi perizinan berusaha; 5) Fasilitasi insentif dan kemudahan berusaha.
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1) Perizinan industri; 2) Promosi produk kopi ke pasar domestik, regional, dan global; 3) Fasilitasi perencanaan pengembangan industri.
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan pabrik pengolahan kopi; 2) Penguatan infrastruktur konektvitas dari sumber-sumber bahan baku produksi kopi;
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1) Pengembangan komoditas kopi; 2) Penguatan hilirisasi komodiatas kopi;

Stakeholder	Nama	Kepentingan
		3) Peningkatan kualitas SDM perani.
	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	1) Penyediaan calon tenaga kerja terampil; 2) Pelatihan calon tenaga kerja.
	Dinas Lingkungan Hidup	1) Pengawasan aspek lingkungan dan keberlanjutan; 2) Fasilitasi izin pengelolaan lingkungan.
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Keselerasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2) Koordinasi dengan OPD teknis terkiat sinkronisasi program dan kegiatan dalam mendukung IPRO Komoditas Kopi
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1) Mempromosikan komoditas kopi sebagai produk wisata; 2) Memberdayakan pemuda sebagai petani kopi modern.
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1) Fasilitasi perizinan berusaha dengan pemerintah kampung/desa; 2) Fasilitasi komunikasi dengan masyarakat kampung/desa
	Dinas Perhubungan	1) Fasilitasi dan koordinasi angkutan barang selama proses pembangunan pabrik; 2) Fasilitasi pengangkutan bahan baku kopi.
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah	DPMPTSP Provinsi Papua Tengah	1) Fasilitasi promosi dan penawaran IPRO kepada calon investor; 2) Fasilitasi perizinan berusaha
Pemerintah Nasional	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	1) Fasilitasi promosi dan penawaran IPRO kepada calon investor
Petani dan Distributor	Petani kopi Mimika	1) Memastikan ketersediaan bahan baku biji kopi; 2) Meningkatkan kualitas biji kopi sesuai standar.
	Distributor kopi Mimika	1) Megindentifikasi sumber bahan baku kopi di sekitar Mimika dan wilayah lain; 2) Mengindentifikasi potensi pasar produk kopi.
Pelaku Usaha	Pemilik usaha caffe di Mimika	1) Stabilisasi harga bahan pokok; 2) Pengembangan ekonomi lokal.
	Pemilik usaha oleh-oleh di Mimika	1) Identifikasi branding kopi untuk oleh-oleh; 2) Identifikasi potensi pasar.

Stakeholder	Nama	Kepentingan
Perusahaan	PT Freeport Indonesia	1) Pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial dan lingkungan; 2) Penguatan citra perusahaan;
Lembaga Masyarakat	Lembaga Adat Suku Amungme	1) Pemberdayaan komunitas adat; 2) Fasilitasi mekanisme pelepasan/penyewaan tanah ulayat
	Lembaga Adat Suku Kamoro	1) Pemberdayaan komunitas adat; 2) Fasilitasi mekanisme pelepasan/penyewaan tanah ulayat.
	LSM/NGO	1) Pemberdayaan masyarakat 2) Peningkatan kesejahterana masyarakat 3) Penguatan ekonomi lokal

Sumber: Olahan dan Analisis Tim, 2025

2.5.2. Penilaian Tingkat Kekuasaan dan Minat

Penilaian tingkat kekuasaan akan menggunakan tiga skala yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan skala tersebut berdasarkan beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Penentuan Tingkat Kekuasaan (*Power*)

Indikator	Penjelasan
Kewenangan formal	Stakeholder punya posisi resmi, regulasi, atau mandat yang dapat mengubah keputusan
Kontrol terhadap sumber daya	Anggaran, tanah, bahan baku, tenaga kerja, peralatan, aset strategis.
Kontrol terhadap informasi	Akses informasi penting atau sensitif yang memengaruhi proyek
Kemampuan memobilisasi dukungan atau penolakan	Dukungan masyarakat, komunitas adat, asosiasi, atau jaringan sosial
Kemampuan memberikan izin atau menghentikan proyek	Izin teknis, izin lokasi, rekomendasi kebijakan, kewenangan pengawasan.
Dampak mereka terhadap legitimasi proyek	Dampak terhadap keberlangsungan proyek

Sumber: Power-Interest Grid, 2022

Berdasarkan indikator penilaian di atas, berikut ini merupakan identifikasi dan penentuan tingkat kekuasaan stakeholder terkait pengembangan IPRO Kopi di Kabupaten Mimika.

Tabel 2.8
Identifikasi Tingkat Kekuasaan (*Power*) Stakeholder

Stakeholder	Nama	Skala Power
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	DPMPTSP	**Tinggi**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Tinggi**

Stakeholder	Nama	Skala Power
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Tinggi**
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	**Tinggi**
	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	**Tinggi**
	Dinas Lingkungan Hidup	**Tinggi**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tinggi**
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	**Tinggi**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	**Tinggi**
	Dinas Perhubungan	**Tinggi**
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah	DPMPTSP Provinsi Papua Tengah	**Tinggi**
Pemerintah Nasional	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	**Tinggi**
Petani dan Distributor	Petani kopi Mimika	**Tinggi**
	Distributor kopi Mimika	**Tinggi**
Pelaku Usaha	Pemilik usaha caffe di Mimika	**Tinggi**
	Pemilik usaha oleh-oleh di Mimika	**Tinggi**
Perusahaan	PT Freeport Indonesia	**Sedang**
Lembaga Masyarakat	Lembaga Adat Suku Amungme	**Tinggi**
	Lembaga Adat Suku Kamoro	**Tinggi**
	LSM/NGO	**Rendah**

Sumber: Olahan dan Analisis Tim, 2025

Penilaian tingkat minat akan menggunakan tiga skala yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan skala tersebut berdasarkan beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Indikator Penentuan Tingkat Minat (*Interest*)

Indikator	Penjelasan
Dampak langsung	Stakeholder terdampak secara ekonomi, sosial, dan operasional
Kepentingan terhadap hasil proyek	Manfaat proyek
Keterlibatan rutin	Intensitas keterlibatan dalam proyek
Motivasi personal atau institusional	Keselerasaan tujuan personal dan institusi dengan proyek
Ekspektasi terhadap proyek	Proyek akan memberikan keuntungan strategis
Ekspektasi terhadap proyek	Potensi risiko kegagalan proyek

Sumber: Power-Interest Grid, 2022

Berdasarkan indikator penilaian di atas, berikut ini merupakan identifikasi dan penentuan tingkat minat stakeholder terkait pengembangan IPRO Kopi di Kabupaten Mimika.

Tabel 2.10
Identifikasi Tingkat Minat (*Interest*) Stakeholder

Stakeholder	Nama	Skala Interest
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika	DPMPTSP	**Tinggi**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Tinggi**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Tinggi**
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	**Tinggi**
	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	**Tinggi**
	Dinas Lingkungan Hidup	**Tinggi**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tinggi**
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	**Tinggi**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	**Tinggi**
	Dinas Perhubungan	**Tinggi**
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah	DPMPTSP Provinsi Papua Tengah	**Tinggi**
Pemerintah Nasional	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	**Tinggi**
Petani dan Distributor	Petani kopi Mimika	**Tinggi**
	Distributor kopi Mimika	**Tinggi**
Pelaku Usaha	Pemilik usaha caffe di Mimika	**Tinggi**
	Pemilik usaha oleh-oleh di Mimika	**Tinggi**
Perusahaan	PT Freeport Indonesia	**Sedang**
Lembaga Masyarakat	Lembaga Adat Suku Amungme	**Tinggi**
	Lembaga Adat Suku Kamoro	**Tinggi**
	LSM/NGO	**Sedang**

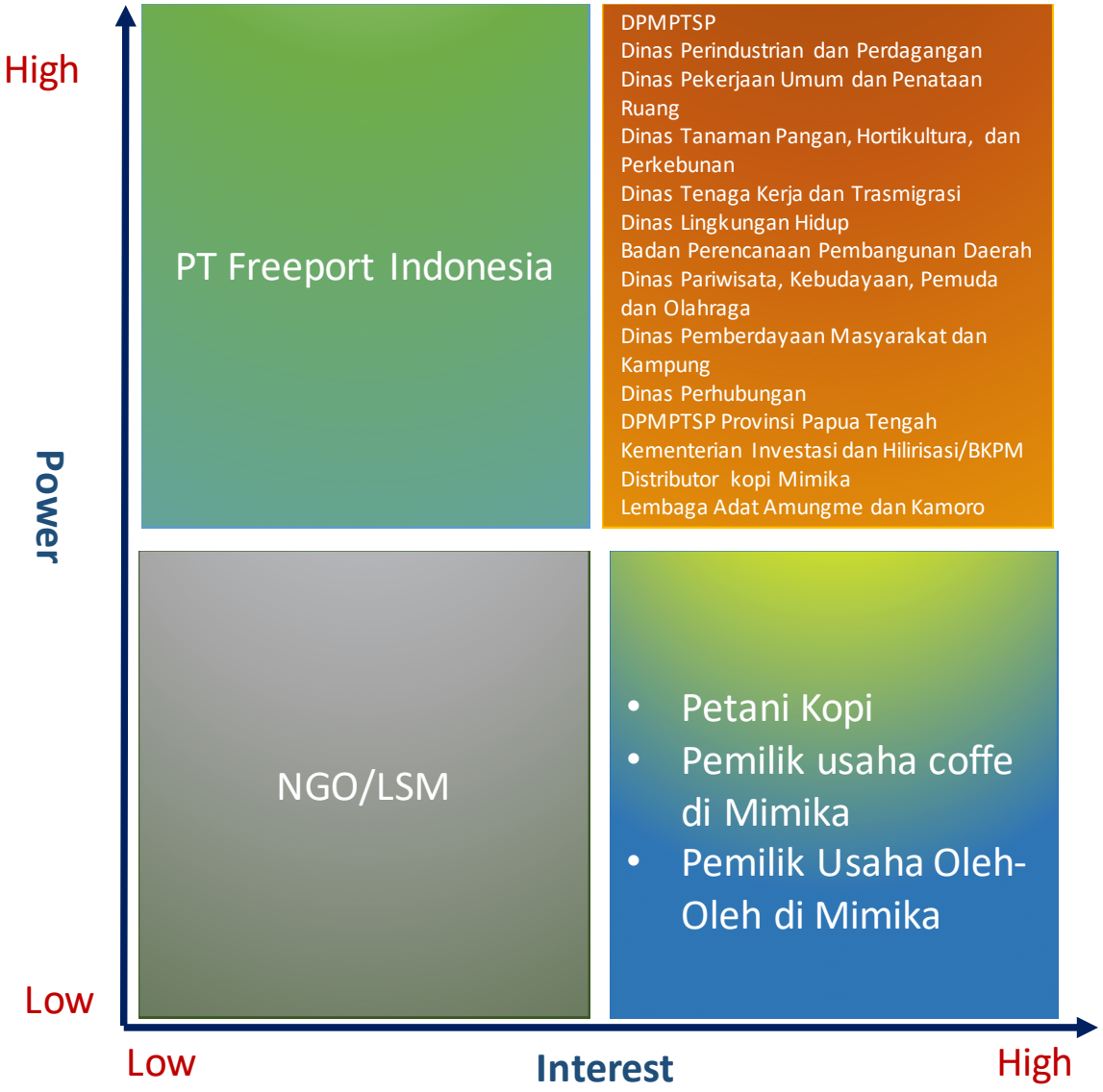
Sumber: Olahan dan Analisis Tim, 2025

Penentuan skala kekuasaan dan minat tersebut menjadi dasar untuk menentukan plot stakeholder pada masing-maisng kuadran sesuai dengan tingkal skala kekuasaan dan minat.

2.5.3. Plot Stakeholder

Analisis ini menggambarkan posisi para stakeholder dalam pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika dengan menggunakan kerangka *power–interest grid*. Pemetaan tersebut menempatkan setiap stakeholder berdasarkan tingkat kekuasaan yang mereka miliki untuk memengaruhi program serta tingkat minat mereka terhadap keberhasilan

implementasinya. Hasil plot ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kelompok yang perlu dikelola secara dekat, dipertahankan keterlibatannya, dijaga informasinya, atau dipantau secara berkala, sehingga pengambilan keputusan dan strategi komunikasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Berikut ini merupakan pemetaan plot stakeholder dalam pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika.



Gambar 2.25.
Plot Stakeholder
Sumber: Olahan dan Analisis Tim, 2025

BAB



Aspek Teknis

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Mimika

3.1.1. Kondisi Geografis

a) Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°31' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah barat : Provinsi Papua Barat
- Bagian timur : Kabupaten Nduga
- Bagian selatan : Laut Arafuru
- Bagian utara : Kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Puncak



Gambar 3.1.
Peta Administrasi Kabupaten Mimika

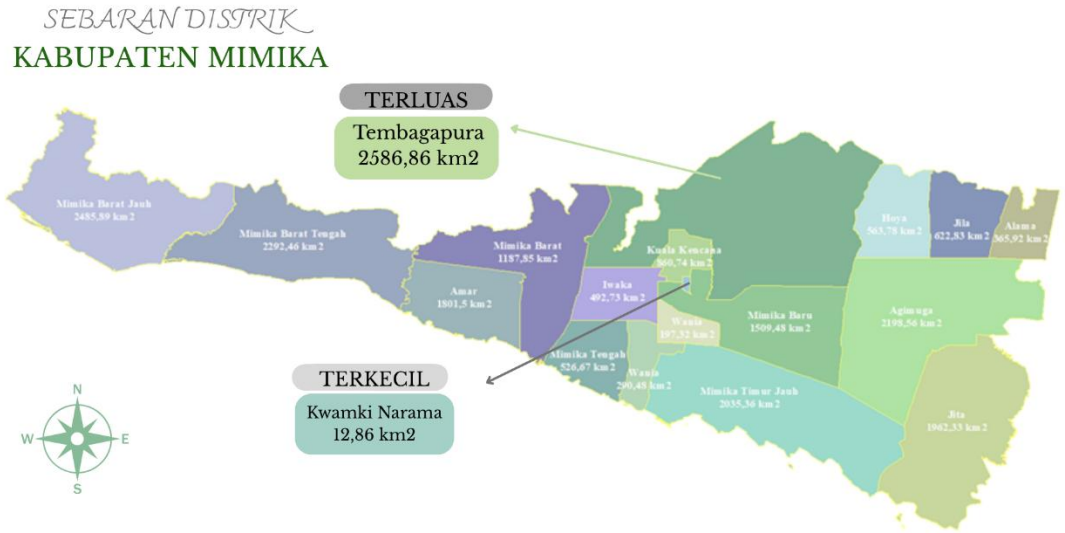
Tabel 3.1.
Sebaran Distrik, ibu kota, Luas wilayah, dan persentase

Distrik	Ibu Kota	Luas wilayah (Km2)	Persentase
Agimuga	Kiliarma	2.198,56	10,00
Amar	Amar	1.801,50	8,19
Alama	Alama	365,92	1,66
Hoya	Hoya	563,78	2,56
Iwaka	Iwaka	492,73	2,24
Jila	Jila	622,83	2,83
Jita	Sempan Timur	1.962,33	8,92
Kuala Kencana	Kuala Kencana	860,74	3,91
Kwamki Narama	Kwamki Narama	12,86	0,06
Mimika Barat	Kokonao	1.187,85	5,40
Mimika Barat Jauh	Potoway Buru	2.485,89	11,30
Mimika Barat Tengah	Kapiraya	2.292,46	10,42
Mimika Baru	Timika	1.509,48	6,86
Mimika Tengah	Atuka	526,67	2,39
Mimika Timur	Mapuru Jaya	290,48	1,32

Distrik	Ibu Kota	Luas wilayah (Km2)	Persentase
Mimika Timur Jauh	Manasari	2.035,36	9,25
Tembagapura	Tembagapura	2.586,86	11,76
Wania	Kamoro Jaya	197,32	0,90
KABUPATEN MIMIKA		**21.693,51**	**100**

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas bisa, maka luas wilayah Distrik Kwamki Narama merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil, yaitu 12,89 Km² atau 0,06% dari total wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan Distrik dengan luas wilayah terbesar adalah distrik Tembagapura dengan luas wilayah 2.586,86 Km² atau 11,76% dari total wilayah Kabupaten Mimika, jauh lebih luas dari Distrik Kwamki Narama.



Gambar 3.2.
Peta Sebaran Distrik Kabupaten Mimika

Pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Mimika didominasi oleh Kampung, yang totalnya mencapai 133 unit, sedangkan Kelurahan berjumlah 19 dan terpusat di delapan Distrik. Distrik Mimika Tengah muncul sebagai pusat urban utama dengan kepemilikan 11 Kelurahan, menjadikannya Distrik dengan total unit administrasi terbanyak (16 unit). Sebaliknya, Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Timur Jauh adalah yang paling sedikit unitnya, masing-masing hanya terdiri dari 5 Kampung, yang menunjukkan karakteristik wilayah yang lebih rural atau pedalaman. Pola ini memperlihatkan adanya konsentrasi pembangunan perkotaan yang sangat signifikan di beberapa Distrik tertentu di Kabupaten Mimika. Berikut tabel jumlah kampung di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.2.
Jumlah Kampung Kabupaten Mimika di setiap Distrik

Distrik	Jumlah	
	Kelurahan	Kampung
Agimuga	-	8
Amar	-	6
Alama	-	11
Hoya	-	6
Iwaka	-	7
Jila	-	12
Jita	-	10
Kuala Kencana	2	8
Kwamki Narama	1	9
Mimika Barat	-	7
Mimika Barat Jauh	-	5
Mimika Barat Tengah	-	9
Mimika Baru	11	3
Mimika Tengah	-	5
Mimika Timur	1	5
Mimika Timur Jauh	-	5
Tembagapura	1	13
Wania	3	4
KABUPATEN MIMIKA	**19**	**133**

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Dengan sebaran 133 Kampung yang mencakup hampir seluruh Distrik, jelas bahwa unit administrasi terkecil ini memegang peran vital dalam struktur pemerintahan Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap Kampung, terutama yang berada di Distrik terpencil seperti Jila (12 Kampung) dan Tembagapura (13 Kampung), mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang merata menjadi kunci utama bagi tercapainya pembangunan inklusif di Mimika.

b) Topografi Kabupaten Mimika

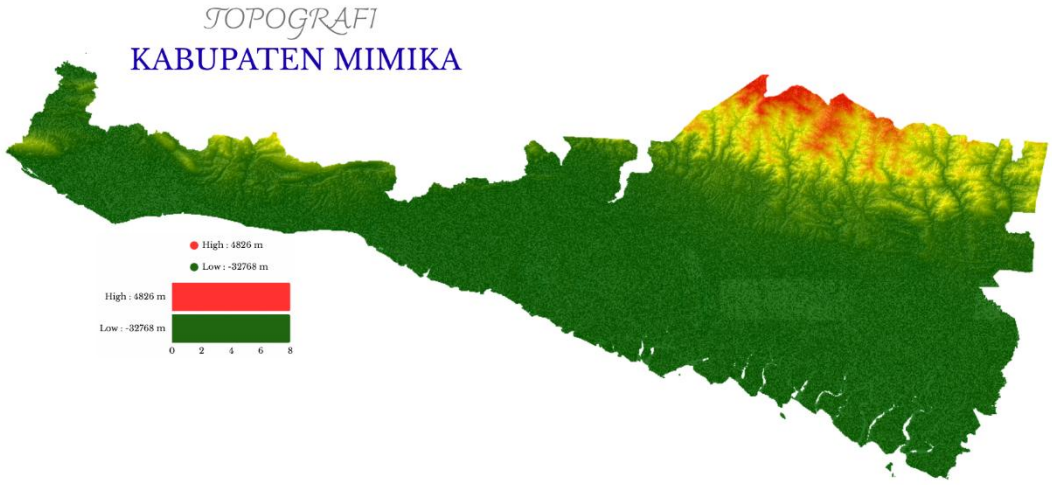
Keberagaman topografi di Kabupaten Mimika menciptakan perbedaan ketinggian yang signifikan antar distrik. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga Distrik tersebut merupakan Distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah yaitu: Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana, Distrik Tembagapura dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, dan Jita merupakan sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

Tabel 3.3.
Tinggi Wilayah Kabupaten Mimika Menurut Kecamatan

No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Tinggi (mdpl)
1	Agimuga	Kiliarma	500
2	Amar	Amar	4
3	Alama	Alama	2800

No	Distrik	Ibu Kota Distrik	Tinggi (mdpl)
4	Hoya	Hoya	2800
5	Iwaka	Iwaka	40
6	Jila	Jila	2800
7	Jita	Sempan Timur	400
8	Kuala Kencana	Kuala Kencana	13
9	Kwamki Narama	Kwamki Narama	40
10	Mimika Barat	Kokonao	4
11	Mimika Barat	Jauh Potowayburu	2
12	Mimika Barat	Tengah Kapiraya	2
13	Mimika Baru	Timika	40
14	Mimika Tengah	Arua	5
15	Mimika Timur	Mapuru Jaya	10
16	Mimika Timur	Jauh Ayuka	5
17	Tembagapura	Tembagapura	1900
18	Wania	Kamoro Jaya	30

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

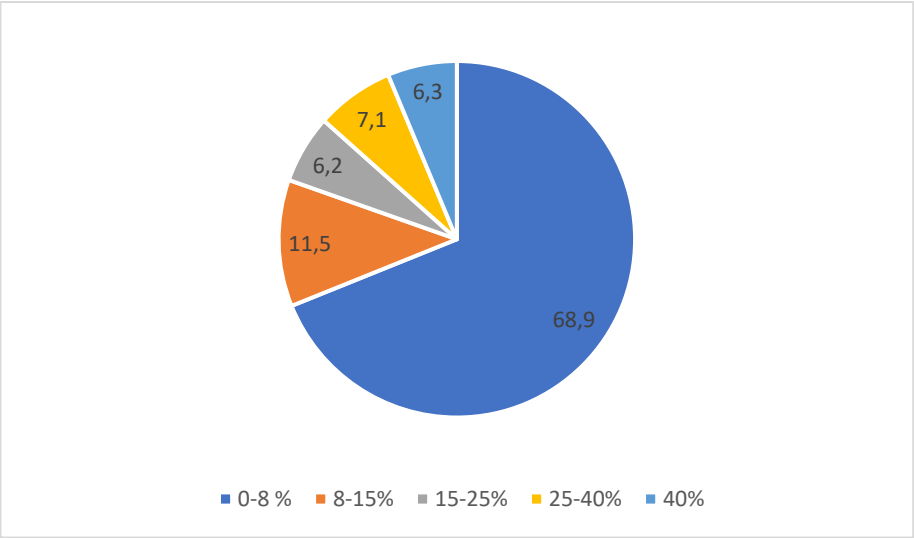


Gambar 3.3.
Peta Topografi Kabupaten Mimika

Dualitas geografis di Kabupaten Mimika menciptakan tantangan logistik sekaligus potensi unik. Pesisir Laut Arafura menawarkan potensi besar bagi sektor kelautan dan transportasi, mengingat kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu wilayah penangkapan ikan terbaik di Indonesia. Sementara itu, zona dataran tinggi menyediakan **zona agrikultur ideal** untuk komoditas unggulan tertentu, seperti kopi Arabika *specialty*, menjadikannya wilayah yang sangat strategis dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan komoditas berbasis keunggulan komparatif. Oleh karena itu, investasi pada komoditas kopi bukan sekadar upaya diversifikasi, melainkan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi lahan yang unik ini, memastikan bahwa Mimika tidak hanya dikenal sebagai pusat pertambangan, tetapi juga sebagai **penghasil biji kopi *single origin* berkualitas premium** yang mampu bersaing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.

c) Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika

Secara topografis Kabupaten Mimika mempunyai wilayah yang cukup bervariasi, terdiri dari daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 5.000 m di atas permukaan laut (mdpl). Bahkan dari segi morfologi wilayah di Kabupaten Mimika terdapat wilayah dengan kategori bukit terjal. Topografi dataran rendah dan pantai terdapat di beberapa distrik di Kabupaten Mimika dan pada umumnya merupakan endapan sedimen sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Menurut dokumen Kajian Lingkungan RTRWK Mimika, kelas kemiringan yang digunakan adalah 0-8 % (datar), 8-15 % (landai), 15-25 % (agak curam), 25-40 % (curam), dan >40 % (sangat curam).



Gambar 3.4.
Kategori Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika
Sumber: Dokumen KLHS/RTRW Kabupaten Mimika

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mimika berada pada kelas kemiringan datar hingga landai dengan proporsi 68,9%. Kondisi ini mencerminkan dominasi bentang lahan pesisir dan dataran rendah pada wilayah Mimika. Sementara itu, kelas lereng menengah hingga sangat curam yang berjumlah sekitar 31% umumnya berada pada zona transisi menuju Pegunungan Tengah dan area pegunungan di bagian timur. Sebaran variasi lereng ini menunjukkan perbedaan karakteristik fisik wilayah yang membentuk pola topografi Mimika secara keseluruhan.

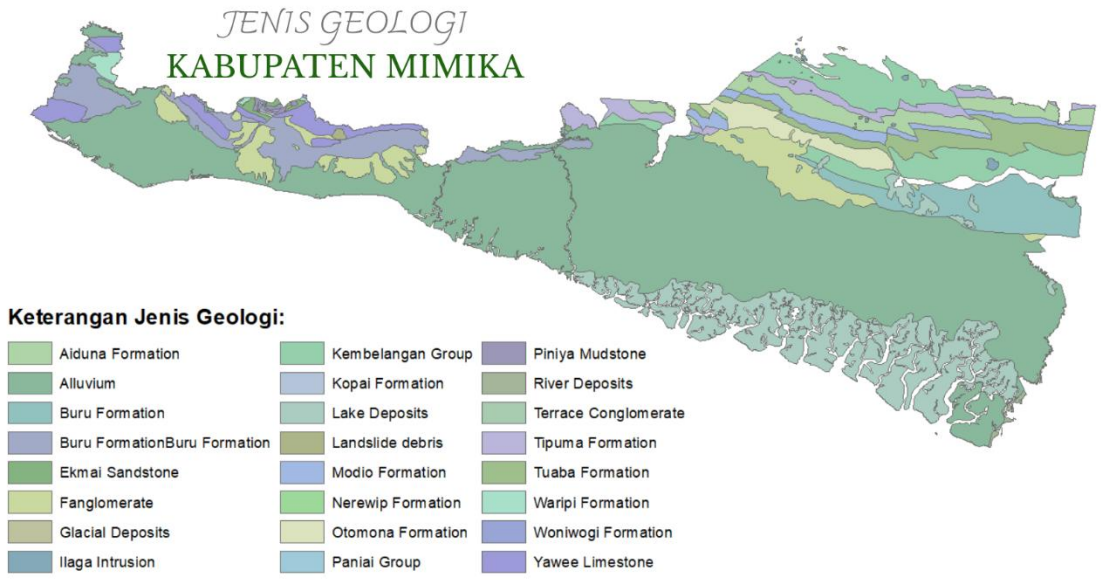
d) Kondisi Geologi Kabupaten Mimika

Kondisi geologi di Kabupaten Mimika terdapat beberapa jenis batuan. Setidaknya ada 25 jenis batuan yang tersebar di Kabupaten Mimika, namun yang dominan adalah jenis batuan alluvium. Batuan ini tersebar banyak karena melihat keadaan geografis Kabupaten Mimika yang memiliki banyak aliran sungai. Batuan aluvium ini merupakan batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungai-sungai. Batuan ini dapat kita lihat di tepi-tepi sungai di muara sungai, misalnya pasir dan tanah di tepi sungai.

Tabel 3.4.
Kondisi Geologi Kabupaten mimika

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Alluvium Terbiku	10,680.75	0.49%
2	Aluvium	969,920.85	44.71%
3	Batuan Malihan Derewo	57,475.11	2.65%

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
4	Batugamping Yawee	90,205.23	4.16%
5	Batulumpur Piniya	7,926.44	0.37%
6	Batupasir Emkai	23,398.27	1.08%
7	Batupasir Woniwogi	1,442.20	0.07%
8	Dolomit Modio	35,306.11	1.63%
9	Endapan Aliran Rombakan	2,912.05	0.13%
10	Endapan Aluvium Dan Litoral	635.35	0.03%
11	Endapan Danau	268,358.19	12.37%
12	Endapan Glasial	2,390.05	0.11%
13	Fanglomerad	2,563.04	0.12%
14	Formasi Otomona	33,712.56	1.55%
15	Formasi Tuaba	62,450.02	2.88%
16	Formasi Aiduna	125,605.36	5.79%
17	Formasi Buru	211,499.75	9.75%
18	Formasi Kopai	4,929.48	0.23%
19	Formasi Tipuma	68,819.30	3.17%
20	Formasi Waripi	14,521.20	0.67%
21	Hancuran Tanah Longsor	5,714.64	0.26%
22	Intrusi Ilaga	2,341.86	0.11%
23	Kelompok Besar Batugamping New Guinea, Tidak Terpisahkan	12,113.10	0.56%
24	Kelompok Kembelangan	19,739.28	0.91%
25	Kelompok Paniai	34,140.58	1.57%
26	Kipas Aluvium	99,391.14	4.58%
Jumlah		**2.169.350,92**	**100%**



Gambar 3.5.
Peta Jenis Geologi Kabupaten Mimika

Kondisi geologi Kabupaten Mimika menunjukkan keragaman jenis batuan dengan dominasi batuan aluvium yang terbentuk dari proses endapan sungai. Persebaran batuan ini dipengaruhi oleh banyaknya aliran sungai yang melintasi wilayah dataran rendah hingga pesisir. Selain aluvium, wilayah pegunungan Mimika juga tersusun atas batuan tua hasil aktivitas tektonik dan intrusi magma. Keberagaman geologi ini berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam serta karakteristik lahan yang mendukung kegiatan pertanian, permukiman, dan pertambangan

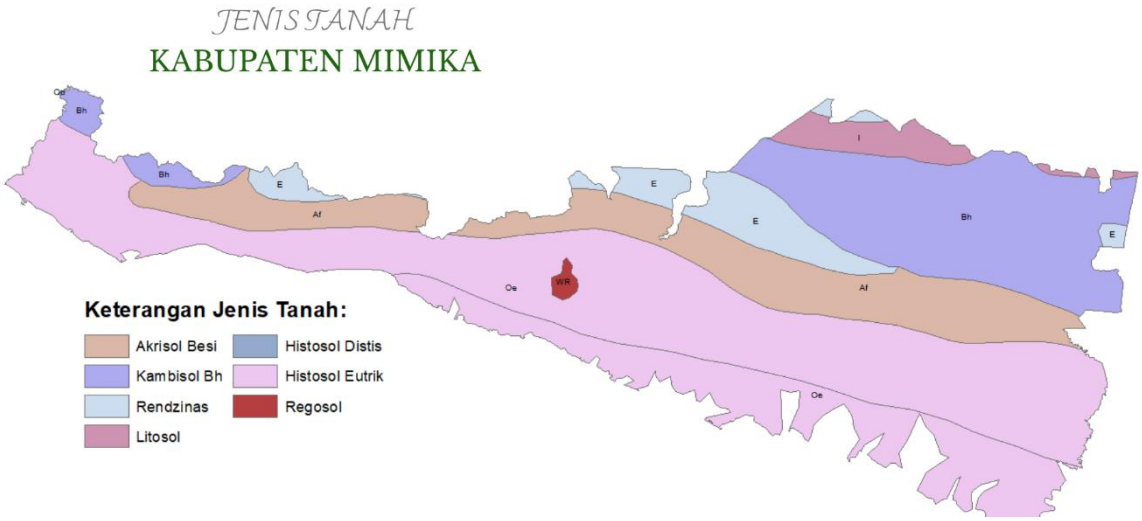
e) Jenis Tanah Kabupaten Mimika

Jenis tanah di Kabupaten Mimika memiliki keragaman jenis tanah yang dipengaruhi oleh kondisi topografi yang ekstrem, mulai dari dataran rendah yang berawa hingga pegunungan tinggi bersalju. Pembagian jenis tanah ini sangat krusial karena memengaruhi potensi pertanian, infrastruktur, dan lingkungan. Jenis tanah di Kabupaten Mimika umumnya merupakan hasil lapukan batuan dasar sebagai *residual soil* dan *transported soil.* Tanah di wilayah ini juga dapat dikelompokkan menjadi tanah Alluvial, dengan tekstur halus hingga kasar dan tanah gambut. Jenis tanah Alluvial tersusun dari Podsolik merah kuning dengan sebaran yang hampir merata di seluruh wilayah kabupaten. Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Litosol dan Tanah Glei dengan luasan masing-masing sekitar 41,7% dan 43,2% dari luas total wilayah. Luasan masing-masing jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Jenis Tanah Kabupaten Mimika

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Litosol	904.731	41,7
2	Mediteran	77.059	3,6
3	Podsolik	55.081	2,5
4	Renzina	194.979	9,0
5	Tanah Glei	935.602	43,2
Total		**2.167.451**	**100,0**

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika 2011-2031



Gambar 3.6.
Tanah Kabupaten Mimika

3.1.2. Kondisi Iklim

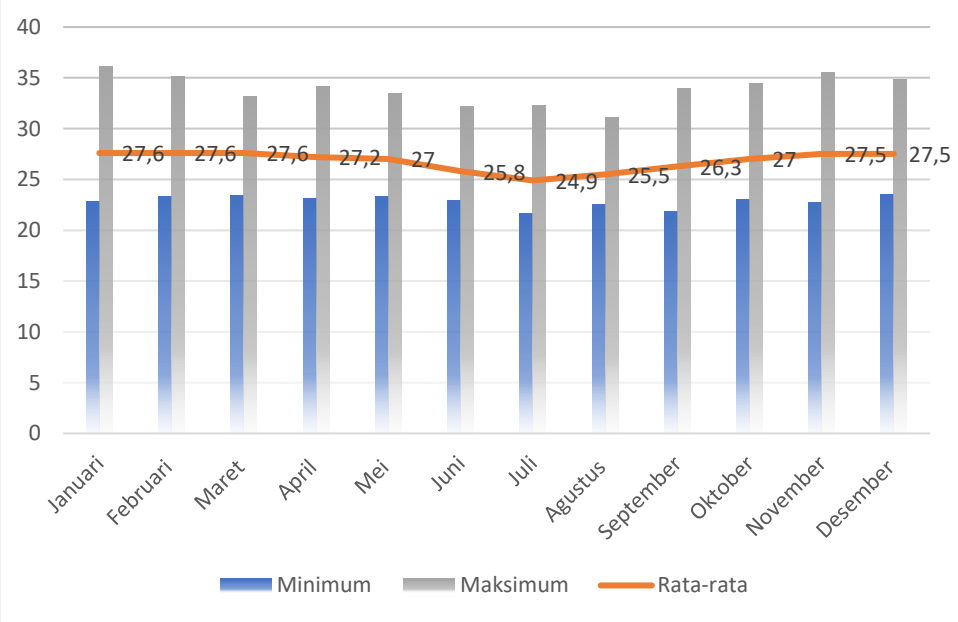
Kondisi iklim suatu wilayah merupakan rata-rata cuaca jangka panjang yang sangat dipengaruhi oleh topografi. Hal ini terlihat jelas di Kabupaten Mimika yang memiliki beragam dataran tinggi dan dataran rendah. Berdasarkan pengamatan unsur-unsur iklim oleh BMKG

pada tahun 2024, Mimika menunjukkan iklim yang cenderung sangat lembab. Data menunjukkan suhu udara rata-rata adalah 26,7 C (dengan rentang antara 21,6◦C dan 36,1◦C) mengindikasikan karakteristik wilayah tropis dataran rendah. Namun, faktor yang paling menonjol adalah tingkat curah hujan ekstrem; curah hujan tahunan mencapai 6.672 mm yang jatuh hampir sepanjang tahun, dibuktikan dengan 274 hari hujan dalam setahun. Tingginya angka hujan ini secara langsung menyebabkan kelembaban udara yang sangat tinggi, rata-rata 87,8%. Meskipun demikian, wilayah ini masih menerima rata-rata penyinaran matahari yang cukup, yaitu sekitar 107 jam per bulan, dan kondisi angin serta tekanan udara relatif stabil.

a) Suhu Kabupaten Mimika Tahun 2024

Suhu merupakan parameter fisik yang mengukur tingkat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan, biasanya dinyatakan dalam satuan Celsius, Fahrenheit, atau Kelvin. Secara ilmiah, suhu memengaruhi berbagai proses alam dan biologis, seperti laju reaksi kimia, pertumbuhan organisme, dan distribusi iklim global. Dalam konteks geografi, variasi suhu antarwilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketinggian, jarak dari khatulistiwa, dan pola angin. Pemahaman mendalam tentang suhu penting untuk analisis ekosistem, pertanian, dan perubahan iklim, karena fluktuasinya dapat berdampak signifikan pada produktivitas lahan dan kehidupan manusia.

Secara umum, data suhu Kabupaten Mimika menunjukkan iklim tropis yang stabil dengan suhu rata-rata tahunan mencapai 26.79 °C Suhu ini, dengan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 24.9 °C (Juli) hingga 27.6 °C (Januari, Februari, Maret), berada pada rentang yang sangat ideal dan optimal untuk budidaya Kopi Robusta. Syarat tumbuh ideal Robusta adalah suhu rata-rata harian sekitar 24 °C hingga 30 °C Fluktuasi suhu minimum (21.6°C) dan maksimum (36.1°C) menunjukkan bahwa daerah ini kemungkinan besar berada di ketinggian yang relatif rendah atau menengah. Meskipun puncak suhu maksimum 36.1°C di bulan Januari mendekati batas toleransi tinggi kopi Robusta (yang dapat menyebabkan stres pada tanaman), sebagian besar waktu, kondisi suhu sangat mendukung pertumbuhan vegetatif dan produksi Robusta. Berikut data suhu Kabupaten Mimika Tahun 2024



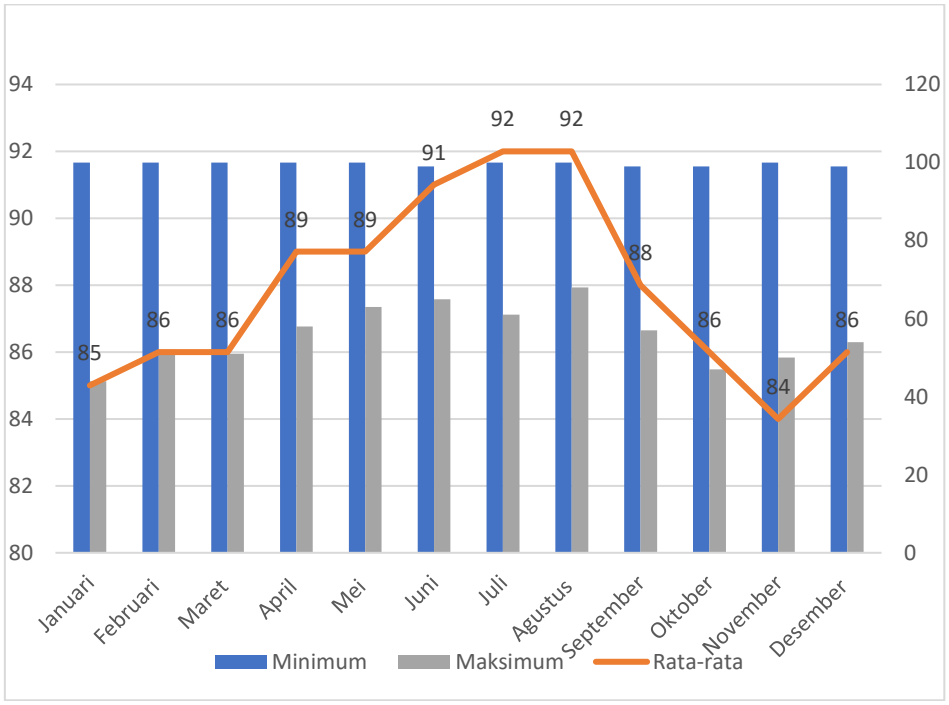
Gambar 3.7.
Grafik Suhu (°C) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Namun, untuk komoditas Kopi Arabika, kondisi suhu Mimika ini secara keseluruhan kurang sesuai karena terlalu hangat. Kopi Arabika idealnya tumbuh pada suhu rata-rata

harian yang lebih sejuk, yaitu antara 15 °C hingga 24 °C yang umumnya ditemukan di dataran tinggi. Menanam Arabika pada suhu rata-rata 26.79 °C akan mempercepat pematangan buah secara prematur, mengurangi kandungan asam, dan berpotensi menurunkan kualitas cita rasa (kopi menjadi "kosong" atau hambar), serta meningkatkan kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit. Kesimpulannya, berdasarkan data suhu ini, investasi pada Kopi Robusta memiliki prospek yang jauh lebih baik di sebagian besar wilayah Kabupaten Mimika, kecuali jika data ini diambil dari lokasi spesifik yang sangat rendah atau jika ada potensi pengembangan Robusta di dataran rendah atau Arabika di dataran tinggi Mimika yang memiliki suhu jauh lebih sejuk.

b) Kelembapan Kabupaten Mimika Tahun 2024

Secara umum, data kelembapan udara (RH) Kabupaten Mimika pada tahun 2025 menunjukkan kondisi sangat lembap (humid) sepanjang tahun, yang merupakan ciri khas iklim tropis. Rata-rata kelembapan udara tahunan yang tercatat mencapai 87.83%, dengan nilai minimum harian yang hampir selalu berada pada titik jenuh air (99% hingga 100%). Stabilitas kelembapan ini mengindikasikan bahwa Mimika mengalami sedikit defisit air di udara, bahkan pada siang hari. Periode paling lembap terjadi pada bulan Juli dan Agustus dengan rata-rata kelembapan mencapai 92%, selaras dengan periode suhu udara rata-rata terendah. Sebaliknya, periode yang sedikit lebih kering terjadi pada bulan Januari dan November (masing-masing 85%dan 84%), yang bersamaan dengan puncak suhu udara maksimum. Meskipun demikian, nilai kelembapan maksimum harian yang tercatat sangat rendah (berkisar antara 44% hingga 68%) menunjukkan adanya variasi diurnal (siang-malam) yang ekstrem. Kelembapan yang anjlok di siang hari (terutama pada Januari, 44%) dapat menyebabkan peningkatan transpirasi dan cekaman kekeringan fisiologis pada tanaman.

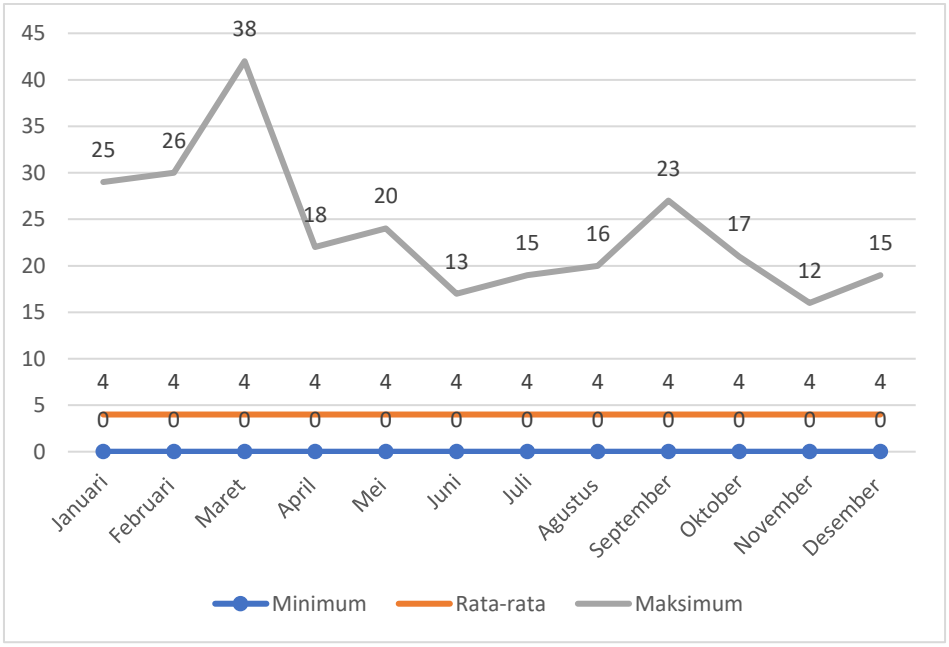


Gambar 3.8.
Grafik Kelembapan Udara (%) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Tingkat kelembapan udara rata-rata tahunan di Kabupaten Mimika bersifat optimal secara fisiologis bagi Kopi Robusta, namun tingginya angka minimum (mendekati saturasi) dan rata-rata kelembapan secara keseluruhan menuntut implementasi manajemen penyakit tanaman dan strategi pengeringan pascapanen yang ketat untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi kopi.

c) Kecepatan Angin Kabupaten Mimika Tahun 2024

Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memiliki potensi agrikultur yang menarik, salah satunya adalah komoditas kopi. Dalam mengidentifikasi kelayakan budidaya kopi di wilayah ini, salah satu faktor iklim mikro yang krusial untuk dipertimbangkan adalah kecepatan angin. Kecepatan angin yang optimal sangat penting karena dapat memengaruhi berbagai proses fisiologis tanaman kopi, mulai dari laju transpirasi dan penyerapan hara hingga risiko kerusakan fisik pada bunga dan buah. Angin yang terlalu kencang dapat menyebabkan gugur bunga atau *wind burn* pada daun, sementara angin yang terlalu pelan dapat meningkatkan kelembapan mikro, yang berpotensi memicu penyakit jamur. Oleh karena itu, analisis data kecepatan angin rata-rata, arah, dan variabilitasnya di sentra-sentra produksi kopi potensial di Mimika menjadi langkah awal yang vital untuk memproyeksikan kesesuaian lahan dan merumuskan strategi perlindungan tanaman yang tepat guna. Berikut data kecepatan angin dalam 1 tahun:



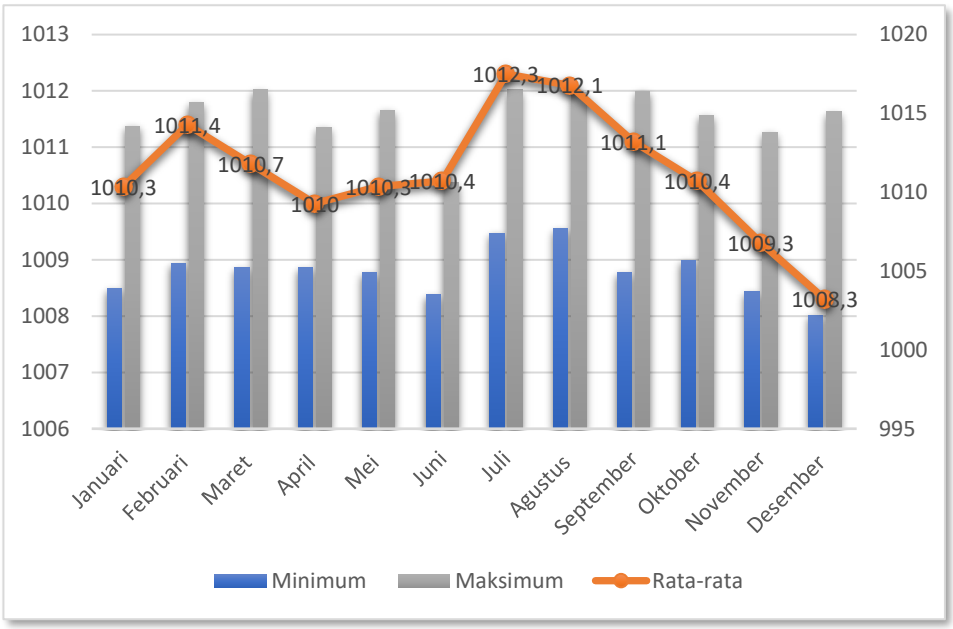
Gambar 3.9.
Grafik Kecepatan Angin (Knot) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Dengan memperhatikan data kecepatan angin maksimum bulanan, budidaya kopi di Kabupaten Mimika menghadapi tantangan signifikan terutama pada **Bulan Maret** ketika kecepatan angin mencapai puncaknya hingga 38 knot, yang berpotensi menyebabkan kerusakan fisik parah, patah cabang, rontok daun, dan gugur bunga pada tanaman kopi. Meskipun terdapat risiko menengah pada bulan-bulan lain seperti Januari, Februari, dan September, periode Juni hingga Desember (dengan pengecualian September) menunjukkan kecepatan angin yang relatif lebih rendah, memberikan kondisi yang lebih kondusif bagi perkembangan buah dan panen. Oleh karena itu, keberhasilan komoditas kopi di Mimika sangat bergantung pada implementasi sistem **pohon pelindung (windbreak)** yang efektif, terutama untuk memitigasi dampak angin kencang ekstrem yang terjadi di awal tahun tanam.

d) Tekanan Udara Kabupaten Mimika Tahun 2024

Faktor iklim seperti tekanan udara memainkan peran penting dalam menentukan kesesuaian ekologis suatu wilayah untuk budidaya komoditas kopi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tekanan udara, yang secara langsung berkorelasi dengan ketinggian (elevasi), sangat memengaruhi suhu, kelembapan, dan komposisi gas atmosfer, termasuk

konsentrasi oksigen dan karbon dioksida yang krusial untuk proses fotosintesis dan respirasi tanaman kopi. Umumnya, varietas kopi Arabika memerlukan tekanan udara yang lebih rendah, yang ditemukan pada ketinggian yang lebih tinggi (>1000 meter di atas permukaan laut), kondisi yang ideal untuk akumulasi rasa dan aroma premium karena proses pematangan buah yang lebih lambat . Sebaliknya, tekanan udara yang lebih tinggi di dataran rendah Mimika cenderung lebih cocok untuk varietas Robusta. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi kopi di Mimika, perlu diidentifikasi zona-zona ketinggian spesifik dengan tekanan udara yang sesuai guna menentukan jenis kopi (Arabika atau Robusta) yang paling tepat untuk dibudidayakan. Berikut data tekanan udara dalam 1 tahun:



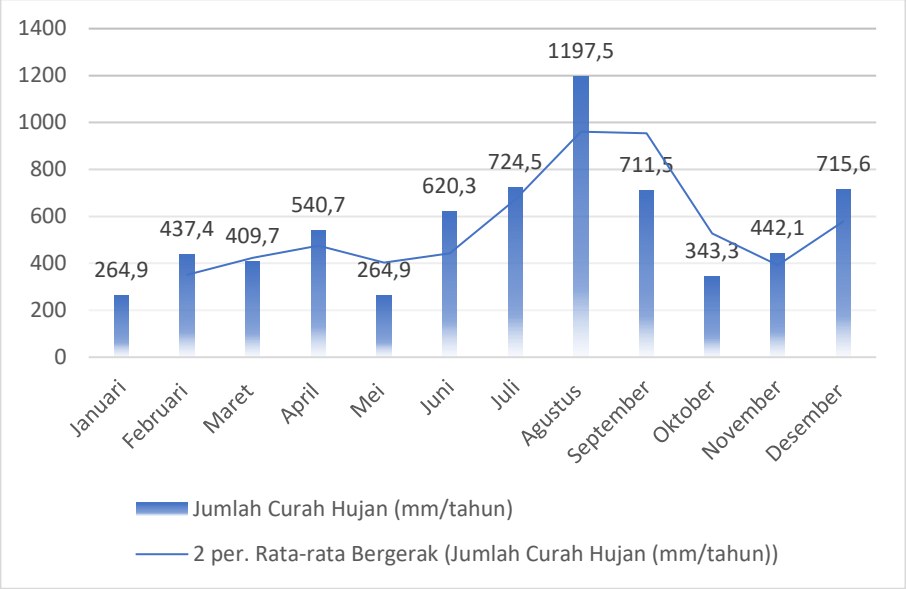
Gambar 3.10.
Grafik Tekanan Udara (mb) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Data tekanan udara bulanan di Mimika, yang berkisar antara 1008,3 hingga 1012,3 mb (milibar) dengan rata-rata tahunan sekitar 1010 mb menunjukkan karakteristik iklim dataran rendah hingga pesisir yang khas. Rentang tekanan udara yang relatif tinggi dan stabil ini mengindikasikan bahwa sentra produksi kopi di sebagian besar wilayah Mimika (terutama yang dekat dengan garis pantai atau dataran rendah) secara ekologis lebih cocok untuk budidaya kopi Robusta, yang membutuhkan tekanan udara lebih tinggi dan dapat beradaptasi dengan suhu yang juga cenderung lebih tinggi di ketinggian 0 hingga 800 mdpl. Namun, variasi kecil, di mana rata-rata tekanan mencapai puncaknya pada Juli dan Agustus 1012,3 dan 1012,1 mb dan terendah pada Desember 1008,3. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran musim dan pola angin yang mempengaruhi dinamika cuaca lokal, meski fluktuasi ini tidak signifikan untuk mengubah jenis kopi yang ideal secara keseluruhan

e) Jumlah Curah Hujan Kabupaten Mimika Tahun 2024

Faktor iklim krusial lain dalam penentuan potensi agrikultur kopi di Kabupaten Mimika adalah jumlah curah hujan tahunan dan pola distribusinya, di mana curah hujan yang optimal bagi kopi berkisar antara 1500 hingga 2500 mm per tahun. Tanaman kopi, baik varietas Arabika maupun Robusta, sangat memerlukan periode bulan kering yang jelas 1 hingga 3 bulan) untuk memicu stres air yang menginduksi pembungaan yang seragam dan massal, yang merupakan kunci bagi efisiensi panen. Apabila Mimika memiliki pola curah hujan tinggi yang cenderung merata sepanjang tahun, hal ini berpotensi menghambat induksi bunga, sekaligus meningkatkan risiko serangan penyakit jamur pada daun dan buah, sehingga

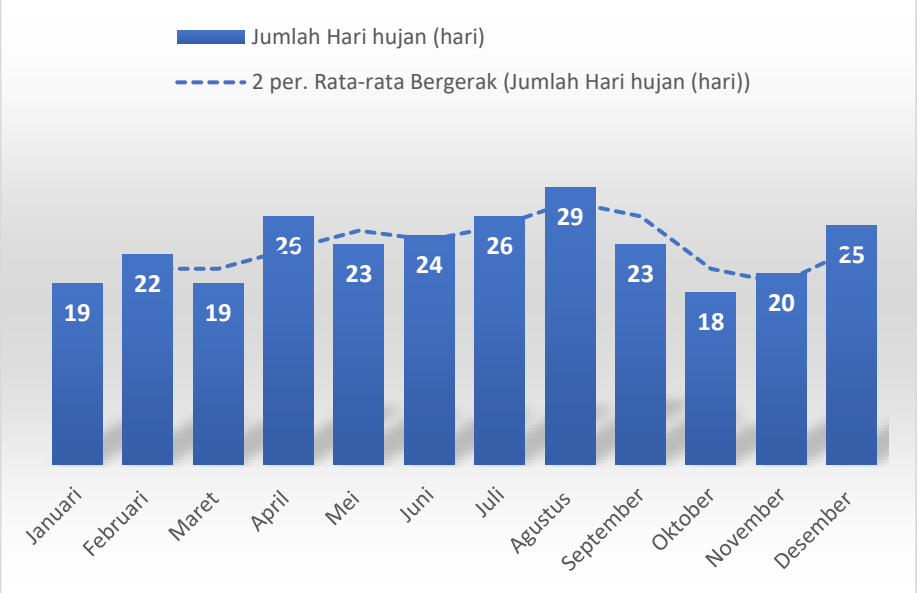
analisis detail terhadap data curah hujan bulanan sangat vital untuk menentukan kalender budidaya yang sukses. Berikut data curah hujan dalam 1 tahun:



Gambar 3.11.
Grafik Curah Hujan (mm/thn) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

f) Jumlah Hari Hujan Kabupaten Mimika Tahun 2024

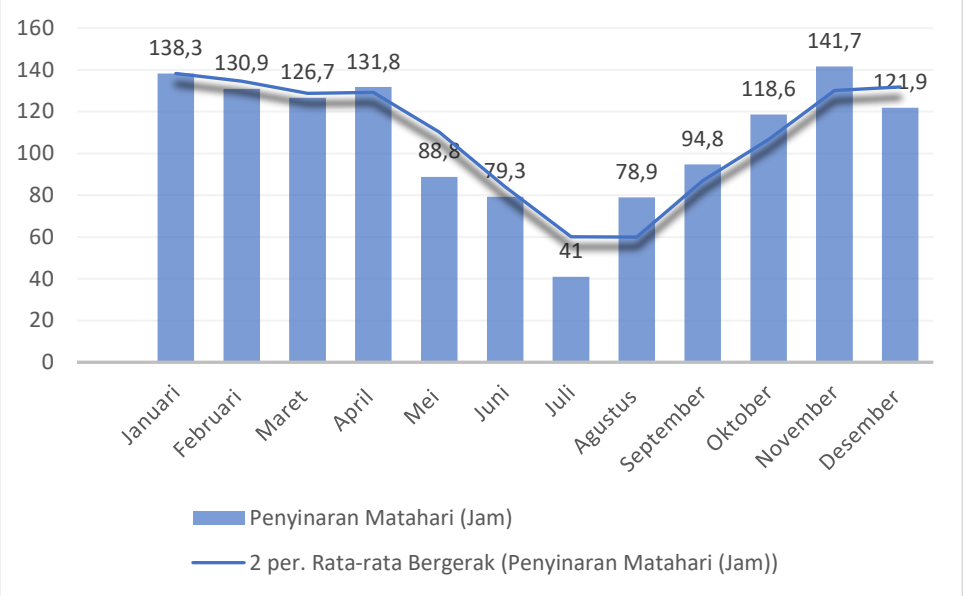
Jumlah hari hujan (HH) per bulan merupakan parameter iklim yang sangat penting untuk mengevaluasi potensi komoditas kopi di Kabupaten Mimika, terutama dalam konteks manajemen penyakit dan efisiensi budidaya. Jumlah hari hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun menciptakan kondisi kelembapan udara dan daun yang konstan. Meskipun kopi memerlukan kelembapan yang cukup, kelembapan berlebihan yang berlangsung lama akibat hari hujan yang sering dapat memfasilitasi perkecambahan spora dan penyebaran cepat penyakit jamur seperti Karat Daun Kopi (Coffee Leaf Rust) atau Antraknosa. Sebaliknya, periode hari hujan yang lebih sedikit (di bawah 10-12 hari) yang bertepatan dengan musim berbunga sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penyerbukan berjalan optimal. Oleh karena itu, analisis pola hari hujan di Mimika akan membantu merencanakan jadwal aplikasi fungisida, sekaligus mengidentifikasi periode kritis yang memerlukan mitigasi kelembapan untuk memaksimalkan hasil panen kopi . Berikut data jumlah hari hujan dalam 1 tahun:



Gambar 3.12.
Jumlah Hari Hujan (hari) Kabupaten Mimika per Bulan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

g) Penyinaran Matahari Kabupaten Mimika Tahun 2024

Penyinaran Matahari (Intensitas dan Lama Penyinaran) adalah faktor lingkungan utama yang mengatur proses fotosintesis dan metabolisme pada tanaman kopi, dan merupakan penentu penting bagi potensi komoditas kopi di Kabupaten Mimika. Tanaman kopi, terutama Arabika, diklasifikasikan sebagai tanaman C3 yang memerlukan naungan sepanjang siklus hidupnya, karena paparan sinar matahari langsung (intensitas 100%) dapat menyebabkan peningkatan suhu daun yang ekstrem, menurunkan efisiensi fotosintesis, dan bahkan memicu kerusakan jaringan (sun scorch). Meskipun demikian, jumlah sinar matahari yang terlalu sedikit (terutama pada Robusta) akan memperlambat laju pertumbuhan dan pematangan buah. Di wilayah Mimika yang bercirikan curah hujan sangat tinggi (mengindikasikan seringnya tutupan awan), analisis data penyinaran menjadi krusial untuk memastikan bahwa tanaman kopi masih menerima cahaya efektif yang cukup untuk mencapai laju fotosintesis optimal, serta untuk menentukan kebutuhan dan jenis pohon pelindung (naungan) yang harus digunakan. Berikut data penyinaran matahari dalam 1 tahun:



Gambar 3.13.
Grafik Penyinaran Matahari (Jam) Kabupaten Mimika Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

3.1.3. Kondisi Demografi

a) Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Analisis terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 merupakan dasar krusial untuk memahami dinamika sosial, perencanaan pembangunan daerah, dan alokasi sumber daya. Fluktuasi atau pertumbuhan populasi di Mimika, yang dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri di Papua Tengah, mencerminkan adanya daya tarik ekonomi (seperti sektor pertambangan dan jasa) yang memicu migrasi masuk, sekaligus tantangan dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai.

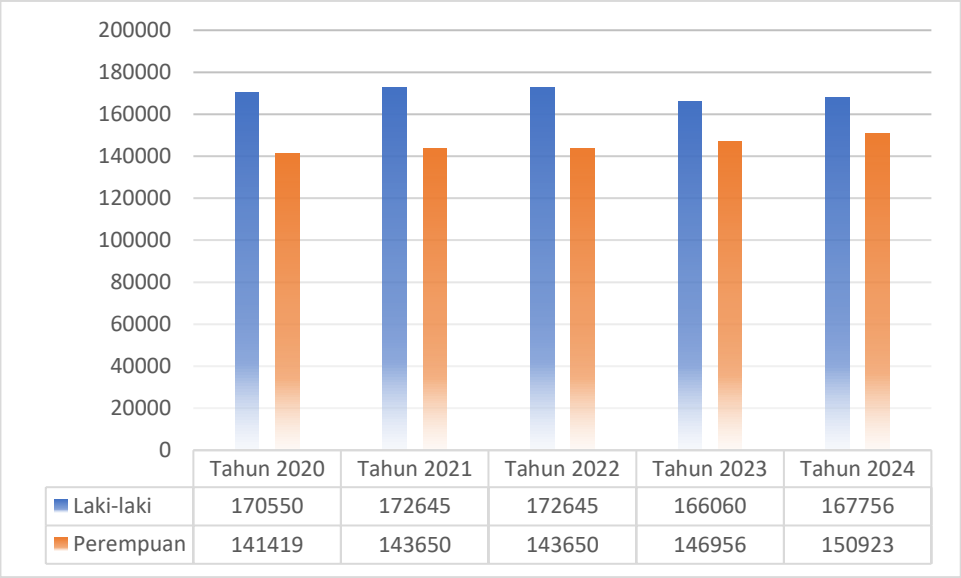
Tabel 3.6.
Data Jumlah Penduduk pe Kecamatan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Agimuga	876	888	888	1261	1363
Amar	2055	2073	2073	2479	2628
Alama	2045	2083	2083	2748	2703
Hoya	1097	1112	1112	1610	1579
Iwaka	10981	11133	11133	11039	11221
Jila	1755	1779	1779	2076	2077
Jita	1526	1547	1547	1959	2174
Kuala Kencana	27774	28159	28159	31021	31569
Kwamki Narama	13750	13941	13941	14816	13930
Mimika Barat	2966	3007	3007	2802	2916
Mimika Barat Jauh	2030	2058	2058	2559	2797
Mimika Barat Tengah	2320	2352	2352	2846	3346
Mimika Baru	142909	144893	144893	143367	144462
Mimika Tengah	4260	4319	4319	4948	5283

Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mimika Timur	10179	10320	10320	11176	11767
Mimika Timur Jauh	3520	3569	3569	3751	4372
Tembagapura	23022	23341	23341	11074	10344
Wania	58904	59721	59721	61484	64148
Kabupaten Mimika	**311969**	**316295**	**316295**	**313016**	**318679**

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

b) Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024



Gambar 3.14.
Grafik Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Mimika tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebesar 318.679 jiwa. Jumlah ini menunjukkan tren peningkatan Berdasarkan jumlah penduduk per distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Baru merupakan distrik dengan populasi tertinggi sebesar 318.679 jiwa pada tahun 2024. Distrik Wania menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Kabupaten Mimika dengan jumlah penduduk sebesar 64.148 jiwa. Sementara itu, Distrik Agimuga merupakan distrik dengan jumlah penduduk terendah sebesar 1.363 jiwa pada tahun 2024.

Secara umum, penduduk laki-laki cenderung lebih banyak dibanding perempuan di hampir semua distrik, termasuk di distrik-distrik dengan jumlah penduduk besar seperti Mimika Baru, Wania, dan Kuala Kencana

c) Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Berdasarkan Kategori Usia Tahun 2020-2024

Analisis mengenai Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Berdasarkan Kategori Usia Tahun 2020-2024 merupakan indikator krusial dalam memahami dinamika demografi dan potensi pembangunan wilayah tersebut. Periode lima tahun ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur populasi, khususnya antara kelompok usia produktif (15-64 tahun), usia muda (0-14 tahun), dan usia non-produktif/lanjut (65 tahun ke atas). Data ini sangat penting sebagai dasar penetapan kebijakan publik, mulai dari perencanaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan hingga proyeksi kebutuhan tenaga kerja di wilayah

yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan industri pertambangan ini. Pemetaan detail komposisi usia ini akan mengungkapkan tantangan dan peluang demografi yang dihadapi Kabupaten Mimika dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan selama periode tersebut.

Tabel 3.7.
Jumlah Penduduk menurut kategori usia Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	41621	41480	-	-	-
5-9	37403	38055	-	-	-
10-14	24585	25394	-	-	-
15-19	20364	19893	-	-	-
20-24	24539	24091	-	-	-
25-29	28326	28480	-	-	-
30-34	30809	31065	-	-	-
35-39	27630	28113	-	-	-
40-44	23724	24287	-	-	-
45-49	19514	20165	-	-	-
50-54	12756	13306	-	-	-
55-59	8593	9023	-	-	-
60-64	4949	5302	-	-	-
65-69	3322	3544	-	-	-
70-74	1966	2097	-	-	-
75+	1868	2000	-	-	-
Total	**311969**	**316295**	-	-	-

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

d) Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Analisis terhadap Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 menyajikan potret penting mengenai komposisi demografi wilayah tersebut. Rasio jenis kelamin, yang dihitung dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan, merupakan indikator fundamental dalam perencanaan sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Secara historis, daerah dengan sektor industri pertambangan yang dominan seperti Mimika, cenderung menunjukkan rasio jenis kelamin yang tinggi (di atas 100), menandakan jumlah laki-laki yang lebih banyak.

Perkembangan rasio dalam kurun waktu lima tahun ini penting untuk diamati karena mencerminkan tidak hanya angka kelahiran, tetapi juga pola migrasi masuk (*in-migration*) dari kelompok usia produktif yang didominasi laki-laki untuk bekerja. Data ini menjadi landasan vital bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang responsif gender, memastikan keseimbangan pembangunan, dan mengantisipasi dampak sosial dari ketidakseimbangan populasi tersebut.

Tabel 3.8.
Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Agimuga	1,18	1,18	1,18	1,19	1,17
Amar	1,12	1,25	1,25	1,09	1,08
Alama	1,25	1,11	1,11	1,19	1,14
Hoya	1,12	1,12	1,12	1,09	1,05
Iwaka	1,15	1,15	1,15	1,09	1,08
Jila	1,26	1,26	1,26	1,16	1,13
Jita	1,15	1,15	1,15	1,1	1,08
Kuala Kencana	1,11	1,10	1,10	1,12	1,11
Kwamki Narama	1,07	1,07	1,07	1,06	1,05
Mimika Barat	1,47	1,46	1,46	1,11	1,1
Mimika Barat Jauh	1,20	1,20	1,20	1,11	1,12
Mimika Barat Tengah	1,12	1,12	1,12	1,12	1,1
Mimika Baru	1,15	1,15	1,15	1,15	1,11
Mimika Tengah	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08
Mimika Timur	1,12	1,12	1,12	1,08	1,09
Mimika Timur Jauh	1,20	1,20	1,20	1,09	1,06
Tembagapura	2,50	2,49	2,49	1,07	1,03
Wania	1,13	1,13	1,13	1,13	1,11
Kabupaten Mimika	**1,21**	**1,20**	**1,20**	**1,13**	**1,11**

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

e) Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

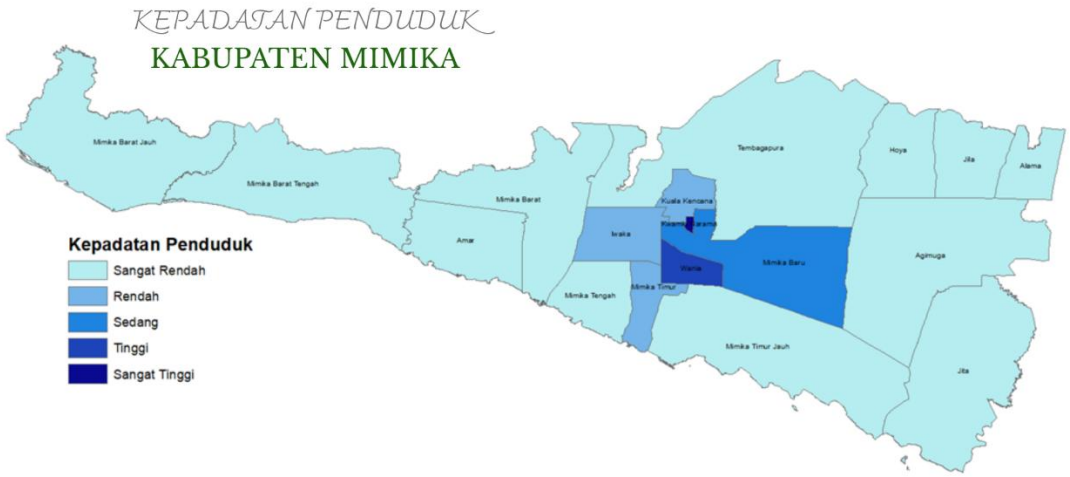
Kabupaten Mimika, sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Papua Tengah, menampilkan dinamika kependudukan yang sangat kompleks dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Analisis terhadap kepadatan penduduk selama periode ini menunjukkan adanya kontras yang mencolok antara wilayah pusat kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah penyangga. Kepadatan penduduk di Mimika sangat dipengaruhi oleh keberadaan sektor industri skala besar yang menarik arus urbanisasi dan migrasi, menjadikan kota utama (Timika) sebagai titik konsentrasi populasi yang padat. Oleh karena itu, rata-rata kepadatan kabupaten secara keseluruhan sering kali tidak merefleksikan adanya ketimpangan spasial yang ekstrem, di mana sebagian kecil wilayah menanggung beban populasi yang sangat besar, sementara distrik-distrik lain di pedalaman dan pesisir tetap berpenduduk jarang

Tabel 3.9.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Agimuga	0,40	0,40	0,40	0,57	0,62
Amar	1,14	1,15	1,15	1,38	1,46
Alama	5,59	5,69	5,69	7,51	7,39
Hoya	1,95	1,97	1,97	2,86	2,80
Iwaka	22,29	22,59	22,59	22,40	22,77

Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jila	2,82	2,86	2,86	3,33	3,33
Jita	0,78	0,79	0,79	1,00	1,11
Kuala Kencana	32,27	32,71	32,71	36,04	36,68
Kwamki Narama	1069,21	1084,06	1084,06	1152,10	1083,20
Mimika Barat	2,50	2,53	2,53	2,36	2,45
Mimika Barat Jauh	0,82	0,83	0,83	1,03	1,13
Mimika Barat Tengah	1,01	1,03	1,03	1,24	1,46
Mimika Baru	94,67	95,99	95,99	94,98	95,70
Mimika Tengah	8,09	8,20	8,20	9,39	10,03
Mimika Timur	35,04	35,53	35,53	38,47	40,51
Mimika Timur Jauh	1,73	1,75	1,75	1,84	2,15
Tembagapura	8,90	9,02	9,02	4,28	4,00
Wania	298,52	302,66	302,66	311,60	325,10
Kabupaten Mimika	**14,38**	**14,58**	**14,58**	**14,43**	**14,69**

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

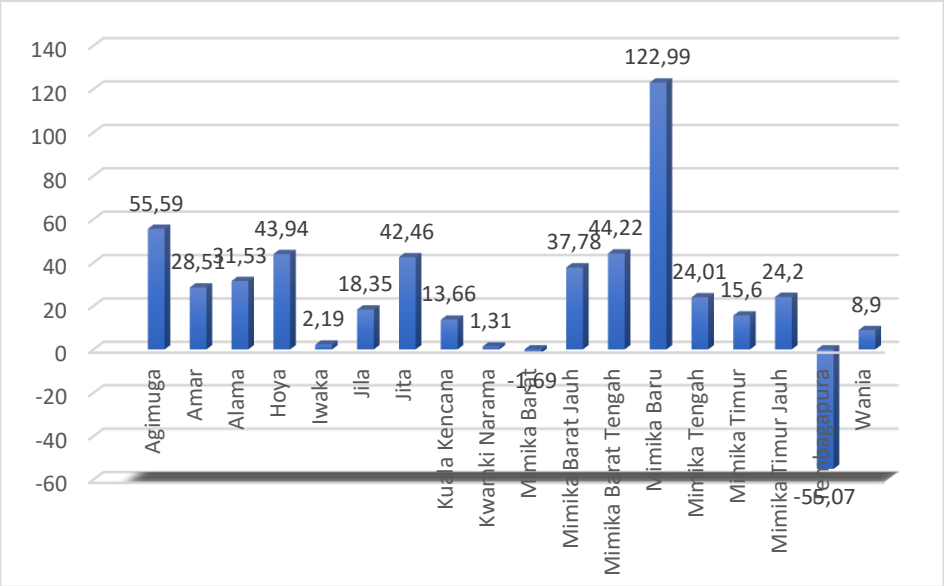


Gambar 3.15.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

f) Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per distrik di Kabupaten Mimika memperlihatkan polaritas demografi yang ekstrem, yang mengindikasikan ketimpangan spasial dalam pembangunan dan migrasi. LPP tertinggi dicatat oleh Distrik Mimika Baru dengan angka dominan sebesar 122,99. Tingginya angka ini secara langsung merefleksikan perannya sebagai pusat gravitasi ekonomi, administrasi, dan sosial (Kota Timika), yang menarik arus urbanisasi dan migrasi masuk yang sangat masif. Sebaliknya, polaritas ditunjukkan oleh LPP terendah yang dicatat oleh Distrik Mimika Timur Jauh dengan nilai negatif ekstrem sebesar -56,07. Nilai negatif ini menyiratkan adanya fenomena emigrasi besar-besaran atau

depopulasi, yang mungkin disebabkan oleh terbatasnya akses infrastruktur, layanan dasar, atau peluang ekonomi.



Gambar 3.16.
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan dan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

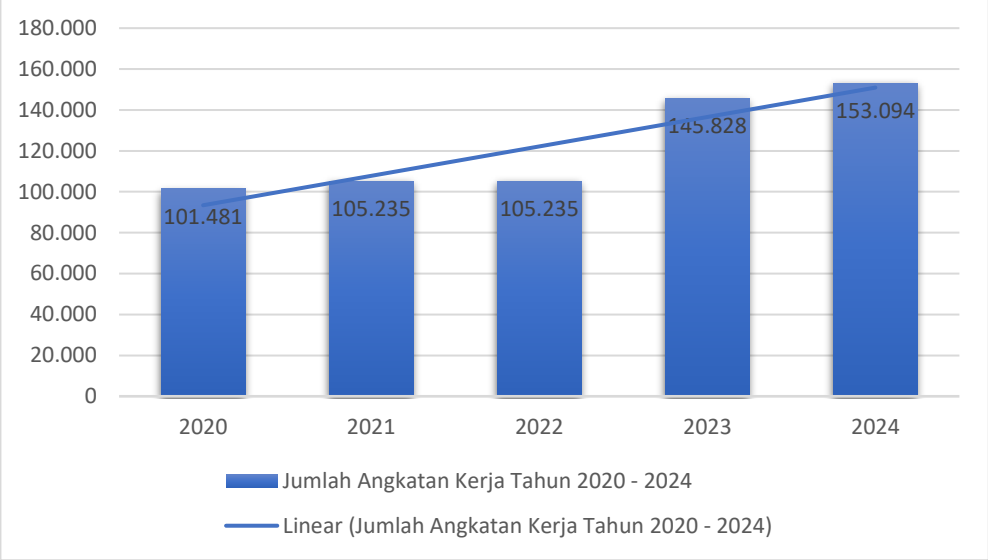
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikator kuat ketidakmerataan pembangunan, di mana pusat kota menyerap pertumbuhan penduduk secara berlebihan, sementara wilayah pinggiran menghadapi tantangan serius berupa penurunan populasi dan potensi isolasi.

3.1.4. Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Data ketenagakerjaan juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang responsif dan inklusif untuk mengatasi kesenjangan gender, mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kondisi ketenagakerjaan tidak hanya penting untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Mimika, tetapi juga untuk memastikan tercapainya visi pembangunan daerah yang berbasis kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

a) Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Analisis terhadap Jumlah Angkatan Kerja (JAK) di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan substansial. Angkatan Kerja, yang mencakup penduduk yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dimulai pada level 101.481 jiwa pada tahun 2020. Pada dua tahun berikutnya, terjadi stabilitas yang mencolok; jumlahnya naik sedikit pada 2021 menjadi 105.235 jiwa dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2022. Namun, titik balik terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah Angkatan Kerja melonjak tajam menjadi 145.828 jiwa. Peningkatan drastis ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi yang kuat atau masuknya sejumlah besar migran usia produktif ke Mimika, terutama seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor-sektor kunci di daerah tersebut.



Gambar 3.17.
Grafik Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Tren peningkatan Angkatan Kerja berlanjut hingga akhir periode, dengan mencatatkan angka tertinggi sebesar 153.094 jiwa pada tahun 2024. Secara keseluruhan, pergerakan dari sekitar 101 ribu jiwa pada tahun 2020 ke lebih dari 153 ribu jiwa pada tahun 2024 menyimpulkan bahwa pasar tenaga kerja Mimika telah mengalami ekspansi yang sangat cepat dalam lima tahun terakhir, didorong oleh tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja, utamanya pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan drastis ini, yang tampak sebagai lonjakan vertikal, menuntut perhatian pemerintah daerah dalam hal penciptaan lapangan kerja.

b) Jumlah Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Analisis terhadap Jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya pergerakan yang relatif stabil di awal periode, diikuti oleh peningkatan yang signifikan. Bukan Angkatan Kerja adalah kelompok penduduk usia produktif yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan (misalnya pelajar, ibu rumah tangga, atau pengangguran sukarela). Jumlah BAK dimulai pada angka 58.432 jiwa di tahun 2020, kemudian menurun sedikit dan stabil di sekitar 57.230 jiwa pada tahun 2021 dan 2022. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk yang berada di luar pasar tenaga kerja—seperti yang fokus pada pendidikan atau mengurus rumah tangga—cenderung konstan di awal periode. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan tajam, di mana jumlah BAK meningkat drastis hingga mencapai puncaknya yaitu 73.047 jiwa.

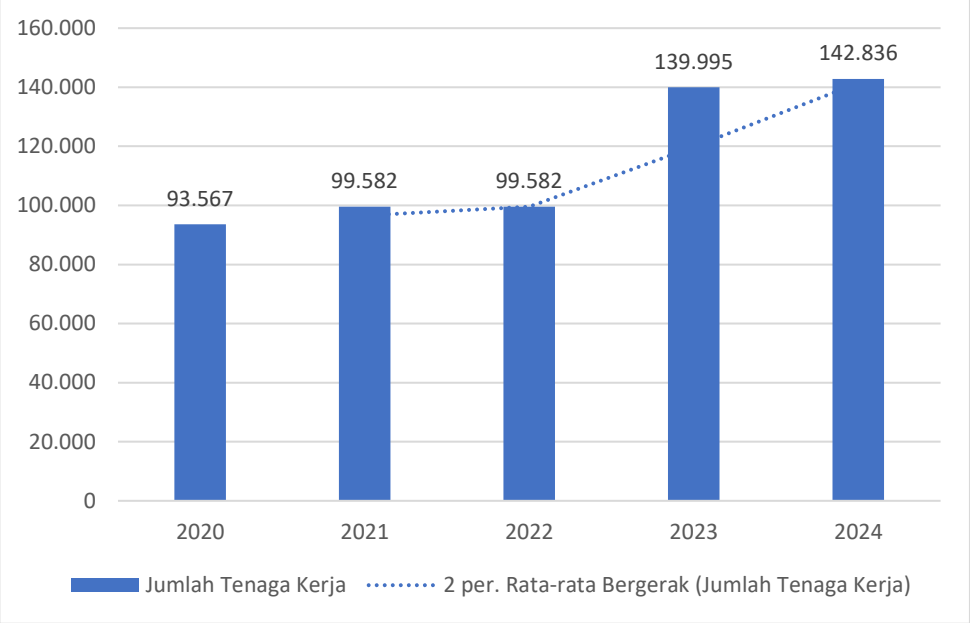


Gambar 3.18.
Grafik Jumlah Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Peningkatan drastis jumlah Bukan Angkatan Kerja yang mencapai puncaknya di tahun 2023, diikuti oleh sedikit penurunan namun tetap tinggi di 69.688 jiwa pada tahun 2024, menyimpulkan adanya perubahan signifikan dalam struktur demografi dan partisipasi tenaga kerja di Mimika. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk yang kembali bersekolah atau bertambahnya jumlah penduduk usia produktif yang memilih menjadi ibu rumah tangga seiring dengan peningkatan Angkatan Kerja di periode yang sama. Meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2024, secara keseluruhan, data 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif yang tidak berpartisipasi dalam pasar kerja telah meningkat secara substansial.

c) Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Analisis terhadap Jumlah Tenaga Kerja (penduduk yang benar-benar bekerja) di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola pergerakan yang stabil di awal, diikuti oleh peningkatan masif di tahun-tahun berikutnya. Jumlah Tenaga Kerja dimulai pada angka 93.567 jiwa di tahun 2020. Selama dua tahun berikutnya, terjadi stabilitas, di mana jumlahnya naik tipis menjadi 99.582 jiwa pada 2021 dan stagnan di angka tersebut pada tahun 2022. Stabilitas ini kemungkinan mencerminkan kondisi pemulihan pasar tenaga kerja pasca-awal pandemi COVID-19. Titik balik dan pertumbuhan yang eksplosif terjadi pada tahun 2023, di mana Jumlah Tenaga Kerja melonjak drastis ke 139.995 jiwa. Lonjakan ini mengindikasikan adanya ekspansi ekonomi yang signifikan dan kemampuan Mimika untuk menyerap Angkatan Kerja dalam jumlah besar.



Gambar 3.19.
Grafik Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Tren positif dalam penyerapan tenaga kerja terus berlanjut hingga akhir periode, dengan Jumlah Tenaga Kerja mencapai puncaknya di 142.836 jiwa pada tahun 2024. Secara keseluruhan, peningkatan substansial dari sekitar 93 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi lebih dari 142 ribu jiwa pada tahun 2024 menyimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Mimika telah menunjukkan resiliensi dan daya serap yang luar biasa, terutama setelah tahun 2022. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan, tetapi juga pertumbuhan yang kuat, yang kemungkinan besar didorong oleh aktivitas sektor-sektor utama di Mimika.

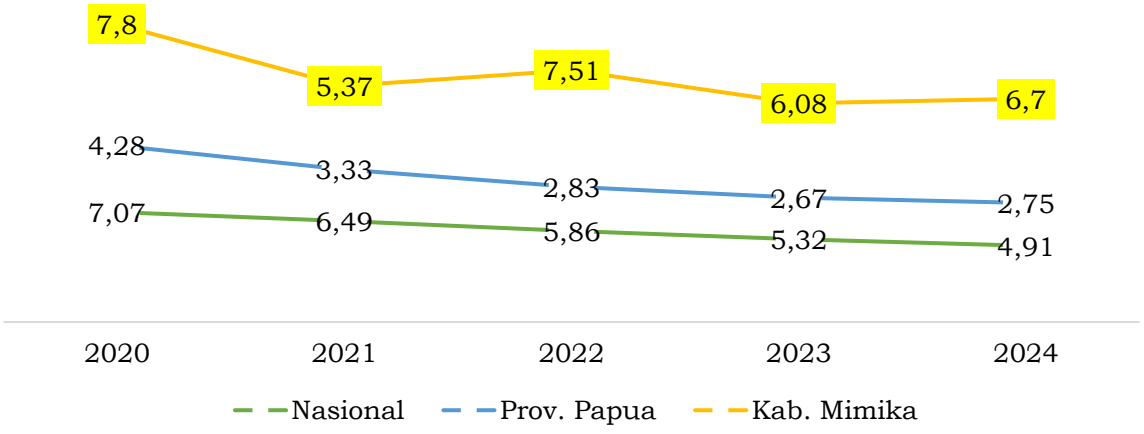
d) Jumlah Pengangguran Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Analisis terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola pergerakan yang sangat dinamis, terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik pasca-pandemi. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran tercatat cukup tinggi, mencapai 7.914 jiwa, mencerminkan dampak awal dari guncangan pasar kerja. Namun, pasar kerja Mimika menunjukkan pemulihan yang cepat, di mana jumlah pengangguran turun tajam pada tahun 2021 menjadi 5.653 jiwa. Angka yang relatif rendah ini kemudian stagnan hingga tahun 2022, menunjukkan keberhasilan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 5.833 jiwa, menandakan adanya sedikit tekanan kembali pada ketersediaan lapangan kerja.



Gambar 3.20.
Grafik Jumlah Pengangguran Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Meskipun Mimika berhasil menjaga angka pengangguran di level rendah selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023), data tahun 2024 menyimpulkan adanya peningkatan jumlah pengangguran yang sangat drastis dan mengkhawatirkan, mencapai angka tertinggi sepanjang periode analisis, yaitu 10.258 jiwa. Ketimpangan ini sebagian besar disebabkan oleh peran domestik perempuan yang masih sangat dominan, terlihat dari jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga mencapai hampir 42 ribu jiwa. Rasio pengangguran terbuka juga menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun angka absolutnya sedikit lebih tinggi pada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap lapangan kerja masih perlu diperluas, khususnya bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam dunia kerja. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran penting bagi perencanaan kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan perempuan di Mimika, dengan fokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, penyediaan layanan dukungan rumah tangga, serta penguatan keterampilan kerja bagi pencari kerja.



Gambar 3.21.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

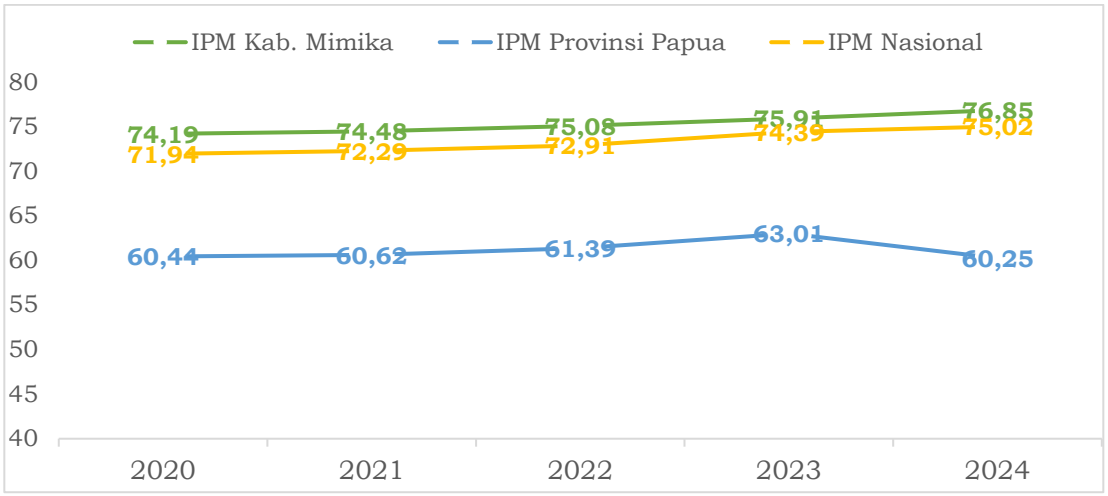
Berdasarkan Gambar 24 yang memperlihatkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka antara nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dibandingkan dua wilayah lainnya. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Mimika tercatat sebagai yang tertinggi, yakni sebesar 7,8%, jauh di atas tingkat nasional sebesar 7,07% dan Provinsi Papua sebesar 4,28%. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2021 di Mimika hingga mencapai 5,37%, namun kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,51%, mencerminkan adanya instabilitas di pasar kerja daerah yang kemungkinan dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan jasa informal.

Pada tahun 2023, angka pengangguran terbuka di Mimika kembali menurun menjadi 6,08%, sebelum sedikit naik menjadi 6,7% pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di tingkat nasional menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, dari 7,07% di tahun 2020 menjadi 4,91% di tahun 2024. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Papua, yang terus menunjukkan penurunan stabil dari 4,28% di tahun 2020 menjadi 2,75% di tahun 2024.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Mimika telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun, stabilitas pasar tenaga kerja masih menjadi tantangan tersendiri. Dibandingkan nasional dan provinsi, fluktuasi angka pengangguran di Mimika menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif di berbagai sektor.

e) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

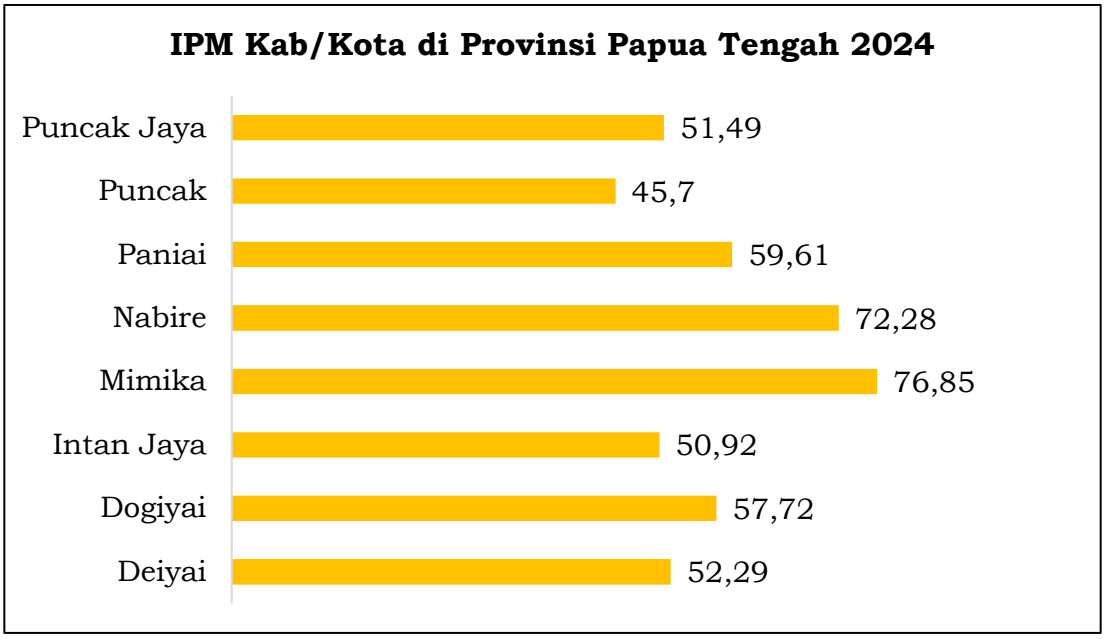
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Analisis IPM memberikan gambaran tentang capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mimika, termasuk perkembangan setiap dimensinya serta kesenjangan yang mungkin terjadi antar kelompok masyarakat. Melalui kajian ini, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mempercepat peningkatan IPM. Dengan demikian, upaya pembangunan daerah tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut kondisi perbandingan IPM antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.



Gambar 3.22.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2020–2024, IPM Kabupaten Mimika menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2020, IPM Mimika tercatat sebesar 74,19, lalu meningkat menjadi 74,48 pada 2021, 75,08 pada 2022, 75,91 pada 2023, dan mencapai 76,85 pada 2024. Kenaikan total sebesar 2,66 poin dalam lima tahun menggambarkan perbaikan simultan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat di Kabupaten Mimika. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program yang telah dijalankan—mulai dari peningkatan layanan kesehatan dasar, perluasan akses pendidikan, hingga program-program pemberdayaan ekonomi lokal.

Dibandingkan dengan tingkat Provinsi Papua, IPM Mimika berada pada level yang jauh lebih tinggi. Selama periode 2020–2023, IPM Provinsi Papua bergerak dari 60,44 (2020) naik tipis ke 63,01 (2023), sebelum turun kembali menjadi 60,25 pada 2024. Selisih lebih dari 15 poin antara Mimika dan rata-rata provinsi menegaskan bahwa Kabupaten Mimika telah mampu melampaui kinerja provinsi dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Hal ini mengindikasikan kebutuhan provinsi untuk meniru praktik terbaik (best practices) di Mimika, seperti penguatan layanan pendidikan vokasi dan peningkatan jejaring akses kesehatan di daerah terpencil. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Kabupaten Mimika juga selalu berada di atas angka nasional. IPM nasional meningkat dari 71,94 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024. Kenaikan sebesar 3,08 poin ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan di Mimika (2,66 poin), namun angka absolut IPM Mimika tetap unggul. Keunggulan ini menegaskan posisi Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah berprestasi dalam konteks pembangunan manusia, sekaligus menunjukkan bahwa meski tumbuh lebih cepat, Indonesia secara keseluruhan masih menyusul capaian IPM Mimika.



Gambar 3.23.
Indeks Pembangun Manusia per Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Mimika, 2025

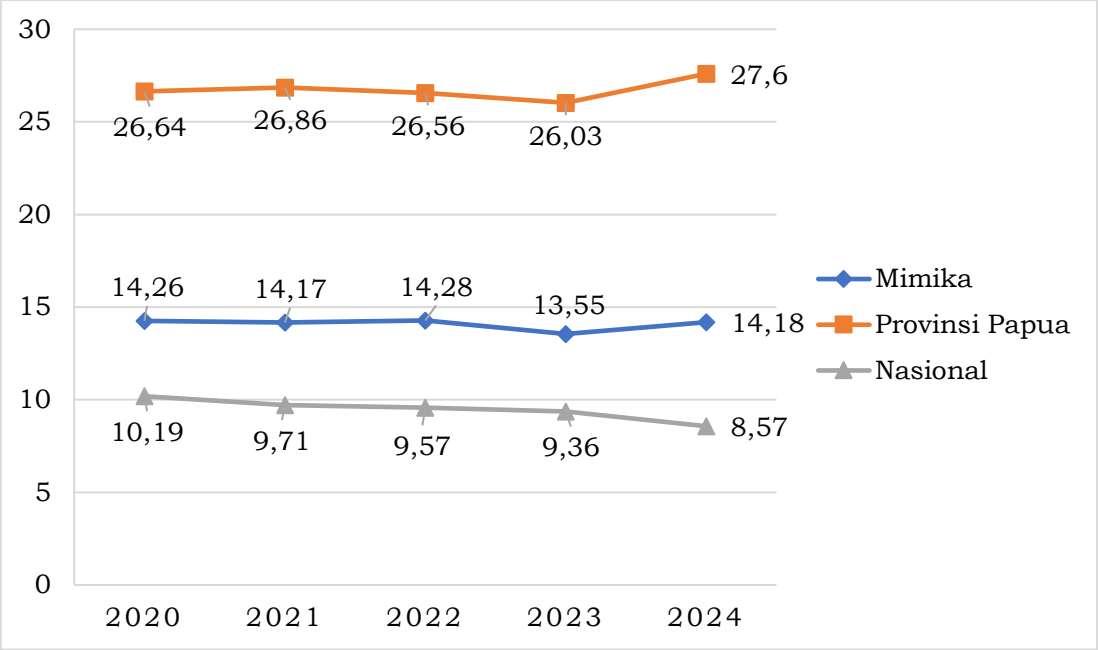
Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tengah menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Mimika menempati posisi tertinggi dengan capaian IPM sebesar 76,85, diikuti oleh Nabire yang mencapai 72,28. Angka-angka ini mencerminkan keberhasilan kedua daerah—yang lebih mudah diakses secara geografis—dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan, dan menguatkan ekonomi lokal. Sementara itu, kabupaten pegunungan dan terpencil masih menghadapi tantangan besar: Puncak mencatat IPM terendah sebesar 45,70, disusul Puncak Jaya (51,49), Intan Jaya (50,92), dan Deiyai (52,29). Keterbatasan infrastruktur transportasi, kurangnya tenaga pendidik dan kesehatan, serta

hambatan kultural menjadi faktor utama penyebab rendahnya capaian IPM di wilayah-wilayah tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, kabupaten menengah seperti Paniai (59,61) dan Dogiyai (57,72) menempati posisi yang relatif moderat. Meskipun masih tertinggal dibandingkan Mimika dan Nabire, kedua kabupaten ini menunjukkan potensi peningkatan melalui intervensi terfokus—misalnya peningkatan kualitas tenaga guru, optimalisasi posyandu, dan perbaikan akses jalan desa. Angka-angka ini menandakan adanya peluang bagi pemerintah daerah untuk memacu percepatan pembangunan manusia dengan memadukan pendekatan peningkatan kapasitas lokal dan transfer teknologi sederhana.

3.1.5. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam konteks Kabupaten Mimika, permasalahan kemiskinan tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup aspek keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk potensi meningkatnya ketimpangan sosial dan keterbatasan mobilitas ekonomi.



Gambar 3.24.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada periode 2020–2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan secara nasional memperlihatkan pola yang berbeda. Secara nasional, proporsi penduduk miskin terus menurun dari 10,19 % pada 2020 menjadi 8,57 % pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan di tingkat pusat, termasuk perluasan bantuan sosial, peningkatan akses layanan dasar, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Di Provinsi Papua, tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi dibandingkan nasional dan justru menunjukkan kecenderungan naik pada akhir periode. Angka kemiskinan bergerak dari 26,64 % pada 2020, sempat turun sedikit di 2022–2023 menjadi 26,03 %, lalu melonjak ke 27,60 % pada 2024. Kenaikan terakhir ini mengindikasikan tantangan struktural—seperti keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta

fluktuasi harga komoditas lokal—yang belum sepenuhnya teratasi meski berbagai intervensi telah dijalankan.

Kabupaten Mimika berada di antara kedua ekstrem tersebut, dengan tingkat kemiskinan yang relatif stabil di kisaran 14 %. Setelah menurun tipis dari 14,26 % (2020) ke 14,17 % (2021), angka ini sempat naik ke 14,28 % pada 2022, turun menjadi 13,55 % pada 2023, sebelum kembali naik ke 14,18 % pada 2024. Friksi pada angka kemiskinan Mimika kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika aktivitas pertambangan dan konstruksi, yang menyediakan lapangan kerja temporer namun rentan terhadap siklus ekonomi komoditas. Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya strategi yang disesuaikan untuk setiap wilayah. Di tingkat nasional, keberlanjutan program pengurangan kemiskinan perlu dipertahankan. Di Papua, penanganan harus fokus pada peningkatan akses infrastruktur dan diversifikasi ekonomi. Sementara itu, di Mimika, perlu diupayakan stabilisasi lapangan kerja berkualitas dan pemberdayaan usaha mikro-kecil yang berkelanjutan, agar penurunan kemiskinan tidak hanya bersifat fluktuatif tetapi juga permanen.

a) Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024

Analisis terhadap grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya tren yang fluktuatif namun cenderung mengalami perbaikan secara keseluruhan. Pada awal periode, yaitu tahun 2020 dan 2021, persentase penduduk miskin berada pada titik tertinggi dan stagnan di angka 14,54%, mencerminkan dampak awal dari pandemi global dan tantangan ekonomi yang menyertainya. Setelah kondisi yang relatif stabil di awal periode, terjadi penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Persentase ini berhasil turun pada tahun 2022 menjadi 14,28%, dan mencapai titik terendah selama lima tahun, yaitu 13,55% pada tahun 2023. Tren penurunan ini mengindikasikan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi di Mimika.



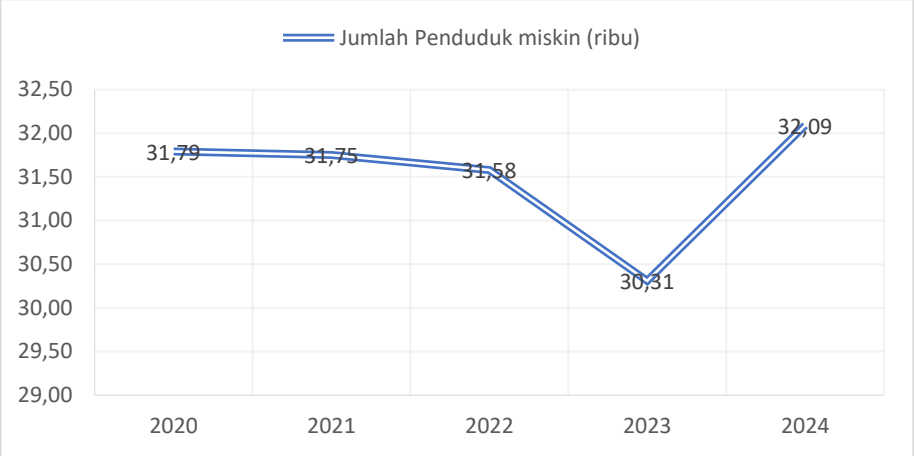
Gambar 3.25.
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Meskipun menunjukkan penurunan yang tajam pada pertengahan periode, data tahun 2024 menyimpulkan adanya sedikit peningkatan kembali menjadi 14,18%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan baru atau tekanan ekonomi yang muncul menjelang akhir periode analisis. Secara keseluruhan, pergerakan dari 14,54% (2020) ke 14,18% (2024) menunjukkan keberhasilan Kabupaten Mimika dalam mengurangi tingkat kemiskinan, meskipun lajunya tidak konsisten dan masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Kesimpulannya, upaya pengentasan kemiskinan di Mimika memerlukan perhatian berkelanjutan dan program yang adaptif, khususnya untuk mempertahankan capaian positif

yang diperoleh pada tahun 2023, serta mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan meningkat kembali pada tahun terakhir.

b) Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024

Analisis terhadap grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pergerakan yang dinamis dan bergejolak, ditandai oleh penurunan tajam dan peningkatan yang sangat signifikan. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 31,79 ribu jiwa, dan angka ini relatif stagnan pada tahun 2021 dengan sedikit penurunan menjadi 31,75 ribu jiwa, sebelum kembali menurun ke 31,58 ribu jiwa pada tahun 2022. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga mencapai titik terendah selama lima tahun, yaitu 30,31 ribu jiwa. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan sementara dalam upaya pengentasan kemiskinan atau dampak positif pemulihan ekonomi di Mimika pasca-pandemi.



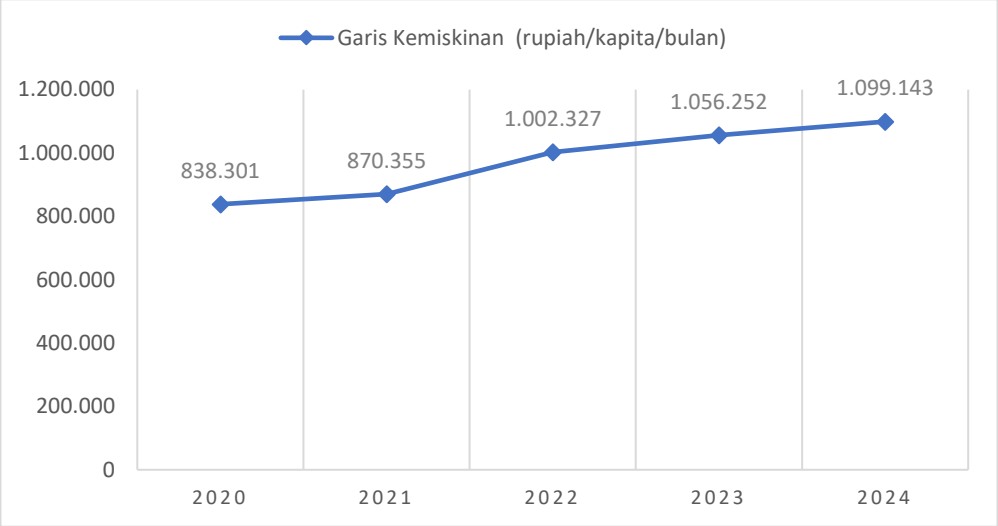
Gambar 3.26.
Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mimika 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Meskipun mencapai titik terendah pada tahun 2023, data tahun 2024 menunjukkan adanya pembalikan tren yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah Penduduk Miskin melonjak tajam ke angka tertinggi selama periode analisis, yaitu 32,09 ribu jiwa. Kenaikan substansial ini menunjukkan bahwa pencapaian positif di tahun 2023 tidak dapat dipertahankan dan daerah tersebut menghadapi tekanan baru yang menyebabkan lebih dari seribu orang kembali terjerumus ke dalam kategori miskin dalam satu tahun. Kesimpulannya, meskipun Kabupaten Mimika mampu menunjukkan kapasitas untuk menekan angka kemiskinan hingga batas tertentu, data keseluruhan periode 2020-2024, yang ditutup dengan peningkatan drastis, menggarisbawahi kerentanan status ekonomi penduduk Mimika terhadap guncangan atau perubahan kebijakan, serta perlunya evaluasi mendalam terhadap program pengentasan kemiskinan untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin di masa mendatang.

c) Garis Kemiskinan Kabupaten Mimika 2020-2024

Analisis terhadap grafik Garis Kemiskinan (GK) per kapita per bulan di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Garis Kemiskinan, yang mewakili nilai pengeluaran minimum yang harus dipenuhi penduduk agar tidak dikategorikan miskin, dimulai pada tahun 2020 sebesar Rp838.301. Angka ini kemudian mengalami peningkatan bertahap, mencapai Rp870.355 pada tahun 2021. Laju peningkatan mulai menunjukkan akselerasi yang lebih jelas pada tahun 2022, di mana Garis Kemiskinan menembus angka satu juta rupiah, mencapai Rp1.002.327. Kenaikan Garis Kemiskinan ini secara fundamental mengindikasikan

adanya tekanan inflasi yang berkelanjutan dan peningkatan biaya hidup yang terjadi di Kabupaten Mimika sepanjang periode tersebut.

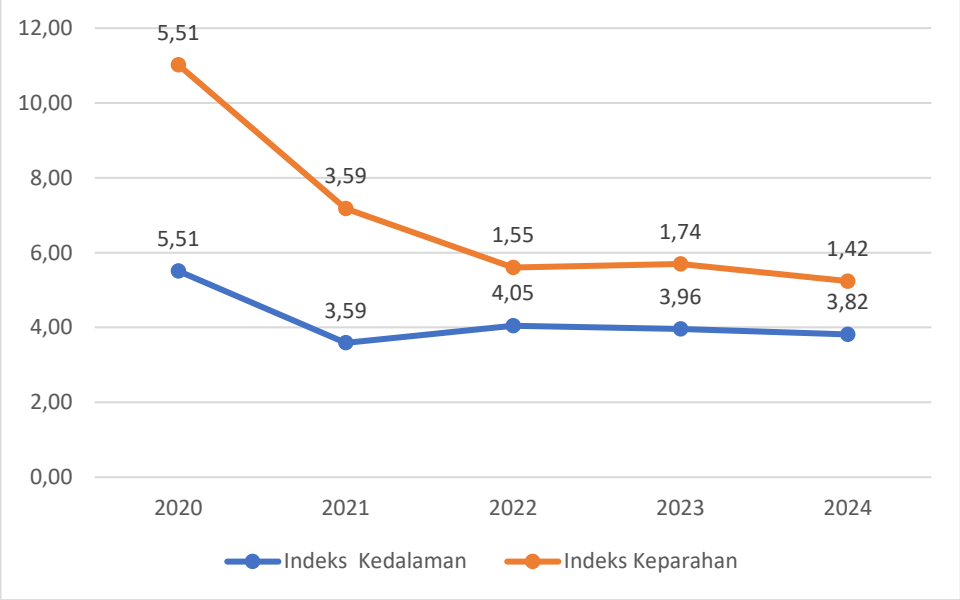


Gambar 3.27.
Grafik Garis Kemiskinan Kabupaten Mimika 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Tren peningkatan Garis Kemiskinan terus berlanjut hingga akhir periode analisis. Pada tahun 2023, Garis Kemiskinan berada di angka Rp1.056.252 dan puncaknya tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp1.099.143. Kenaikan yang terjadi secara konsisten dan substansial dari tahun 2020 hingga 2024 ini menyimpulkan bahwa standar minimum kesejahteraan ekonomi di Mimika terus meningkat seiring dengan tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Konsekuensinya, persentase penduduk yang terancam jatuh ke jurang kemiskinan akan bertambah jika pendapatan mereka tidak tumbuh secepat kenaikan Garis Kemiskinan. Oleh karena itu, lonjakan Garis Kemiskinan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, agar upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif.

d) Indeks Keparahan dan Kedalaman Kabupaten Mimika 2020-2024

Analisis terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Mimika dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan yang sangat signifikan di awal periode, diikuti oleh fluktuasi. Indeks Kedalaman (P1), yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, dimulai pada angka 5,51 di tahun 2020, kemudian menurun drastis menjadi 3,59 di tahun 2021. Sementara itu, Indeks Keparahan (P2), yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri, juga menunjukkan penurunan yang luar biasa dari 11,06 di tahun 2020 menjadi 7,33 di tahun 2021. Penurunan masif pada kedua indeks ini di tahun pertama menunjukkan adanya peningkatan cepat pada kondisi kesejahteraan rata-rata penduduk miskin Mimika, segera setelah tantangan ekonomi tahun 2020.



Gambar 3.28.
Grafik Indeks Keparahan dan Kedalaman Kabupaten Mimika 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Meskipun terjadi perbaikan substansial di tahun 2021, tren pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan tantangan yang berkelanjutan. Indeks Kedalaman (P1) cenderung stabil pada level yang lebih rendah, berkisar antara 4,05 (2022) hingga 3,82 (2024), mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah berada lebih dekat dengan Garis Kemiskinan dibandingkan tahun 2020. Namun, Indeks Keparahan (P2) menunjukkan tren yang lebih mengkhawatirkan karena sempat meningkat dari 5,51 (2022) ke 5,75 (2023) sebelum kembali menurun menjadi 5,29 (2024). Secara keseluruhan, tren ini menyimpulkan bahwa meskipun jarak rata-rata kemiskinan (P1) berhasil dikendalikan, ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin (P2) masih rentan terhadap fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan Mimika harus lebih fokus pada kelompok termiskin untuk mencegah ketidakmerataan yang semakin parah.

3.1.6. Kondisi Pendidikan

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Mimika menunjukkan dinamika yang signifikan, baik dari sisi akses, kualitas, maupun keberlanjutan pendidikan. Berikut tabel realisasi kinerja Pendidikan Kabupaten Mimika:

Tabel 3.10.
Realisasi Kinerja Urusan Bidang Pendidikan

No	Indikator	Realiasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.40 Tahun	12,69 Tahun	12,69 Tahun	12,96 Tahun	13,16 Tahun
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10.17 tahun	10,18 Tahun	10,18 Tahun	10,47 Tahun	10,72 Tahun
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	98,65%	95.56%	0.9935	102,8	97,72
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs	86.04%	96.89%	0.9165	67,48	101
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	77.09%	76.70%	0.9548	99,51	77,51

No	Indikator	Realiasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	57.37%	61.86%	0.8502	62,15	62,91
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,06%	0.6%	0.0096	4,28	1,08
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,72%	0,01%	0.0053	2,52	0,57
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,83%	98,15%	0.9846	99,89	99,89%
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,46%	97,85%	0.9818	99,5	99,54%
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104,80%	92,84%	0.9894	95	112,4
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	1.23	93,60%	1.0373	98,59	114,22
13	APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%)	58.80%	52.92%	0.4847	49,8	98,70
14	Angka Kelulusan Paket A (%)			1	25,36	
15	Angka Kelulusan Paket B (%)			1	28,99	
16	Angka Kelulusan Paket C (%)			1	41,08	
17	Angka Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun Laki-laki dan Perempuan (%)	57.70%	57.01%	0.674	84	
18	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik		99,24%	0.7		97,82%
19	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik		98,30%	0.93		58
20	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD	1: 22	1:24	1:17.49		1:20,34
21	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP	1: 17	1:17	1:23.31		1:16,60
22	Rasio Rombongan Belajar (Rombel) Terhadap Ruang Kelas SD	0.9:1	0,8:1	1 :1		
23	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	58.80%	52.92%	0.4847	49,80	98,70
24	Angka Melek Huruf (Usia 15 - 59 Tahun) (%)	57.70%	57.01%	0.674		
25	Persentase Lembaga PAUD Berizin Operasional dan Terakreditasi (Lembaga)	100 / 21.3	100/ 71.71%	100 / 75.24%		
26	Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)			1		

No	Indikator	Realiasi Tahun Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
27	Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)			1		
28	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Usia Produktif 15 - 44 Tahun) Memiliki Kemampuan Life Skill (Orang)			0		
29	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	77.1%	61.3%	0.9422		70,44%
30	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	49.1%	84.9%	0.8862		72,38%
31	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	93.5%	97.1%	1		99,60%
32	Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	5.5%	4.7%	0.0804		11%
33	Persentase Guru SD bersertifikat pendidik (%)	14.2%	16.4%	0.1011		20,62%
34	Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik (%)	29.6%	25.6%	0.2328		24,41%
35	Cakupan kurikulum muatan lokal					50
36	Kualitas Tenaga Pendidik					80,8

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

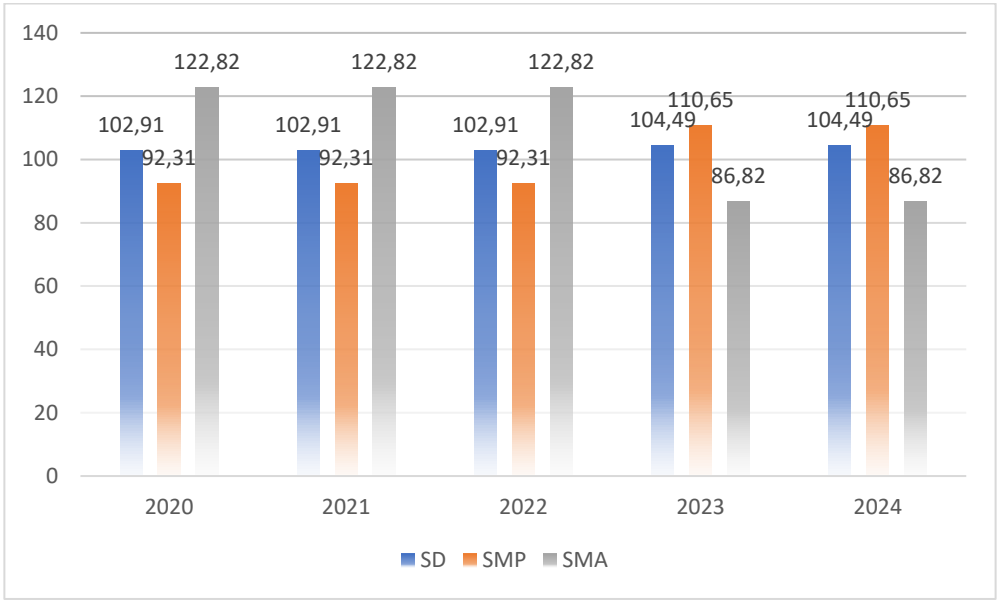
Indikator pendidikan di Kabupaten Mimika menunjukkan kemajuan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus meningkat hingga 2024, menandakan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi. Tren serupa terlihat pada Angka Melanjutkan antarjenjang, baik dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA/SMK, yang mencapai lebih dari 110% pada 2024, mencerminkan kelancaran transisi pendidikan. Meski sempat terjadi fluktuasi pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), mayoritas indikator tetap menunjukkan arah yang membaik.

Di sisi lain, sektor efisiensi dan mutu pendidikan juga mengalami peningkatan. Angka Putus Sekolah (APS) berhasil ditekan di bawah 1% untuk semua jenjang pada 2024, sementara Angka Kelulusan (AL) mencapai lebih dari 99%. Ketersediaan tenaga pendidik pun relatif ideal dengan rasio guru-murid seimbang dan peningkatan kualifikasi akademik guru hingga 99,6% untuk SMP. Namun, masih terdapat tantangan pada kondisi fisik sekolah jenjang SMP dan rendahnya sertifikasi pendidik, sehingga perlu upaya berkelanjutan agar kualitas pendidikan di Mimika tumbuh lebih merata dan berkeadilan.

a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kabupaten Mimika 2020-2024

Analisis terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kabupaten Mimika pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya pola yang relatif stabil pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), namun dengan pergerakan yang dinamis pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). APK SD mempertahankan angka yang seragam, yaitu 102,91 dari tahun 2020 hingga 2022, sebelum mengalami sedikit peningkatan menjadi 104,49 pada tahun 2023 dan bertahan hingga 2024. Sementara itu,

APK SMA menunjukkan angka tertinggi dan stabil di 122,82 selama tiga tahun pertama. Sebaliknya, jenjang SMP mencatatkan fluktuasi yang paling signifikan, dimulai dari 92,31 (2020-2022) kemudian melonjak tajam menjadi 110,65 pada tahun 2023, sebelum akhirnya mengalami penurunan drastis kembali ke 86,82 pada tahun 2024.

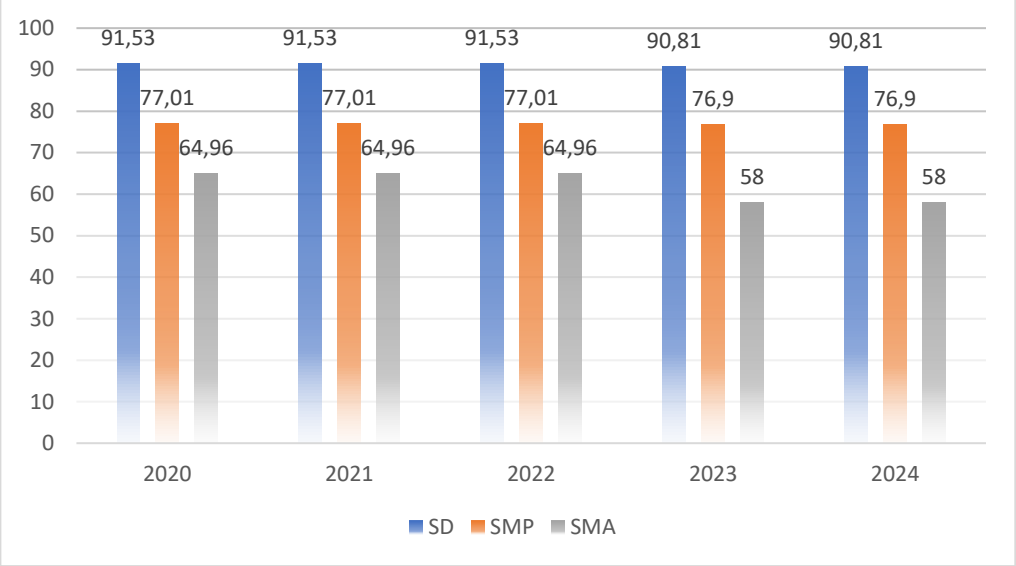


Gambar 3.29.
Grafik Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kabupaten Mimika 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, data APK Mimika menyimpulkan bahwa capaian partisipasi pada jenjang SD dan SMA cenderung memuaskan, dengan angka di atas 100% (kecuali untuk APK SMP di tahun 2020-2022 dan 2024), yang mengindikasikan adanya partisipasi siswa di luar kelompok usia resmi. Namun, stabilitas yang terjadi pada SD dan SMA, terutama lonjakan tinggi yang stagnan di SMA pada awal periode, perlu dicermati dari sisi kualitas data. Tantangan utama terletak pada jenjang SMP. Lonjakan spektakuler APK SMP di tahun 2023 (110,65) dan diikuti oleh penurunan tajam yang kembali ke level terendah pada tahun 2024 (86,82) menunjukkan adanya ketidakstabilan yang serius dalam sistem pendidikan menengah pertama di Mimika. Penurunan di tahun 2024 mengindikasikan adanya sejumlah besar anak usia SMP yang kembali tidak bersekolah, sehingga memerlukan intervensi mendesak untuk memahami faktor pendorong di balik volatilitas partisipasi di jenjang ini.

b) Angka Partisipasi Murni Pendidikan Kabupaten Mimika 2020-2024

Analisis terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan di Kabupaten Mimika selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang sangat stabil pada tiga jenjang pendidikan, diikuti oleh penurunan di tahun-tahun akhir. APM mengukur proporsi penduduk usia sekolah yang terdaftar pada jenjang yang sesuai. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), APM menunjukkan angka yang sangat tinggi dan stabil di 91,53% selama tiga tahun berturut-turut (2020, 2021, dan 2022), sebelum sedikit menurun menjadi 90,81% pada tahun 2023 dan 2024. Pola serupa terlihat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang stabil di 77,01% pada periode 2020–2022, lalu menurun menjadi 76,9% pada 2023–2024. Sementara itu, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mencatatkan angka terendah dengan penurunan yang paling drastis, stabil di 64,96% (2020–2022) kemudian jatuh tajam ke 58% pada tahun 2023 dan 2024.

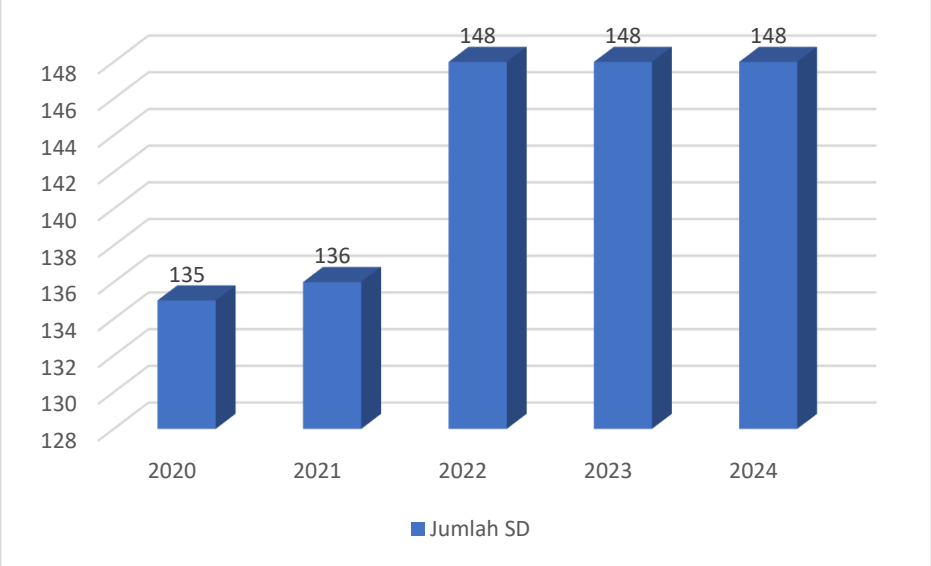


Gambar 3.30.
Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kabupaten Mimika 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, data APM Kabupaten Mimika menyimpulkan bahwa meskipun partisipasi murni pada jenjang SD tergolong baik, tingkat partisipasi semakin menurun pada jenjang yang lebih tinggi, mengindikasikan adanya masalah transisi dan retensi siswa. Penurunan yang relatif kecil pada jenjang SD dan SMP di akhir periode menunjukkan sedikit penurunan efektivitas dalam menjangkau kelompok usia sekolah yang tepat. Namun, tantangan terberat terletak pada jenjang SMA, di mana APM anjlok ke angka 58% dan bertahan rendah. Hal ini berarti lebih dari 40% anak usia SMA di Mimika tidak terdaftar di sekolah yang seharusnya, mengisyaratkan tingginya angka putus sekolah setelah lulus SMP atau tidak melanjutkan sama sekali. Oleh karena itu, prioritas kebijakan pendidikan Mimika harus difokuskan pada upaya meningkatkan akses dan motivasi agar siswa lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan memastikan APM dapat kembali ditingkatkan, terutama pada jenjang yang lebih tinggi.

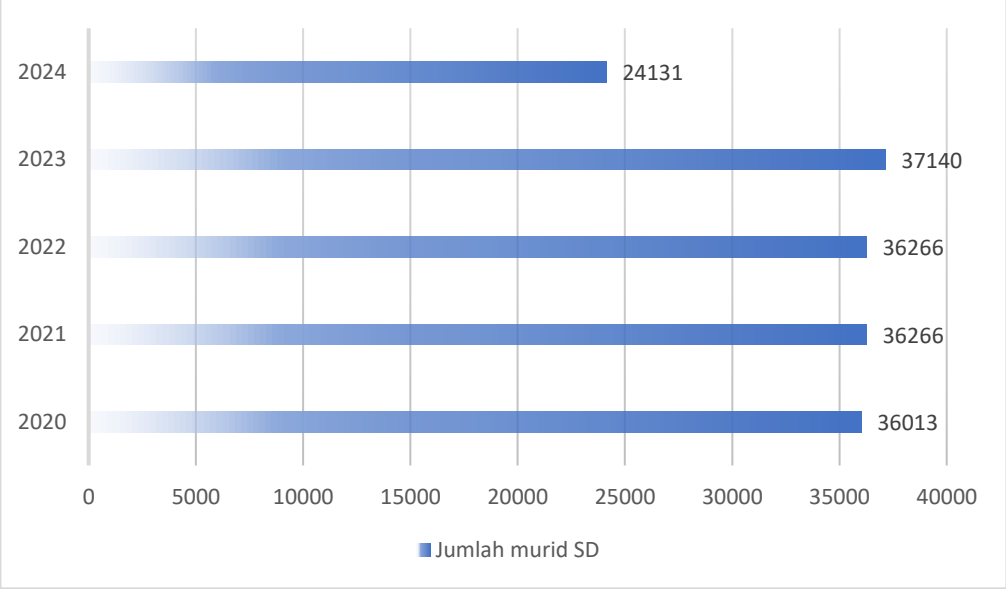
c) Jumlah Sekolah Dasar dan Murid Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Sektor pendidikan dasar di Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen serius dalam memperluas aksesibilitas institusional selama lima tahun terakhir, yang didorong oleh kebutuhan untuk melayani populasi yang tersebar secara geografis. Infrastruktur pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Mimika, yang memiliki tantangan demografi dan geografis unik di Provinsi Papua. Ketersediaan SD secara memadai menjadi indikator kunci dalam menjamin hak fundamental setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dasar, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 3.31.
Grafik Jumlah Sekolah Dasar Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Analisis data menunjukkan adanya ekspansi cepat institusi pendidikan dasar diikuti oleh anomali populasi murid. Jumlah SD melonjak dari 135 unit di tahun 2020 menjadi 148 unit di tahun 2022, dan jumlah ini dipertahankan secara stabil hingga tahun 2024, mengindikasikan bahwa fase pembangunan fisik telah mencapai *plateau*. Sementara itu, jumlah murid SD mengalami fluktuasi yang mencolok; dari 36.013 murid pada 2020, angka ini stabil di sekitar 36.000–37.000 hingga tahun 2023. Namun, terjadi penurunan tajam dan substansial pada tahun 2024, di mana jumlah murid anjlok menjadi hanya 24.131, menciptakan disparitas signifikan antara kapasitas fisik yang stabil dan utilisasi kapasitas yang menurun drastis. Fenomena penurunan murid sebesar kurang lebih 35% pada tahun terakhir ini merupakan indikasi krisis data atau pergeseran demografi besar yang memerlukan investigasi mendalam.

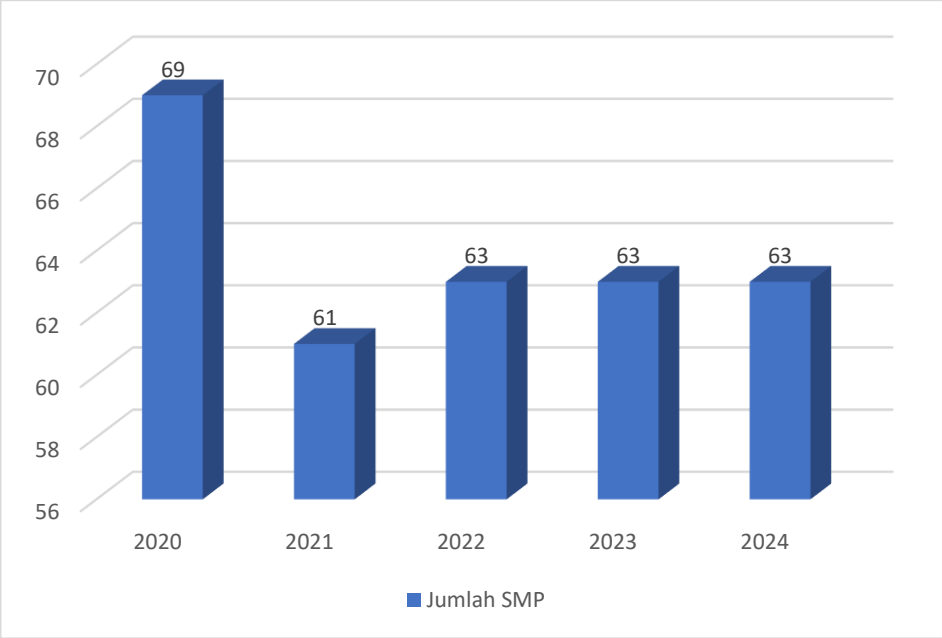


Gambar 3.32.
Grafik Jumlah Murid Sekolah Dasar Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, lima tahun terakhir di Kabupaten Mimika ditandai dengan keberhasilan monumental dalam peningkatan kuantitas institusi SD, mencerminkan dedikasi untuk memperluas jangkauan pendidikan ke daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Namun, keberhasilan pembangunan fisik ini dihadapkan pada tantangan serius berupa penurunan masif jumlah murid di tahun 2024. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa fokus kebijakan pendidikan harus beralih dari pembangunan fisik ke optimalisasi dan efisiensi operasional dari 148 SD yang sudah ada. Prioritas harus diletakkan pada verifikasi akurasi data murid dan penguatan program untuk memastikan setiap kapasitas yang ada termanfaatkan secara efektif demi meningkatkan kualitas dan pemerataan hasil pendidikan di Kabupaten Mimika.

d) Jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Murid Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

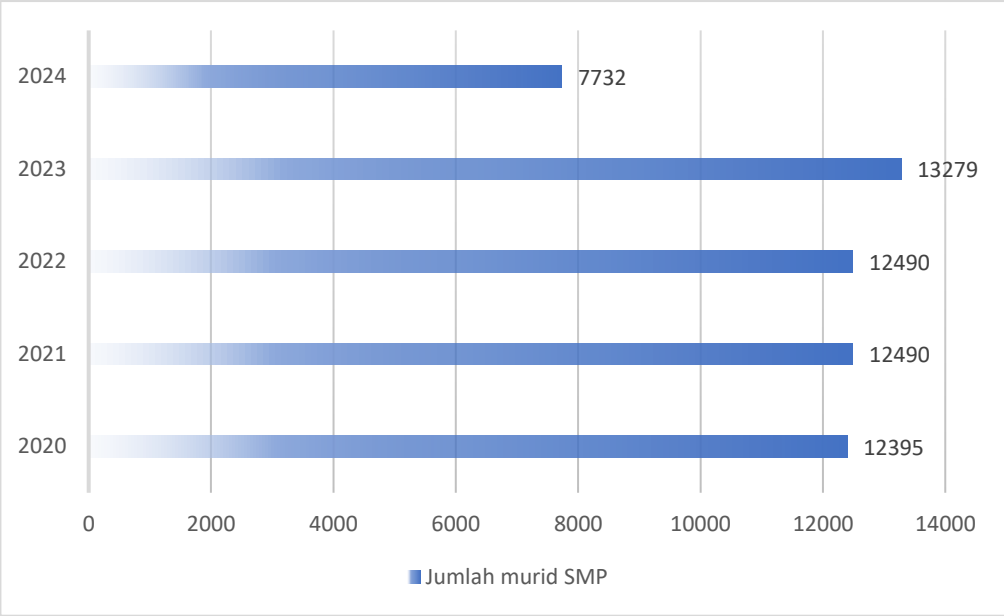
Sektor pendidikan menengah pertama di Kabupaten Mimika menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan jenjang dasar, berfokus pada peningkatan kualitas akses bagi lulusan SD. Ketersediaan SMP sangat krusial dalam menjamin transisi pendidikan dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 13-15 tahun di kabupaten tersebut. Infrastruktur SMP berfungsi sebagai penentu keberlanjutan jenjang pendidikan formal, khususnya di wilayah dengan sebaran penduduk yang menuntut pendirian sekolah yang lebih tersebar. Data menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, jumlah SMP telah mengalami fluktuasi, yang merefleksikan dinamika pembukaan, penutupan, atau penggabungan institusi di Mimika.



Gambar 3.33.
Grafik Jumlah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Analisis data menunjukkan adanya penurunan awal jumlah SMP diikuti oleh stagnasi institusional dan fluktuasi ekstrem pada populasi murid. Jumlah SMP menurun dari 69 unit di tahun 2020 menjadi 61 unit di tahun 2021, sebelum kemudian distabilkan di angka 63 unit dari tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh rasionalisasi atau penggabungan sekolah. Sementara itu, jumlah murid SMP relatif stabil di kisaran 12.395 hingga 12.490 dari tahun 2020 hingga 2022, bahkan mengalami sedikit puncak di tahun 2023 dengan 13.279 murid. Namun, terjadi penurunan mendadak pada tahun 2024, di mana jumlah murid anjlok menjadi 7.732, menciptakan disparitas signifikan antara kapasitas

sekolah yang stabil dan utilisasi kapasitas yang menurun drastis, serupa dengan pola yang terjadi di jenjang SD.

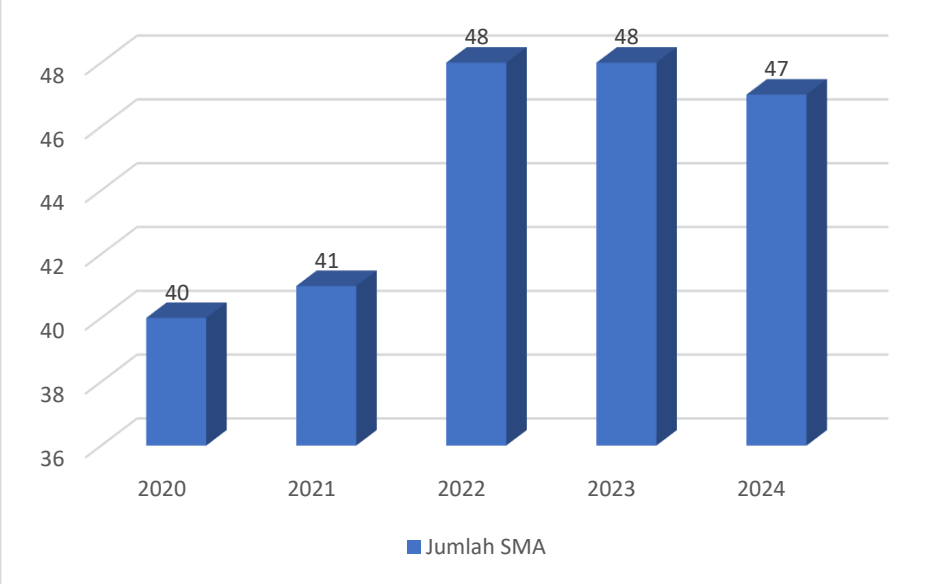


Gambar 3.34.
Grafik Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, lima tahun terakhir di Kabupaten Mimika ditandai dengan upaya konsolidasi kelembagaan pada jenjang SMP, dengan jumlah institusi yang berangsur stabil di angka 63 unit pasca-rasionalisasi di tahun 2021. Meskipun demikian, keberhasilan ini dibayangi oleh krisis populasi murid yang akut di tahun 2024, di mana penurunan jumlah murid mencapai lebih dari 40% dari tahun sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa fokus kebijakan harus diarahkan pada penyelidikan mendalam terhadap penyebab penurunan murid yang masif di tahun 2024—yang mungkin disebabkan oleh ketidakakuratan data, migrasi, atau peningkatan Angka Putus Sekolah. Upaya selanjutnya harus berpusat pada optimalisasi pemanfaatan 63 unit SMP yang ada dan menjamin bahwa kualitas pendidikan tetap terjamin meskipun terjadi fluktuasi populasi yang tidak terduga.

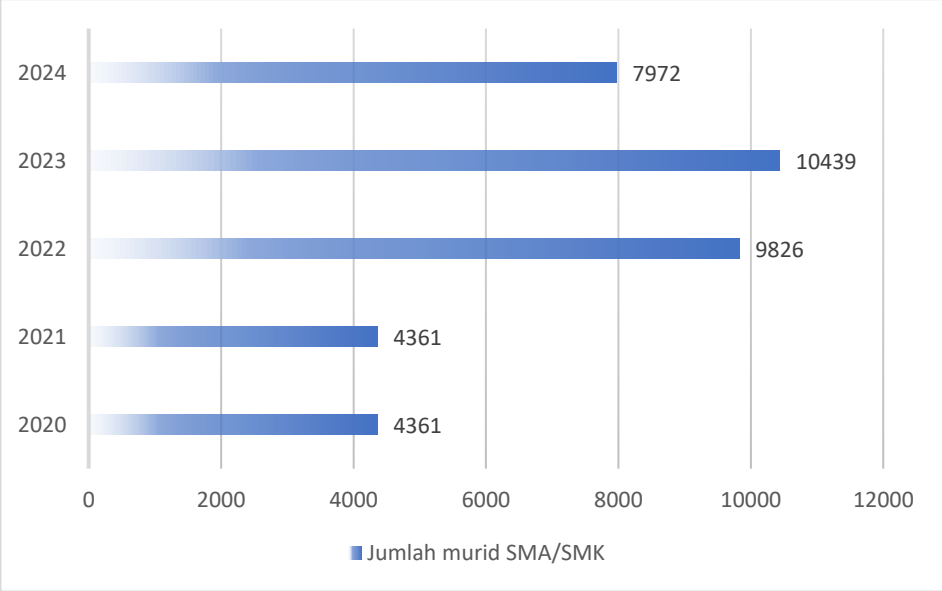
e) Jumlah Sekolah Menengah Atas dan Murid Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Pendidikan menengah atas (SMA) di Kabupaten Mimika berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan generasi muda menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keberadaan SMA menjadi wadah strategis bagi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik di wilayah yang memiliki dinamika sosial-ekonomi yang berkembang pesat ini. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru dan peningkatan fasilitas pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Mimika dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Tengah.



Gambar 3.35.
Grafik Jumlah Sekolah Menengah Atas Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah SMA di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 40 SMA, meningkat menjadi 41 SMA pada tahun 2021, dan mencapai 48 SMA pada tahun 2022 dan 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 47 SMA pada tahun 2024. Jumlah murid SMA/SMK juga menunjukkan tren fluktuatif dengan peningkatan tajam dari 4.361 murid pada tahun 2020–2021 menjadi 9.826 murid pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya sebesar 10.439 murid pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi 7.972 murid pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya perkembangan kapasitas dan daya tarik pendidikan menengah di Mimika yang sejalan dengan peningkatan sarana pendidikan, meskipun terdapat sedikit penurunan jumlah murid pada tahun terakhir akibat kemungkinan faktor transisi atau distribusi wilayah pendidikan.



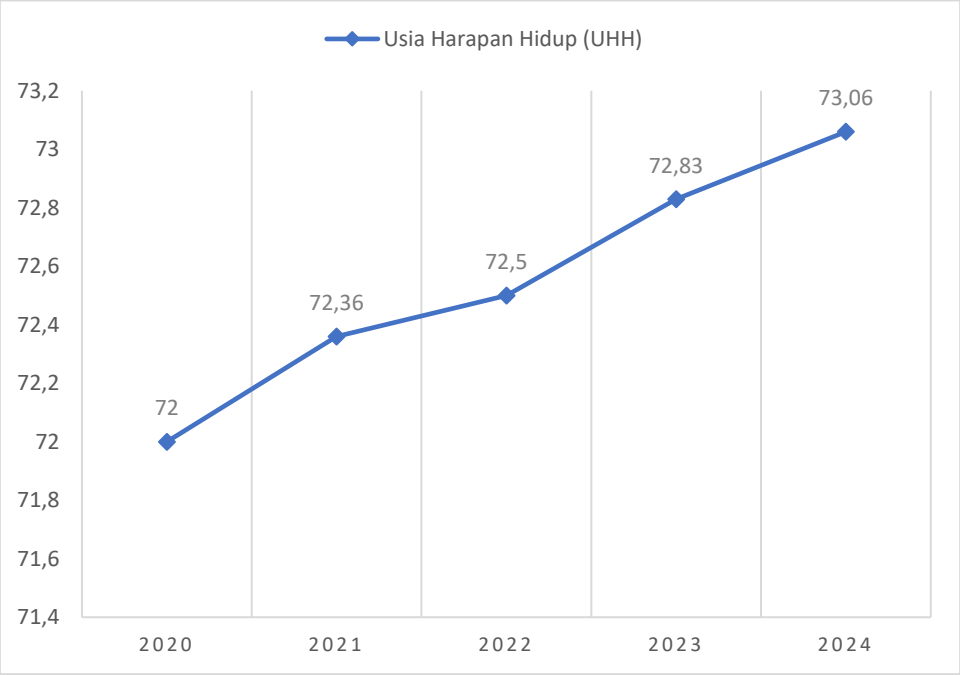
Gambar 3.36.
Grafik Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, perkembangan SMA di Kabupaten Mimika selama lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang positif dalam hal ketersediaan lembaga pendidikan dan partisipasi siswa. Peningkatan jumlah sekolah dan murid mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan daerah dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, secara umum tren lima tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Kondisi ini memperkuat posisi Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah di Papua Tengah yang memiliki potensi kuat dalam membangun generasi muda berpendidikan, yang pada gilirannya dapat mendukung pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian dan komoditas unggulan daerah, termasuk kopi.

3.1.7. Kondisi Kesehatan

a) Usia Harapan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ada. Di Kabupaten Mimika, perkembangan UHH mencerminkan kemajuan dalam bidang pelayanan kesehatan, gizi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan demikian, analisis terhadap tren UHH menjadi penting untuk memahami sejauh mana pembangunan manusia di wilayah ini berjalan secara berkelanjutan.

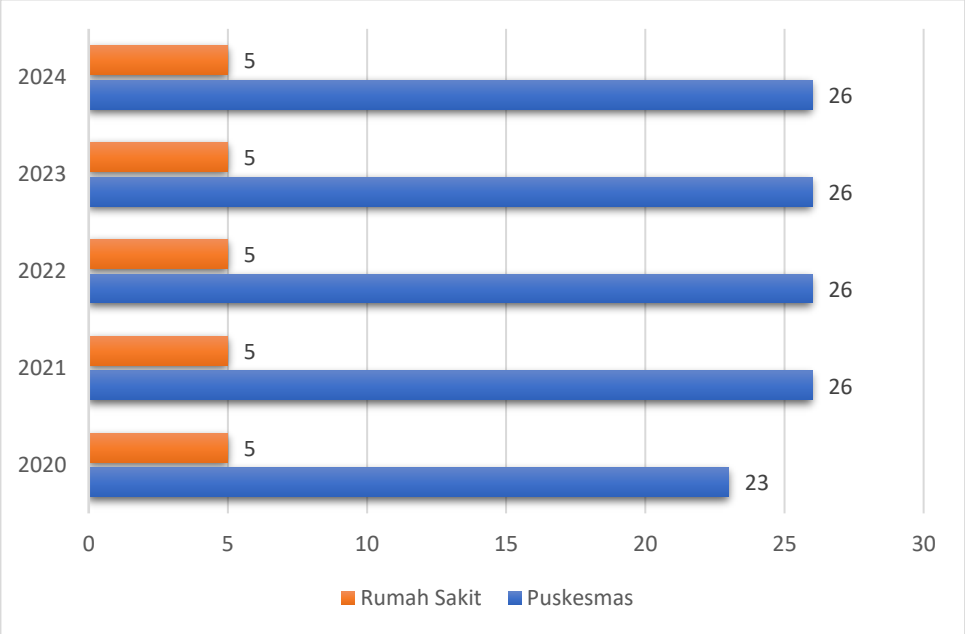


Gambar 3.37.
Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Mimika tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 72 tahun, kemudian naik menjadi 72,36 tahun pada 2021 dan 72,5 tahun pada 2022. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 mencapai 72,83 tahun, dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 73,06 tahun. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat Mimika, yang dipengaruhi oleh peningkatan layanan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan penduduk secara umum.

b) Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

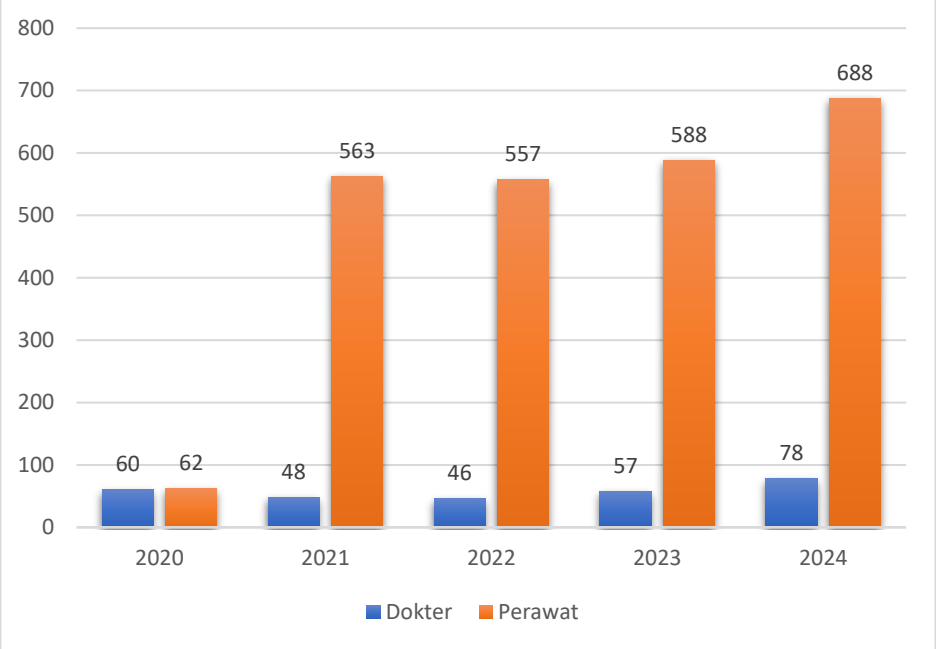
Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Mimika menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Tercatat terdapat 5 rumah sakit yang konsisten beroperasi setiap tahun selama periode tersebut. Sementara itu, jumlah puskesmas mengalami peningkatan dari 23 unit pada tahun 2020 menjadi 26 unit sejak tahun 2021 hingga 2024. Data ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan jumlah puskesmas yang tersebar di berbagai distrik.



Gambar 3.38.
Grafik Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

c) Jumlah Dokter dan Perawat Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Kabupaten Mimika menunjukkan penguatan signifikan pada Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang vital untuk mempertahankan Angka Harapan Hidup (AHH) tinggi. Jumlah Perawat mengalami peningkatan substansial, melonjak dari sekitar 563 orang di tahun 2021 menjadi 688 orang di tahun 2024, yang menunjukkan keberhasilan dalam penambahan staf pendukung layanan kesehatan primer. Meskipun jumlah Dokter sempat fluktuatif, angka ini juga berakhir dengan peningkatan, mencapai 78 orang di tahun 2024 (naik dari 60 di 2020), menegaskan adanya upaya peningkatan rasio tenaga medis per penduduk meskipun masih terdapat ketimpangan signifikan antara jumlah dokter dan perawat.



Gambar 3.39.
Grafik Jumlah Dokter dan Perawat Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

3.1.8. Kondisi Infrastruktur

a) Panjang Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Struktur jaringan jalan di Mimika umumnya terbagi atas tiga kategori status—jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten yang total keseluruhannya melayani konektivitas internal dan eksternal. Pada tahun 2024, total panjang jalan di Kabupaten Mimika mencapai 1079,5 kilometer. Jalan ini terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kewenangan pemerintah. Untuk jalan yang menjadi kewenangan pusat memiliki panjang 152,2 kilometer. Jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi memiliki panjang 162,1 kilometer, sedangkan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten mencapai 765,2 kilometer. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan di Kabupaten Mimika dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten, yang mencakup lebih dari 70% total panjang jalan di wilayah tersebut. Infrastruktur jalan yang tersebar ini memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.40.
Panjang Jalan Kabupaten Mimika

Kondisi jalan di Kabupaten Mimika memainkan peran krusial dalam mendukung distribusi sektor unggulan. Sebagai wilayah dengan topografi yang menantang, termasuk pegunungan, hutan lebat, dan daerah terpencil yang sulit dijangkau, keberadaan infrastruktur jalan yang baik dan terawat menjadi sangat penting. Banyak jalan di Kabupaten Mimika masih dalam kondisi kurang memadai, dengan beberapa rute yang sering kali rusak, tidak diaspal, atau bahkan terputus akibat kondisi alam seperti hujan lebat dan longsor. Keterbatasan ini mengakibatkan peningkatan biaya transportasi, waktu pengiriman yang lebih lama, dan risiko kerusakan produk sebelum mencapai pasar.

Tantangan ini berdampak langsung pada daya saing daerah serta menghambat peluang ekonomi yang dapat diperoleh dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, di sisi lain, terdapat upaya dari pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki dan memperluas jaringan jalan di wilayah ini. Peningkatan akses jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperlancar distribusi produk unggulan, mengurangi biaya logistik, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Infrastruktur jalan yang memadai juga akan meningkatkan konektivitas antar daerah, baik di Kabupaten Mimika maupun dengan provinsi lain, memungkinkan aliran barang, jasa, dan informasi yang lebih lancar, serta memperkuat integrasi ekonomi di dalam provinsi maupun dengan wilayah lain di Indonesia.

b) Kondisi Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Data kemantapan jalan (Berdasarkan tingkat kerusakan) memperlihatkan adanya perbaikan signifikan dalam kondisi fisik jalan antara tahun 2020 dan 2024. Pada tahun 2020, dari total panjang 765,195 km, mayoritas jalan berada dalam kondisi buruk, dengan 603,512 km diklasifikasikan sebagai Rusak. Namun, pada tahun 2023, meskipun total panjang jalan sama, terjadi peningkatan dramatis pada kategori Baik menjadi 271,73 km, meskipun kategori Rusak Berat juga melonjak menjadi 437,72 km. Capaian terbaik terlihat pada tahun 2024 dengan total panjang 755,46 km, di mana kondisi Baik mencapai 302,2 km dan Sedang meningkat tajam menjadi 293,73 km. Peningkatan yang substansial pada kategori Baik dan Sedang ini mencerminkan efektivitas program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang dilakukan antara tahun 2023 dan 2024, yang secara signifikan mengurangi persentase jalan yang tidak layak.

Tabel 3.11.
Kondisi Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Tahun	Kondisi Jalan				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah/Total
2020	143,294	18,389	603,512	-	**765,195**
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	271,73	8,82	46,92	437,72	**765,19**
2024	302,2	293,73	113,17	46,36	**755,46**

Sumber: BPS Kabupaten Mimika

Data panjang jalan berdasarkan jenis permukaan menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam komposisi material jaringan jalan di Kabupaten Mimika antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total panjang jalan adalah 765,12 km, di mana jalan Aspal hanya menyumbang 159,24 km, dan sebagian besar (448,25 km) dikategorikan sebagai Lainnya. Lonjakan drastis terlihat pada tahun 2023, di mana total panjang jalan tetap stabil (765,195 km), namun jalan Aspal meningkat menjadi 248,665 km, dan terjadi peningkatan mencolok pada jalan Tanah hingga 433,97 km, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam klasifikasi material atau pembangunan di wilayah baru. Tren yang paling menonjol pada tahun 2024 adalah peningkatan jalan Kerikil menjadi 447,8 km dan penurunan drastis jalan Tanah menjadi hanya 0,6 km, mengindikasikan upaya masif untuk meningkatkan kualitas permukaan jalan tanah menjadi kerikil dalam setahun.

Tabel 3.12.
Jenis Jalan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Jalan				
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Total
2020	159,24	36,42	121,21	448,25	**765,12**
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	248,665	45,195	433,97	37,365	**765,195**
2024	**239,14**	447,8	0,6	67	**754,54**

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

c) Jumlah Jembatan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Aktivitas pembangunan jembatan di Mimika, terutama yang berada di bawah wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten, seringkali bersifat proyek tahunan yang bertujuan untuk mengganti struktur yang rusak atau membangun akses baru. Misalnya, laporan menunjukkan adanya pengerjaan hingga 8 jembatan dalam satu tahun anggaran, termasuk jembatan permanen dan jembatan gantung di distrik-distrik penting seperti Jila, Arwanop, dan Jita. Pengerjaan ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kemantapan jaringan jalan secara keseluruhan, sebagaimana terlihat dari data perbaikan jalan.

Berdasarkan laporan pembangunan infrastruktur daerah, jumlah total jembatan di Kabupaten Mimika sulit untuk disajikan dalam satu angka tunggal dan pasti karena adanya berbagai klasifikasi jembatan (jembatan permanen, jembatan gantung, jembatan kayu/darurat) dan perbedaan kewenangan (Nasional, Provinsi, Kabupaten). Namun, secara umum, dapat diestimasi bahwa Kabupaten Mimika memiliki ratusan unit jembatan jika mencakup jembatan dengan berbagai status dan ukuran, dari jembatan utama di jalan poros hingga jembatan kecil di akses kampung dan pedalaman.

Kondisi infrastruktur jembatan di Kabupaten Mimika dicirikan oleh kontras yang tajam antara fokus pembangunan di wilayah tertentu dan kerusakan parah pada akses vital di daerah pedalaman. Berdasarkan laporan terkini, meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas PUPR terus melakukan pembangunan jembatan gantung baru di distrik-distrik pedalaman sebagai upaya perluasan akses, sejumlah jembatan gantung yang sudah ada di wilayah seperti Distrik Hoya (Kampung Jementi-Jawa) dan Distrik Jita (Kampung Kanmapri-Sempan Timur) berada dalam kondisi rusak, rapuh, dan nyaris roboh. Kerusakan ini sering kali disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, seperti curah hujan tinggi yang memicu longsor dan erosi, serta kurangnya pemeliharaan rutin dari pemerintah daerah.

d) Jumlah Bandara

Bandar udara di Kabupaten Mimika menjadi infrastruktur penting untuk mendukung aktivitas perekonomian, terutama distribusi komoditas unggulan, serta memiliki peran vital dalam menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusatpusat aktivitas ekonomi. Bandara Udara Internasional Mozes Kilangin Timika adalah bandara terbesar di Provinsi Papua Tengah. Dengan kondisi geografis yang sulit diakses melalui jalur darat dan waktu tempuh yang lama melalui jalur laut, bandara ini memainkan peran krusial dalam mengangkut hasil pertanian dan perikanan dari daerah pedalaman ke pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar kabupaten. Infrastruktur bandara ini, dengan demikian, tidak hanya memfasilitasi mobilitas manusia tetapi juga menjadi tulang punggung distribusi komoditas yang vital bagi perekonomian daerah.



Gambar 3.41.
Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika

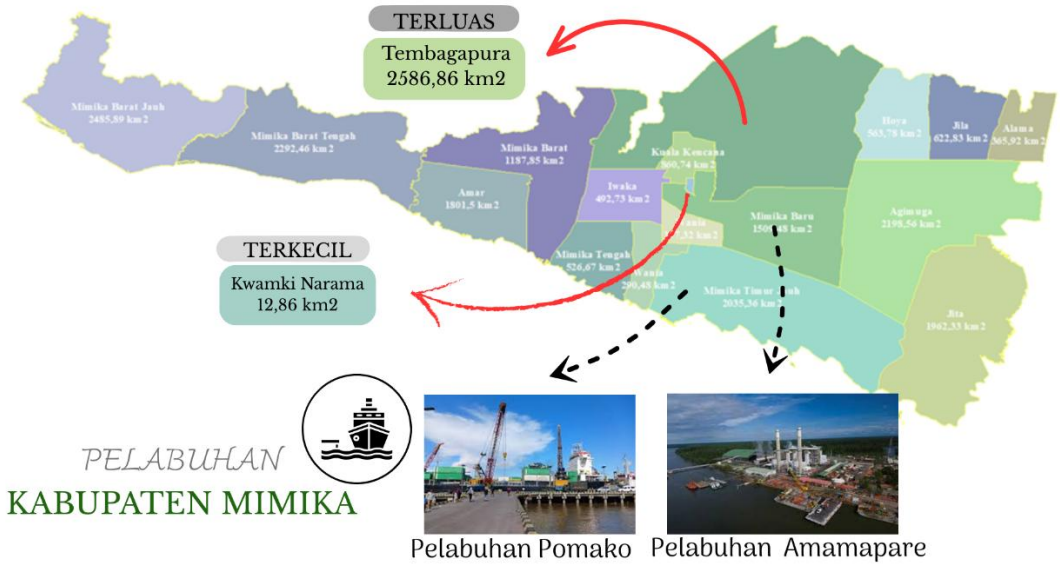
Bandara seperti Bandara Mozes Kilangin di Mimika menjadi penghubung utama antara Kabupaten Mimika dengan kota-kota besar di Indonesia dan dunia. Hal ini memungkinkan komoditas perikanan yang dihasilkan untuk dikirim dengan cepat ke pasar domestik dan internasional, sehingga menjaga kualitas dan kesegaran produk. Selain itu, bandara juga berperan dalam mendukung pariwisata dan investasi di Kabupaten Mimika, membuka peluang ekonomi baru, serta memperkuat daya saing daerah.

e) Jumlah Pelabuhan

Pelabuhan merupakan infrastruktur krusial dalam mendukung distribusi sektor unggulan di Kabupaten Mimika, mengingat wilayah ini memiliki keterbatasan aksesibilitas darat akibat kondisi geografis yang menantang. Sebagai titik utama untuk keluar masuknya barang, pelabuhan memainkan peran penting dalam menghubungkan Kabupaten Mimika

dengan wilayah lain di Indonesia maupun pasar internasional. Sektor unggulan di Papua Tengah, seperti komoditas pertanian, hasil tambang, dan produk perikanan, sangat bergantung pada pelabuhan untuk distribusi yang efisien. Produk-produk ini sering kali dihasilkan di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga memerlukan sarana transportasi yang dapat mengangkut dalam jumlah besar dan menjangkau pasar dengan cepat. Pelabuhan memungkinkan pengiriman massal melalui jalur laut, yang menjadi alternatif lebih ekonomis dibandingkan transportasi udara untuk barang dalam volume besar.

Pelabuhan juga berfungsi sebagai pusat logistik yang memudahkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan komoditas unggulan. Infrastruktur pendukung, seperti gudang dan fasilitas pengolahan di pelabuhan, juga membantu menjaga kualitas produk sebelum dikirim ke pasar tujuan. Dengan demikian, keberadaan pelabuhan di Kabupaten Mimika tidak hanya mempermudah distribusi barang, tetapi juga berperan dalam menjaga daya saing komoditas unggulan dari Kabupaten Mimika di pasar nasional dan internasional. Terdapat dua pelabuhan utama, yaitu **Pelabuhan Pomako** (untuk publik dan logistik umum) dan **Pelabuhan Amamapare** (untuk kepentingan khusus pertambangan), serta **Pelabuhan Kapal Rakyat** (untuk kapal kecil).



Gambar 3.42.
Pelabuhan di Kabupaten Mimika

Pelabuhan Pomako terletak di Kabupaten Mimika, di bagian selatan Provinsi Papua Tengah. Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam distribusi barang dan komoditas dari dan ke Mimika, termasuk untuk kegiatan logistik PT Freeport Indonesia yang beroperasi di daerah ini. Selain Pelabuhan Pomako, terdapat pula Pelabuhan Amamapare yang merupakan salah satu infrastruktur penting di Kabupaten Mimika. Sebagai pelabuhan utama, Amamapare berfungsi sebagai gerbang masuk dan keluar barang, terutama untuk komoditas unggulan seperti hasil pertanian, perikanan, dan bahan tambang. Dengan letak geografis yang strategis, Pelabuhan Amamapare memberikan akses vital bagi transportasi laut, menghubungkan Kabupaten Mimika dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan pasar internasional. Keberadaan pelabuhan ini sangat penting, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi yang menantang, sehingga membuat transportasi darat menjadi sulit dan memakan waktu.

3.1.9. Akses Sumber Daya Air Bersih dan Listrik

a) Akses Air Bersih Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari rumah tangga, toko, kantor, dan lain-lain. Air bersih sendiri

bermanfaat untuk menjaga kesehatan masyarakat yang digunakan untuk mandi, minum, memasak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pada awal periode 2020 hingga 2022, akses air bersih di Kabupaten Mimika melalui sistem perpipaan terpusat masih sangat terbatas. Sebagian besar wilayah kota Timika dan sekitarnya masih menghadapi kendala infrastruktur, menyebabkan masyarakat harus mengandalkan sumber air mandiri seperti sumur atau mata air lokal, dengan kualitas dan kuantitas yang bervariasi. Proyek-proyek air bersih besar yang direncanakan bertahun-tahun sebelumnya sempat mengalami kemandekan, sehingga pelayanan air perpipaan kepada pelanggan massal belum dapat dilakukan secara optimal dan merata.

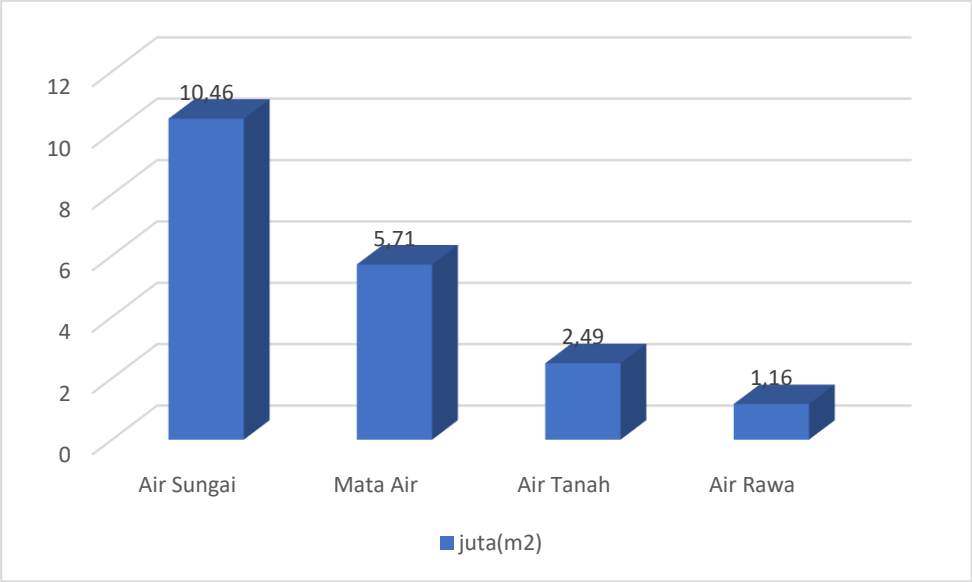
Titik balik signifikan dalam pelayanan air bersih terjadi pada tahun 2023 dengan diserahterimakannya Water Treatment Plant (WTP) Kuala Kencana dari PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Daerah Mimika. Penyerahan fasilitas vital ini membuka jalan bagi Pemkab Mimika untuk memulai penyaluran air bersih berstandar tinggi yang berasal dari sumber pegunungan. Langkah awal yang diambil adalah menguji coba penyaluran air bersih tahap pertama, yang berhasil menjangkau sekitar 7.888 rumah di beberapa wilayah Kota Timika pada Agustus 2023, mengubah secara mendasar lanskap akses air bersih di pusat kabupaten. Memasuki tahun 2024 dan proyeksi hingga 2025, tren peningkatan akses air bersih di Mimika menunjukkan lonjakan pesat. Layanan air bersih ini terus dipercepat melalui program-program pemerintah daerah. Target yang ditetapkan adalah pemasangan total 16.000 Sambungan Rumah (SR) yang direncanakan akan melayani area Satuan Pemukiman (SP) 1 hingga SP 4. Upaya ini tidak hanya berfokus pada kuantitas pelanggan, tetapi juga pada kualitas dan kontinuitas layanan, dengan harapan mampu bertransisi dari layanan terbatas menuju layanan air 24 jam penuh di masa mendatang.

b) Sumber Air Baku Kabupaten Mimika

Ketersediaan air baku di Kabupaten Mimika, terutama di wilayah Timika dan sekitarnya, sangat bergantung pada dua sumber utama: air bawah tanah (akuifer) dan air permukaan (sungai). Studi menunjukkan bahwa Mimika memiliki potensi cadangan air bawah tanah yang besar, menjadikannya sumber utama bagi sebagian besar kebutuhan air bersih rumah tangga melalui sumur-sumur pribadi. Akuifer ini tersebar luas di distrik-distrik padat seperti Mimika Baru, Mimika Timur, dan Kuala Kencana, dengan karakteristik lapisan pasir-kerikil yang mampu menyimpan volume air tawar yang signifikan.

Selain air tanah, air permukaan dari sungai juga dimanfaatkan melalui fasilitas pengolahan. Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui UPTD Dinas PUPR, berfokus pada pembangunan fasilitas pengolahan air minum (WTP), termasuk penerapan teknologi Reverse Osmosis (RO) di distrik-distrik seperti Kokonao dan Amar. Teknologi ini dirancang untuk mengolah air tawar yang melimpah (baik dari sumur dalam maupun sungai) menjadi air siap minum dengan kualitas tinggi. Untuk daerah terpencil, program penyediaan Penampungan Air Hujan (PAH) juga menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun Mimika memiliki cadangan air baku yang memadai, tantangan utama terletak pada pengelolaan dan perluasan jaringan distribusi ke seluruh wilayah distrik. Saat ini, pengelolaan air bersih belum sepenuhnya ditangani oleh PDAM, melainkan di bawah naungan UPTD Dinas PUPR. Oleh karena itu, berbagai proyek strategis terus digalakkan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh populasi di Kabupaten Mimika. Bahan baku utama yang digunakan oleh perusahaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan diproses dari air sungai, danau, mata air dan sumber lainnya.



Gambar 3.43.
Grafik total penggunaan bahan baku air bersih Provinsi Papua Tahun 2023
Sumber: Provinsi Papua dalam Angka 2024

Berdasarkan wilayah, kabupaten/kota dengan penggunaan bahan baku terbesar adalah Kabupaten dan Kota Jayapura sebesar 9,81 juta meter kubik atau sekitar 49,48 persen dari total air baku. Sedangkan kabupaten/kota dengan penggunaan bahan baku terkecil adalah Kabupaten Nabire sebesar 61,80 ribu meter kubik atau sekitar 3,29 persen.

c) Akses Listrik Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Jaringan listrik merupakan salah satu bagian dari utilitas umum yang diperlukan untuk pelayanan dan kegiatan usaha suatu daerah. Ketersediaan listrik memiliki urgensi yang signifikan, baik dalam pemenuhan aktivitas masyarakat secara umum maupun secara lebih spesifik untuk sarana produksi, di mana teknologi saat ini sangat bergantung pada listrik. Ketersediaan listrik dapat dilihat pada kapasitas terpasang pembangkit listrik yang ada. Ketersediaan dan keandalan listrik menjadi faktor kunci dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari sektor industri, perdagangan, hingga sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Mimika. Listrik tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi kegiatan usaha.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Kabupaten Mimika menjadi indikator utama dalam mengukur kemampuan wilayah ini untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri. Di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, tantangan dalam menyediakan listrik sering kali menghambat perkembangan ekonomi. Tanpa listrik, banyak kegiatan produksi tidak dapat berjalan optimal, teknologi modern sulit diterapkan, dan akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi terbatas. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing daerah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas listrik, termasuk pembangunan pembangkit listrik baru dan perluasan jaringan distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil, akan memiliki dampak yang sangat positif. Ketersediaan listrik yang memadai akan mendorong pengembangan industri pengolahan lokal, serta membuka peluang investasi baru. Selain itu, listrik juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Di tahun 2024 jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Mimika ada sebanyak 77.057 konsumen. Dimana listrik di wilayah Kabupaten Mimika sudah mulai menjangkau hampir semua distrik walaupun beberapa distrik belum mencapai 24 jam.



Gambar 3.44.
Grafik Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN Persero di Kabupaten Mimika, 2024
Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

d) Sumber Daya Listrik Kabupaten Mimika

Pembangunan dan ketersediaan infrastruktur kelistrikan merupakan faktor krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di Kabupaten Mimika. Sebagai wilayah yang terus berkembang, kebutuhan akan energi listrik yang andal dan merata menjadi prioritas. Distribusi listrik di Mimika dikelola oleh PT. PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Timika, yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik baik untuk kawasan perkotaan, industri, maupun daerah pedalaman. Berikut data kelistrikan Kabupaten Mimika.

Tabel 3.13.
Daya Terpasang, Poduki dan Distribusi PT.PLN (Persero) pada Cabang/ranting PLN menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika Tahun 2024

Kecamatan	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/ Hilang (KWh)
Agimuga	70,75	98,541	87,619	22	10,9
Amar	360,7	502,387	446,703	114	55,569
Alama	-	-	-	-	-
Hoya	-	-	-	-	-
Iwaka	5,630,000	7,841,521	6,972,387	1,787	867,347
Jila	-	-	-	-	-
Jita	160,2	223,128	198,397	51	24,68
Kuala Kencana	15,744,900	21,929,656	19,499,030	4,997	2,425,628
Kwamki Narama	999,35	1,391,905	1,237,630	317	153,958
Mimika Barat	815,75	1,136,185	1,010,253	259	125,673
Mimika Barat Jauh	296,5	412,968	367,196	94	45,678
Mimika Barat Tengah	460,45	641,319	570,237	146	70,936

Kecamatan	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/ Hilang (KWh)
Mimika Baru	114,511,100	159,492,217	141,814,517	36,345	17,641,355
Mimika Tengah	683,9	952,543	846,965	217	105,36
Mimika Timur	5,833,600	8,125,097	7,224,533	1,852	898,713
Mimika Timur Jauh	116,2	161,845	143,906	37	17,902
Tembagapura	3,5	4,875	4,335	1	539
Wania	41,706,550	58,089,304	51,650,838	13,238	6,425,229
TOTAL Mimika	187,393,450	261,003,491	232,074,547	59,478	28,869,466

Sumber: Kabupaten Mimika dalam Angka 2025

3.1.10. Profil Industri dan UMKM

a) Jumlah Industri Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Industri Kabupaten Mimika didominasi oleh sektor pertambangan, terutama PT Freeport Indonesia, yang mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta menyumbang signifikan terhadap PDRB. PDRB ADHB per kapita Mimika pada tahun 2024 adalah yang tertinggi di Provinsi Papua Tengah, yaitu sebesar Rp446,33 juta per kapita per tahun. Meskipun demikian, data pertanian, seperti produksi padi dan beras, relatif rendah di kabupaten ini dibandingkan kabupaten lain di Papua Tengah, seperti Nabire

b) Jumlah UMKM Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Berdasarkan laporan pada Agustus 2024, jumlah UMKM aktif di Kabupaten Mimika mencapai 18.000 unit, menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Angka ini digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan dukungan pemerintah daerah. Di sisi lain, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop UMKM) Kabupaten Mimika melaporkan pada awal tahun 2024 bahwa mereka melakukan pembinaan terhadap 1.850 pelaku UMKM yang terdata di daerah tersebut pada tahun 2023, yang terdiri dari campuran Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP. Meskipun terdapat perbedaan antara total UMKM aktif dan jumlah UMKM binaan, angka tersebut secara keseluruhan menunjukkan adanya puluhan ribu pelaku UMKM yang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Mimika. Untuk data tahunan yang lebih rinci, sumber resmi seperti publikasi Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Mimika dari BPS atau Dinas Koperasi dan UKM setempat dapat memberikan rincian angka per distrik.

3.1.11. Kondisi Investasi

Investasi yang ada di suatu kawasan dapat dilihat dari jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi PMDN di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2023 mencapai 458,84 miliar rupiah. Investasi PMDN terbesar terdapat di Kabupaten Mimika sebesar 411,95 miliar rupiah atau sebesar 89,78 persen dari total PMDN di Provinsi Papua Tengah. Diikuti investasi PMDN di Kabupaten Nabire sebesar 42,94 miliar rupaiah atau sebesar 9,36 persen dari total PMDN. Di sisi lain, masih belum ada investasi PMDN yang masuk ke Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2023.

Sementara itu investasi PMA di Provinsi Papua Tengah tahun 2023 baru ada di dua kabupaten saja yakni Kabupaten Mimika dan Nabire, dengan total PMA mencapai US$968,04 juta. Dari total PMA yang terjadi di Provinsi Papua Tengah tersebut sebanyak 99,48 persen atau senilai US$963,04 juta terjadi di Kabupaten Mimika. Sisanya sebesar 0,52 persen atau senilai US$5 juta terjadi di Kabupaten Nabire. Besarnya investasi PMDN dan PMA di

Kabupaten Mimika pad tahun 2023 karena adanya perusahaan besar disana yakni PT. Freeport Indonesia.

a) Nilai Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Realisasi investasi di Kabupaten Mimika tahun 2023 menunjukkan posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah. Dengan total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 411.951,7 juta Rupiah dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 963.037,5 ribu USD, Mimika mencatatkan angka investasi tertinggi di provinsi ini. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kehadiran sektor pertambangan dan energi yang mendominasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Industri besar, terutama pertambangan, menjadi pendorong utama investasi dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah serta penciptaan lapangan kerja. Investasi yang mengalir ke Mimika tidak hanya berfokus pada pengembangan industri besar, tetapi juga menciptakan dampak lanjutan yang positif, seperti peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, serta kapasitas sumber daya manusia lokal. Dengan adanya investasi PMDN dan PMA yang signifikan, Mimika juga menjadi pusat transfer teknologi dan inovasi, yang berpotensi meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Sementara kabupaten-kabupaten lain di Papua Tengah mencatatkan angka investasi yang lebih rendah, Mimika berdiri sebagai motor penggerak utama bagi ekonomi provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten Nabire, yang berada di posisi kedua dengan PMDN sebesar 42.937,2 juta Rupiah dan PMA sebesar 5.005,2 ribu USD, kontribusi Mimika jelas sangat dominan. Selain sektor pertambangan, Mimika juga memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan. Letak geografisnya yang strategis dengan akses langsung ke perairan yang kaya sumber daya menjadikan sektor ini peluang besar untuk dikembangkan. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan diharapkan mampu melengkapi investasi yang ada, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam rantai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang tepat, sektor perikanan dan kelautan di Mimika dapat tumbuh sebagai salah satu penopang ekonomi baru, memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan memperluas lapangan kerja.

Tabel 3.14.
Realisasi Investasi per Kabupaten Provinsi Papua Tengah tahun 2023

Kabupaten	PMDN (Juta Rupiah)	PMA (Ribu US$)
Mimika	411.951,70	963.037,50
Dogiyai	160	-
Deiyai	-	-
Nabire	42.937,20	5.005,20
Paniai	791,8	-
Intan Jaya	-	-
Puncak	3.000,00	-
Puncak Jaya	-	-
Papua Tengah	458.840,70	968.042,70

Sumber: Papua Tengah dalam Angka 2025

b) Jumlah Proyek Investasi Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Mimika menunjukkan fluktuasi ekstrem dan tidak stabil dalam hal jumlah proyek maupun nilai investasi selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, Mimika mencatat puncak jumlah proyek yang luar biasa, mencapai 7.987 proyek, dengan nilai investasi yang signifikan sebesar Rp12,43 triliun. Namun, di tahun 2021, terjadi decline yang sangat drastis, di mana jumlah proyek anjlok menjadi hanya 656 proyek dan nilai investasi menyusut tajam menjadi Rp515,78 miliar (penurunan lebih dari 95% dari tahun sebelumnya). Fenomena ini mengindikasikan bahwa

sebagian besar proyek di tahun 2020 mungkin merupakan investasi berskala mikro atau jangka pendek yang tidak berkelanjutan.

Tabel 3.15.
Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rupiah)
2020	7987	12.430.373.487.914
2021	656	515.787.500.000
2022	-	39.310.168.689.185
2023	-	-
2024	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, 2025

Secara analitis, lonjakan nilai investasi kembali terjadi pada tahun 2022, meskipun data jumlah proyek tidak tersedia, nilai investasi melonjak signifikan menjadi Rp39,31 triliun. Kenaikan tajam ini, hampir tujuh puluh kali lipat dari nilai tahun 2021, mengisyaratkan adanya satu atau beberapa proyek investasi berskala sangat besar yang mulai direalisasikan pada tahun tersebut. Data PMDN ini merefleksikan bahwa Mimika memiliki potensi investasi yang sangat besar (terutama di sektor ekstraktif dan infrastruktur pendukung), namun pola investasi bersifat tidak merata dan sangat bergantung pada masuknya proyek-proyek high-value daripada jumlah proyek yang banyak.

3.2. Analisis Struktur Perekonomian

3.2.1. PDRB Kabupaten Mimika

a) PDRB ADHB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika berdasarkan Lapangan Usaha sangat esensial untuk pengembangan potensi wilayah. PDRB per sektor memberikan gambaran menyeluruh mengenai nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi di Mimika. Analisis ini memiliki peran ganda: pertama, mengidentifikasi sektor mana yang saat ini menopang utama perekonomian daerah, dan kedua, menyingkap potensi-potensi pertumbuhan yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui pemahaman akan kontribusi setiap sektor, pemangku kepentingan dapat menentukan prioritas investasi yang akurat, mengarahkan perhatian pada area yang membutuhkan perbaikan, dan merumuskan strategi diversifikasi ekonomi. Oleh karena keunikan geografis, kekayaan sumber daya alam, dan keragaman budaya yang dimiliki, analisis mendalam terhadap PDRB Mimika menjadi sangat relevan untuk perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024:

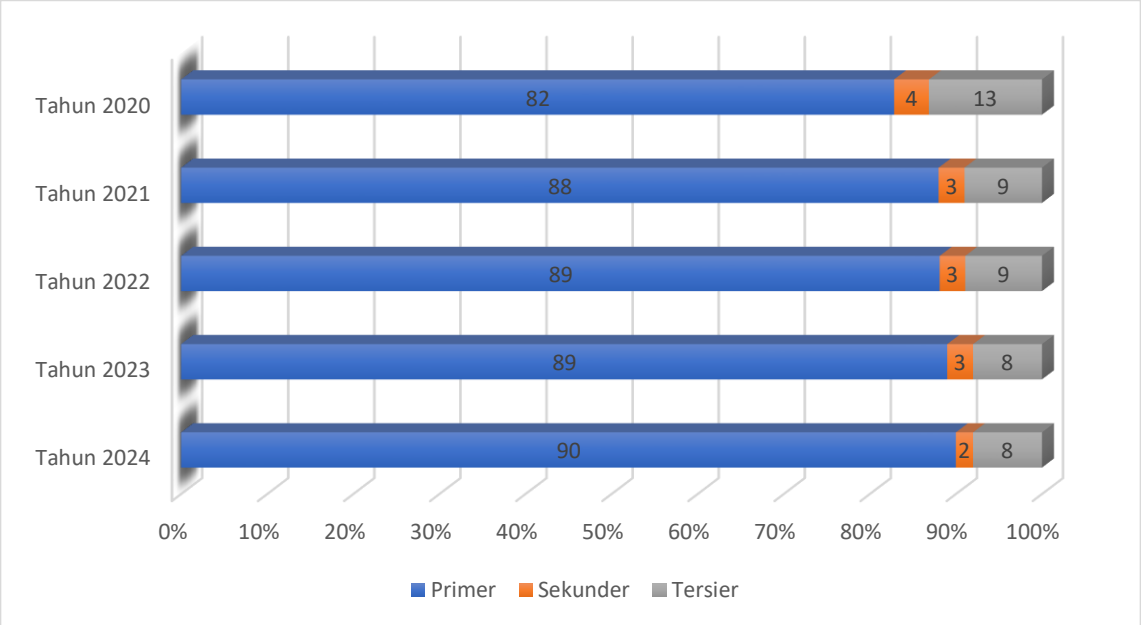
Tabel 3.16.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%), Tahun 2024

Kategori	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB ADHB Tahun 2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1%
B.	Pertambangan dan Penggalian	89%
C.	Industri Pengolahan	0%
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0%
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0%
F.	Konstruksi	2%
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2%

Kategori	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB ADHB Tahun 2024
H.	Transportasi dan Pergudangan	1%
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0%
J.	Informasi dan Komunikasi	1%
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0%
L.	Real Estate	1%
M.	Jasa Perusahaan	0%
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1%
O.	Jasa Pendidikan	0%
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0%
Q.	Jasa Lainnya	0%
Produk Domestik Regional Bruto		**100%**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025

Berdasarkan analisis diatas, Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Mimika pada 2024 menunjukkan dominasi sektor pertambangan dan penggalian, yang menyumbang 89% terhadap total PDRB. Hasil tersebut naik 6% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 83% . Sektor konstruksi dan perdagangan besar dan eceran juga memainkan peran penting dengan kontribusi 2%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor transportasi dan pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatatkan 1 %. Secara keseluruhan, distribusi PDRB ini mencerminkan ketergantungan yang besar pada sektor pertambangan, khususnya bijih logam, sebagai pilar utama ekonomi Kabupaten Mimika. Namun, sektor-sektor lain seperti pertanian dan perdagangan juga menunjukkan peran yang penting, meskipun masih dengan kontribusi yang lebih kecil.



Gambar 3.45.
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier, 2020-2024 (%)
Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 146 triliun rupiah, dibandingkan tahun sebelumnya naik sekitar 194 miliar rupiah. Struktur ekonomi Kabupaten Mimika didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, yang menyumbang jumlah terbesar dengan 130 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan ketergantungan Kabupaten Mimika pada sektor pertambangan, terutama di Kabupaten Mimika yang menjadi pusat aktivitas tambang. Sektor Konstruksi merupakan kontributor terbesar kedua dengan nilai PDRB sebesar 3,2 triliun rupiah. Sektor ini penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun sosial, di wilayah yang memiliki tantangan geografis yang kompleks seperti Kabupaten Mimika. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga memainkan peran penting dengan kontribusi sebesar 3,1 triliun rupiah. Ini menandakan aktivitas perdagangan yang cukup kuat di wilayah tersebut, yang didorong oleh kebutuhan lokal serta distribusi barang ke wilayah pegunungan dan terpencil.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 1,6 triliun rupiah. Meskipun penting untuk ketahanan pangan dan mata pencaharian lokal, kontribusi sektor ini terhadap total PDRB masih relatif lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lain seperti pertambangan dan konstruksi. Sektor Transportasi dan Pergudangan menyumbang 1,7 triliun rupiah, menunjukkan peningkatan aktivitas logistik yang krusial bagi daerah dengan kondisi geografis yang sulit diakses. Sementara itu, sektor Informasi dan Komunikasi juga signifikan dengan kontribusi sebesar 1,9 triliun rupiah, mencerminkan pentingnya layanan telekomunikasi dan digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat PDRB sebesar 569 miliar rupiah, yang menunjukkan peningkatan penggunaan dan akses terhadap layanan keuangan di Kabupaten Mimika. Di sisi lain, sektor lainnya seperti Jasa Perusahaan dan Real Estat masing-masing menyumbang 451 miliar rupiah dan 819 miliar rupiah, mengindikasikan perkembangan ekonomi yang semakin beragam. Sektor jasa lainnya, termasuk administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, secara kolektif juga memberikan kontribusi penting dengan nilai gabungan melebihi 2,1 triliun rupiah ,menunjukkan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam mendukung perekonomian daerah, terutama di wilayah yang memerlukan dukungan infrastruktur dan layanan dasar.

Tabel 3.17.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 (juta)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.482.986,9	1.523.195,9	1.557.908,7	1.657.312,9	1.654.168,8
B	Pertambangan dan Penggalian	50.702.707,1	81.896.726,7	96.190.021,5	111.810.973,5	130.210.492,0
C	Industri Pengolahan	134.047,4	136.663,9	138.197,1	142.128,8	147.235,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13.100,9	14.128,5	15.898,2	17.108,4	18.323,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.115,9	7.362,0	7.568,5	7.601,4	7.330,0
F	Konstruksi	2.686.446,7	2.803.202,5	3.056.806,2	3.152.874,6	3.266.726,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.268.224,7	2.405.650,4	2.544.022,3	2.857.526,8	3.106.553,0
H	Transportasi dan Pergudangan	793.460,9	963.760,0	1.215.410,0	1.414.427,0	1.703.275,1
I	Penyediaan Akomodasi	232.870,4	237.309,0	248.491,3	261.622,4	276.967,9

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	1.649.482,3	1.764.333,6	1.841.706,1	1.861.460,5	1.914.510,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	369.445,1	380.794,1	433.625,2	513.135,0	569.343,1
L	Real Estate	664.079,4	677.653,2	727.110,1	742.440,4	819.885,6
M,N	Jasa Perusahaan	387.632,8	396.123,7	407.556,6	425.855,4	451.304,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.409.900,6	1.410.864,3	1.408.219,4	1.360.294,6	1.459.720,2
P	Jasa Pendidikan	164.015,8	162.375,4	167.409,0	169.147,4	176.834,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.969,2	198.324,3	199.324,3	199.291,2	218.437,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	235.540,7	237.708,1	248.536,0	279.724,3	296.477,9
PDRB TOTAL		**63.397.036,7**	**95.216.352,2**	**110.407.810,4**	**126.872.924,7**	**146.297.585,8**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025

b) PDRB ADHK

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika atas dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai total Rp 90 triliun di tahun 2024. Struktur ekonomi Kabupaten Mimika didominasi secara absolut oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, yang menyumbang jumlah terbesar dengan 80 triliun. Angka kontribusi yang luar biasa besar ini (sekitar 89% dari total PDRB) secara tegas mencerminkan ketergantungan struktural Kabupaten Mimika pada sektor pertambangan, terutama kegiatan tambang skala besar di wilayah tersebut yang menjadi pendorong utama ekonomi regional.

Sektor konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan sebesar 2 triliun rupiah, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 1,8 triliun rupiah, menunjukkan pentingnya aktivitas perdagangan dalam perekonomian regional dan sektor informasi serta komunikasi memberikan kontribusi sebesar 1,4 triliun rupiah. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Sektor transportasi dan pergudangan menyumbang 825 miliar rupiah, dan. Kontribusi sektor-sektor lain seperti jasa keuangan dan asuransi mencapai 379 miliar rupiah, sementara sektor real estate memberikan kontribusi sebesar 539 miliar rupiah. Sektor industri pengolahan, meskipun relatif kecil dibandingkan dengan sektor lain, tetap berperan dengan nilai 101 miliar rupiah. Sektor jasa lainnya, termasuk administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, secara kolektif juga memberikan kontribusi penting dengan nilai gabungan melebihi 1,5 triliun rupiah. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Mimika mencerminkan kekuatan utama dari sektor pertambangan, dengan kontribusi yang signifikan dari sektor konstruksi dan perdagangan, serta peranan penting sektor jasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

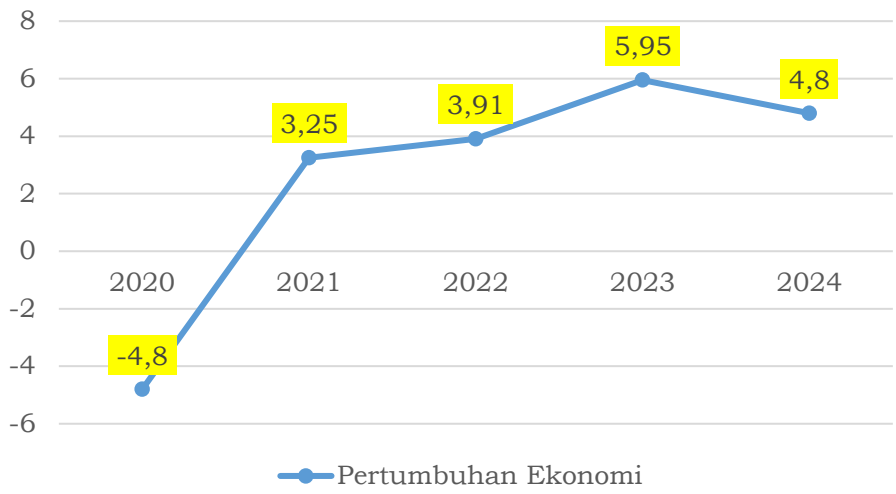
Tabel 3.18.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024 (Juta)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.176.756,5	1.181.167,5	1.189.783,7	1.232.810,9	1.189.312,4
B	Pertambangan dan Penggalian	41.737.919	60.161.230,0	70.450.482,5	76.488.982,3	80.410.277,1

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
C	Industri Pengolahan	101.013,2	101.701,2	102.092,2	101.767,5	101.732,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.019,5	9.554,0	10.300,5	10.692,3	10.848,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.305,1	6.421,7	6.542,3	6.517,5	6.381,5
F	Konstruksi	1.814.964,5	1.851.989,8	1.960.516,4	1.994.917,2	2.007.854,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.560.655,2	1.629.741,9	1764.024,0	1.778.760,9	1.810.617,6
H	Transportasi dan Pergudangan	519.645,8	604.037,0	683.819,9	740.622,7	825.305,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	164.190,6	165.137,0	168.516,3	169.514,3	173.226,1
J	Informasi dan Komunikasi	1.270.485,5	1.334.263,9	1.398.562,9	1.408.280,9	1.442.871,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	294.907,1	298.583,1	318.499,9	343.798,7	379.467,4
L	Real Estate	460.690,7	461.704,3	493.469,5	500.382,3	539.700,1
M,N	Jasa Perusahaan	303.581,0	305.736,5	307.955,0	321.426,9	331.514,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.061.001,2	1.064.966,8	1.062.602,5	1.063.234,5	1.081.006,3
P	Jasa Pendidikan	130.372,2	130.541,7	132.143,9	141.755,4	145.635,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.022.8	139.036,8	139.982,3	139.489,9	144.672,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	171.555,6	173.099,6	178.309,9	182.540,8	191.122,4
PDRB TOTAL		**50.922.905,3**	**69.618.912,8**	**80.277.603,6**	**86.625.494,9**	**90.791.544,8**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dihitung dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.



Gambar 3.46.
Pertumbuhan Ekonomi Kabpaten Mimika 2020-2024
Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan selama periode 2019–2023, terutama akibat pengaruh sektor tambang yang dominan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencatat penurunan tajam sebesar -38,47%, yang disebabkan oleh faktor produksi di sektor tambang. Namun, pada tahun 2020, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan positif sebesar 11,55%, meskipun masih berada dalam masa pandemi COVID-19.

Pemulihan ekonomi berlanjut pada tahun 2021 dengan pertumbuhan yang sangat tinggi, mencapai 36,85%. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas di sektor tambang, didukung oleh kenaikan harga komoditas tambang di pasar global. Meski pertumbuhan melambat pada tahun 2022 (15,31%) dan 2023 (7,9%), angka ini tetap mencerminkan stabilitas dan kontribusi sektor tambang sebagai motor utama ekonomi Kabupaten Mimika. Tren ini menunjukkan bahwa sektor tambang menjadi penopang utama ekonomi daerah, meskipun terdapat tantangan untuk menjaga keberlanjutan dan diversifikasi ekonomi dalam jangka panjang.

Tabel 3.19.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mimika Tahun 2020 -2024

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB 2020-2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,07
B	Pertambangan dan Penggalian	92,66
C	Industri Pengolahan	0,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,21
F	Konstruksi	10,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,02
H	Transportasi dan Pergudangan	58,82

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB 2020-2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,50
J	Informasi dan Komunikasi	13,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,67
L	Real Estate	17,15
M,N	Jasa Perusahaan	9,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89
P	Jasa Pendidikan	11,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,41
PDRB TOTAL		78,29

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2025

3.2.2. Analisis Neraca Perdagangan

Analisis Neraca Perdagangan Kabupaten Mimika merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi posisi ekonomi daerah dalam aktivitas perdagangan domestik maupun internasional. Neraca Perdagangan didefinisikan sebagai selisih antara total nilai ekspor (penjualan barang dan jasa ke luar daerah atau luar negeri) dan total nilai impor (pembelian barang dan jasa dari luar daerah atau luar negeri). Di Kabupaten Mimika, kajian ini memiliki kekhasan signifikan karena Neraca Perdagangan secara dominan dipengaruhi oleh kegiatan sektor pertambangan skala besar. **Neraca Perdagangan Mimika dicirikan oleh potensi surplus yang besar** karena tingginya nilai **ekspor** konsentrat tambang yang dikirim ke pasar global. Namun, nilai **impor** yang signifikan untuk kebutuhan logistik operasional tambang dan barang konsumsi masyarakat Timika turut menentukan besar kecilnya surplus tersebut. Neraca Perdagangan mencatatkan **surplus** ketika nilai ekspor melampaui impor, mengindikasikan Mimika menerima lebih banyak devisa daripada yang dikeluarkannya.

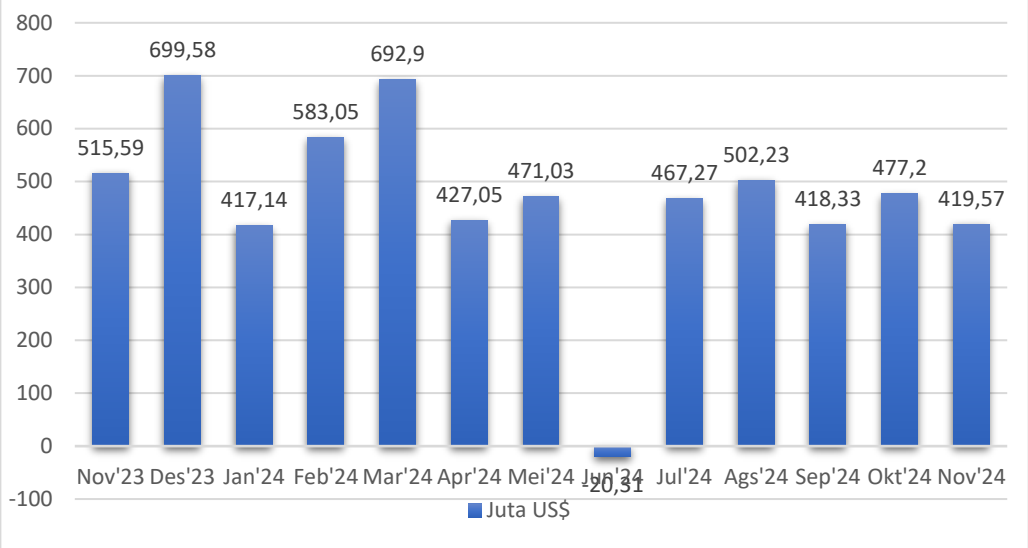
Tabel 3.20.
Neraca Perdagangan Provinsi Papua Tengah (Juta US$)

Uraian	Nilai FOB (RIBU US$)		Perubahan jan-Nov 2024**thd Jan-Nov 2024 (%)
	Jan-Nov 2023	Jan - Nov 2024**	
Ekspor	5609,34	5270,92	-6,03
Impor	356,36	435,79	22,29
Neraca Perdagangan	**5252,98**	**4835,13**	**-7,95**

Ket: (*) menunjukkan Angka Tetap (**) menunjukkan Angka Sementara
Sumber: Papua Tengah Dalam Angka 2025

Neraca perdagangan Papua Tengah pada November 2024 mengalami surplus senilai US$419,57 juta. Surplus terjadi karena nilai ekspor yang lebih besar dari nilai impor. Pada November 2024, nilai ekspor Papua Tengah tercatat senilai US$466,40 juta sedangkan nilai impor Papua Tengah sebesar US$46,83 juta. Nilai neraca perdagangan Papua Tengah pada November 2024 turun sebesar 12,08 persen dibanding Oktober 2024 yang senilai US$477,20 juta. Secara kumulatif, neraca perdagangan Papua Tengah pada Januari-November 2024 mengalami surplus senilai US$4.835,13 juta. Nilai ekspor kumulatif Januari-November 2024 sebesar US$5.270,92 juta sedangkan nilai impor kumulatif Januari-November 2024 sebesar

US$435,79 juta. Neraca perdagangan Papua Tengah Januari-November 2024 menunjukkan adanya penurunan sebesar 7,95 persen dibanding neraca perdagangan Januari-November 2023 yang mengalami surplus senilai US$5.252,98 juta.



Gambar 3.47.
Neraca Perdagangan Papua Tengah Nov 2023- Nov 2024
Sumber: Papua Tengah Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik neraca perdagangan Papua Tengah periode November 2023 hingga November 2024, terlihat bahwa nilai ekspor berfluktuasi cukup tajam setiap bulannya. Nilai tertinggi terjadi pada **Desember 2023** sebesar **699,58 juta US$**, sedangkan nilai terendah terjadi pada **Juni 2024** dengan **-20,34 juta US$**, menandakan defisit perdagangan pada bulan tersebut. Secara umum, tren perdagangan menunjukkan ketidakstabilan namun tetap berada pada posisi surplus di sebagian besar bulan, mencerminkan ketergantungan tinggi pada sektor ekspor sumber daya alam, terutama tambang.

3.2.3. Analisis Location Quotient (LQ)

Adanya analisis LQ berasumsi bahwa daerah merupakan suatu sistem sosial ekonomi terpadu dan berinteraksi ekonomi dengan daerah lain. Dalam rangka penetapan skala prioritas pembangunan sektor ekonomi yang merupakan keunggulan komparatif masingmasing wilayah. Analisis LQ dapat didefinisikan sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis. Tarigan (2014) mendefinisikan LQ sebagai perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan data antara PDRB Kabupaten/Kota dengan PDRB Provinsi berdasarkan ADHK menurut lapangan usaha tahun saat ini dan tahun sebelumnya.

$$LQ = Xij/RVj \; Xi/RVi$$

Keterangan:
LQ = Indeks/koefisien Location Quotient dari sektor i di kabupaten j
Xij = PDRB sektor i pada kabupaten j
Xi = PDRB sektor i provinsi RVj = Total PDRB pada kabupaten j
Rvi = Total PDRB provinsi

Hasil Perhitungan: LQ > 1, mengindikasikan dilakukannya ekspor produk pada sektor tersebut, ekspor dilakukan karena adanya surplus. Peranan sektor lebih besar di daerah daripada provinsi. LQ < 1, mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. Peranan sektor lebih kecil di daerah daripada provinsi. LQ = 1, mengindikasikan bahwa adanya produktivitas berimbang yang berarti sektor ini masih belum layak untuk diekspor. Peranan sektor sama baik di daerah maupun secara provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis Location Quotient Kabupaten Mimika didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.21.
Location Quotients (LQ) Kabupaten Mimika

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Kabupaten Mimika Tahun 2024	PDRB ADHK Papua Tengah Tahun 2024	LQ	KETERANGAN
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1189,31	3865,79	0,357393	Sektor Non-Basis
B.	Pertambangan dan Penggalian	80410,28	81828,45	1,141555	Sektor Basis
C.	Industri Pengolahan	101,73	252,68	0,4677	Sektor Non-Basis
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,85	17,75	0,710102	Sektor Non-Basis
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,38	9,48	0,781811	Sektor Non-Basis
F.	Konstruksi	2007,85	5555,56	0,419849	Sektor Non-Basis
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1810,62	3902,09	0,539038	Sektor Non-Basis
H.	Transportasi dan Pergudangan	825,31	1427,46	0,67165	Sektor Non-Basis
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	173,23	222,84	0,903066	Sektor Non-Basis
J.	Informasi dan Komunikasi	1442,87	1733,92	0,966691	Sektor Non-Basis
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	379,47	577,82	0,762912	Sektor Non-Basis
L.	Real Estate	539,7	1038,81	0,60354	Sektor Non-Basis
M.	Jasa Perusahaan	331,51	434,5	0,886332	Sektor Non-Basis
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1081,01	3240,52	0,387529	Sektor Non-Basis

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Kabupaten Mimika Tahun 2024	PDRB ADHK Papua Tengah Tahun 2024	LQ	KETERANGAN
O.	Jasa Pendidikan	145,64	502,67	0,336579	Sektor Non-Basis
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,67	470,7	0,357046	Sektor Non-Basis
Q.	Jasa Lainnya	191,12	390,43	0,56866	Sektor Non-Basis

Berdasarkan analisis LQ, hanya terdapat satu lapangan usaha yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Mimika, yaitu Pertambangan dan Penggalian. Hal ini menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Mimika yang **sangat timpang (tersentralisasi)**, di mana sektor Pertambangan berfungsi sebagai **basis dan pilar utama** yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan output melampaui kebutuhan domestik, sementara sektor-sektor non-tambang berada pada posisi **sektor non-basis** yang kontribusinya relatif kecil dan mungkin belum mampu memenuhi permintaan lokal sepenuhnya, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan pembangunan pada sektor yang ada.

3.2.4. Analisis Shift Share (SS)

Analisis Shift Share (SS) dikembangkan untuk menganalisis perubahan ekonomi dan memperkuat analisis penentuan potensi dan prioritas pengembangan ekonomi sektoral secara terperinci. Metode ini menggambarkan kinerja sektor perekonomian di suatu provinsi terhadap perekonomian nasional dengan melihat aspek daya saing dan pertumbuhan suatu sektor. Analisis ini juga dapat melihat perkembangan dalam membandingkan besar aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antarwilayah.

Teknik ini banyak digunakan dalam menganalisis dampak pertumbuhan regional, khususnya pertumbuhan lapangan kerja, diterapkan untuk menggambarkan tren pertumbuhan historis, memperkirakan pertumbuhan regional dan menganalisis efek dari inisiatif kebijakan serta mengembangkan perencanaan strategis untuk komunitas (Rice & Horton, 2010). Metode analisis ini bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah suatu daerah (Dij) dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu regional share (regional growth component), pertumbuhan sektoral (proportional shift), dan pertumbuhan daya saing wilayah (different shift) sebagaimana berikut:

a) Komponen Pertumbuhan Regional/Regional Share (Nij): ditujukan untuk mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum. Komponen pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan output agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan output dari sektor yang sama di wilayah yang besar yang digunakan sebagai acuan yaitu provinsi;

b) Komponen Pertumbuhan Sektoral/Proportional Shift (Mij): yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh pergeseran proporsional (Proportional Shift) yang mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada suatu daerah dibandingkan perekonomian provinsi. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan (provinsi) bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.

c) Komponen Keunggulan Kompetitif/(Cij): komponen pertumbuhan ekonomi daerah terjadi karena pergeseran diferensial (Differential Shift) yang menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor di kabupaten/kota dibandingkan sektor yang sama secara provinsi.

Jika pergeseran positif, maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya daripada sektor yang sama pada perekonomian provinsi. Metode analisis Shift Share (SS) diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor i di suatu wilayah j (Dij) dengan rumus berikut:

Dij= Nij + Mij + Cij

Keterangan:
Dij :Perubahan PDRB sektor/sub-sektor i di wilayah Kabupaten.
Ni :Perubahan PDB sektor/sub-sektor i Kabupaten yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi.
Mij :Perubahan PDRB sektor/sub-sektor i di wilayah studi Kabupaten yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i secara Provinsi.
Cij :Perubahan PDRB sektor/sub-sektor i di wilayah yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah tersebut.

Untuk menghitung komponen Nij, Mij, dan Cij adalah sebagai berikut:
1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi:

Nij = Yij x rn

2) Pergeseran proporsional atau pengaruh-pengaruh bauran industri:

Mij = Yij (rin – rn)

3) Pengaruh keunggulan kompetitif:

Cij = Yij (rij – rn)

Keterangan:
Yij = pendapatan di sektor I daerah j
Yin = pendapatan di sektor I provinsi
Rij = laju pertumbuhan di sektor i daerah j
Rin = laju pertumbuhan di sektor i provinsi
Rn = laju pertumbuhan ekonomi provinsi

Interpretasi dari analisis ini adalah, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Hasil analisis Shift Share Kabupaten Mimika disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 3.22.
Analisis Shift Share Kabupaten Mimika 2020-2023

Lapangan Usaha		Shift Share 2020-2023	
		Dij	SS
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,95	Sektor Kompetitif
B.	Pertambangan dan Penggalian	12943,43	Sektor Kompetitif
C.	Industri Pengolahan	0,07	Sektor Kompetitif
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,45	Sektor Kompetitif
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	Sektor Kompetitif
F.	Konstruksi	26,38	Sektor Kompetitif
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	50,15	Sektor Kompetitif
H.	Transportasi dan Pergudangan	13,24	Sektor Kompetitif

Lapangan Usaha		Shift Share 2020-2023	
		Dij	SS
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,76	Bukan Sektor Kompetitif
J.	Informasi dan Komunikasi	46,2	Sektor Kompetitif
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,94	Sektor Kompetitif
L.	Real Estate	10,54	Sektor Kompetitif
M.	Jasa Perusahaan	2,02	Sektor Kompetitif
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	Sektor Kompetitif
O.	Jasa Pendidikan	3,2	Sektor Kompetitif
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	Sektor Kompetitif
Q.	Jasa Lainnya	2,66	Sektor Kompetitif

Dari hasil analisis shift share, dapat diketahui bahwa hampir seluruh lapangan usaha di Kabupaten Mimika bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa secara agregat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika mengalami percepatan. Akan tetapi, terdapat satu lapangan usaha yang laju pertumbuhannya melambat, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun pada hasil analisis tahun 2024, terdapat 3 lapangan usaha bukan sektor kompetitif yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan air, pengelolaan sampah. Limbah, dan daur ulang; dan Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib.

Tabel 3.23.
Analisis Shift Share Kabupaten Mimika Tahun 2023-2024

Lapangan Usaha		Shift Share (2023-2024)	
		Dij	SS
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-8267,24	Bukan Sektor Kompetitif
B.	Pertambangan dan Penggalian	419529,38	Sektor Kompetitif
C.	Industri Pengolahan	11,18	Sektor Kompetitif
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	24,19	Sektor Kompetitif
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-42,85	Bukan Sektor Kompetitif
F.	Konstruksi	4870,53	Sektor Kompetitif
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1656,23	Sektor Kompetitif
H.	Transportasi dan Pergudangan	15817,04	Sektor Kompetitif
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	90,44	Sektor Kompetitif
J.	Informasi dan Komunikasi	1287,75	Sektor Kompetitif
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3566,87	Sektor Kompetitif
L.	Real Estate	4753,70	Sektor Kompetitif
M.	Jasa Perusahaan	1512,24	Sektor Kompetitif

Lapangan Usaha		Shift Share (2023-2024)	
		Dij	SS
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1457,83	Bukan Sektor Kompetitif
O.	Jasa Pendidikan	369,45	Sektor Kompetitif
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	768,31	Sektor Kompetitif
Q.	Jasa Lainnya	1105,83	Sektor Kompetitif

3.2.5. Analisis Tipologi Klaster

Analisis Tipologi Sektor digunakan untuk memperoleh klasifikasi posisi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah. Analisis Tipologi Sektor digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor ekonomi unggulan wilayah dengan memperhatikan sektor pertumbuhan sektoral (Shift-share Analysis/SSA), dan pemusatan aktivitas ekonomi (Location Quotient/LQ). Dari kedua komponen ini jika besaran SSA dan LQ dinyatakan dalam suatu bidang datar, dengan nilai SSA sebagai sumbu vertikal (y) dan nilai LQ sebagai sumbu horizontal (x), maka diperoleh empat kategori posisi relatif ekonomi daerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.24.
Matriks Tipologi Klaster

Location Quotient (LQ)	Shift-share Analysis/SSA	
	Negatif (-)	Positif (+)
Positif (+/>1)	Kuadran II Sektor potensial atau masih berkembang dengan cepat	Kuadran I Sektor maju dan tumbuh cepat
Negatif (-/<1)	Kuadran IV Sektor Tertinggal	Kuadran III Sektor Maju tetapi Tertekan

Menurut Hill dalam Kuncoro (2004) analisis tipologi sektor yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:

1. High growth and high income (sektor cepat maju dan cepat tumbuh);
2. High growth but low income (sektor berkembang cepat/potensial);
3. High income but low growth (sektor maju tapi tertekan);
4. Low growth and low income (sektor relatif tertinggal).

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. High growth and high income, Kuadran I (SSA positif dan LQ positif/>1) adalah sektor maju dengan pertumbuhan sangat cepat (rapid growth sector/industry or fast growing);
2. High growth but low income, Kuadran II (SSA positif dan LQ negatif/1) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan terhambat tapi maju/berkembang (depressed sektor/industri yang berkembang/developing);
3. High growth but low income, Kuadran III (SSA negatif dan LQ positif/>1) adalah sektor dengan kecepatan pertumbuhan terhambat tapi maju/berkembang (depressed sektor/industri yang berkembang/developing);
4. Low growth and low income, Kuadran IV (SSA negatif dan LQ negatif)

Berdasarkan analisis LQ, terdapat satu sektor yang merupakan basis ekonomi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sedangkan berdasarkan analisis shift share, terdapat 15 sektor yang memiliki laju pertumbuhan sektoral positif.

Tabel 3.25.
Tipologi Sektor Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha		LQ	SS	Tipologi Sektor
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,36	-8267,24	Sektor Maju tapi Tertekan
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,14	419529,38	Sektor Maju dan Cepat Tumbuh
C.	Industri Pengolahan	0,47	11,18	Sektor Maju tapi Tertekan
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,71	24,19	Sektor Maju tapi Tertekan
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,78	-42,85	Sektor Tertinggal
F.	Konstruksi	0,42	4870,53	Sektor Maju tapi Tertekan
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,54	1656,23	Sektor Maju tapi Tertekan
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,67	15817,04	Sektor Maju tapi Tertekan
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,90	90,44	Sektor Maju tapi Tertekan
J.	Informasi dan Komunikasi	0,97	1287,75	Sektor Maju tapi Tertekan
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	3566,87	Sektor Maju tapi Tertekan
L.	Real Estate	0,60	4753,70	Sektor Maju tapi Tertekan
M.	Jasa Perusahaan	0,89	1512,24	Sektor Maju tapi Tertekan
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,39	-1457,83	Sektor Tertinggal
O.	Jasa Pendidikan	0,34	369,45	Sektor Maju tapi Tertekan
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	768,31	Sektor Maju tapi Tertekan
Q.	Jasa Lainnya	0,57	1105,83	Sektor Maju tapi Tertekan

Berdasarkan analisis tipologi sektor, Pertambangan dan Penggalian termasuk dalam sektor yang mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat di Kabupaten Mimika. Selain itu, sebagian besar atau 14 lapangan usaha lainnya mampu berkembang namun kecepatan pertumbuhannya terhambat.

3.2.6. Analisis Tipologi Klassen

Analisis Klassen digunakan untuk memperoleh tambahan pandangan atas klasifikasi posisi/kondisi pertumbuhan sektor ekonomi (lapangan usaha) dan posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor dibandingkan dengan kondisi provinsi. Masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Menurut Tipologi daerah, daerah dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah;

2. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata;
3. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan, tetapi tingkat per kapita lebih rendah dari rata-rata;
4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang rendah

Dalam analisis terdapat empat klasifikasi sektor-sektor ekonom yang mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu, sektor tumbuh cepat (rapid growth sector), sektor tertekan (retarded sector), sektor sedang tumbuh (growing sector), sektor relatif tertinggal (relatively backward sector) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26.
Klasifikasi Sektor Menurut Tipologi Klassen

	yi > y	yi < y
ri > r	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Berkembang Cepat
ri < r	Sektor Maju tetapi Tertekan	Sektor Relatif Tertinggal

Keterangan :
ri: Laju Pertumbuhan sektor i
r: Laju Pertumbuhan PDRB
yi: Kontribusi sektor i terhadap PDRB
y: Kontribusi rata-rata sektor terhadap PDRB

Tabel 3.27.
Tipologi Klassen Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika	Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Tengah	Kontribusi Sektor terhadap PDRB kabupaten Mimika	Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi Papua Tengah	Tipologi Klassen
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,54	0,95	1,13	3,71	Sektor Tertinggal
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,13	4,45	89,00	76,79	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat
C.	Industri Pengolahan	-0,04	4,51	0,10	0,23	Sektor Tertinggal
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,50	5,09	0,01	0,02	Sektor Tertinggal
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-2,15	-0,21	0,005	0,007	Sektor Tertinggal
F.	Konstruksi	0,65	6,14	2,23	5,98	Sektor Tertinggal
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	1,79	3,48	2,12	3,79	Sektor Tertinggal

Lapangan Usaha		Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika	Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Tengah	Kontribusi Sektor terhadap PDRB kabupaten Mimika	Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi Papua Tengah	Tipologi Klassen
	dan Sepeda Motor					
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,66	12,87	1,16	1,67	Sektor Tertinggal
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,19	2,69	0,19	0,21	Sektor Tertinggal
J.	Informasi dan Komunikasi	2,46	2,80	1,31	1,45	Sektor Tertinggal
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,38	3,38	0,39	0,52	Sektor Berkembang Cepat
L.	Real Estate	7,86	5,31	0,56	0,90	Sektor Berkembang Cepat
M.	Jasa Perusahaan	3,14	5,78	0,31	0,36	Sektor Tertinggal
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,72	1,29	1,00	3,19	Sektor Berkembang Cepat
O.	Jasa Pendidikan	2,74	4,16	0,12	0,39	Sektor Tertinggal
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,71	5,96	0,15	0,43	Sektor Tertinggal
Q.	Jasa Lainnya	4,70	5,44	0,20	0,36	Sektor Tertinggal

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Mimika merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Papua Tengah. Selain itu, terdapat tiga lapangan usaha lain yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi daripada tingkat provinsi. Hal ini dapat menjadi peluang dan potensi untuk dikembangkan ke depannya oleh pemerintah.

3.2.7. Analisis Penentuan Sektor, Subsektor Unggulan Berdasarkan Analisis Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), Tipologi Sektor, dan Tipologi Klassen

Berbagai pendekatan digunakan untuk mengevaluasi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Mimika, yaitu melalui analisis Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), Tipologi Sektor, dan Tipologi Klassen. Pendekatan ini relevan dengan prinsip yang tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2014, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengutamakan sektor ekonomi unggulan berbasis potensi lokal, keterkaitan antar sektor, serta peluang pemasaran regional, nasional, maupun internasional. Penggabungan keempat metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keunggulan kompetitif, dinamika pertumbuhan, kontribusi terhadap ekonomi regional, serta klasifikasi sektor-sektor berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya. Tabel berikut menyajikan

hasil gabungan dari keempat analisis tersebut sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan strategis pengembangan sektor unggulan.

Tabel 3.28.
Location Quotient, Shift Share, Tipologi Sektor dan Tipologi Klassen Kabupaten Mimika

Lapangan Usaha		LQ	SS	Tipologi Sektor	Tipologi Klassen
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Sektor Non-Basis	Bukan Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
B.	Pertambangan dan Penggalian	Sektor Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju dan Cepat Tumbuh	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat
C.	Industri Pengolahan	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Sektor Non-Basis	Bukan Sektor Kompetitif	Sektor Tertinggal	Sektor Tertinggal
F.	Konstruksi	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
H.	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
J.	Informasi dan Komunikasi	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat
L.	Real Estate	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Berkembang Cepat
M.	Jasa Perusahaan	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal

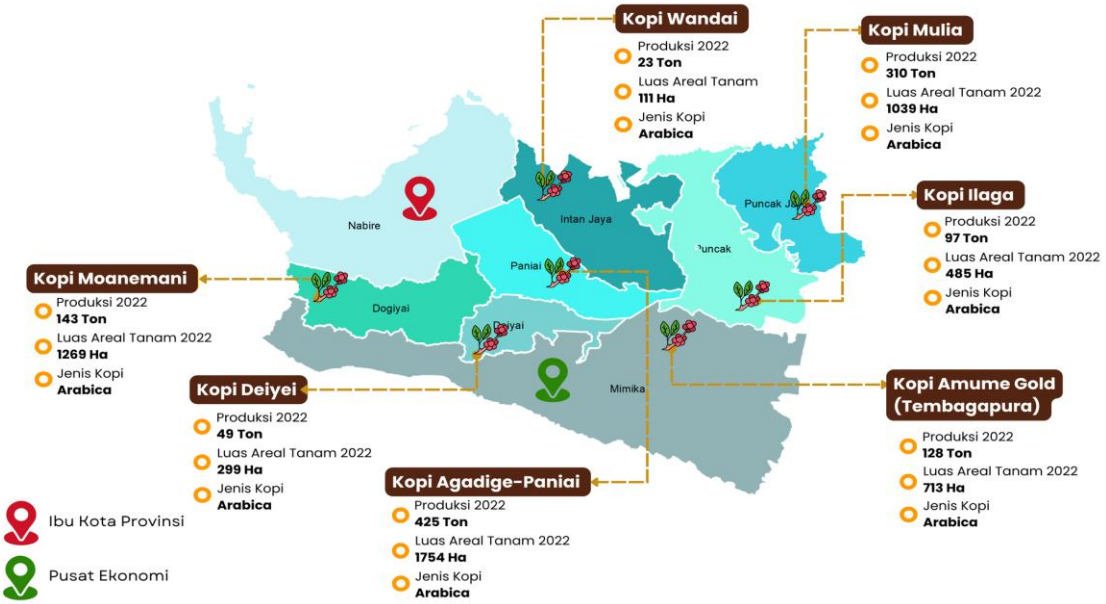
Lapangan Usaha		LQ	SS	Tipologi Sektor	Tipologi Klassen
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sektor Non-Basis	Bukan Sektor Kompetitif	Sektor Tertinggal	Sektor Berkembang Cepat
O.	Jasa Pendidikan	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal
Q.	Jasa Lainnya	Sektor Non-Basis	Sektor Kompetitif	Sektor Maju tapi Tertekan	Sektor Tertinggal

3.3. Gambaran Kondisi Komoditas Kopi

3.3.1. Kopi Arabika Provinsi Papua Tengah

Kopi merupakan komoditas yang sejak tahun 1950-an telah dibudidayakan di wilayah Papua. Komoditas kopi Arabika diperkirakan telah diperkenalkan di Papua pada tahun 1800-an, namun baru mengalami perkembangan paska Perang Dunia II. Untuk wilayah Papua Tengah, varietas kopi yang dikembangkan adalah varietas Jamaica Blue Mountains, yang merupakan varietas turunan dari Arabica Typica dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda atau misionaris dari Belanda. Paska bergabung dengan Indonesia, produksi kopi mengalami penurunan sehingga petani memilih untuk membudidayakan tanaman hortikultura selain kopi. Trend budidaya kopi di Papua meningkat memasuki tahun 2010-an, seiring dengan berkembangnya pangsa pasar untuk kopi Arabika specialty coffee. Produksi kopi arabika Provinsi Papua Tengah menunjukkan pola yang meningkat pada dari tahun 2020 sebesar 972 ton menjadi 1.179 ton pada tahun 2021. Produksi kopi arabika Provinsi Papua Tengah pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 1.175 ton. Peningkatan produksi pada tahun 2021 menandakan bahwa produksi kopi arabika di Provinsi Papua Tengah tidak terdampak pandemi Covid-19. Hal ini juga memperkuat bahwa sektor pertanian tidak mengalami kontraksi yang signifikan selama terjadinya pandemi Covid-19.

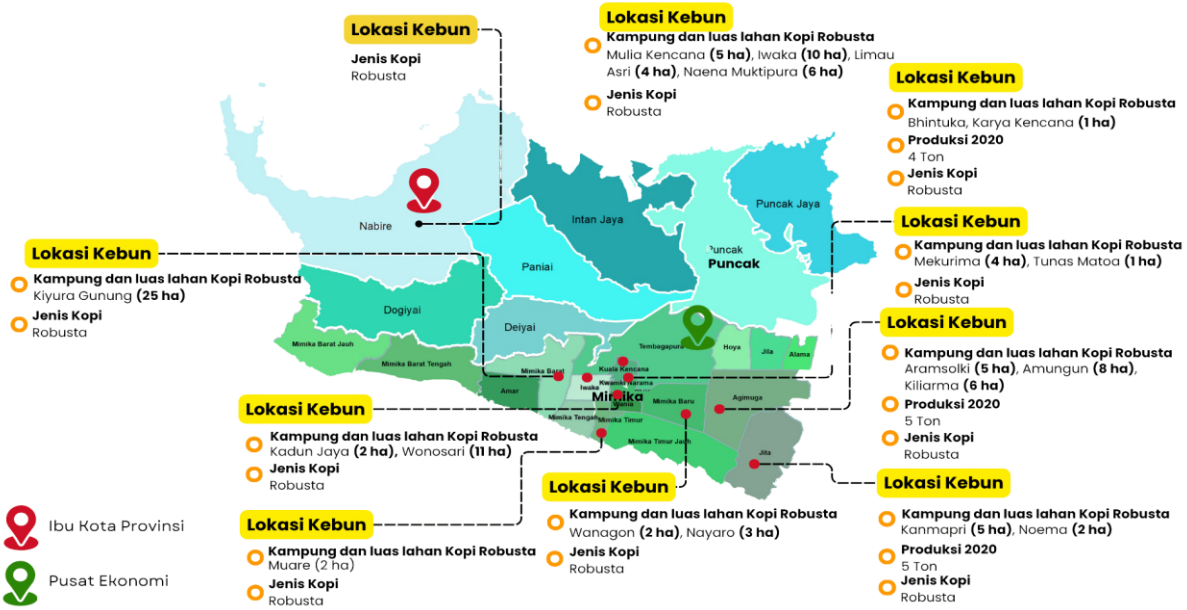
Berdasarkan produksi di masing-masing wilayah kabupaten Provinsi Papua Tengah. Pada tahun 2022, produksi kopi arabika sebagian besar diproduksi di wilayah Kabupaten Paniai yaitu sebanyak 425 ton. Wilayah kedua dengan jumlah produksi kopi arabika terbanyak di Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten Puncak Jaya sebesar 310 ton. Wilayah ketiga adalah Kabupaten Dogiyai dengan jumlah produksi kopi arabika sebanyak 143 ton. Kabupaten Nabire menjadi satu-satunya wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang tidak memproduksi kopi arabika. Hal ini karena sebagian besar wilayah Kabupaten Nabire merupakan dataran rendah yang kurang cocok bagi pengembangan jenis kopi arabika. Berikut ini merupakan peta sebaran komoditas kopi arabika di Provinsi Papua Tengah berdasarkan luas areal dan produksinya pada tahun 2022. Terdapat beberapa varian kopi arabika di Provinsi Papua Tengah seperti Kopi Moanemani di Kabupaten Dogiyai, Kopi Deiyai di Kabupaten Deiyai, Kopi Agadige di Kabupaten Paniai, Kopi Wandai di Kabupaten Intan Jaya, Kopi Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, Kopi Ilaga di Kabupaten Puncak, dan Kopi Amume Gold di Kabupaten Mimika.



Gambar 3.48.
Kopi Arabika Provinsi Papua Tengah
Sumber: Data Olah Berbagai Sumber, 2025

3.3.2. Kopi Robusta Provinsi Papua Tengah

Kopi robusta merupakan jenis kopi yang dapat tumbuh di wilayah dengan ketinggian 400 – 800 mdpl. Kopi robusta memiliki karakter yang berbeda dengan kopi arabika. Kopi robusta cenderung memiliki sifat yang mudah ditanam dan dirawat. Terdapat beberapa wilayah di Provinsi Papua Tengah yang telah membudidayakan dan mengembangkan kopi robusta diantaranya berada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Pada tahun 2022, luas areal tanam kopi robusta sebesar 713 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 128 ton. Jumlah produksi tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dan tahun 2020 sebanyak 40 ton. Berdasarkan pola data luas areal tanam dan jumlah produksi, bahwa luas areal tanam pada tahun 2022 cenderung menurun dibanding tahun 2021 sebesar 741 Ha. Namun, penurunan luas areal tana mini justru berbanding terbalik dengan jumlah produksi kopi robusta yang tinggi pada tahun 2022. Hal ini karena jenis kopi robusta merupakan komoditas yang baru dikembangkan pada tahun 2019. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pengetahuan petani terkait pengolahan dan perawatan tumbuhan kopi robusta. Tren data produksi kopi robusta yang terus meningkat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan petani dan pengusaha kopi dalam mengelola kopi robusta di wilayah Provinsi Papua Tengah, sehingga komoditas ini memiliki potensi untuk dikembangkan ke depannya.



Gambar 3.49.
Kopi Robusta Provinsi Papua Tengah
Sumber: Data Olah Berbagai Sumber, 2025

3.3.3. Kopi Arabika Kabupaten Mimika

Data produksi kopi arabika di Kabupaten Mimika dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi signifikan dalam total produksi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, total produksi kopi arabika tercatat sebesar 268 Kilogram. Total produksi ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 347 Kilogram. Produksi kopi arabika melonjak drastis pada tahun 2023, dengan capaian 1215,3 Kilogram. Namun, total produksi kembali menurun pada tahun 2024, hanya sebesar 463,9 Kilogram. Untuk tahun 2025, Kabupaten Mimika memiliki produksi kopi arabika sebesar 1388,347 Kilogram. Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan yang tidak konsisten, namun terdapat peningkatan di tahun 2023 dan di tahun 2025.

Tabel 3.29.
Produksi Kopi Arabika Kabupaten Mimika 2020-2025

No	Distrik	Produksi (Kg)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Hoya	120	180	159,4	160,3	438,6
2	Tembagapura	148	167	1055,9	303,6	949,747
Total		**268**	**347**	**1215,3**	**463,9**	**1388,347**

Sumber: Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, DTPHP Kabupaten Mimika

3.3.4. Kopi Robusta Kabupaten Mimika

Data produksi kopi arabika di Kabupaten Mimika dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren penurunan dan fluktuasi pada tingkat distrik. Pada tahun 2021, total produksi kopi arabika mencapai 332 Kilogram, dengan Distrik Jita menjadi kontributor terbesar dengan 123 Kilogram. Total produksi ini menurun tajam pada tahun 2022 menjadi 120 Kilogram. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2023, dengan total produksi sebesar 81 Kilogram, dan pada tahun ini Distrik Wania mulai berkontribusi dengan 12 Kilogram. Pada tahun 2024, total produksi sedikit meningkat menjadi 97,9 Kilogram, dengan munculnya kontribusi dari Distrik Kuala Kencana (8 Kilogram), Kwamki Narama (13 Kilogram), dan Mimika Baru (6 Kilogram). Tahun 2025 menunjukkan total produksi sebesar 129,7 Kilogram, dengan Distrik Mimika Barat (Kiyura) menjadi kontributor utama dengan 81 Kilogram. Secara

keseluruhan, data ini mengindikasikan pergeseran kontribusi produksi antar distrik dan penurunan total produksi yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2025, meskipun ada sedikit peningkatan di tahun 2024 dan 2025 dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 3.30.
Produksi Kopi Robusta Kabupaten Mimika 2020-2025

No	Distrik	Produksi (Kg)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jita	123	60	19	15	13
2	Agimuga	99	30	9		
3	Iwaka	110	30	33	2	3,2
4	Kuala Kencana				8	20,5
5	Mimika Timur					1
6	Wania			12	4	8
7	Kwamki Narama				13	
8	Mimika Baru				6	3
9	Mimika Barat (Kiyura)			8	49,9	81
	Total	**332**	**120**	**81**	**97,9**	**129,7**

Sumber: Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, DTPHP Kabupaten Mimika

3.3.5. Sebaran Rumah Pengolahan Kabupaten Mimika

Terdapat 10 rumah pengolahan kopi di Kabupaten Mimika. Persebaran sepuluh rumah kopi di wilayah Mimika, dengan berbagai lokasi yang ditandai. Peta tersebut menampilkan lokasi kafe-kafe seperti Waanal Coffee and Resto, Maoke Coffee House, Mozas Coffee & Eatery, Rumah Kopi Amungme Gold, New Kopi Amuro, Halaman Sudut Ruang Coffee, Kopi Mulo, Nereg Coffee Home, Sudut Ruang Coffee, dan Junsei Cafe. Berikut ini merupakan peta sebaran rumah pengolahan kopi di Timika.



Gambar 3.50.
Rumah Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika
Sumber: Data Olah Berbagai Sumber, 2025

3.4. Bencmarking Pabrik Pengolahan Kopi

Benchmarking industri kopi merupakan proses pengukuran dan perbandingan kinerja suatu usaha atau proyek pengolahan kopi dengan standar terbaik di industri, baik di tingkat nasional maupun global. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik unggulan (best practices), standar kualitas, efisiensi operasional, serta strategi bisnis yang telah terbukti

berhasil dalam rantai pasok kopi. Melalui benchmarking, pelaku usaha dapat memahami posisi kompetitifnya, menilai efektivitas proses produksi, serta menemukan peluang peningkatan dalam aspek kualitas produk, teknologi pengolahan, pemasaran, dan manajemen rantai pasok. Dalam konteks pengembangan industri kopi di Kabupaten Mimika, benchmarking menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pengolahan dan pemanfaatan sumber daya lokal mampu memenuhi standar pasar domestik maupun internasional. Berikut ini merupakan berbagai industri pengembangan kopi di dunia yang dapat menjadi *bencmarking* pengolahan kopi di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.31.
***Bencmarking* Industri Pengolahan Kopi**

Pabrik	Nilai Investasi	Produksi	Produk Utama
Starbuck Cina	2,1 Trilliun	135 Juta Ton	Biji kopi roasted, blend arabika, kopi siap saji.
Illy Italia	1,6 Trilliun	50 ribu Ton	Biji kopi premium roasted, kapsul kopi, kopi instan
Nestle Vietnam	1,6 Trilliun	800 ribu Ton	Kopi instan (Nescafé), bubuk kopi, kapsul Nespresso
Lavazza Italia	1,6 Trilliun	100 ribu Ton	Kopi roasted, kopi siap minum
JDE Inggris	1,6 Trilliun	200 ribu Ton	Kopi bubuk, kapsul, kopi instan
Kapal Api Indonesia	300 Milyar	50 ribu Ton	Kopi bubuk, instan, campuran spesial

Sumber: Analisis Tim dari Berbagai Sumber, 2025

3.5. Alternatif Lokasi Pengembangan "*Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated*"

Lokasi lahan alternatif pertama untuk pengembangan pabrik pengolahan kopi Kabupaten Mimika, terletak di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru. Lahan tersebut memiliki luas 1 hektar dan ditandai dengan garis merah pada gambar. Informasi terperinci mengenai lahan ini menunjukkan bahwa ia merupakan tapak hak milik dengan topografi dataran dan kondisi lahan berupa rimba. Selain itu, gambar ini juga menyajikan data jarak lahan ke berbagai fasilitas penting, yaitu 47 meter ke jalan RT/RW utama, sekitar 2 kilometer atau 4 menit ke SPBU terdekat, sekitar 3 kilometer atau 5 menit ke PLN terdekat, dan sekitar 8 kilometer atau 14 menit ke bandara. Di sisi kanan gambar, terdapat juga informasi mengenai bidang tanah yang memiliki tipe hak milik dengan luas 9.921 m^2. Secara keseluruhan, informasi ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai lokasi strategis dan karakteristik lahan yang diusulkan untuk pembangunan pabrik pengolahan kopi.



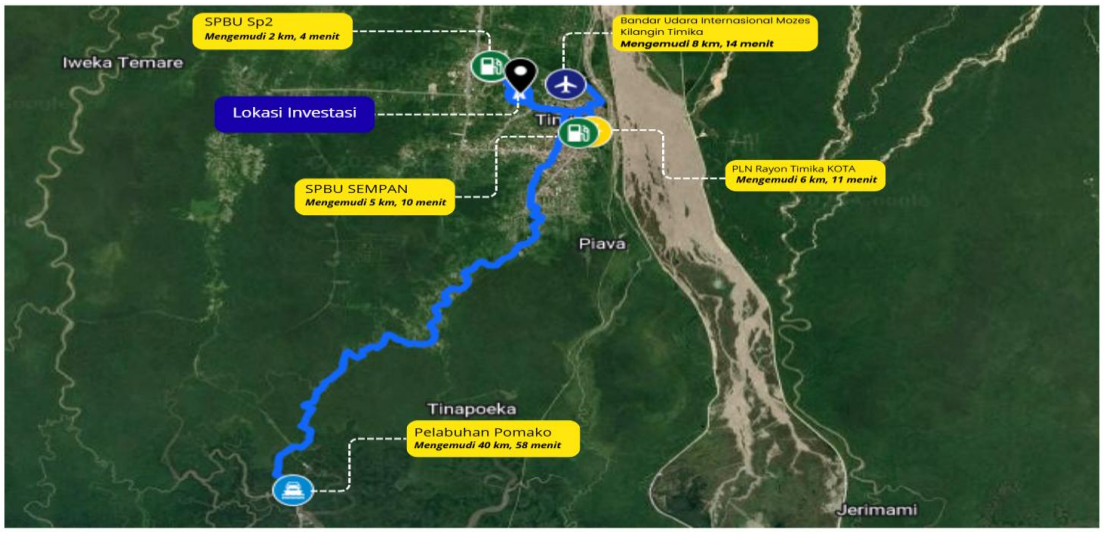
Gambar 3.51.
Lokasi Alternatif Pertama Pengembangan Pabrik Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika
Sumber: Analisis Tim, 2025

Lokasi lahan alternatif kedua untuk pengembangan pabrik pengolahan kopi terletak di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru. Lahan tersebut memiliki luas 0,9 hektar dan ditandai oleh garis merah pada gambar. Informasi terperinci mengenai lahan ini menunjukkan bahwa ia merupakan tapak hak milik dengan zona RTRW sebagai kawasan peruntukan industri, topografi dataran, dan kondisi lahan berupa rimba. Selain itu, gambar ini juga memuat data jarak lahan ke berbagai fasilitas penting, yakni 60 meter ke jalan RT/RW utama, sekitar 1,8 kilometer atau 4 menit ke SPBU terdekat, sekitar 3 kilometer atau 5 menit ke PLN terdekat, serta sekitar 9 kilometer atau 16 menit ke bandara. Di sisi kanan bawah gambar, terdapat informasi mengenai bidang tanah yang memiliki tipe hak milik dengan luas 9849 meter persegi dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01745. Kedua gambar kecil yang disematkan menunjukkan kondisi jalan raya dan lingkungan sekitar lokasi. Secara keseluruhan, informasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis dan karakteristik lahan yang diusulkan untuk pembangunan pabrik pengolahan kopi, sebagai alternatif kedua.



Gambar 3.52.
Lokasi Alternatif Kedua Pengembangan Pabrik Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika
Sumber: Analisis Tim, 2025

Lokasi alternatif lahan pertama dan kedua memiliki letak strategis karena berdekatan dengan beberapa fasilitas umum, seperti SPBU SP2 dengan jarak 2 Km, SPBU Sempan dengan jarak 5 Km, PLN Rayon Timika Kota dengan jarak 6 Km, Bandar Udara Mozez Kilangin dengan jarak 8 Km, dan Pelabuhan Pomako dengan jarak 40 Km. Berikut ini merupakan peta konektivitas lahan alternatif pertama dan lahan alternatif kedua dengan berbagai fasilitas umum.



Gambar 3.53.
Konektivitas Lokasi Alternatif Peratama dan Kedua Pengembangan Pabrik Pengolahan Kopi Kabupaten Mimika
Sumber: Analisis Tim, 2025

3.6. Rencana Desain Pengembangan "Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated"

Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated dikembangkan dengan konsep *green and modern industry terintegrated.* Rancangan desain pabrik memiliki kebutuhan luas lahan sebesar 2.000 m^2 dengan proyeksi kapasitas produksi sebesar 300 ton per tahun. Nilai investasi awal pengembangan pabrik ini sebesar Rp92,75 Milyar dengan nilai NPV positif sebesar Rp52,88 Milyar, IRR sebesar 22,077%, dan Payback Period selama 3,91 tahun. Sumber pendapatan pabrik ini berasal dari penjulan produk olahan kopi; layanan coffe shop; jasa pengolahan; dan wisata edukasi. Potensi pasar pabrik ini meliputi kebutuhan komsumsi kopi lokal, regional, nasional, dan global. Lokasi pengembangan pabrik berada di Kampung Kwanki, Distrik Mimika Baru dengan letak strategis dan terhubungan dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, listrik, dan air.



Gambar 3.54.
Desain Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated
Sumber: Analisis Tim, 2025

Area Pengolahan (Produksi) memiliki total luas area sekitar 850 m² dan dirancang untuk mengikuti alur kerja pengolahan kopi dari basah, kering, instan, sehingga memastikan efisiensi proses produksi. Area Ritel (Fungsi Publik) memiliki luas area sekutar 250 m^2, yang ditempatkan di bagian depan, berfungsi untuk memudahkan akses pengunjung, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kelancaran interaksi dengan pelanggan. Area Eksterior & Pendukung, dengan luas sekitar 900 m², dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan sisa, sehingga berperan sebagai penunjang operasional sekaligus memanfaatkan ruang secara optimal. Secara keseluruhan, total area fisik mencakup seluruh lahan yang digunakan sebesar 2.000 m² atau 100% dari luas lahan, yang terbagi menjadi tiga fungsi utama: produksi, publik, dan pendukung. Struktur ini memastikan bahwa setiap area berkontribusi secara efektif terhadap kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan pengunjung serta proses produksi.

Tabel 3.32.
Rencana Pola Ruang Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated

No.	Ruang Fungsional	Estimasi Luas Area (m^2)	Persentase Lahan	Keterangan Efisiensi & Alur Kerja
I	Area Pengolahan (Produksi) - Total Area: ± 850 m^2			Mengikuti Alur Kopi: Basah → Kering → Instan
1	Penerimaan & Penyimpanan Biji (Green Bean)	180 m^2	9%	Lokasi awal, dekat akses bongkar muat kargo.
2	Pengolahan Basah (Washing & Pulping)	120 m^2	6%	Berdekatan dengan sumber air dan sistem pengolahan limbah (WWTP).
3	Tempat Penjemuran Kopi (Drying) (Tambahan)	150 m^2	7.50%	Area Penjemuran Terkontrol/Parabola/Rumah Kaca. Lokasi strategis antara Pengolahan Basah dan Produksi Kering.
4	Roasting, Penggilingan & Pengemasan (Produksi Instan)	200 m^2	10%	Area inti produksi kopi instan. Memastikan aliran roasting langsung ke grinding dan packaging.
5	Gudang Limbah & Utilitas	200 m^2	10%	Ruang terpisah untuk mesin genset, boiler, dan penampungan limbah.
II	Area Ritel (Fungsi Publik) - Total Area: ± 250 m^2			Ditempatkan di bagian depan untuk akses pengunjung.
6	Kedai Kopi (Coffee Shop) & Ruang Pamer Produk	250 m^2	12.50%	Lokasi dengan tampilan terbaik ke Taman Agro dan akses mudah dari parkir.
III	Area Eksterior & Pendukung - Total Area: ± 900 m^2			Memaksimalkan fungsi lahan sisa.
7	Area Parkir (Mobil & Motor)	400 m^2	20%	Luas untuk menampung pengunjung Kedai Kopi dan karyawan Pabrik.
8	Taman Agro & Ruang Hijau Terbuka	500 m^2	25%	Area rekreasi dan edukasi, serta buffer hijau bangunan.
Total Area Fisik		2.000 m^2	100%	Total area lahan yang digunakan.

Sumber: Analisis Tim, 2025

Desain interior kafe ini memiliki struktur kayu alami sebagai elemen utama, dengan atap melengkung yang menciptakan kesan organik dan hangat, serta tanaman gantung hijau yang menambah kesegaran visual. Ruang terbuka dengan dinding kaca besar memungkinkan cahaya alami masuk secara maksimal dan menampilkan pemandangan alam di luar, sehingga menciptakan koneksi antara pengunjung dan lingkungan sekitar. Meja dan kursi terbuat dari rotan dan kayu, disusun bersama sofa abu-abu yang nyaman untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Di tengah ruangan, terdapat counter kopi dengan dinding batu hitam yang elegan dan logo "Timika Gold Coffee" sebagai identitas merek, sementara beberapa pengunjung duduk santai menikmati suasana yang ramah dan menenangkan. Pencahayaan alami dan desain arsitektur organik secara bersama-sama menciptakan atmosfer yang mengundang dan memperkuat pengalaman pengunjung dalam menikmati kopi.



Gambar 3.55.
Desain Coffe dan Retail
Sumber: Analisis Tim, 2025

Area penerimaan dan penyimpanan biji kopi memiliki struktur kayu alami dan dinding batu hitam yang kokoh, sehingga menciptakan kesan kuat dan fungsional. Ruangan luas dengan atap tinggi dan ventilasi alami melalui skylight memungkinkan cahaya masuk dan sirkulasi udara yang baik, sehingga menjaga kualitas biji kopi selama penyimpanan. Rak kayu besar berjejer rapi di sepanjang dinding, menyimpan karung-karung biji kopi yang tersusun teratur, sehingga memudahkan pengelolaan stok. Di bagian depan, terdapat meja penerimaan dengan logo "Timika Gold Coffee" yang mencolok, serta area kerja untuk petugas penerimaan, sehingga memastikan proses penerimaan berjalan efisien. Lantai beton yang bersih dan kuat menunjang aktivitas logistik, sementara pemandangan alam hijau di luar jendela besar menambah kesan segar dan alami. Desain ini menekankan efisiensi, kebersihan, dan kenyamanan operasional, sehingga mendukung kelancaran proses dari penerimaan hingga penyimpanan biji kopi.



Gambar 3.56.
Desain Area Penerimaan dan Penyimpanan Biji
Sumber: Analisis Tim, 2025

Area pengolahan basah kopi memiliki desain modern yang menggabungkan elemen alami dan teknologi, sehingga menciptakan kesan industrial namun ramah lingkungan. Ruangan luas dengan dinding batu hitam dan tiang bambu yang kokoh menjadi struktur utama, sehingga memberikan kekuatan visual dan fungsional. Di tengah ruangan, terdapat tangki-tangki stainless steel besar untuk proses pencucian dan pemisahan biji kopi, yang terhubung dengan sistem pipa dan mesin otomatis, sehingga memastikan efisiensi dan konsistensi dalam pengolahan. Lantai beton dengan saluran drainase yang rapi memastikan kebersihan dan efisiensi aliran limbah, sehingga mencegah kontaminasi dan memudahkan perawatan. Di bagian depan, terdapat area kerja petugas dengan meja kontrol dan layar monitor untuk memantau proses, sehingga memungkinkan pengawasan real-time dan respons cepat terhadap perubahan kondisi. Pemandangan alam hijau di luar jendela besar menambah kesan segar, sementara pencahayaan alami dari skylight meminimalkan penggunaan energi listrik, sehingga mendukung prinsip keberlanjutan. Desain ini menekankan efisiensi, kebersihan, dan keberlanjutan dalam proses pengolahan basah kopi, sehingga memastikan kualitas produk yang optimal dan ramah lingkungan.



Gambar 3.57.
Desain Area Pengolahan Biji Basah
Sumber: Analisis Tim, 2025

Area pengolahan kering kopi memiliki desain industrial modern yang tetap mempertahankan elemen alami, sehingga menciptakan nuansa hangat dan estetis. Ruangan luas dengan dinding kayu berpola geometris menjadi latar belakang utama, sehingga memberikan kesan visual yang menarik dan fungsional. Di tengah ruangan, terdapat dua mesin roasting besar berbahan tembaga yang menjadi fokus utama, sehingga menonjolkan proses pengolahan kopi secara visual dan memudahkan pengawasan. Di sekitar mesin, terdapat rak-rak kayu bertingkat yang berisi biji kopi yang sedang dikeringkan, sehingga memudahkan akses dan pengawasan oleh petugas. Lantai beton dengan pencahayaan alami dari skylight di atas memastikan sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup, sehingga mendukung proses pengeringan yang optimal. Di bagian depan, terdapat area kerja petugas dengan meja kontrol digital untuk memantau suhu dan waktu roasting, sehingga memastikan kualitas kopi yang konsisten dan sesuai standar. Desain ini menekankan efisiensi, estetika, dan kenyamanan dalam proses pengolahan kering kopi, sehingga memastikan hasil akhir yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.



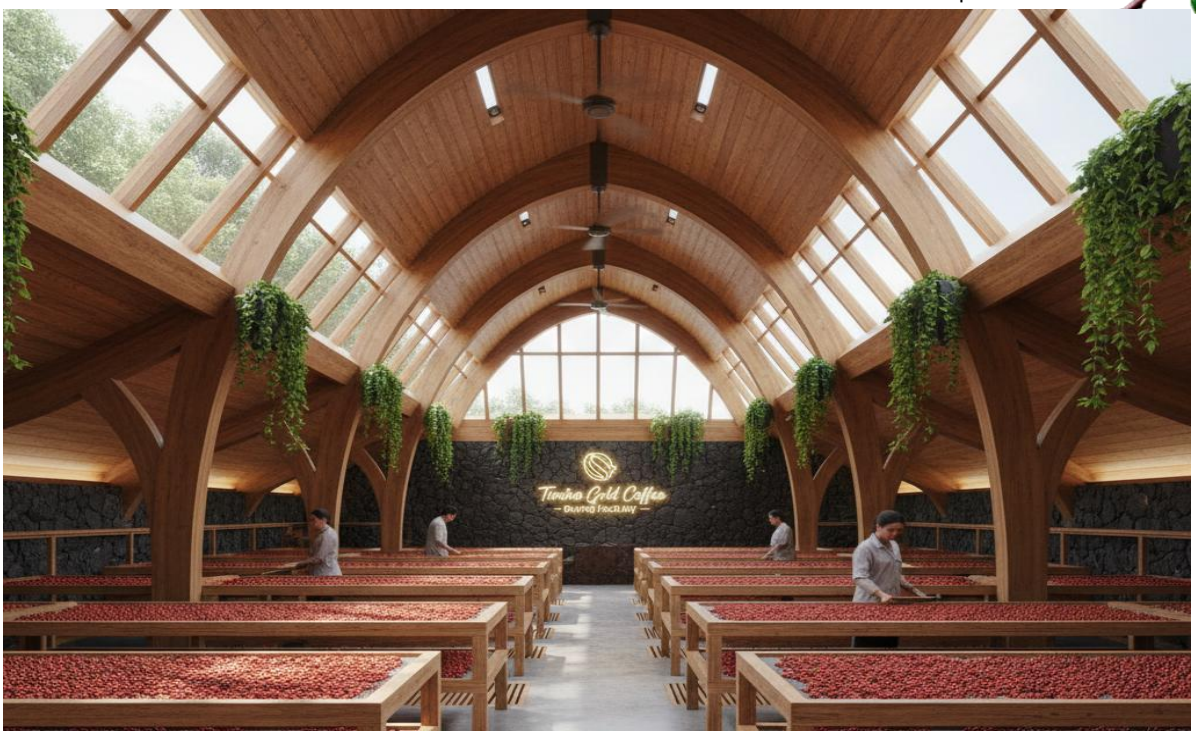
Gambar 3.58.
Desain Area Pengolahan Biji Kering
Sumber: Analisis Tim, 2025

Area penggilingan dan pengemasan kopi memiliki desain industrial modern yang tetap mempertahankan elemen alami, sehingga menciptakan nuansa hangat dan estetis. Ruangan luas dengan dinding kayu berpola geometris menjadi latar belakang utama, sehingga memberikan kesan visual yang menarik dan fungsional. Di tengah ruangan, terdapat dua mesin penggiling kopi besar berbahan tembaga yang menjadi fokus utama, sehingga menonjolkan proses penggilingan kopi secara visual dan memudahkan pengawasan. Di sekitar mesin, terdapat rak-rak kayu bertingkat yang berisi biji kopi yang siap digiling, sehingga memudahkan akses dan pengawasan oleh petugas. Lantai beton dengan pencahayaan alami dari skylight di atas memastikan sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup, sehingga mendukung proses penggilingan yang optimal. Di bagian depan, terdapat area kerja petugas dengan meja kontrol digital untuk memantau suhu dan waktu penggilingan, sehingga memastikan kualitas kopi yang konsisten dan sesuai standar. Di sisi kanan, terdapat jalur pengemasan dengan mesin pengemas otomatis yang terhubung langsung ke mesin penggiling, sehingga memudahkan proses pengemasan tanpa hambatan. Desain ini menekankan efisiensi, estetika, dan kenyamanan dalam proses penggilingan dan pengemasan kopi, sehingga memastikan hasil akhir yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.



Gambar 3.59.
Desain Area Penggilingan dan Pengemasan Kopi
Sumber: Analisis Tim, 2025

Area penjemuran kopi memiliki desain yang menggabungkan nuansa alami dan fungsionalitas tinggi, sehingga menciptakan lingkungan optimal untuk proses pengeringan biji kopi. Ruangan luas dengan atap melengkung berbahan kayu menjadi elemen utama yang memberikan kesan hangat dan estetis, sehingga mendukung kenyamanan kerja petugas. Di tengah ruangan, terdapat banyak rak kayu bertingkat yang berisi biji kopi yang sedang dijemur, sehingga memudahkan pengawasan dan memastikan sirkulasi udara yang baik selama proses penjemuran. Dinding ruangan terbuat dari batu alam yang memberikan kesan alami dan sejuk, sehingga mendukung proses penjemuran yang optimal dan mencegah panas berlebih. Di bagian atas, terdapat skylight yang memungkinkan cahaya matahari masuk secara langsung, sehingga mempercepat proses penjemuran tanpa perlu bantuan alat tambahan. Di sekitar ruangan, terdapat tanaman hijau yang menggantung dari atap, sehingga menciptakan nuansa segar dan nyaman bagi petugas maupun pengunjung. Desain ini menekankan efisiensi, estetika, dan kenyamanan dalam proses penjemuran kopi, sehingga memastikan hasil akhir yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan.



Gambar 3.60.
Desain Area Penjemuran Kopi
Sumber: Analisis Tim, 2025

3.7. Analisis KBLI

Analisis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan langkah penting dalam perencanaan dan pengembangan suatu kegiatan usaha, karena KBLI berfungsi sebagai pedoman resmi untuk mengidentifikasi jenis aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan. Melalui analisis KBLI, pelaku usaha dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha, struktur industri, serta regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Proses ini juga membantu mengarahkan fokus kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi yang tepat, mempermudah pengurusan perizinan melalui OSS, serta memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup bisnis yang akan dijalankan. Analisis KBLI diperlukan untuk menentukan jenis kegiatan industri, jasa pendukung, serta aktivitas hilir yang relevan. Dengan memahami dan memilih KBLI yang sesuai, perusahaan dapat mengoptimalkan potensi usaha.

Tabel 3.33.
Analisis KBLI Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated

Kode KBLI	Keterangan
10792 – Industri Kopi	Kode KBLI ini mencakup kegiatan industri yang mengolah biji kopi menjadi berbagai bentuk produk olahan, termasuk kopi bubuk, kopi sangrai, kopi instan, dan turunan kopi lainnya. KBLI ini digunakan sebagai dasar perizinan untuk usaha pabrik pengolahan kopi skala kecil hingga besar.
82920 – Jasa Pengemasan	KBLI ini meliputi kegiatan jasa pengemasan produk, termasuk pengemasan bahan makanan dan minuman dalam berbagai bentuk seperti sachet, pouch, box, atau kemasan ritel lainnya. Kode ini digunakan untuk usaha yang menyediakan layanan

Kode KBLI	Keterangan
	pengemasan, baik untuk produk sendiri maupun pihak lain.
56301 – Penyedia Minuman	Kode ini mencakup usaha penyediaan minuman yang disajikan untuk konsumsi langsung, seperti kedai kopi, bar, café minuman, atau tempat sejenis yang fokus pada penjualan minuman sebagai produk utama. KBLI ini cocok digunakan untuk usaha coffee shop atau beverage counter.
56102 – Restoran	KBLI ini mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi di tempat, seperti restoran, rumah makan, bistro, atau café yang menyediakan menu makanan lengkap. Kode ini digunakan untuk usaha yang menawarkan layanan makan-minum secara komprehensif.

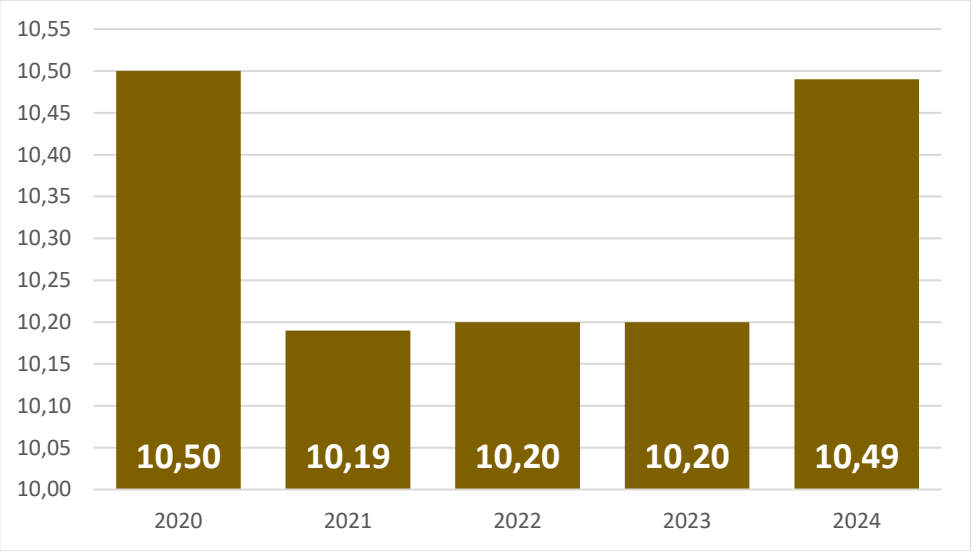
BAB



Aspek Pasar

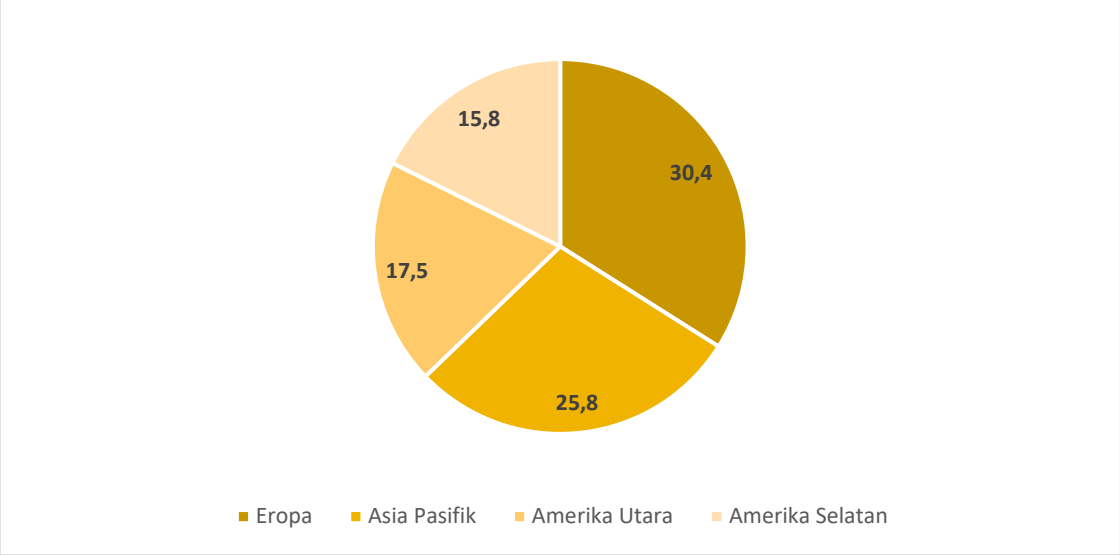
4.1. Analisis Permintaan

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Komoditas kopi memiliki permintaan yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai tahun 2025. Peningkatan tersebut terjadi baik secara global, nasional, maupun regional. Pertumbuhan industri kedai kopi, perubahan gaya hidup masyarakat, dan meningkatnya minat pada kopi spesialti mendorong peningkatan konsumsi kopi. Permintaan kopi dunia menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024. Pada tahun 2021, permintaan kopi mencapai 10,19 juto ton. Permintaan ini meningkat menjadi 10,20 juta ton pada tahun 2022 dan tahun 2023. Jumlah tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 10,49 juta ton pada tahun 2024.



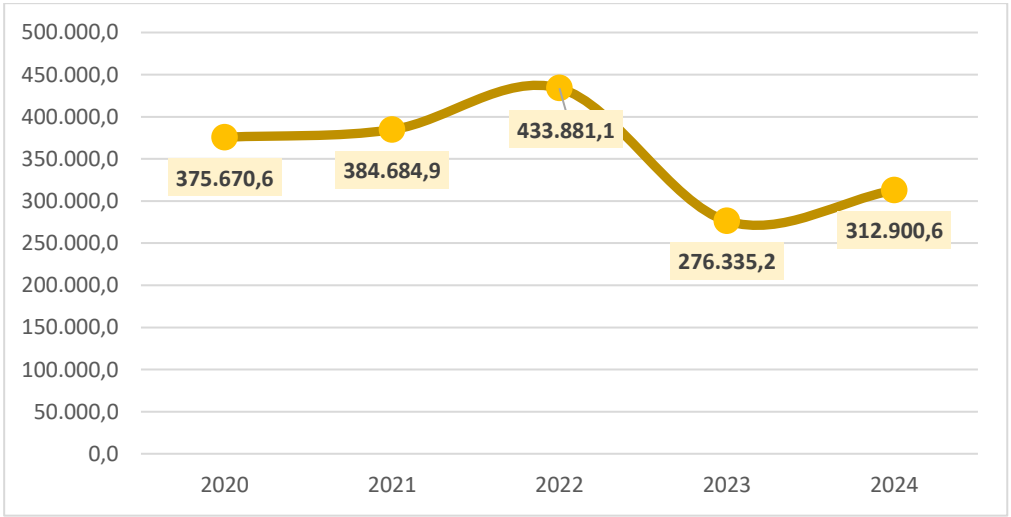
Gambar 4.1.
Permintaan Kopi Dunia (Juta Ton)
Sumber: International Coffe Oragnization, diolah

Berdasarkan kawasan pengomsumsi kopi terbanyak dunia, kawasan Eropa menjadi wilayah dengan komsumsi sebesar 30,4 persen dari total komsumsi dunia pada tahun 2025. Kawasan kedua adalah Asia Pasifik sebesar 25,8 persen. Ketiga adalah kawasan Amerika Utara sebesar 17,5 persen dan keempat adalah kawasan Amerika Selatan sebesar 15,8 persen.



Gambar 4.2.
Persentase Komsumsi Kopi Dunia
Sumber: International Coffe Oragnization, diolah

Volume ekspor kopi Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada awal tahun 2020, volume ekspor tercatat sebesar 375.670,6 ton. Volume tersebut meningkat menjadi 384.684,9 ton pada tahun 2021. Puncak tertinggi periode terjadi pada tahun 2022, volume ekspor kopi Indonesia mencapai 433.881,1 ton. Kenaikan ini mengindikasikan adanya permintaan global yang kuat atau kondisi produksi yang sangat menguntungkan. Volume ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 276.335,2 ton. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan besar yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, hambatan logistik, dan dinamika pasar global. Ekspor kopi Indonesia menunjukkan pemulihan pada tahun 2024. Volume ekspor kembali meningkat menjadi 312.900,6 ton.



Gambar 4.3.
Ekspor Kopi Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statsitik, diolah

Negara tujuan ekspor kopi Indonesia terbanyak didominasi oleh Amerika Serikat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, ekspor ke Amerika Serikat mencapai 54.473,7 ton, kemudian meningkat menjadi 57.694,0 ton pada tahun 2021. Namun, volume ini sedikit

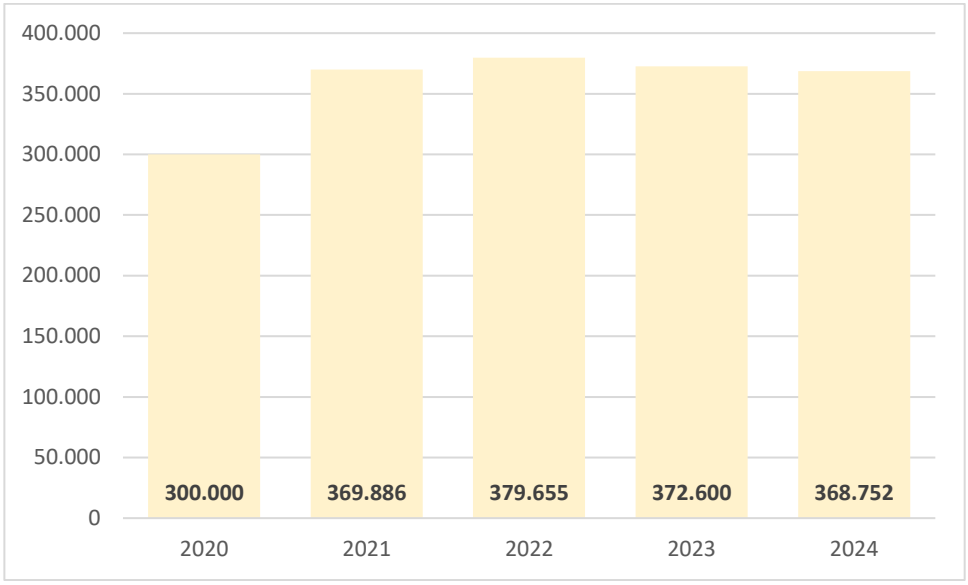
menurun pada tahun 2022 menjadi 55.810,2 ton, dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 36.625,6 ton. Pada tahun 2024, ekspor ke Amerika Serikat menunjukkan pemulihan menjadi 44.304,5 ton. Negara kedua adalah Mesir. Volume ekspor kopi meningkat dari 32.536,7 ton pada tahun 2020 menjadi 48.521,3 ton pada tahun 2021. Setelah itu, ekspor ke Mesir cenderung menurun, yaitu 37.428,4 ton pada tahun 2022, 32.047,8 ton pada tahun 2023, dan menjadi 31.479,2 ton pada tahun 2024. Negara ketiga adalah Malasyia dengan volume ekspor sebanyak 36.186,0 ton pada tahun 2020, volume ekspor ke negara ini mengalami penurunan hingga mencapai 22.690,9 ton pada tahun 2023. Namun, volume ekspor mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan 28.687,1 ton. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki pasar ekspor kopi yang beragam, tetapi negara ini sangat bergantung pada beberapa pasar utama seperti Amerika Serikat. Fluktuasi yang terjadi di berbagai negara tujuan menyoroti perlunya strategi diversifikasi pasar dan adaptasi terhadap dinamika permintaan global.

Tabel 4.1.
Negara Tujuan Ekspor Kopi Indonesia

Negara Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Amerika Serikat	54.473,7	57.694,0	55.810,2	36.625,6	44.304,5
Mesir	32.536,7	48.521,3	37.428,4	32.047,8	31.479,2
Malaysia	36.186,0	29.180,7	26.117,3	22.690,9	28.687,1
Belgia	14.758,1	14.434,0	22.179,8	3.430,9	21.298,2
Jerman	21.321,9	13.334,9	36.976,4	9.460,4	16.442,2
Jepang	23.471,6	27.297,0	18.813,5	15.316,8	15.258,6
India	19.998,0	22.109,6	43.596,9	23.811,3	9.827,6
Georgia	12.748,0	13.398,0	15.902,6	11.536,4	8.505,6
Aljazair	5.919,6	3.918,1	13.142,5	5.291,4	6.817,2
Maroko	9.603,7	12.164,1	9.230,4	6.633,2	6.678,8
Italia	27.237,5	24.590,0	24.006,2	18.122,0	6.549,9
Belanda	1.490,8	2.243,6	3.598,0	3.795,0	5.016,3
Singapura	5.212,9	5.377,0	6.573,2	5.522,3	4.394,8
Perancis	4.376,4	5.993,5	874,7	644,6	3.073,3

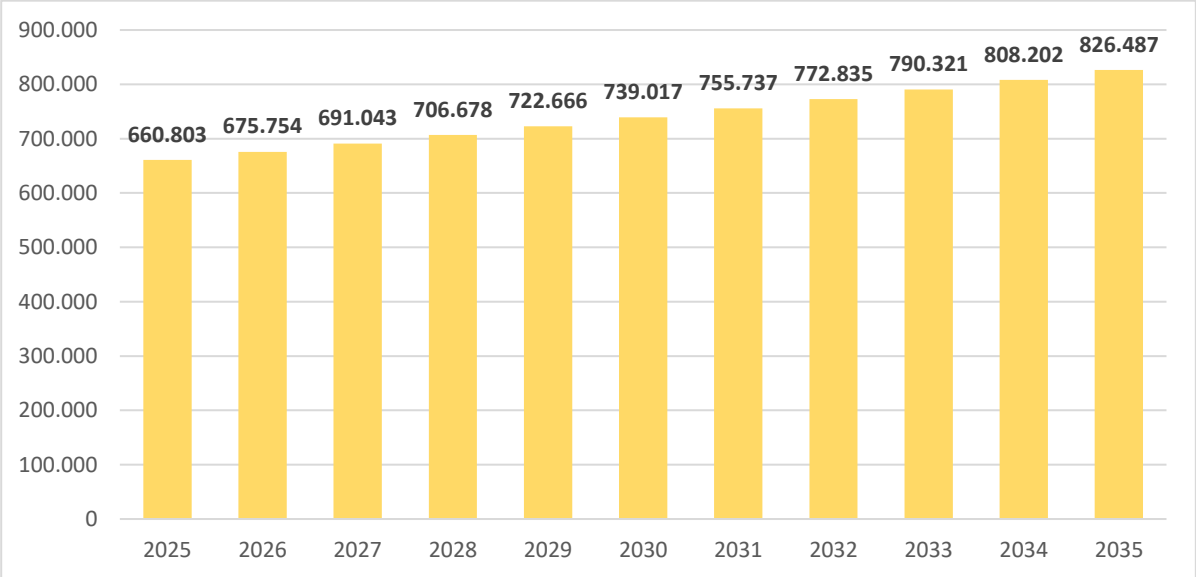
Sumber: Badan Pusat Statsitik, diolah

Data permintaan kopi Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020, permintaan kopi sebesar 300.000 ton. Angka permintaan ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 369.886 ton. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022. Permintaan kopi Indonesia mencapai 379.655 ton. Namun, setelah mencapai titik tertinggi tersebut, permintaan mulai menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2023, permintaan turun menjadi 372.600 ton. Penurunan ini terjadi hingga tahun 2024. Permintaan kopi Indonesia berada pada angka 368.752 ton.



Gambar 4.4.
Permintaan Kopi Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statsitik, diolah

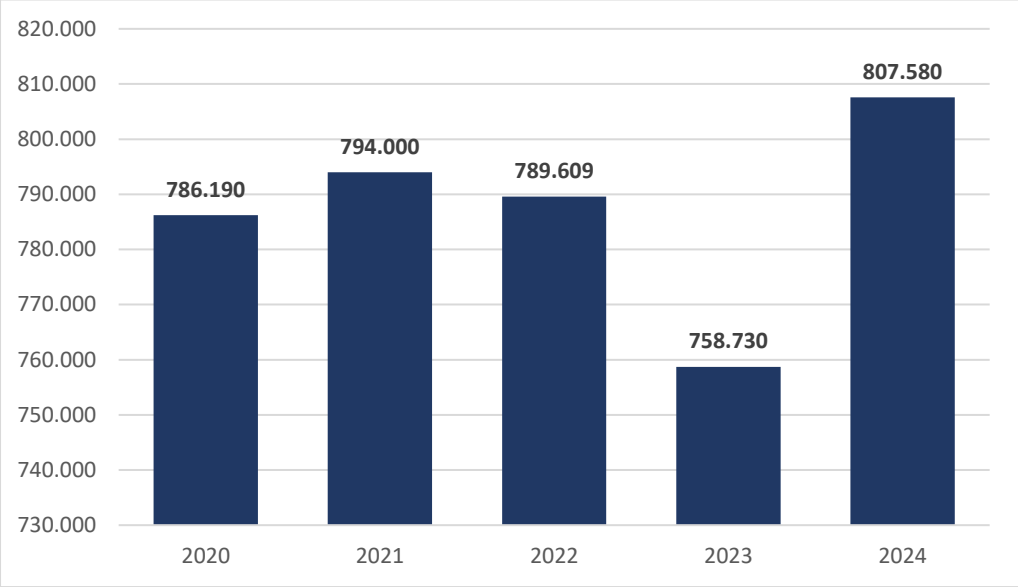
Data ini memperlihatkan proyeksi permintaan kopi Indonesia dalam kurun waktu 2025 hingga 2035 yang mengindikasikan adanya tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2025, permintaan kopi diperkirakan mencapai 660.803 ton. Peningkatan permintaan ini berlanjut secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, permintaan kopi naik menjadi 675.754 ton, dan pada tahun 2027, mencapai 691.043 ton. Permintaan tersebut terus tumbuh, dengan angka 706.678 ton pada tahun 2028 dan 722.666 ton pada tahun 2029. Proyeksi permintaan tetap positif. Pada tahun 2030, permintaan kopi diproyeksikan mencapai 739.017 ton. Tren kenaikan ini berlanjut, dengan 755.737 ton pada tahun 2031 dan 772.835 ton pada tahun 2032. Pada akhir periode proyeksi, permintaan kopi Indonesia menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2033, permintaan diperkirakan mencapai 790.321 ton. Angka ini terus meningkat, dengan 808.202 ton pada tahun 2034, dan akhirnya mencapai puncak proyeksi sebesar 826.487 ton pada tahun 2035.



Gambar 4.5.
Proyeksi Permintaan Kopi Indonesia
Sumber: Roadmap Kopi Indonesia 2020-2045, diolah

4.2. Analisis Penawaran

Pada tahun 2020, produksi kopi tercatat sebesar 786.190 ton. Pada tahun 2021, produksi kopi mengalami peningkatan signifikan, mencapai 794.000 ton. Peningkatan ini mengindikasikan pertumbuhan positif. Namun, pada tahun 2022, produksi sedikit menurun, menjadi 789.609 ton. Penurunan produksi ini berlanjut tajam pada tahun 2023, produksi kopi turun menjadi 758.730 ton. Penurunan ini mencerminkan tantangan tertentu dalam sektor pertanian kopi pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, produksi kopi Indonesia menunjukkan pemulihan yang kuat, dengan peningkatan signifikan menjadi 807.580 ton.



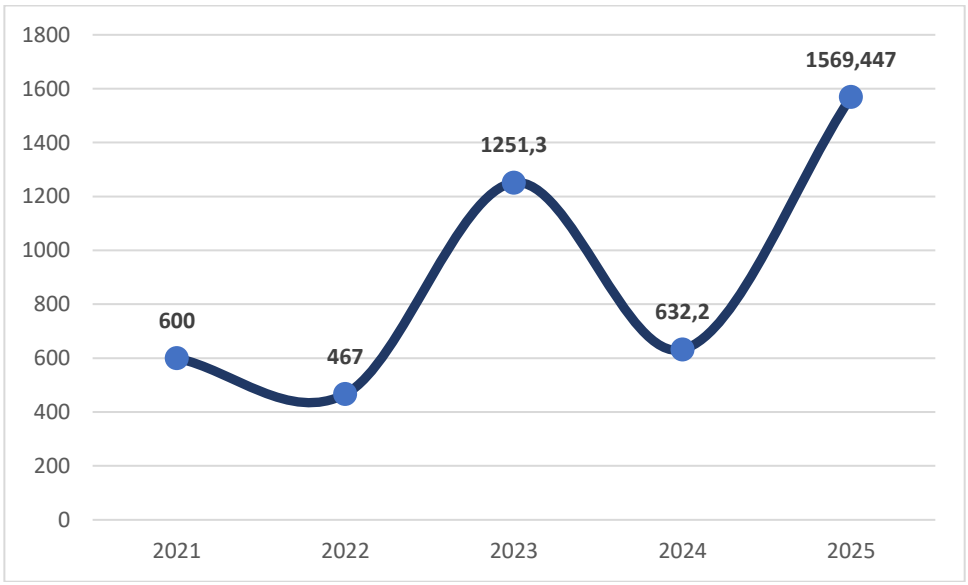
Gambar 4.6.
Produksi Kopi Indonesia
Sumber: Badan Pusat Stastistik, diolah

Sumatera Selatan mendominasi produksi kopi Indonesia dengan 219.586 ton dari 267.435 hektar area tanam. Provinsi ini merupakan kontributor terbesar produksi kopi nasional. Lampung menyusul di posisi kedua dengan 120.739 ton dari 152.609 hektar, yang menunjukkan peran signifikan dalam suplai kopi. Sumatera Utara juga merupakan salah satu provinsi produsen utama, dengan 91.695 ton dari 99.064 hektar. Aceh memberikan kontribusi sebesar 74.131 ton dari 113.099 hektar. Bengkulu menghasilkan 55.634 ton dari 90.500 hektar. Jawa Timur dan Sulawesi Selatan juga berperan penting. Jawa Timur memproduksi 53.248 ton dari 94.877 hektar, sedangkan Sulawesi Selatan menyumbang 31.785 ton dari 80.229 hektar. Provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat (26.480 ton dari 55.958 hektar), Jawa Tengah (26.787 ton dari 48.807 hektar), dan Nusa Tenggara Timur (24.378 ton dari 74.269 hektar) juga berkontribusi pada total produksi kopi nasional. Provinsi dengan produksi yang lebih kecil meliputi Jambi (23.227 ton dari 32.029 hektar), Sulawesi Barat (16.978 ton), Sumatera Barat (15.316 ton), dan Bali (14.711 ton dari 33.749 hektar). Nusa Tenggara Barat menunjukkan produksi terkecil di antara daerah yang tertera, yaitu 6.423 ton dari 14.081 hektar.



Gambar 4.7.
Produksi Kopi Per Provinsi
Sumber: Badan Pusat Stastistik, diolah

Pada tahun 2021, produksi kopi Kabupaten Mimika tercatat sebesar 600 ton. Kemudian, pada tahun 2022, produksi mengalami penurunan menjadi 467 ton. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan awal yang dihadapi dalam produksi kopi. Namun, pada tahun 2023, produksi kopi mencapai 1.251,3 ton. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan produksi atau kondisi yang sangat mendukung pertanian kopi pada tahun tersebut. Produksi kembali menurun di tahun 2024, yaitu menjadi 632,2 ton. Penurunan ini mengindikasikan bahwa tren pertumbuhan belum stabil dan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan peningkatan produksi. Pada tahun produksi sebesar 1.569,447 ton. Angka ini tidak menandakan optimisme tinggi terhadap potensi produksi kopi di Kabupaten Mimika pada masa mendatang.



Gambar 4.8.
Produksi Kopi Kabupaten Mimika
Sumber: Bidang Produksi Tanaman Perkebunan DTPHP Kabupaten Mimika

Distrik Tembagapura menunjukkan pertumbuhan produksi yang tinggi. Produksinya meningkat dari 148 kg pada tahun 2021 menjadi 1.055,9 kg pada tahun 2023 dan mencapai 949,747 kg pada tahun 2025. Distrik ini merupakan kontributor terbesar terhadap total produksi kopi. Distrik Hoya juga menunjukkan peningkatan produksi yang stabil dari 120 kg pada tahun 2021 menjadi 438,6 kg pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan potensi pertumbuhan yang konsisten di distrik ini. Beberapa distrik seperti Jila, Jita, Agimuga, dan Iwaka mengalami penurunan signifikan dalam produksi setelah tahun-tahun awal atau menunjukkan produksi yang rendah secara konsisten. Distrik Jita, misalnya, mengalami penurunan dari 123 kg pada tahun 2021 menjadi hanya 13 kg pada tahun 2025. Distrik-distrik lain seperti Kwamki Narama, Kuala Kencana, Mimika Timur, Wania, Mimika Baru, dan Mimika Barat (Kiyura) mulai menunjukkan kontribusi pada tahun-tahun belakangan dan diproyeksikan akan meningkatkan produksi mereka pada tahun 2025. Kwamki Narama, contohnya, memiliki proyeksi produksi 13 kg pada 2024 dan tidak ada data pada 2025. Distrik Mimika Barat (Kiyura) meningkatkan produksi dari 8 kg pada 2023 menjadi 81 kg pada 2025.

Tabel 4.2.
Produksi Kopi Kabupaten Mimika Per Distrik

No	Distrik	Produksi (Kg)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Hoya	120	180	159,4	160,3	438,6
2	Tembagapura	148	167	1055,9	303,6	949,747
3	Jila				70,4	51,4
4	Jita	123	60		15	13
5	Agimuga	99	30			
6	Iwaka	110	30	16	2	3,2
7	Kuala Kencana				8	20,5
8	Mimika Timur					1
9	Wania			12	4	8
10	Kwamki Narama				13	
11	Mimika Baru				6	3
12	Mimika Barat (Kiyura)			8	49,9	81
Total		**600**	**467**	**1251,3**	**632,2**	**1569,447**

Sumber: Bidang Produksi Tanaman Perkebunan DTPHP Kabupaten Mimika

4.3. Identifikasi Investor Potensial

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi calon investor potensial, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berpotensi berinvestasi dalam pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika. Analisis ini juga mencakup profil investor yang sesuai, minat dan kebutuhan mereka, serta strategi pendekatan yang efektif untuk menarik investasi. Calon investor potensial adalah pihak yang memiliki kemampuan finansial, minat, dan kesesuaian usaha untuk menanamkan modal dalam suatu proyek atau bisnis. Berikut ini merupakan identifikasi calon investor potensial untuk pengembangan pabrik pengolahaan kopi di Kabupaten Mimika.

1) Perusahaan Pengolahan Kopi Besar
   - Profil: Perusahaan ini sudah *established* di industri kopi, memiliki kapasitas produksi yang besar, dan jangkauan pasar yang luas seperti PT. Kapal Api Global, PT. Mayora Indah Tbk, Nestle.
   - Minat: Perusahaan ini mencari sumber bahan baku yang stabil dan berkualitas tinggi, ingin memperluas pangsa pasar, serta memanfaatkan potensi pertumbuhan di daerah baru.

- Kebutuhan: Jaminan pasokan bahan baku yang konsisten, infrastruktur pendukung meliputi akses jalan, listrik, air, serta stabilitas regulasi dan iklim investasi yang kondusif.

2) Pemodal Ventura atau *Private Equality*
   - Profil: Entitas ini mencari peluang investasi pada perusahaan dengan potensi pertumbuhan tinggi, terutama di sektor agribisnis atau pengolahan pangan.
   - Minat: Tertarik pada proyek yang dapat memberikan pengembalian investasi (ROI) tinggi dalam jangka menengah hingga panjang.
   - Kebutuhan: Studi kelayakan yang komprehensif, proyeksi keuangan yang realistis, dan model bisnis yang solid dengan strategi pemasaran yang jelas.
3) Produsen Kopi Spesial/Artisan
   - Profil: Produsen ini fokus pada kopi berkualitas tinggi dan pasar niche, seringkali dengan penekanan pada keberlanjutan dan jejak karbon seperti starbucks dan merek kopi specialty roaster.
   - Minat: Mencari biji kopi dengan karakteristik unik dari daerah tertentu (single origin), serta peluang untuk berinvestasi dalam rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan.
   - Kebutuhan: Memerlukan kepastian kualitas biji kopi, sertifikasi, dan informasi yang jelas tentang praktik pertanian yang berkelanjutan.
4) Badan Usaha Milik Pemerintah
   - Profil: Lembaga ini berinvestasi dalam proyek strategis yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan nasional.
   - Minat: Mendukung peningkatan nilai tambah komoditas lokal, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi.
   - Kebutuhan: Proyek harus selaras dengan program pemerintah, membutuhkan studi dampak sosial dan ekonomi, serta transparansi dalam pengelolaan proyek.

Tabel 4.3.
Identifikasi Calon Investor Potensial

Calon Invstor	Minat	Kebutuhan
Perusahan Kopi Besar	Sumber bahan baku yang stabil dan berkualitas tinggi, Memperluas pangsa pasar, serta Memanfaatkan potensi pertumbuhan di daerah baru	Jaminan pasokan bahan baku yang konsisten, Infrastruktur pendukung (akses jalan, listrik, air), Stabilitas regulasi dan iklim investasi yang kondusif.
Pemodal Ventura atau Private Equity	Proyek yang dapat memberikan pengembalian investasi (ROI) tinggi dalam jangka menengah hingga panjang.	Studi kelayakan yang komprehensif, Proyeksi keuangan yang realistis, dan Model bisnis yang solid dengan strategi pemasaran yang jelas.
Produsen Kopi Spesial/Artisan	Biji kopi dengan karakteristik unik dari daerah tertentu (*single origin*), serta Peluang untuk berinvestasi dalam rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan.	Kepastian kualitas biji kopi, Sertifikasi (*organik, fair trade*), dan Informasi yang jelas tentang praktik pertanian yang berkelanjutan
Badan Usaha Milik Pemerintah	Peningkatan nilai tambah komoditas lokal, Penciptaan lapangan kerja, dan Transfer teknologi.	Selaras dengan program pemerintah, Membutuhkan studi dampak sosial dan ekonomi, serta Transparansi dalam pengelolaan proyek

Sumber: Analisis dari Berbagai Sumber, 2025



BAB 6

Aspek Keuangan

5.1. Profil Proyek Peluang Investasi

Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated akan dikembangkan di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Proyek peluang investasi ini akan dikembangkan pada lahan seluas 2.000 m^2. Pabrik pengolahan kopi ini akan memiliki kapasitas produksi kopi instan sebesar 300.000 kg/tahun dan *roasted bean* sebesar 40.000 kg/tahun. Ruang lingkup operasi pabrik pengolahan kopi ini meliputi pengolahan basah (*washing, drying*), *roasting & grinding,* ekstraksi kopi, evaporasi & *spray drying,* pengemasan industri, serta fasilitas *coffee shop & retail*. Terdapat tiga sumber pendapatan yaitu penjualan kopi instan, penjualan roasted beans, serta *coffee shop.* Pabrik ini akan membutuhkan 69 tenaga kerja yang terdiri dari 38 orang produksi, 6 orang QC/Lab, 5 orang maintence, 8 orang admin dan manajemen, dan 12 orang di *coffe shop.*

5.2. Analisis Kelayakan Finansial

Analisis kelayakan finansial ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi keuntungan dan keberlanjutan investasi pada proyek pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika. Analisis ini akan memberikan gambaran kelayakan finanasial pengembangan pabrik kopi kepada calon investor. Analisis kelayakan finansial ini terdiri dari *capex, opex,* estimasi pendapatan tahunan, laporan laba rugi, arus kas, *net present value* (NPV), *internal rate of return* (IRR), dan *payback period*. Asumsi dasar perhitungan kelayanan finansial adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Asumsi Dasar Perhitungan

Komponen	Nilai
Harga kopi instan	140.000/kg
Harga roasted beans	80.000/kg
Pendapatan coffee shop	1.000.000.000/tahun
Umur proyek	10 tahun
Diskonto	10%
Pajak Perusahaan	22%
Depresiasi	Garis lurus 10 tahun

Sumber: Analsis Tim, 2025

Analisis CAPEX (Capital Expenditure Analysis) adalah proses mengidentifikasi, menghitung, dan mengevaluasi seluruh biaya investasi awal yang diperlukan untuk membangun, membeli, atau meningkatkan aset tetap suatu proyek atau perusahaan. Aset tetap tersebut biasanya mencakup bangunan, mesin, peralatan produksi, kendaraan operasional, sistem teknologi, serta infrastruktur pendukung lainnya. Tujuan analisis ini adalah menentukan besaran biaya investasi awal yang dibutuhkan sebelum proyek dapat beroperasi, menilai kelayakan finansial proyek, yaitu apakah investasi tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, membantu perencanaan jangka panjang, terutama terkait kebutuhan pembiayaan, umur ekonomis aset, dan pengembalian investasi, serta mengidentifikasi risiko biaya seperti kenaikan harga material, kebutuhan teknologi tambahan, atau penggantian mesin. Berdasarkan analisis capex estimasi investasi awal sebesar Rp92.750.000.000,-

Tabel 5.2.
Estimasi Investasi Awal (CAPEX)

Komponen	Nilai (Rp)
Lahan 2.000 m² × 2 juta	4.000.000.000
Bangunan 1.500 m²	9.750.000.000
Peralatan produksi	63.000.000.000
Peralatan coffee shop	1.200.000.000

Komponen	Nilai (Rp)
Utilities (boiler, genset, WWTP)	7.000.000.000
Biaya pra-operasi & perizinan	2.000.000.000
Contingency 7%	5.800.000.000
Total CAPEX	**92.750.000.000**

Sumber: Analsis Tim, 2025

Analisis OPEX (Operational Expenditure Analysis) adalah proses mengidentifikasi, menghitung, dan mengevaluasi seluruh biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis atau proyek setelah investasi awal dilakukan. OPEX mencakup semua pengeluaran rutin yang diperlukan agar operasi dapat berjalan setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun. Analisis ini bertujuan untuk menghitung total biaya operasional yang perlu disiapkan untuk menjaga kelancaran proses produksi atau layanan, menilai efisiensi operasional, yaitu apakah biaya dapat dikurangi atau dioptimalkan tanpa mengganggu kualitas output, memproyeksikan kebutuhan biaya jangka panjang, termasuk kenaikan harga bahan baku, inflasi, atau perubahan kebutuhan sumber daya manusia, mendukung analisis kelayakan usaha. Berdasarkan analisis *opex* sebesar Rp25.558.000.000,- per tahun.

Tabel 5.3.
Estimasi Biaya Operasional (OPEX)

Komponen	Nilai (Rp)
Tenaga kerja (69 orang)	4.968.000.000
Bahan baku (green beans)	10.500.000.000
Biaya utilitas	6.000.000.000
Maintenance	1.890.000.000
Operasional coffee shop	1.200.000.000
Overhead lain-lain	1.000.000.000
Total OPEX	**25.558.000.000**

Sumber: Analsis Tim, 2025

Estimasi pendapatan adalah proses memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diperoleh oleh suatu usaha atau proyek dalam periode waktu tertentu, berdasarkan data historis, kondisi pasar, kapasitas produksi, strategi penjualan, dan asumsi-asumsi bisnis lainnya. Estimasi ini disusun untuk memproyeksikan potensi pemasukan yang realistis sebelum kegiatan operasional berjalan. Estimasi pendapatan pada peluang investasi proyek pengembangan pabrik kopi di Kabupaten Mimika adalah Rp46.200.000.000,-

Tabel 5.4.
Estimasi Pendapatan

Sumber Pendapatan	Volume	Harga	Total (Rp)
Kopi instan	300.000 kg	140.000	42.000.000.000
Roasted beans	40.000 kg	80.000	3.200.000.000
Coffee shop	–	–	1.000.000.000
Total			**46.200.000.000**

Sumber: Analsis Tim, 2025

Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menggambarkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Berdasarkan analisis laporan laba rugi pengembangan peluang investasi pabrik

pengolahan kopi Kabupaten Mimika memiliki laba bersih sebesar Rp16.100.760.000,- per tahun.

Tabel 5.5.
Laporan Laba Rugi

Komponen	Nilai (Rp)
Pendapatan	46.200.000.000
OPEX	-25.558.000.000
Laba Operasi (EBIT)	**20.642.000.000**
Pajak 22%	-4.541.240.000
Laba Bersih	**16.100.760.000**

Sumber: Analsis Tim, 2025

Arus kas bersih (*cash flow*) adalah selisih antara total pemasukan kas dan total pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Arus kas bersih menunjukkan berapa banyak uang tunai yang benar-benar masuk atau keluar dari perusahaan, sehingga mencerminkan kondisi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, membiayai operasional, serta melakukan investasi. *Cashflow* pabrik pengolahan kopi Kabupaten Mimika sebesar Rp23.700.760.000,-.

Tabel 5.6.
Laporan Arus Kas Bersih (*Cashflow)*

Komponen	Perhitungan Dasar	Total
Depresiasi = (Bangunan + Mesin) / 10	= (76.000.000.000 / 10)	= **7.600.000.000/tahun**
Cashflow = Laba Bersih + Depresiasi	= 16.100.760.000 + 7.600.000.000	= **23.700.760.000**

Sumber: Analsis Tim, 2025

NPV adalah nilai kini bersih dari seluruh arus kas masa depan proyek dikurangi investasi awal. NPV menghitung seberapa besar nilai ekonomis yang dihasilkan sebuah investasi. Nilai NPV pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika adalah Rp52.880.910.276,- . IRR adalah tingkat pengembalian internal dari sebuah investasi, yaitu tingkat diskonto (r) yang membuat nilai NPV = 0. Nilai IRR pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika adalah 22,077%. *Payback Period* adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas bersih yang dihasilkan proyek. *Payback Period* pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika adalah 3,91 tahun

Tabel 5.7.
NPV, IRR, dan *Payback Period*

No	Konponen	Hasil
1	NPV	**Rp 52.880.910.276**
2	IRR	**22,077%**
3	Payback Period	**92.750.000.000 ÷ 23.700.760.000 = 3,91**

Sumber: Analsis Tim, 2025

Analisis finansial dari pembangunan industri pengolahan kopi terintegrasi yang meliputi pengolahan basah, roasting, produksi kopi instan melalui proses ekstraksi–evaporasi–spray drying, pengemasan, serta fasilitas coffee shop. Analisis menunjukkan bahwa proyek memberikan **NPV positif sebesar Rp 52,88 miliar**, **IRR 22,077%**, dan **Payback Period 3,91 tahun**, jauh lebih baik dari benchmark industri pangan (5–7 tahun). Hasil perhitungan menegaskan bahwa proyek ini **sangat layak secara finansial**, dengan risiko dapat dikendalikan.

BAB



Aspek Sosial dan Ekonomi

6.1. Aspek Sosial

Analisis dampak sosial merupakan komponen krusial dalam evaluasi kelayakan suatu proyek, termasuk pembangunan pabrik pengolahan kopi dan jaringan ritel terintegrasi di Kabupaten Mimika. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan mengurangi potensi dampak negatif, sekaligus memperbesar dampak positif proyek terhadap masyarakat sekitar. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sosial. Dampak sosial merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat suatu intervensi proyek, program, atau kebijakan. Dalam konteks pengembangan peluang investasi pabrik kopi, perubahan ini bisa menyangkut aspek demografi, ekonomi, kesehatan, budaya, mata pencaharian, kualitas hidup, dan struktur sosial masyarakat lokal. Memahami dampak sosial sejak awal memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merancang strategi mitigasi dan optimalisasi yang efektif. Pemetaan aspek sosial pengembangan peluang investasi pabrik kopi di Kabupaten Mimika akan menggunakan matriks analisis biaya manfaat sosial.

Matriks Dampak adalah alat kualitatif yang digunakan untuk memetakan hubungan antara aktivitas proyek dan potensi dampak terhadap berbagai komponen sosial. Metode ini memungkinkan identifikasi dampak, penilaian signifikansinya (positif atau negatif, besar atau kecil), dan seringkali mempertimbangkan probabilitas kejadiannya. Untuk proyek pabrik kopi di Mimika, matriks ini akan membantu kita secara terstruktur melihat bagaimana setiap tahapan proyek (mulai dari pembangunan hingga operasional dan ritel) akan berinteraksi dengan masyarakat lokal, budaya, dan struktur sosial. Penilaian dampak matrik akan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1) Sifat Dampak
   - Positif (+): Meningkatkan kesejahteraan/kualitas hidup.
   - Negatif (-): Menurunkan kesejahteraan/kualitas hidup.
   - Netral (0): Tidak ada dampak signifikan
2) Intensitas
   - Rendah (R): Dampak kecil, terbatas, mudah ditangani.
   - Sedang (S): Dampak moderat, mungkin memerlukan mitigasi.
   - Tinggi (T): Dampak besar, luas, perlu penanganan serius.
3) Jangka Waktu
   - Jangka Pendek (JP): Terjadi selama proyek berlangsung atau dalam waktu singkat setelahnya.
   - Jangka Menengah (JM): Terjadi dalam beberapa tahun.
   - Jangka Panjang (JJ): Dampak bersifat permanen atau sangat sulit diubah.
4) Probabilitas
   - Pasti (P): Hampir pasti terjadi.
   - Kemungkinan Besar (KB): Sangat mungkin terjadi.
   - Mungkin (M): Ada kemungkinan terjadi.
   - Kecil (K): Sangat kecil kemungkinannya.
5) Reversibility
   - Reversibel (Rv): Dampak dapat dipulihkan.
   - Iriversibel (Ir): Dampak tidak dapat dipulihkan.

Tabel 6.1
Identifikasi Aspek Sosial

Aktivitas	Demografi	Budaya dan Adat	Kesehatan Masyarakat	Pendidikan	Infrastruktur dan Layanan Publik	Hubungan Masyarakat	Persepsi dan Harapan Masyarakat
Pra Kontruksi							
Pembebasan Lahan	(+) T/JM/P/Rv	(+) T/JJ/P/Rv	(-) S/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv
Konstuksi							
Pembangunan Pabrik dan Retail	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JJ/P/Rv	(-) S/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv
Operasional							
Perekrutan Tenaga Kerja	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JJ/P/Rv	(-) S/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv
Produksi Pabrik Kopi	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JJ/P/Rv	(-) S/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv	(+) T/JP/P/Rv

Sumber: Analisis Tim, 2025

Berdasarkan isian matrik pada tabel di atas, berikut ini merupakan identifikasi dan intepretasi aspek sosial pengembangan peluangan investasi pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika.

Dampak Positif:

a) Peningkatan Kesejahteraan
Dengan pendapatan yang lebih baik, masyarakat bisa memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

b) Pengembangan Kapasitas SDM
Peluang peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui program pelatihan dan pengalaman kerja di pabrik.

c) Penguatan Jaringan Komunitas
Melalui kemitraan dengan petani atau program CSR, dapat memperkuat ikatan sosial.

d) Peningkatan Citra Daerah
Mimika dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas.

Dampak Negatif:

a) Perubahan Struktur Sosial
Masuknya karyawan dari luar daerah dapat mengubah komposisi demografi dan dinamika sosial.

b) Pergeseran Nilai Budaya
Modernisasi dan pola kerja industri dapat mengikis nilai-nilai dan tradisi lokal.

c) Konflik Sosial
Potensi konflik lahan, ketegangan antara masyarakat lokal dan pendatang, atau antara masyarakat dengan perusahaan.

d) Perubahan Gaya Hidup
Adopsi gaya hidup konsumtif atau modern yang mungkin tidak selaras dengan budaya adat.

e) Isu Kesehatan Masyarakat
Peningkatan populasi atau aktivitas industri dapat menambah beban pada fasilitas kesehatan yang ada.

6.2. Aspek Ekonomi

Analisis aspek ekonomi adalah bagian krusial dalam studi pengembangan pabrik pengolahan kopi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah suatu proyek layak memberikan keuntungan ekonomi yang optimal bagi para pemangku kepentingan, baik itu investor, masyarakat lokal, maupun pemerintah. Analisis ini melibatkan identifikasi, kuantifikasi, dan perbandingan biaya serta manfaat yang timbul dari proyek tersebut, baik

yang bersifat moneter maupun non-moneter. Berikut merupakan merupakan identifikasi biaya dan manfaat peluang investasi pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika.

1) Identifikasi Biaya

Biaya Langsung

- Pembelian/Penyewaan Lahan: Biaya akuisisi lahan untuk pabrik.
- Pembangunan Infrastruktur: Biaya pembangunan gedung pabrik, gudang, kantor, jalan akses internal.
- Pembelian Mesin dan Peralatan: Mesin roasting, grinding, packaging, espresso machine, dll.
- Perizinan dan Legalisasi: Biaya untuk mendapatkan berbagai izin usaha, lingkungan, dll.
- Pelatihan Karyawan: Biaya pelatihan awal untuk operator mesin dan staf lainnya.
- Bahan Baku: Pembelian biji kopi dari petani.
- Gaji dan Upah Karyawan: Termasuk tunjangan dan asuransi.
- Energi: Listrik, bahan bakar untuk operasional mesin.
- Air: Untuk produksi dan kebutuhan sanitasi.
- Pemeliharaan: Biaya perawatan mesin dan fasilitas.
- Pemasaran dan Penjualan: Iklan, promosi, distribusi.
- Pajak dan Retribusi Operasional: Pajak daerah, retribusi sampah, dll.

Biaya Tidak Langsung

- Pengolahan Limbah: Biaya instalasi dan operasional IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) jika ada limbah cair, biaya penanganan limbah padat.
- Polusi Udara/Suara: Jika ada dampak signifikan yang memerlukan mitigasi, biaya mitigasi pencemaran udara/suara.
- Degradasi Lahan/Deforestasi: Jika pembukaan lahan untuk pabrik menyebabkan deforestasi, biaya restorasi atau kompensasi.
- Peningkatan Harga Tanah Lokal: Kenaikan harga properti di sekitar pabrik yang mungkin memberatkan penduduk lokal.
- Perubahan Sosial: Peningkatan populasi migran yang mencari pekerjaan dapat membebani fasilitas umum dan memicu isu sosial.

2) Identifikasi Manfaat

Manfaat Langsung

- Peningkatan Pendapatan Penjualan Pabrik: Penjualan produk kopi olahan biji sangrai, kopi bubuk, kopi siap minum.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Gaji yang dibayarkan kepada karyawan.
- Pajak dan Retribusi Pemerintah: Pajak penghasilan karyawan, pajak korporasi, retribusi daerah

Manfaat Tidak Langsung

- Peningkatan Pendapatan Petani Kopi: Pabrik menyediakan pasar yang stabil dan harga yang lebih baik untuk biji kopi petani.
- Transfer Pengetahuan dan Teknologi: Dari pabrik ke petani (teknik budidaya, pasca-panen) atau ke masyarakat lokal (keterampilan baru).
- Peningkatan Nilai Tambah Produk Lokal: Kopi yang tadinya dijual mentah kini diolah, meningkatkan nilai ekonomi per unit.
- Pengembangan Infrastruktur Lokal: Pembangunan jalan, listrik, air yang sebagian didorong oleh kebutuhan pabrik, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
- Peningkatan Brand Image Kopi Mimika: Kopi Mimika semakin dikenal, menarik wisatawan atau investasi ke daerah.



- Multiplier Effect Ekonomi: Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa lokal lainnya
- Peningkatan Kualitas Produk Kopi: Melalui standar dan teknologi pengolahan yang lebih baik, kopi Mimika bisa meraih harga premium.

Berdasarkan identifikasi biaya dan manfaat di atas baik secara langsung maupun tidak langsung berikut ini merupakan aspek ekonomi pengembangan peluang investasi pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

Dampak Positif

a) Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Kopi
Dengan adanya pasar yang stabil dan harga yang kompetitif, petani akan memiliki insentif untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi mereka.

b) Penciptaan Lapangan Kerja Baru
Baik di pabrik itu sendiri (operator mesin, teknisi, manajemen), maupun di sektor pendukung (transportasi, logistik, jasa katering, keamanan) dan sektor-sektor yang terinduksi (pedagang lokal, jasa rekreasi).

c) Pengembangan UMKM Lokal
Pabrik dapat menjadi pembeli produk atau jasa dari UMKM setempat, atau UMKM dapat tumbuh dengan menjual produk olahan kopi turunan atau jasa pendukung.

d) Peningkatan Investasi dan Diversifikasi Ekonomi
Kehadiran pabrik dapat menarik investasi lain ke Mimika, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu (misalnya pertambangan), dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih beragam.

e) Transfer Teknologi dan Pengetahuan
Pekerja lokal dan petani bisa mendapatkan pelatihan dan pengetahuan baru mengenai budidaya kopi modern, pengolahan, dan manajemen bisnis.

f) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Melalui pajak dan retribusi yang dikenakan pada operasional pabrik dan aktivitas ekonomi terkait.

g) Pembangunan atau Peningkatan Infrastruktur
Pabrik mungkin memerlukan atau berkontribusi pada pengembangan jalan, listrik, dan air di sekitarnya.

Dampak Negatif

a) Kompetisi Lahan dan Peningkatan Harga Lahan
Pembangunan pabrik bisa memicu spekulasi lahan dan meningkatkan harga, menyulitkan masyarakat lokal atau UMKM kecil.

b) Migrasi Pekerja
Jika tidak ada cukup pekerja lokal dengan kualifikasi yang dibutuhkan, akan terjadi migrasi pekerja dari luar yang dapat menimbulkan gesekan sosial atau tekanan pada fasilitas umum.

c) Peningkatan Kesenjangan Ekonomi
Jika manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak, bisa memperlebar kesenjangan antara yang diuntungkan dan yang tidak.

d) Ketergantungan Pasar
Petani bisa menjadi terlalu bergantung pada satu pembeli besar (pabrik), yang berisiko jika pabrik mengalami masalah.

e) Dampak Lingkungan (Biaya Eksternal)

Pengelolaan limbah pabrik dan penggunaan sumber daya alam (air, energi) harus diawasi ketat untuk menghindari biaya lingkungan yang besar.

f) Pergeseran Budaya dan Gaya Hidup
Modernisasi ekonomi dapat membawa perubahan pada struktur sosial dan budaya masyarakat lokal.

6.3. Aspek Lingkungan

Analisis aspek lingkungan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan dampak potensial suatu proyek terhadap lingkungan fisik, biologis, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan selaras dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pembangunan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika merupakan sebuah inisiatif yang berpotensi membawa peningkatan perekonomian lokal, namun juga menghadirkan tantangan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Setiap aktivitas industri akan berinteraksi dan meninggalkan jejak pada ekosistem sekitarnya. Oleh karena itu, melakukan analisis lingkungan yang komprehensif adalah langkah krusial. Analisis ini bertujuan untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi dampak, baik yang bersifat menguntungkan (positif) maupun merugikan (negatif), yang mungkin timbul dari keseluruhan siklus hidup pabrik, mulai dari konstruksi hingga operasional penuh. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai dampak-dampak ini, kita dapat merumuskan strategi pengelolaan yang efektif, meminimalkan risiko, memaksimalkan manfaat, dan memastikan bahwa pengembangan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis bukti, mengarah pada pembangunan industri kopi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Mimika.

Dampak Positif

a) Peningkatan Kesadaran dan Praktik Pertanian Berkelanjutan Pengembangan
- Membina Petani: Melalui program kemitraan atau pelatihan, pabrik dapat mengedukasi petani kopi lokal tentang praktik pertanian berkelanjutan (Good Agricultural Practices - GAP), seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan hama terpadu (Integrated Pest Management - IPM), serta teknik konservasi tanah dan air. Hal ini secara langsung akan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya di hulu.
- Sertifikasi Kopi Berkelanjutan: Pabrik dapat memfasilitasi dan mendorong petani untuk mendapatkan sertifikasi kopi berkelanjutan (misalnya, Rainforest Alliance, Fair Trade, Organic). Sertifikasi ini mewajibkan praktik ramah lingkungan, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah pertanian, dan pengurangan emisi.
- Program CSR Lingkungan: Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), pabrik dapat berinvestasi dalam proyek-proyek lingkungan di komunitas sekitar, seperti reboisasi, restorasi ekosistem lokal, atau program pendidikan lingkungan bagi masyarakat. Ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan tetapi juga kesadaran komunitas.

b) Adopsi dan Transfer Teknologi Ramah Lingkungan
- Efisiensi Sumber Daya: Teknologi pengolahan modern dapat menggunakan air dan energi secara lebih efisien. Misalnya, sistem pengeringan biji kopi yang hemat energi, atau penggunaan kembali air dalam proses pencucian (closed-loop systems) dapat mengurangi jejak ekologis.

- Pengelolaan Limbah Terpadu: Berbeda dengan pengelolaan limbah yang sporadis di tingkat petani, pabrik dapat menerapkan sistem pengelolaan limbah terpadu. Ini termasuk pengolahan air limbah dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) canggih, serta pemanfaatan limbah padat (kulit dan ampas kopi) menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk kompos berkualitas tinggi, pakan ternak, atau sumber energi biomassa. Ini mendorong konsep ekonomi sirkular.
- Pengurangan Emisi: Dengan teknologi pemfilteran udara yang lebih baik pada fasilitas sangrai (roaster) dan boiler, emisi gas rumah kaca serta polutan udara lainnya dapat diminimalkan, sehingga menjaga kualitas udara di sekitar pabrik.

c) Rehabilitasi Lahan dan Peningkatan Tutupan Hijau (Potensial)
- Agroforestri Kopi: Mendorong model agroforestri dalam budidaya kopi, di mana pohon-pohon pelindung ditanam bersama kopi, dapat meningkatkan tutupan hutan dan keanekaragaman hayati, serta membantu konservasi tanah dan air.
- Penghijauan Area Terdegradasi: Dalam konteks pasokan bahan baku, pabrik dapat mengidentifikasi area-area yang terdegradasi di sekitar Mimika dan bekerja sama dengan komunitas untuk program rehabilitasi lahan melalui penanaman kembali pohon, khususnya spesies asli.

d) Ketersediaan Data Lingkungan
Operasional pabrik yang modern biasanya dilengkapi dengan sistem pemantauan lingkungan. Data mengenai kualitas air limbah, emisi udara, dan konsumsi sumber daya dapat dikumpulkan dan dianalisis, memberikan informasi berharga untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik di tingkat regional.

Dampak Negatif

a) Dampak Terhadap Kualitas Air
- Pencemaran Air Limbah Organik: Air limbah hasil pencucian biji kopi sangat kaya akan bahan organik (seperti gula, asam), nitrogen, dan kafein. Tanpa pengolahan yang memadai, pembuangan langsung ke sungai atau badan air dapat:
- Menyebabkan Eutrofikasi: Pertumbuhan alga yang berlebihan karena peningkatan nutrisi, menguras oksigen dalam air.
- Menurunkan Kadar Oksigen: Dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme menggunakan oksigen terlarut, menyebabkan kematian ikan dan biota air lainnya.
- Pencemaran Tanah dan Lahan Basah: Peresapan air limbah ke tanah dapat mencemari sumber air tanah dan merusak ekosistem lahan basah.
- Penggunaan Air Berlebihan: Proses pengolahan yang intensif dapat menarik volume air yang besar dari sumber air lokal. Jika tidak ada manajemen air yang berkelanjutan, hal ini dapat menyebabkan:
- Kelangkaan Air: Kompetisi air dengan komunitas lokal dan kebutuhan ekosistem.
- Penurunan Air Tanah: Penurunan muka air tanah yang dapat mempengaruhi sumur-sumur penduduk dan vegetasi.
- Pencemaran dari Agrokimia (tidak langsung): Jika pabrik mendukung peningkatan produksi kopi dari perkebunan yang intensif pestisida dan



pupuk kimia, limpasan dari perkebunan ini akan berakhir di sumber air, mencemari air dan tanah di sekitar.

b) Dampak Terhadap Kualitas Udara
- Emisi dari Pembakaran (Roasting & Boiler): Proses sangrai kopi dan penggunaan boiler untuk energi menghasilkan:
- Gas Rumah Kaca: CO2, berkontribusi terhadap perubahan iklim.
- Polutan Udara Lain: Partikulat (debu halus), senyawa organik volatil (VOCs), dan oksida nitrogen (NOx), yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kabut asap.
- Debu Kopi: Aktivitas seperti penggilingan, pengayakan, dan bongkar muat biji kopi dapat menghasilkan debu yang mengganggu kesehatan pernapasan pekerja dan masyarakat sekitar.
- Bau: Proses fermentasi (jika ada), penyimpanan ampas kopi, atau bahkan bau dari proses sangrai dapat menjadi keluhan bagi penduduk terdekat.

c) Dampak Terhadap Kualitas Tanah
- Mencemari Tanah: Meningkatkan keasaman tanah, memperkenalkan patogen.
- Menarik Hama: Menjadi sarang bagi serangga dan hewan pengerat.
- Menghasilkan Gas Metana: Dekomposisi anaerobik limbah organik dapat menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang lebih kuat dari CO2.
- Perubahan Struktur Tanah (Konstruksi): Pembukaan lahan dan aktivitas konstruksi pabrik dapat menyebabkan pemadatan tanah, erosi, dan hilangnya lapisan tanah subur.

d) Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati
- Perubahan Penggunaan Lahan: Pembangunan pabrik dan infrastruktur pendukung (jalan akses, area parkir, perumahan pekerja) akan membutuhkan konversi lahan. Ini dapat berarti:
- Deforestasi: Pembukaan hutan atau area vegetasi alami yang menjadi habitat penting.
- Fragmentasi Habitat: Memisahkan populasi satwa liar dan menghambat migrasi, yang mengancam kelangsungan hidup spesies.
- Polusi Kebisingan: Operasional pabrik yang terus-menerus (mesin, transportasi) dapat menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi, mengganggu pola perilaku dan reproduksi satwa liar, serta kenyamanan masyarakat lokal.
- Gangguan Ekosistem Perairan: Pencemaran air dan perubahan morfologi sungai akibat pengambilan air dan pembuangan limbah dapat merusak ekosistem perairan dan spesies endemik.

e) Penggunaan Sumber Daya Alam
- Konsumsi Energi: Operasional pabrik membutuhkan energi yang besar (untuk mesin, penerangan, pendinginan). Ketergantungan pada energi fosil (misalnya, PLTD) akan:
- Meningkatkan Emisi GRK: Berkontribusi pada perubahan iklim.
- Meningkatkan Biaya Operasional: Rentan terhadap fluktuasi harga energi.
- Konsumsi Bahan Baku (Biji Kopi): Peningkatan permintaan biji kopi untuk pasokan pabrik dapat mendorong ekspansi perkebunan kopi di Mimika. Jika ekspansi ini tidak direncanakan dengan baik dan tanpa praktik berkelanjutan, risiko deforestasi dan degradasi lahan akan meningkat.

- Material Konstruksi: Pembangunan pabrik memerlukan material seperti semen, baja, dan kayu, yang proses produksinya juga memiliki jejak ekologis (misalnya emisi CO2 dari produksi semen).

6.4. Dukungan terhadap SDG's

Pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika tidak hanya berpotensi menggerakkan roda ekonomi lokal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan secara global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs adalah cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua. SDGs mengatasi tantangan global yang kita hadapi, termasuk kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian, dan keadilan. Keterkaitan antara investasi pada sektor kopi dan pencapaian SDGs ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Pengembangan pabrik pengolahan kopi di Mimika dapat berkontribusi pada beberapa SDGs utama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa SDGs yang paling relevan.

1) **SDG 1: Tanpa Kemiskinan**
   Peluang: Peningkatan nilai tambah kopi lokal akan meningkatkan pendapatan petani kopi dan menciptakan lapangan kerja baru di pabrik pengolahan, yang dapat mengangkat masyarakat dari kemiskinan.
   Dukungan: Kebijakan harga minimum untuk biji kopi, program pelatihan keterampilan bagi petani dan pekerja pabrik, serta akses ke pembiayaan mikro.
2) **SDG 2: Tanpa Kelaparan**
   Peluang: Peningkatan pendapatan petani kopi memungkinkan mereka untuk membeli makanan yang lebih bergizi dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
   Dukungan: Program diversifikasi tanaman untuk petani kopi guna memastikan ketersediaan pangan di luar musim panen kopi.
3) **SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**
   Peluang: Penciptaan lapangan kerja formal yang layak di sektor pengolahan, termasuk pekerja pabrik, manajer, tenaga pemasaran, dan logistik. Peningkatan investasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
   Dukungan: Insentif fiskal bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, regulasi ketenagakerjaan yang adil, pelatihan vokasi, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi.
4) **SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**
   Peluang: Pembangunan pabrik pengolahan modern mendorong adopsi teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi kopi, serta memicu pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih.
   Dukungan: Investasi pemerintah dalam infrastruktur dasar, insentif untuk investasi di teknologi ramah lingkungan, dan fasilitas riset dan pengembangan.
5) **SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**
   Peluang: Pabrik dapat menerapkan praktik produksi berkelanjutan, mengurangi limbah, dan memastikan rantai pasok kopi yang etis dan transparan.
   Dukungan: Kebijakan yang mendorong sertifikasi berkelanjutan (misalnya, Rainforest Alliance, Fair Trade, Organic), insentif untuk penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah, serta promosi produk kopi yang diproduksi secara bertanggung jawab.



BAB

4

Analisis Risiko

Risiko merupakan "*uncertainties*" atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan proyek, sebagaimana dijelaskan dalam *Project Management Body of Knowledge* edisi ke-7. Secara konsep, ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan dampak negatif digolongkan sebagai risiko, sedangkan ketidakpastian yang dapat memberikan dampak positif disebut peluang (*opportunities*). Dalam konteks pengembangan IPRO, fokus pembahasan diarahkan pada risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan proyek.

Secara umum, risiko dapat dijabarkan sebagai kombinasi antara konsekuensi dari suatu kejadian dan kemungkinan terjadinya kejadian tersebut. Untuk menilai kedua aspek ini, diperlukan proses Analisis Risiko, yaitu upaya sistematis untuk memahami karakteristik risiko secara lebih mendalam. Analisis Risiko menjadi bagian penting bagi para pemangku kepentingan dalam memastikan tercapainya tujuan proyek. Dalam konteks IPRO kopi di Kabupaten Mimika, analisis risiko ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi ancaman yang dapat memengaruhi keberlanjutan industri kopi.

Hasil kajian risiko menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi risiko, menentukan langkah penanganannya, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Dengan demikian, analisis risiko bertujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahap awal manajemen risiko yang bertujuan mengenali secara sistematis berbagai kejadian atau kondisi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Fokus tahap ini adalah menghasilkan daftar risiko yang lengkap dan jelas, bukan langsung menilai besar-kecilnya dampak.

Proses identifikasi dilakukan dengan menelaah dokumen perencanaan, data historis, hasil audit, wawancara pemangku kepentingan, diskusi kelompok, serta observasi lapangan. Setiap risiko dijelaskan secara spesifik dengan mencantumkan sumber risiko, kejadian pemicu, dan potensi konsekuensinya terhadap aspek waktu, biaya, mutu, keselamatan, kepatuhan, atau reputasi.

Identifikasi yang baik menghasilkan *risk register* awal yang terstruktur dan tidak bersifat umum. Rumusan risiko disarankan menggunakan format "Jika … maka … yang berdampak pada …" agar memudahkan analisis dan penentuan mitigasi. Kualitas tahap ini krusial, karena risiko yang tidak teridentifikasi sejak awal dapat muncul sebagai kejadian tak terduga yang mengganggu pelaksanaan dan sulit dikendalikan. Dalam konteks IPRO kopi di Kabupaten Mimika, identifikasi risiko dilakukan pada seluruh tahapan rantai nilai: hulu, pabrik, pasar-logistik, regulasi-sosial, lingkungan, dan finansial.

2. Penilaian Risiko

Menurut ISO 31000, suatu risiko dinilai berdasarkan perpaduan antara kemungkinan (Probabilitas) terjadinya dan dampak yang akan ditimbulkannya. Untuk menggambarkan kedua aspek tersebut, digunakan skala lima tingkat, yang penjelasannya disajikan pada bagian berikut.

a. Kemungkinan (Probabilitas)

Setiap risiko dinilai menggunakan skala yang menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Penilaian ini mempertimbangkan berbagai interpretasi terkait frekuensi dan probabilitas kejadian sepanjang durasi proyek. Perlu dipahami bahwa interpretasi tersebut tidak selalu bersifat konsisten dan hanya dimaksudkan sebagai acuan umum dalam menentukan tingkat signifikansi risiko.

Tabel 7.1.
Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko (*Likelihood Scale*)

Peringkat	Deskripsi
5 Sangat Sering/*Almost Certain*	Kemungkinan kuat peristiwa tersebut akan terjadi sewaktu-waktu karena adanya Riwayat kejadian secara kasual
4 Sering/*Likely*	Kemungkinan peristiwa cukup sering terjadi
3 Mungkin/*Possible*	Ada kemungkinan peristiwa tertentu terjadi
2 Jarang/*Unlikely*	Peristiwa dapat terjadi tapi dengan kemungkinan yang rendah
1 Sangat Jarang/*Rare*	Peristiwa ini secara historikal tidak pernah terjadi, tetapi dapat terjadi dalam keadaan luar biasa

b. Dampak Risiko

Dampak dari suatu peristiwa risiko dinilai menggunakan skala peringkat yang menggambarkan besarnya pengaruh yang mungkin timbul apabila peristiwa tersebut terjadi.

Tabel 7.2.
Skala Dampak Risiko terhadap Proyek (*Impact Severity Scale*)

Peringkat	Potensi Kerugian Proyek
1 Tidak Signifikan	Kerugian finansial dan operasional yang sangat kecil
2 Minor	Kerugian finansial yang kecil, penundaan minor, perbaikan yang cenderung mudah
3 Moderat	Kerugian finansial yang moderat dan/atau penundaan proyek
4 Signifikan	Kerugian finansial yang signifikan, penundaan proyek jangka panjang
5 Sangat Signifikan	Kerugian finansial yang masif, kegagalan proyek, kegagalan investasi

c. Nilai Risiko

Skema penilaian risiko mengombinasikan aspek Probabilitas dan Dampak untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai peta risiko. Melalui pemetaan ini, langkah mitigasi dapat dirancang agar mampu menurunkan tingkat risiko hingga batas paling rendah yang dapat dicapai.

Tabel 7.3.
Matriks Penilaian Risiko (*Risk Assessment Matrix*)

Probabilitas Trjadinya Risiko	Dampak Risiko				
	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Sangat Sering (5)	Moderat (5)	Tinggi (10)	Sangat Tinggi (15)	Sangat Tinggi (20)	Sangat Tinggi (25)
Sering (4)	Rendah (4)	Moderat (8)	Tinggi (12)	Sangat Tinggi (16)	Sangat Tinggi (20)
Mungkin (3)	Rendah (3)	Moderat (6)	Moderat (9)	Tinggi (12)	Sangat Tinggi (15)
Jarang (2)	Sangat Rendah (2)	Rendah (4)	Moderat (6)	Moderat (8)	Tinggi (10)
Sangat Jarang (1)	Sangat Rendah (1)	Sangat Rendah (2)	Rendah (3)	Rendah (4)	Moderat (5)

3. Mitigasi Risiko

Menurut ISO 31000, mitigasi risiko merupakan bagian dari proses penanganan risiko (*risk treatment*) yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari suatu risiko. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi risiko prioritas yang memerlukan intervensi langsung untuk menjaga keberlangsungan operasional dan daya saing.

7.1. Analisis Risiko IPRO Kopi

Analisis risiko pada IPRO Kopi di Kabupaten Mimika mengelompokkan risiko ke dalam enam kategori utama: (1) risiko hulu, (2) risiko operasional pabrik, (3) risiko pasar dan logistik, (4) risiko regulasi dan sosial, (5) risiko lingkungan, dan (6) risiko finansial. Di bawah ini dijelaskan uraian setiap kategori risiko beserta mitigasi risiko yang direkomendasikan.

7.1.1. Risiko Hulu

Risiko pada sektor hulu merupakan risiko paling dominan karena berhubungan langsung dengan kontinuitas pasokan bahan baku. Penilaian menunjukkan beberapa risiko berada pada kategori Sangat Tinggi (LR = 25), yakni:

1. **Produksi kopi lokal tidak stabil** disebabkan cuaca ekstrem, pola tanam tidak seragam, serta praktik budidaya tradisional. Kondisi ini berpotensi menyebabkan gangguan operasional pabrik secara signifikan.
2. **Kualitas biji kopi tidak konsisten** yang berdampak langsung pada standar kualitas produk premium maupun ekspor.
3. **Perubahan iklim** yang meningkatkan ketidakpastian produktivitas dan memengaruhi siklus panen.

Mitigasi diarahkan pada penguatan kelembagaan hulu melalui *contract farming*, penyediaan nursery, penerapan SOP pascapanen, serta adaptasi iklim melalui *climate-smart agriculture*. Risiko lain seperti keamanan di wilayah hulu dan kapasitas petani masuk kategori

Tinggi (LR 16–20). Hal ini terutama berkaitan dengan kondisi geografis pegunungan, dinamika keamanan lokal, dan keterbatasan pengetahuan budidaya petani.

Tabel 7.4.
Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Hulu

No	Risiko	Dampak (D)	Prob (P)	Level Risiko (LR)	Tingkat Risiko Baru	Mitigasi Risiko
1	Produksi kopi lokal tidak stabil	5	5	25	Sangat Tinggi	Contract farming, pendampingan budidaya, nursery
2	Kualitas biji kopi tidak konsisten	5	5	25	Sangat Tinggi	SOP pascapanen, washing station, insentif kualitas
3	Risiko keamanan wilayah hulu	5	4	20	Tinggi	Penjadwalan distribusi, koordinasi aparat, kemitraan lokal
4	Kapasitas petani rendah	4	4	16	Tinggi	Pelatihan GAP, klaster petani
5	Perubahan iklim	5	5	25	Sangat Tinggi	Agroforestry, CSA, varietas adaptif

Sumber: Analisis Tim Ahli, 2025.

7.1.2. Risiko Operasional Pabrik

Risiko operasional umumnya berada pada kategori **Sedang hingga Tinggi**. Risiko kerusakan mesin mendapat nilai tinggi (LR = 20) karena dampaknya signifikan terhadap keberlangsungan proses produksi. Sementara itu, keterbatasan tenaga kerja terampil dan gangguan utilitas mendapat penilaian kategori Sedang (LR = 12).

Mitigasi diarahkan ke:

1. Peningkatan kapasitas teknis tenaga kerja.
2. Penguatan infrastruktur pendukung seperti genset atau PLTS atap.
3. Perawatan mesin secara berkala dan penyediaan sparepart kritis.
4. Penyusunan dan penerapan SOP produksi dan quality control.

Tabel 7.5.
Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Operasional Pabrik

No	Risiko	Dampak (D)	Prob (P)	Level Risiko (LR)	Tingkat Risiko Baru	Mitigasi Risiko
6	Tenaga kerja terampil terbatas	4	3	12	Sedang	Pelatihan teknis, magang industri
7	Gangguan utilitas	4	3	12	Sedang	Genset/PLTS atap
8	Kerusakan mesin	5	4	20	Tinggi	Kontrak servis, sparepart kritis
9	Minimnya SOP	4	3	12	Sedang	Penyusunan SOP & QC

Sumber: Analisis Tim Ahli, 2025.

7.1.3. Risiko Pasar dan Logistik

Risiko pasar menunjukkan tantangan utama terkait tingginya biaya logistik dan ketatnya persaingan dengan kopi dari daerah lain. **Biaya logistik tinggi mendapat nilai LR = 25 (Sangat Tinggi)** karena memengaruhi struktur harga dan daya saing produk di pasar nasional maupun global. Risiko seperti permintaan tidak stabil, fluktuasi harga global, dan akses pasar terbatas berada pada kategori **Sedang** dengan LR 12. Untuk mengurangi risiko ini, strategi mitigasi mencakup:

1. Diversifikasi pasar melalui pemasaran digital dan partisipasi pada pameran internasional.
2. Pengembangan identitas produk berbasis origin (Mimika Specialty Coffee).
3. Optimalisasi rantai distribusi dan kerja sama dengan BUMN logistik.

Tabel 7.6.
Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Pasar dan Logistik

No	Risiko	Dampak (D)	Prob (P)	Level Risiko (LR)	Tingkat Risiko Baru	Mitigasi Risiko
10	Permintaan tidak stabil	4	3	12	Sedang	Niche specialty, branding
11	Biaya logistik tinggi	5	5	25	Sangat Tinggi	Optimasi rute, kerja sama BUMN
12	Fluktuasi harga global	4	3	12	Sedang	Forward contract, specialty
13	Akses pasar terbatas	4	3	12	Sedang	Marketplace, B2B

Sumber: Analisis Tim Ahli, 2025.

7.1.4. Risiko Regulasi dan Sosial

Risiko regulasi dan sosial memengaruhi kelancaran operasi dan keberterimaan usaha di masyarakat. Risiko seperti penerimaan masyarakat lokal dan konflik hak ulayat masuk kategori **Tinggi (LR = 20)** karena berdampak langsung pada kegiatan di lapangan. Permasalahan perizinan dan standar mutu berada pada kategori **Sedang (LR = 12)**. Mitigasi dilakukan melalui penyusunan roadmap sertifikasi dan pemenuhan regulasi yang berlaku. Aspek sosial menjadi perhatian penting. Penerapan pendekatan berbasis komunitas, dialog adat, skema *community-shareholding*, dan program CSR merupakan strategi mitigasi yang efektif.

Tabel 7.7.
Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Regulasi dan Sosial

No	Risiko	Dampak (D)	Prob (P)	Level Risiko (LR)	Tingkat Risiko Baru	Mitigasi Risiko
14	Perizinan/standar mutu	4	3	12	Sedang	Sertifikasi, roadmap SNI
15	Penerimaan masyarakat lokal	5	4	20	Tinggi	Dialog adat, CSR
16	Konflik hak tanah	5	4	20	Tinggi	Pemetaan sosial, MoU ulayat

Sumber: Analisis Tim Ahli, 2025.

7.1.5. Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan berada pada kategori **Sedang hingga Tinggi**, dengan isu degradasi lingkungan hulu berada pada nilai LR 20. Hal ini berkaitan dengan potensi pembukaan lahan tidak terkendali yang dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang rantai pasok. Risiko limbah fermentasi dan penggunaan air mendapat kategori Sedang (LR = 12), sementara pengelolaan limbah padat berada pada kategori Rendah (LR = 6). Mitigasi meliputi:

1. Pembangunan IPAL sederhana dan sistem resirkulasi air.
2. Pemanfaatan limbah padat menjadi kompos.
3. Rehabilitasi lahan dan penerapan agroforestry.

Tabel 7.8.
Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Lingkungan

No	Risiko	Dampak (D)	Prob (P)	Level Risiko (LR)	Tingkat Risiko Baru	Mitigasi Risiko
17	Limbah fermentasi/air	4	3	12	Sedang	IPAL
18	Pengelolaan limbah padat buruk	3	2	6	Rendah	Kompos organik
19	Degradasi lingkungan hulu	5	4	20	Tinggi	Agroforestry, rehabilitasi

Sumber: Analisis Tim Ahli, 2025.

7.1.6. Risiko Keuangan

Risiko keuangan seperti arus kas tidak stabil, ROI lambat, dan ketergantungan pembiayaan eksternal seluruhnya berada pada kategori **Sedang (LR = 12)**. Walaupun risikonya tidak setinggi risiko hulu, mitigasi finansial tetap menjadi elemen penting untuk menjaga kesehatan proyek.

Strategi mitigasi meliputi:

1. Pembiayaan berbasis milestone.
2. Ekspansi modular yang disesuaikan kapasitas pasar.
3. Pendanaan campuran melalui kerja sama dengan swasta maupun BUMD.

Tabel 7.9.
Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Keuangan

No	Risiko	Dampak (D)	Prob (P)	Level Risiko (LR)	Tingkat Risiko Baru	Mitigasi Risiko
20	Arus kas tidak stabil	4	3	12	Sedang	Milestone-based financing
21	ROI lambat	4	3	12	Sedang	Modular expansion
22	Ketergantungan pembiayaan eksternal	4	3	12	Sedang	Pendanaan campuran

Sumber: Analisis Tim Ahli, 2025.

7.2. Kesimpulan Umum

Hasil analisis menunjukkan bahwa **70% risiko berada pada kategori Sedang hingga Tinggi**, sedangkan **empat risiko mencapai kategori Sangat Tinggi (LR 25)**. Seluruh risiko berkaitan erat dengan stabilitas produksi hulu, kualitas bahan baku, biaya logistik, dan perubahan iklim. Keempat risiko tersebut merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian khusus pada tahap perencanaan dan implementasi proyek.

Tabel 7.10.
Ringkasan Risiko Kritis (Level Risiko Sangat Tinggi)

Risiko	Level Risiko (LR)	Deskripsi
Produksi kopi tidak stabil	25 (Sangat Tinggi)	Memengaruhi kontinuitas pabrik
Kualitas biji kopi tidak konsisten	25 (Sangat Tinggi)	Merusak kualitas produk premium
Biaya logistik tinggi	25 (Sangat Tinggi)	Risiko pasar dan daya saing
Perubahan iklim	25 (Sangat Tinggi)	Ancaman jangka panjang pada hulu

Risiko kategori Tinggi terutama berasal dari aspek teknis-operasional, sosial-regulasi, dan lingkungan yang memerlukan pendekatan mitigasi berlapis, mulai dari teknis hingga kemitraan dengan masyarakat. Implementasi mitigasi yang sistematis akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan resiliensi rantai nilai kopi secara keseluruhan.

Analisis risiko ini memberikan dasar kuat dalam penyusunan kebijakan operasional, strategi pengembangan usaha, serta kerangka monitoring dan evaluasi. Dengan pengelolaan risiko yang tepat, industri kopi tidak hanya akan tumbuh secara berkelanjutan tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar dan kontribusi bagi pembangunan daerah.

BAB



Kesimpulan & Rekomendasi

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis berbagai aspek pengembangan peluang investasi pabrik *Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated*. Berikut ini kesimpulan pengembangan dokumen IPRO (*Invesment Project Ready to Offer*) Kopi Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1) *Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated* memiliki konsep pengembangan dengan konsep *green and modern industry* terintegrated. Rancangan pabrik memiliki kebutuhan luas lahan sebesar 2.000 m^2 dengan proyeksi kapasitas produksi sebesar 300 ton per tahun;
2) Nilai investasi awal sebesar Rp92.750.000.000,- dengan NPV positif sebesar Rp 52,88 miliar, IRR 22,077%, dan Payback Period 3,91 tahun, jauh lebih baik dari benchmark industri pangan (5–7 tahun). Hasil perhitungan menegaskan bahwa proyek ini sangat layak secara finansial, dengan risiko dapat dikendalikan;
3) Area Pengolahan (Produksi) memiliki total luas area sekitar 850 m^2 dan dirancang untuk mengikuti alur kerja pengolahan kopi dari basah, kering, instan, sehingga memastikan efisiensi proses produksi. Area Ritel (Fungsi Publik) memiliki luas area sekutar 250 m2, yang ditempatkan di bagian depan, berfungsi untuk memudahkan akses pengunjung, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kelancaran interaksi dengan pelanggan. Area Eksterior & Pendukung, dengan luas sekitar 900 m^2, dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan sisa, sehingga berperan sebagai penunjang operasional sekaligus memanfaatkan ruang secara optimal;
4) Lokasi lahan alternatif pertama untuk pengembangan pabrik pengolahan kopi di Kabupaten Mimika, yang terletak di Kampug Kwamki, Distrik Mimika Baru. Lahan tersebut memiliki luas 1 hektar dan ditandai dengan garis merah pada gambar. Informasi terperinci mengenai lahan ini menunjukkan bahwa ia merupakan tapak hak milik dengan topografi dataran dan kondisi lahan berupa rimba. Selain itu, gambar ini juga menyajikan data jarak lahan ke berbagai fasilitas penting, yaitu 47 meter ke jalan RT/RW utama, sekitar 2 kilometer atau 4 menit ke SPBU terdekat, sekitar 3 kilometer atau 5 menit ke PLN terdekat, dan sekitar 8 kilometer atau 14 menit ke bandara. Di sisi kanan gambar, terdapat juga informasi mengenai bidang tanah yang memiliki tipe hak milik dengan luas 9.921 m^2;
5) Lokasi lahan alternatif kedua untuk pengembangan pabrik pengolahan kopi terletak di Kampung Kwamki, Distrik Mimika Baru. Lahan tersebut memiliki luas 0,9 hektar dan ditandai oleh garis merah pada gambar. Informasi terperinci mengenai lahan ini menunjukkan bahwa ia merupakan tapak hak milik dengan zona RTRW sebagai kawasan peruntukan industri, topografi dataran, dan kondisi lahan berupa rimba. Selain itu, gambar ini juga memuat data jarak lahan ke berbagai fasilitas penting, yakni 60 meter ke jalan RT/RW utama, sekitar 1,8 kilometer atau 4 menit ke SPBU terdekat, sekitar 3 kilometer atau 5 menit ke PLN terdekat, serta sekitar 9 kilometer atau 16 menit ke bandara. Di sisi kanan bawah gambar, terdapat informasi mengenai bidang tanah yang memiliki tipe hak milik dengan luas 9849 $meter^2$ dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01745;
6) Sumber pendapatan pabrik ini berasal dari penjulan produk olahan kopi; layanan coffe shop; jasa pengolahan; dan wisata edukasi. Potensi pasar meliputi kebutuhan komsumsi kopi lokal, regional, nasional, dan global;
7) Dampak sosial pengembangan *Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated* adalah a) Peningkatan Kesejahteraan, dengan pendapatan yang lebih baik, masyarakat bisa memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; b) Pengembangan Kapasitas SDM, peluang

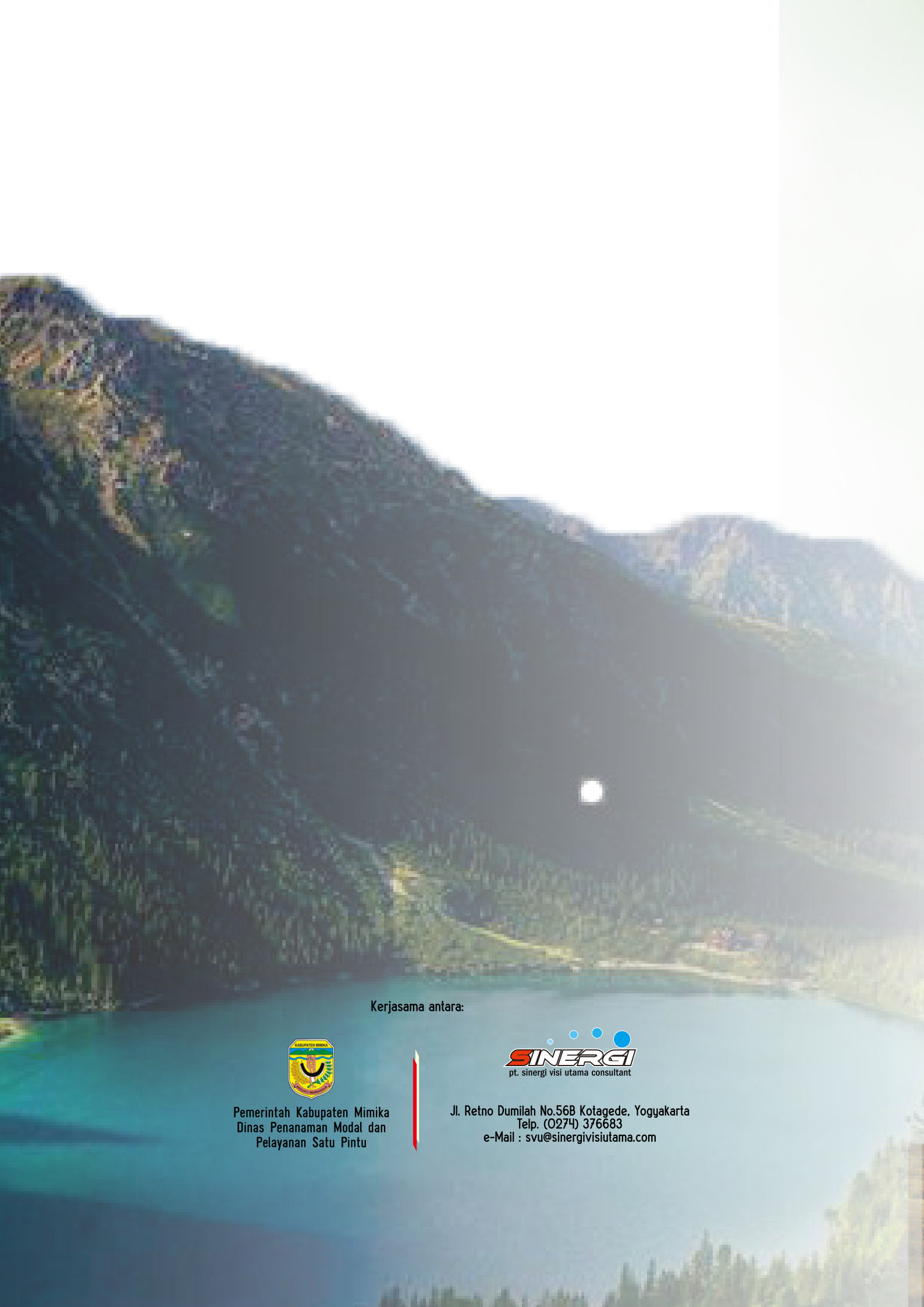
peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui program pelatihan dan pengalaman kerja di pabrik; c) Penguatan Jaringan Komunitas, melalui kemitraan dengan petani atau program CSR, dapat memperkuat ikatan sosial; d) Peningkatan Citra Daerah, Mimika dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas;

8) Dampak ekonomi *Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated* adalah: a) Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Kopi, dengan adanya pasar yang stabil dan harga yang kompetitif, petani akan memiliki insentif untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi mereka; b) Penciptaan Lapangan Kerja Baru, baik di pabrik itu sendiri (operator mesin, teknisi, manajemen), maupun di sektor pendukung (transportasi, logistik, jasa katering, keamanan) dan sektor-sektor yang terinduksi (pedagang lokal, jasa rekreasi); c) Pengembangan UMKM Lokal, pabrik dapat menjadi pembeli produk atau jasa dari UMKM setempat, atau UMKM dapat tumbuh dengan menjual produk olahan kopi turunan atau jasa pendukung; d) Peningkatan Investasi dan Diversifikasi Ekonomi, kehadiran pabrik dapat menarik investasi lain ke Mimika, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu (misalnya pertambangan), dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih beragam. e) Transfer Teknologi dan Pengetahuan, pekerja lokal dan petani bisa mendapatkan pelatihan dan pengetahuan baru mengenai budidaya kopi modern, pengolahan, dan manajemen bisnis; f) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pajak dan retribusi yang dikenakan pada operasional pabrik dan aktivitas ekonomi terkait; g) Pembangunan atau Peningkatan Infrastruktur, pabrik mungkin memerlukan atau berkontribusi pada pengembangan jalan, listrik, dan air di sekitarnya.

8.2. Rekomenadasi

Berdasarkan kesimpulan analisis berbagai aspek pengembangan peluang investasi pabrik *Timika Gold Coffe: Instant Coffe Processing and Retail Integrated*. Berikut ini rekomendasi pengembangan dokumen IPRO (*Invesment Project Ready to Offer*) Kopi Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1) Melakukan promosi secara intensif kepada calon investor melalui berbagai forum investasi, mengundang investor potensial, memanfaatkan berbagai kanal media digita;
2) Menawarkan berbagai fasilitas kemudahan berinvestasi kepada calon investor, baik fiskal maupun non fiskal;
3) Melakukan fasilitasi penyediaan lahan clear dan clean;
4) Meningkatkan infrastruktur pendukung investasi di lokasi alternatit potensial investasi;
5) Melakukan fasilitasi kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Penguatan sinergi dan kolaborasi antara investor dengan masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro di kawasan proyek investasi dalam rangka peningkatan kenyamanan dan keamanan investasi, serta kemanfaatan ekonomi kedua belah pihak.



Kerjasama antara:

Pemerintah Kabupaten Mimika
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu

pt. sinergi visi utama consultant

Jl. Retno Dumilah No.56B Kotagede, Yogyakarta
Telp. (0274) 376683
e-Mail : svu@sinergivisiutama.com